

Hutan Papua dan Para Penguasanya

Agung Ady Setiyawan - Isnenti Apriani - Soelthon G. Nanggara
Anggi Putra Prayoga - Ogy Dwi Aulia - Christian P. Purba - Mufti Fathul Barri

Hutan Papua dan Para Penguasanya

Tim Penulis

Agung Ady Setiyawan
Isnenti Apriani
Soelthon G. Nanggara
Anggi Putra Prayoga
Ogy Dwi Aulia
Christian P. Purba
Mufti Fathul Barri

Tim Periset

Aryo Ardi Chondro
Wildan Badawi
Maya Indriyani

Penyelaras Bahasa

Amalya Reza O.

Ilustrasi Sampul & Visualisasi Data

Saffanah Layalia Alfath

Tata Letak Isi & Sampul

Andi Bhatara

Forest Watch Indonesia

2020

Hutan Papua dan Para Penguasanya

Bogor, Jawa Barat

Daftar Isi

i	Kata Pengantar
iv	Latar Belakang
1	Sekilas Hutan Alam Pulau Papua
5	Perkembangan Izin HPH dan HTI di Pulau Papua
8	Penguasaan Lahan Grup HPH dan HTI di Pulau Papua
12	Penguasaan Saham Perusahaan HPH dan HTI di Pulau Papua
20	Produksi Kayu dari Pulau Papua
30	Pendapatan Negara dari Ekstraksi kayu di Pulau Papua
39	Kepatuhan atas Legalitas Kayu & Kelestarian Pengelolaan Hutan di Pulau Papua
49	Alert Deforestasi dalam Konsesi HPH dan HTI di Papua

55	Peredaran Kayu HPH dan HTI dari Pulau Papua
61	Ekspor Kayu dari Pulau Papua
67	Penutup
72	Profil HPH dan HTI di Papua
197	Lampiran

Glosarium

Asimetris

Ketimpangan atau ketidakmerataan.

Bottom Up

Saat tujuan tugas sebagian besar diinformasikan umpan balik karyawan. Dalam hal ini, karyawan diminta memiliki peran untuk penetapan tujuan, apalagi peran karyawan terkadang hanya berbentuk *feedback* pada perusahaan.

Deforestasi

Semua bentuk perubahan kondisi penutupan lahan dari hutan menjadi bukan hutan yang diakibatkan oleh kondisi alam dan atau pelaku deforestasi, baik secara legal atau ilegal dalam kurun waktu tertentu yang bersifat sementara ataupun permanen.

Ekstraksi Kayu

Proses pemisahan kayu dari campurannya.

Hak Pengusahaan Hutan (HPH) atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA)

Izin yang dikeluarkan untuk kegiatan tebang pilih di hutan alam selama periode tertentu, umumnya 20 tahun dan dapat diperbarui untuk satu periode selanjutnya, umumnya 20 tahun lagi. Izin HPH ini semula dimaksudkan untuk tetap mempertahankan hutan sebagai kawasan Hutan Produksi Permanen.

HGU

Hak Guna Usaha, hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu tertentu, yang digunakan untuk usaha pertanian, perikanan atau peternakan.

HHBK

Hasil hutan bukan kayu (HHBK) adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani serta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan.

Hutan Primer

Hutan yang terutama terdiri dari pohon-pohon asli yang tidak pernah ditanam oleh manusia. Hutan-hutan alam tidak mencakup perkebunan dan hutan tanaman.

Hutan Tanaman Industri (HTI) atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)

Hutan tanaman pada Hutan Produksi yang dibangun oleh kelompok industri kehutanan untuk meningkatkan potensi dan kualitas Hutan Produksi dengan menerapkan sistem silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku bagi industri hasil hutan.

IPK

Izin Pemanfaatan Kayu adalah izin menebang dan/atau mengangkut kayu sebagai akibat dari adanya kegiatan non kehutanan antara lain dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan telah dilepas, kawasan hutan produksi dengan cara tukar menukar kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan dengan izin pinjam pakai, dan Areal Penggunaan Lain yang telah diberikan izin peruntukan.

IPPKH

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atau Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) merupakan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukkan kawasan hutan.

Konglomerasi

Perusahaan besar atau induk yang beranggotakan berbagai macam perusahaan dan bergerak dalam berbagai bidang usaha.

Land Clearing (LC)

Pembukaan lahan adalah proses pembersihan dan penyiapan lahan sebelum dimulainya aktivitas pertanian, perkebunan, atau penambangan/pembangunan suatu proyek konstruksi.

Legal Harvest Verification (LHV)

Standar yang mensyaratkan bahwa pemilik/pengelola hutan memiliki hak untuk memanen kayu dalam batas-batas yang ditetapkan secara hukum.

Legalitas Kayu

Sistem untuk memastikan agar semua produk kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia memiliki status legalitas yang meyakinkan.

Moratorium

Penghentian/Penundaan terhadap izin atau objek tertentu.

Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)

Kegiatan penyediaan prasarana dalam rangka persiapan kegiatan tebangan eksploitasi hutan. Pembukaan wilayah hutan adalah bagian dari pengelolaan hutan yang memerlukan infrastruktur seperti jalan, *log pond*, *basecamp*, penimbunan kayu, jembatan, menara pengawas dan lainnya.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB)

Penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

Perhutanan Sosial

Sistem pengelolaan Hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan.

PHPL

Pengelolaan Hutan Produk Lestari, (PHPL) Kegiatan yang memastikan bahwa produk hasil hutan yang dihasilkan adalah legal dan memberikan jaminan terhadap kelestarian hutan baik secara produksi, ekologi dan sosial.

PIPIB

Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru.

PSDH

Provisi Sumber Daya Hutan, pungutan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara dan/atau terhadap hasil hutan yang berada pada kawasan hutan yang telah dilepas statusnya menjadi bukan kawasan hutan dan/atau hutan negara yang dicadangkan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan.

Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)

Rencana yang memuat kebutuhan bahan baku dan pasokan bahan baku yang berasal dari sumber yang sah sesuai kapasitas izin industri primer hasil hutan dan ketersediaan jaminan pasokan bahan baku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan sistem pengendalian pasokan bahan baku.

RKT

Rencana Kerja Tahunan.

Sertifikasi FSC

Forest Management Certification, atau Sertifikasi Pengelolaan Hutan. Sertifikasi ini memastikan bahwa praktik pengelolaan hutan yang dilakukan oleh pengelola konsesi atau pemilik lahan telah memenuhi standar pengelolaan hutan yang bertanggung jawab, yaitu keseimbangan aspek Lingkungan, Sosial, dan Ekonomi.

Sertifikasi Mandatory

Standar pengelolaan hutan alam yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan bersifat mandatori (wajib) dimana semua unit manajemen di Indonesia wajib dinilai kinerja pengelolaan hutannya agar memenuhi standar PHPL sesuai undang-undang yang berlaku.

S-PHPL

Skema sertifikasi hutan untuk memastikan apakah Unit Manajemen Hutan telah mengelola hutan produksi secara lestari.

SVLK

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu, merupakan sistem pelacakan yang disusun secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia. Sistem verifikasi legalitas kayu dikembangkan untuk mendorong implementasi peraturan pemerintah yang berlaku terkait perdagangan dan peredaran hasil hutan yang legal di Indonesia.

Tata Kelola Hutan

Proses, mekanisme, aturan dan lembaga untuk memutuskan bagaimana lahan dan hutan yang dikelola.

Top Down

Model perencanaan yang dilakukan dari atasan yang ditujukan kepada bawahannya dimana yang mengambil keputusan adalah atasan sedangkan bawahan hanya sebagai pelaksana saja.

TPK

Tempat Penimbunan Kayu, tempat milik Pemegang Izin/Pengelola Hutan yang berfungsi menimbun kayu bulat, yang lokasinya berada luar areal Pemegang Izin/Pengelola Hutan.

Hutan Papua dan Para Penguasanya

i



Kata Pengantar

Hutan sejatinya adalah ekosistem yang menopang sistem kehidupan manusia. Begitu juga halnya dengan kelompok-kelompok masyarakat yang sangat menggantungkan hidupnya dari keberadaan hutan. Seperti komunitas-komunitas masyarakat adat dan lokal yang bermukim di dalam dan sekitar hutan. Dimana, hutan menjadi “Ibu” yang terbukti memenuhi kebutuhan hidup mereka secara turun-temurun. Baik itu kehidupan fisik dan non fisik.

Dimana, hutan menjadi “Ibu” yang terbukti memenuhi kebutuhan hidup mereka secara turun-temurun. Baik itu kehidupan fisik dan non fisik.

Keberagaman budaya masyarakat Indonesia juga didasari oleh interaksi dan hubungan masyarakat dengan alam, termasuk ekosistem hutan di dalamnya. Maka dari itu, pengelolaan hutan seharusnya dilakukan secara terbuka dan menjunjung tinggi prinsip keadilan untuk seluruh kelompok masyarakat.

Publikasi ini mencoba untuk menggambarkan lebih detail tentang informasi-informasi praktik pengelolaan hutan yang sampai saat ini dirasa sulit didapatkan oleh masyarakat. Adanya publikasi ini, diharapkan mampu mendorong keterbukaan informasi yang lebih luas dalam pengelolaan hutan di Indonesia, khususnya di tanah Papua. Juga membuka wawasan masyarakat tentang situasi dan praktik-praktik pengelolaan hutan di Papua.

Informasi yang disajikan dalam publikasi ini dihasilkan berdasarkan penelitian yang menggunakan metode-metode ilmiah. Selain informasi tentang kondisi hutan, di dalam publikasi ini juga terdapat data-data terkait kepemilikan suatu entitas perusahaan yang didapatkan dari data Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM, pencarian data di internet, dan sumber laporan-laporan lainnya yang sudah dipublikasikan berbagai pihak. Kajian ini juga tidak dimaksudkan untuk menyudutkan individu maupun perusahaan/*group* tertentu, melainkan murni berupa penyampaian informasi yang utuh dan kredibel, sesuai informasi publik yang tersedia dan bisa diakses oleh masyarakat.

iii

Terimakasih,

Salam.

Direktur Eksekutif FWI

Mufti Fathul Barri

iv



Latar Belakang

Forest Watch Indonesia (FWI) merupakan organisasi jaringan pemantau hutan independen, yang terdiri dari individu-individu yang memiliki komitmen untuk mewujudkan proses pengelolaan data dan informasi kehutanan di Indonesia yang terbuka, serta dapat menjamin pengelolaan sumber daya hutan yang adil dan berkelanjutan. Atas dasar komitmen tersebut, FWI terus menyuarakan pentingnya keterbukaan informasi dalam pengelolaan hutan, sehingga dapat tercipta tata kelola hutan yang berkelanjutan dan adil dari aspek informasi.

Asimetri informasi dalam pengelolaan hutan di Indonesia masih terjadi hingga saat ini. Dimana informasi-informasi terkait situasi hutan seperti deforestasi, data perizinan, tata guna hutan, dan lain sebagainya, masih belum disampaikan secara utuh ke masyarakat. Sehingga banyak menimbulkan ketidakadilan informasi di dalamnya. Contohnya, masyarakat yang bermukim di dalam atau sekitar hutan, jarang sekali mendapatkan pemahaman atau informasi yang utuh terkait pengelolaan hutan yang ada di wilayah mereka. Begitu juga sebaliknya, praktik-praktik yang baik dalam tata kelola hutan, yang dilakukan oleh masyarakat adat / lokal jarang sekali mendapatkan pengakuan dan perlindungan secara legal. Masih adanya ketidakadilan terhadap informasi, juga dapat dilihat dengan konflik sosial yang masih terus terjadi dalam pengelolaan hutan.

Asimetri informasi dalam pengelolaan hutan di Indonesia masih terjadi hingga saat ini. Dimana informasi-informasi terkait situasi hutan seperti deforestasi, data perizinan, tata guna hutan, dan lain sebagainya, masih belum disampaikan secara utuh ke masyarakat.

Dalam mendorong terciptanya pelaksanaan tata kelola hutan yang baik (*Good Forest Governance*), adanya ketimpangan informasi yang terjadi di antara anggota masyarakat disebut sebagai asimetri informasi (*information asymmetry*). Konsep asimetri informasi pertama kali diperkenalkan oleh George A Akerlof (1970) dalam artikel ilmiahnya yang berjudul *The Market for Lemons: Quality Uncertainty and The Market Mechanism*¹, yang kemudian dikenal sebagai *Lemon Market Theory*.

Asimetri informasi akan membawa keuntungan bagi segelintir pihak, namun pada saat yang bersamaan, juga dapat menyebabkan kerugian yang besar bagi pihak-pihak lain. Asimetri informasi kerap terjadi di Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan, dan bahkan kian marak akhir-akhir ini. Begitu juga tentang informasi pengelolaan hutan dan lahan di Indonesia, khususnya Papua, dimana sumber informasi terbatas, sulitnya aksesibilitas, serta ketidakberimbangan informasi yang diterima, maupun informasi yang keluar dari masyarakat lokal / adat.

Keberadaan asimetri informasi inilah, yang menyebabkan pihak di luar Papua menganggap wilayah Papua tidak kondusif, seluruh daratannya berupa hutan alam yang kosong, dan dipandang hanya sebatas sumber daya alam melimpah yang bisa diekstraksi sebesar-besarnya. Sedangkan kenyataannya, Pulau Papua merupakan pulau yang tidak hanya kaya akan sumber daya alam, namun juga kaya akan keragaman suku, budaya, flora, fauna, dan keragaman biodiversitas lainnya. Papua merupakan rumah bagi lebih dari 255 suku asli Papua², 718 bahasa daerah³, serta memiliki lebih dari 200 flora dan 1000 fauna.

Salah satu informasi yang tidak tersampaikan dengan utuh terkait pengelolaan hutan di Papua ialah tentang perizinan sektor kehutanan, baik itu melalui skema IUPHHK-HT (HTI) atau IUPHHK-HA (HPH). Dapat dipastikan bahwa banyak masyarakat Papua yang tidak mengetahui tentang situasi tersebut. Siapa yang paling diuntungkan dari ekstraksi sumberdaya hutan di Papua? Apakah kebijakan yang ada saat ini mampu melindungi hutan Papua? Kemana hasil hutan tersebut dibawa? Bagaimana legalitas izin-izin yang sedang ataupun akan beroperasi? Bagaimana situasi ruang spasial di dalam hutan Papua? Seperti apa perencanaan pengelolaan hutan Papua di masa yang akan datang? Masih banyak pertanyaan-pertanyaan terkait pengelolaan hutan Papua yang jawabannya belum diketahui oleh masyarakat Papua itu sendiri.

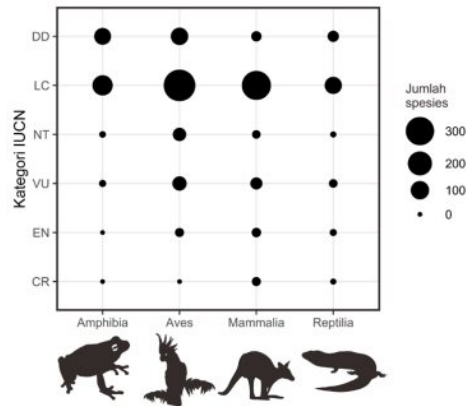
Atas dasar permasalahan ketidakadilan informasi tersebutlah, FWI mengeluarkan publikasi ini untuk sedikit mengurai “kusutnya” informasi pengelolaan hutan, khususnya di Papua. FWI yakin bahwa pengelolaan hutan akan menjadi lebih baik, jika tercipta “keadilan informasi”, dimana semua data kehutanan dan data terkait dengan sumber daya alam bisa diperoleh dengan mudah dan cepat oleh semua orang. Serta semua jenis kegiatan eksploitasi hutan dan pengalihan penggunaan kawasan hutan, dapat dilaksanakan secara komprehensif, dengan melihat dampak lingkungan ke depannya. Tidak lupa, turut melihat subjek dan objek yang ada di wilayah tersebut. Dengan adanya kajian ini, kami berharap masyarakat, khususnya masyarakat Papua dapat lebih memahami situasi ruang yang terjadi. Bagi pemerintah dan pihak lain, kami harap dapat menemukan jalan dalam memecahkan degradasi dan deforestasi hutan, serta ketimpangan penguasaan hutan dan lahan di Indonesia, khususnya di tanah Papua.

1



Sekilas Hutan Alam Pulau Papua

Daratan Pulau Papua di Indonesia, yang mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat, memiliki luas 41.38 juta hektare. Hasil analisis FWI pada tahun 2018, daratan Papua memiliki luas tutupan hutan alam sebesar 33.4 juta hektare, atau sekitar 80.71% dari total luas daratannya.



Ekosistem hutan alam yang masih utuh di tanah Papua berkontribusi pada ketersediaan keanekaragaman hayati yang hidup di dalamnya. Berdasarkan data yang dihimpun dari GBIF dan IUCN red list, ditemukan lebih dari 250 jenis flora yang tumbuh di Papua dan lebih dari 1000 spesies fauna (terdiri dari reptilia, amfibi, mamalia, dan aves). Kekayaan spesies burung di Papua sangat tinggi, sekitar 588 jenis burung dan 394 jenis mamalia dapat ditemukan di Papua. Status konservasi fauna di Papua masih banyak yang belum dikaji dan minim informasi. Walaupun proporsi spesies yang tidak terancam di Papua relatif masih tinggi, namun ditemukan pula spesies payung yang memiliki keterancaman tinggi, mulai dari rentan hingga sangat terancam. (Catatan, DD: Tidak ada Data, LC: Tidak Terancam, NT: Agak rentan, VU: Rentan, EN: Terancam, CR: Sangat Terancam).

Berdasarkan data spasial yang berhasil dikompilasi oleh FWI, sampai dengan tahun 2020, sekitar 15.6% daratan di region Papua telah dibebani hak pemanfaatan dan penggunaan lahan dalam bentuk izin pengelolaan hutan, Sekitar 5.503 juta hektare diberikan kepada IUPHHK-HA, 974 ribu hektar kepada IUPHHK-HT, Di antaranya, seluas 5.89 juta hektare masih merupakan hutan alam.

Luas hutan alam tersebut terus berkurang. Pada tahun 2019-2020 berdasarkan data GLAD Alert⁴ yang ditumpang susunkan dengan tutupan hutan FWI tahun 2018, terdapat setidaknya 55.65 ribu hektare hutan alam terindikasi terdeforestasi dan 78% atau 43.6 ribu hektare dari total indikasi ini berada di areal yang sudah dibebani izin. Begitu pun juga untuk area yang masuk ke dalam peta moratorium hutan alam dan lahan gambut (PIPPIB). Meskipun jumlahnya kecil dan turun setiap tahunnya (pada tahun 2019 deforestasi di wilayah moratorium 10.391 hektare, dan 8.908 hektare pada tahun 2020), namun deforestasi di wilayah moratorium semestinya tidak boleh terjadi.

Kebijakan moratorium izin pada hutan primer dan gambut memang sudah dipermanenkan sejak Agustus 2019, namun hingga saat ini masih memiliki banyak catatan dan dirasa belum mampu memberikan kontribusi secara maksimal, dalam melindungi hutan tersisa di Indonesia. Karena sejak lahirnya kebijakan moratorium tahun 2011 hingga saat ini, wilayah yang di moratorium masih bersifat indikatif. Sehingga akan lebih kuat jika peta indikatif tersebut bisa dinaikkan levelnya menjadi definitif.

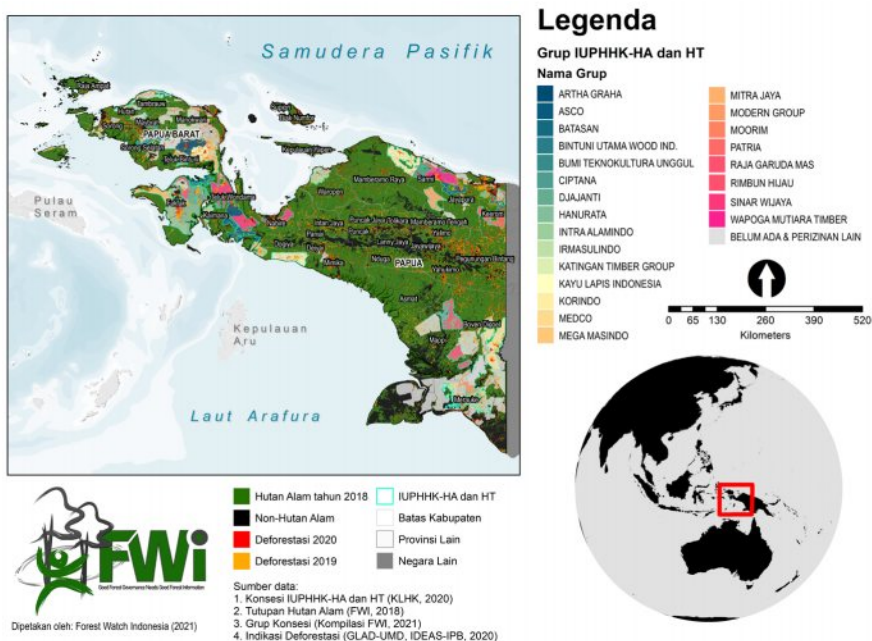
Secara keseluruhan, sekitar 22 juta hektare (34%) area yang masuk dalam wilayah moratorium, merupakan kawasan konservasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga secara kebijakan, wilayah tersebut memang peruntukannya tidak untuk dikonversi. Situasi ini memperlihatkan bahwa rupanya kebijakan moratorium hanya melindungi sekitar 42 juta hektare hutan primer di Indonesia. **Selain itu, kebijakan moratorium hutan ini juga masih memberikan beberapa pengecualian untuk izin-izin yang sudah ada dan telah mendapatkan persetujuan prinsip, pembangunan yang bersifat vital, perpanjangan izin, restorasi ekosistem, jalur evakuasi bencana alam, penyiapan pusat pemerintahan/pemerintahan daerah, proyek strategis nasional (mengacu Perpres) dan kepentingan pertahanan keamanan serta**

penunjang keselamatan umum. Sehingga, meskipun area hutan alam tersebut telah masuk wilayah moratorium, di kemudian hari tetap akan bisa dikonversi jika terdapat rencana pemerintah yang masuk ke dalam beberapa poin pengecualian diatas.

Karena penetapan wilayah PIPPIB juga masih terbatas pada hutan alam yang masuk kawasan hutan⁵, timbul lagi persoalan lain misalnya masih ada sekitar 34 juta hektare hutan alam yang tidak masuk dalam area moratorium, terdapat sekitar 13,7 juta ha area moratorium yang penutupannya bukan hutan alam dan ada sekitar 1,6 juta ha hutan alam yang hilang di dalam area moratorium pada rentang tahun 2013-2017.

Khusus untuk Pulau Papua, terdapat sekitar 26,4 juta hektare kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai areal indikatif PIPPIB. Dan sekitar 1.145.272 hektare areal yang telah ditetapkan tersebut berada didalam wilayah konsesi.

4



Gambar 1. Peta lokasi grup HPH HTI di pulau Papua. Sumber: FWI Tahun 2021

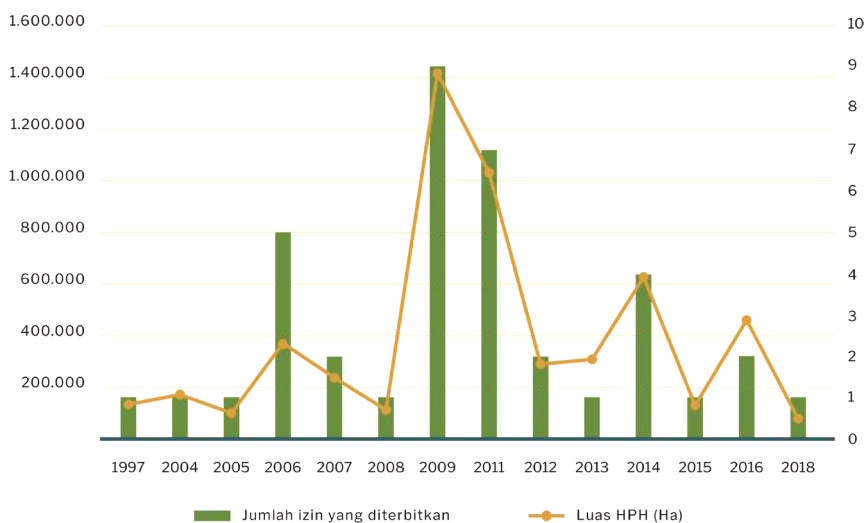
5



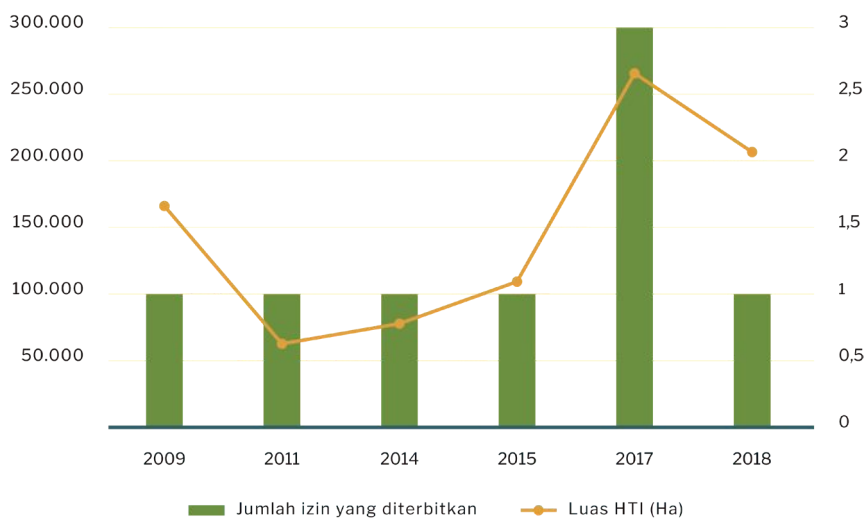
Perkembangan Izin HPH dan HTI di Pulau Papua

Perkembangan industri perkayuan di tanah Papua ditandai dengan beroperasinya Perusahaan Perseroan (Persero) Eksploitasi dan Industri Hutan atau PT Inhutani II/Kesatuan Usaha Manokwari pada bulan Januari 1979, dan pada tanggal 19 Maret 1979 dilakukan ekspor kayu Log jenis Matoa (*Pometia spp*) sebanyak 5400 m³ dengan negara tujuan Jepang. Pada tahun 1980, PT Inhutani diberi kewenangan untuk mengelola dan mengambil alih bekas areal kerja dari Perusahaan Kayu Negara (PKN) Manokwari, dan mengoperasikan penggergajian kayu (sawmill). Setelah sembilan tahun, tepatnya tahun 1989, PT Inhutani II menyerahkan kembali areal bekas PKN tersebut, karena telah beralih fungsi sebagai daerah transmigrasi, memiliki topografi terjal, dan potensi tegakan yang kurang⁶. Berdasarkan data tahun 2020, perkembangan HPH di Pulau Papua sejak tahun 1997 semakin meningkat baik dari luasan maupun jumlah izinnya. Jumlah unit manajemen sampai dengan tahun 2019 sebanyak 38 perusahaan dengan luas izin sekitar 6 juta hektare.

Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Indonesia dimulai pada pertengahan tahun 1980-an. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas hutan dan juga memenuhi gap kebutuhan pasokan bahan baku kayu untuk industri. Di Pulau Papua, izin HTI pertama dikeluarkan pada tahun 1998. HTI pertama yang beroperasi adalah PT Maharani Rayon Jaya yang sekarang bernama PT Merauke Rayon Jaya. Dan sampai dengan tahun 2020, izin yang telah diterbitkan untuk HTI di Pulau Papua sebanyak 8 unit manajemen dengan luas izin sekitar 898 ribu hektare.



Gambar 2. Perkembangan perizinan HPH di Pulau Papua berdasarkan SK Izin tahun 2020⁷. Sumber: Analisis FWI Tahun 2021



Gambar 3. Perkembangan perizinan HTI di Pulau Papua berdasarkan SK Izin tahun 2020⁸. Sumber: Analisis FWI tahun 2021

8



Penguasaan Lahan Grup HPH dan HTI di Pulau Papua

Pemanfaatan hasil hutan kayu melalui HPH dan HTI di Pulau Papua dimiliki oleh 43 perusahaan yang tergabung dalam 24 grup dan ada 3 perusahaan lain yang berdiri sendiri. Berdasarkan analisis spasial, ada sekitar 6 grup perusahaan dengan penguasaan lahan berkisar antara 6-8% dari total luas izin yang diberikan, antara lain:

- Grup pertama yang menguasai lahan di Papua adalah Kayu Lapis Indonesia yang memiliki 3 anak perusahaan dengan total luasan 632 ribu hektare, yaitu PT Bina Balantak Utama, PT Diadyani Timber dan PT Yotefa Sarana Timber. Ketiga perusahaan ini mengirimkan kayunya ke Industri PT Henrison Iriana di Sorong, yang juga merupakan bagian dari KLI.
- Grup kedua adalah Raja Garuda Mas (RGM) yang memiliki tiga anak perusahaan bergerak di bidang eksploitasi hutan dan perkebunan kayu yaitu PT Damai Setiatama Timber (HPH), Mukti Artha Yoga (HPH) dan PT Kesatuan Mas Abadi (HTI). Ketiganya menguasai hutan seluas 549 ribu hektare.
- Grup ketiga adalah Sinar Wijaya Group yang memiliki empat anak perusahaan dengan total luas konsesi 547.383 hektare yaitu PT Jati Dharma Indah Plywood Industries, PT Wijaya Sentosa, PT Wukirasari, dan PT Kaltim Hutama. Tiga diantaranya berlokasi di Provinsi Papua Barat dan satu lagi di Provinsi Papua. Ke empat perusahaan ini merupakan penyedia bahan baku utama untuk industri PT Sinar Wijaya Plywood Industries yang terletak di Dawai - Serui, Yapen Waropen, Provinsi Papua.
- Grup keempat adalah Intra Alamindo yang memiliki 2 perusahaan yaitu PT Prabu Alaska dan PT Rimbakayu Arthamas dengan total luas sekitar 460 ribu hektare.
- Grup kelima adalah Korindo yang memiliki 3 anak perusahaannya yaitu PT Bade Makmur Orisa, PT Tunas Timber Lestari dan PT Inocin Abadi yang menguasai sekitar 417 ribu hektare hutan papua. Korindo juga memiliki industri pengolahan plywood sendiri di Boven Digoel (PT Korindo Abadi).
- Grup keenam adalah Mega Masindo yang memiliki 4 perusahaan dengan luas sekitar 406 ribu hectare yaitu PT Arfak Indra, PT Manokwari Mandiri Lestari, PT Megapura Membramo Bangun, PT Mutiara Alas Khatulistiwa.

Selain itu, ada beberapa perusahaan yang juga membangun industri pengolahan kayunya sendiri seperti PT Bintuni Utama Murni Wood Industries, perusahaan HPH yang khusus mengolah kayu *mangrove* untuk dijadikan *chipwood* sebagai bahan baku pulp. Dan juga PT Wapoga Mutiara Timber (WMT), perusahaan HPH yang memiliki kompleks industri kayu terintegrasi yang berbasis di Biak dan memproduksi kayu lapis, *block-board*, *film face*, *sawn timber moulding*.

Berikut adalah grup dan perusahaan HPH dan HTI yang beroperasi di Papua dan Papua Barat.

No	Grup	Luas Lahan (ha)	Persentase Penguasaan Lahan Dibandingkan Dengan Total Luas Lahan Yang Dibeberikan Izin
1	Kayu Lapis Indonesia	632.007	10%
2	Raja Garuda Mas	549.478	8%
3	Sinar Wijaya	547.383	8%
4	Intra Alamindo	460.445	7%
5	Korindo	417.579	6%
6	Mega Masindo	406.579	6%
7	Artha Graha	312.570	5%
8	Hanurata	290.344	4%
9	Asco	274.273	4%
10	Medco	235.075	4%
11	Djajanti	234.943	4%

12	Bumi Teknokultura Unggul	224.377	3%
13	Modern Group	211.707	3%
14	Irmasilindo	174.936	3%
15	Wapoga Mutiara Timber	169.514	3%
16	Patria	164.359	3%
17	Mitra Jaya	157.376	2%
18	Ciptana	94.429	1%
19	Bintuni Utama Wood Industries	81.810	1%
20	Rimbun Hijau	81.379	1%
21	Katingan Timber Group	80.282	1%
22	Batasan	79.634	1%
23	Moorim	64.433	1%
24	Perusahaan lain	532.521	8%
Luas Lahan Yang dibebani Izin		6.477.435	100%

Tabel 1. Luas penguasaan lahan oleh grup. Sumber: Analisis FWI tahun 2021

12



**Penguasaan
Saham
Perusahaan
HPH dan HTI di
Pulau Papua**

Permasalahan pengusahaan HPH tidak hanya terletak pada arah konglomerasi pengusahaan hutan Indonesia, namun cara pemberian HPH dinilai banyak pihak kurang transparan, karena tidak melalui sistem lelang (tender) terbuka. Akibatnya muncul konglomerasi bisnis hutan, yang akhirnya menimbulkan ketimpangan sosial. Konglomerasi akan mengarah pada bentuk oligopol⁹ pasar hasil hutan. Begitu pun dengan transparansi pemilik manfaat/*Beneficial Ownership* (BO) di Indonesia yang saat ini masih sangat rendah. Menurut data Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) per 31 Agustus 2021, baru 515.783 korporasi dari 2,306.908 juta korporasi yang telah menerapkan prinsip transparansi BO atau baru sekitar 22,36%¹⁰.

Langkah awal dalam menelusuri pemilik manfaat bisa dilakukan melalui data Administrasi Hukum Umum (AHU) dari Kemenkumham. Meski acapkali membutuhkan serangkaian penelusuran berlapis untuk menemukan nama pemilik akhir di balik perusahaan tersebut. Seringkali pada dokumen AHU *layer* pertama, kepemilikan saham pada perusahaan tersebut adalah perusahaan juga, sehingga membutuhkan dokumen AHU *layer* kedua dari perusahaan yang memiliki saham pada perusahaan pertama yang dikaji. Dan pola ini bisa berlanjut hingga *layer* ketiga dan seterusnya hingga ditemukannya nama perseorangan. Setelah diketahui aktor perseorangan

Setelah diketahui aktor perseorangan itu pun terkadang hanya merupakan “boneka” para bos besar yang berfungsi sebagai pengecoh pengelakan pajak (tax evasion) dan penghindaran pajak (tax avoidance).

itu pun terkadang hanya merupakan “boneka” para bos besar yang berfungsi sebagai pengecoh pengelakan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penelusuran juga akan menemukan jalan buntu jika ternyata entitas terakhir dari suatu perusahaan merupakan perusahaan luar negeri yang berasal dari negara suka pajak.

Dalam kajian HPH dan HTI di Pulau Papua, pola yang seragam atau berulang tersebut dapat ditemui. Misalnya pada Korindo Group, dimana kepemilikan saham antar perusahaan di bawah naungan Korindo saling terkait satu sama lain. Seperti PT Bade Makmur Orisa (BMO) yang saham mayoritasnya dimiliki oleh PT Pelayaran Korindo (PK) dan PT Trisetia Intiga (TI). PT PK dimiliki sahamnya oleh PT Bumi Indawa Niaga (BIN) dan PT Bimaruna Abadi (BA), sedangkan PT TI dimiliki sahamnya kembali oleh PT PK dan PT Balikpapan Forest Industries (BFI). Kemudian PT BFI juga kembali dimiliki saham mayoritasnya oleh PT PK dan PT BMO. Begitu pun juga dengan anggota Korindo Group lainnya yang saling terkait (PT Inocin dan PT Tunas Timber Lestari). Dan di akhir mengerucut pada nama Robert Seung. Begitu pun dengan Medco Group, dimana kepemilikan saham perusahaan saling terkait namun ujungnya ke Arifin Panigoro.

Ada pula kepemilikan saham perusahaan yang langsung bisa diketahui kepemilikan perorangnya ketika melakukan analisis pada *layer* pertama dokumen AHU. Sebagai contoh adalah Asco Group lewat PT APN dan PT PHLM yang dimiliki oleh Abdurrachman Abdulkadir Assegaf, pengusaha asal Pasuruan yang juga merupakan pemilik industri PT Indo Furnitama Raya (IFURA). Dan contoh lainnya adalah PT Sumber Mitra Jaya di bawah Mitra Jaya Group yang dimiliki pengusaha asal Malaysia keturunan India Drs. Gowindasamy dan Sinar Wijaya Group yang dimiliki oleh Sapto Joyo Wijoyo. Untuk lebih jelas melihat siapa pemilik HPH dan HTI yang beroperasi di Pulau Papua dapat dilihat pada tabel berikut.

Penguasaan Saham Perusahaan HPH dan HTI di Pulau Papua

No	Grup	Nama Perusahaan	Indikasi Pemilik Manfaat/BO
1	Raja Garuda Mas	-	Sukanto Tanoto
		PT Damai Setiatama Timber	Ir Agus Didong, Abdi Tunggal dan Dedy Sutanto
		PT Kesatuan Mas Abadi	Ir Agus Didong, Abdi Tunggal dan Dedy Sutanto
		PT Mukti Artha Yoga	Ir Agus Didong, Abdi Tunggal dan Dedy Sutanto
2	Sinar Wijaya	-	Sapto Joyo Wijoyo
		PT Jati Dharma Indah Plywood Industries	Sapto Joyo Wijoyo dan Budi Susanto
		PT Kaltim Utama	Sapto Joyo Wijoyo dan Budi Susanto
		PT Wijaya Sentosa	Sapto Joyo Wijoyo dan Hendra Wijaya
		PT Wukirasari	Sapto Joyo Wijoyo
3	Kayu Lapis Indonesia	-	Belum Teridentifikasi
		PT Bina Balantak Utama	Lanny Lanawati dan Guntoro
		PT Diadyani Timber	Dimas Rahadian Suryoputro dan Freddy Wibowo
		PT Yotefa Sarana Timber	Dimas Rahadian Suryoputro dan Freddy Wibowo
4	Intra Alamindo	PT Prabu Alaska Unit I	Darius Audryc dan Juan Mulya
		PT Rimba Kayu Arthamas	Darius Audryc dan Juan Mulya

Hutan Papua dan Para Penguasanya

5	Korindo	-	Robert Seung
		PT Inocin Abadi	Robert Seung
		PT Tunas Timber Lestari	Robert Seung
		PT Bade Makmur Orissa	Robert Seung
6	Mega Masindo	-	Mr. Wong atau Paulus George Hung/ Ting Ting Hung
		PT Arfak Indra	Heru Budiyo
		PT Megapura Membramo Bangun	Usman
		PT Manokwari Mandiri Lestari	Grace Sukmawati dan Yongki Indrawan
		PT Mutiara Alas Khatulistiwa	Jasong Ting Kuan Yew dan Paulus George Hung (Mr. Hung)
7	Artha Graha	-	Tommy Winata
		PT Kurniatama Sejahtera	Keluarga TW dan Budi Santoso
		PT Papua Satya Kencana	Keluarga TW dan Budi Santoso
8	Hanurata	-	Keluarga Cendana
		PT Hanurata	Keluarga Cendana
		PT Hanurata Unit Jayapura	Keluarga Cendana

Penguasaan Saham Perusahaan HPH dan HTI di Pulau Papua

9	Asco	-	Abdurrachman Abdulkadir Assegaf
		PT Asco Prima Nusantara	Abdurrachman Abdulkadir Assegaf
		PT Papua Hutan Lestari Makmur	Abdurrachman Abdulkadir Assegaf
10	Medco	-	Keluarga Panigoro
		PT Medcopapua Alam Lestari	Arifin Panigoro
		PT Selaras Inti Semesta	Arifin Panigoro
11	Djajanti	-	Belum Teridentifikasi
		PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya	Yoseph Prawira
12	Bumi Teknokultura Unggul	-	-
		PT Bangun Kayu Irian	Keluarga Sutanto (Yenny, Anne, Dody, Ari)
		PT Mitra Pembangunan Global	Keluarga Sutanto (Yenny, Anne, Dody, Ari)
13	Modern Group	-	Keluarga Honoris
		PT Wanamulia Sukses Sejati	David Honoris dan Margareth Honoris
		PT Wanamulia Sukses Sejati Unit III	David Honoris dan Margareth Honoris

Hutan Papua dan Para Penguasanya

14	Irmasulindo	-	Yul Liemsela dan Johny Tjowasi
		PT Irmasulindo (Unit I dan II)	Yul Liemsela dan Johny Tjowasi
15	Wapoga Mutiara Timber	-	Belum Teridentifikasi
		PT Wapoga Mutiara Timber Unit II	Rahadian Tatas
16	Patria	-	Keluarga Tamsil
		PT Semarak Dharma Timber	Ferry Tamsil, Jemmy Tamsil dan Charles Tamsil
17	Mitra Jaya	-	Dato Drs. K. Gowindasamy
		PT Sumber Mitra Jaya (SK.396)	Dato Drs. K. Gowindasamy
		PT Sumber Mitra Jaya (SK.556)	Dato Drs. K. Gowindasamy
18	Ciptana	-	Keluarga Sudarsono Chandrawidjaja
		PT Mondialindo Setya Pratama	Jenny Tjandra Widjaja
19	Bintuni Utama Murni Wood Industries	-	Belum Teridentifikasi
		PT Bintuni Utama Murni Wood Industries	Raflis
20	Rimbun Hijau	-	Tiong Hiew King
		PT Salaki Mandiri Sejahtera	Susan Lilianti Sunarti

21	Katingan Timber Group	-	Belum Teridentifikasi
		PT Wahana Samudra Sentosa	Tan Keng Liam dan Ivan Chandra
22	Batasan	-	-
		PT Batasan	Tan Tjin Kok dan PT Unggul Cipta Utama
23	Moorim		Do Kyun Lee
		PT Plasma Nutfah Marind Papua	PT Moorim P&P, Co., LTD
24	Texmaco		Marimutu Sinivasan
		PT Merauke Rayon Jaya	Belum Teridentifikasi
25	Tidak ada informasi mengenai grup	PT Bina Nusa Lestari	PT Mancaraya Agro Mandiri
		PT Multi Wahana Wijaya	Tonny Widjaja, Andry Widjaja, Irwan Widjaja
		IR Haji Aristiadi Widodo dan Sutinah	PT Wana Galang Utama

Tabel 2. Indikasi kepemilikan saham HPH HTI. Sumber: Analisis FWI tahun 2021

20



**Produksi Kayu
dari Pulau
Papua**

Sepanjang tahun 2019 - 2020, sekitar 2,72 juta m³ kayu bulat diproduksi dari hutan alam di Pulau Papua. Kayu tersebut diproduksi dari berbagai sumber, antara lain: HPH, IPK/IPPKH/HGU/Perorangan, *Land Clearing* HTI dan HTI. Produksi kayu ini bila disandingkan dengan produksi kayu nasional terlihat tidak signifikan, karena hanya berkontribusi sekitar 2 hingga 3% saja. Tetapi bila dilihat dari sumber produksi dan jenis kayu yang dihasilkan, Pulau Papua memegang peranan yang signifikan sebagai penyuplai kayu yang berasal dari hutan alam dan cenderung meningkat dalam 2 tahun terakhir. Berikut adalah rincian detailnya:

1. Produksi kayu dari HPH

Pada tahun 2019, kayu bulat yang berasal dari hutan alam mencapai sekitar 1,24 juta m³ dan berkontribusi sekitar 19,5% dari produksi kayu hutan alam nasional. Dan pada tahun 2020, meski produksi kayu hutan alam dari Pulau Papua mengalami penurunan menjadi sekitar 1,15 juta m³, kontribusi kayu hutan alam dari Pulau Papua pada produksi kayu nasional justru meningkat mencapai 21,9%.

2. Produksi kayu dari IPK/IPPKH/HGU/Perorangan

Pada tahun 2019, kayu bulat yang diproduksi oleh IPK/IPPKH/HGU/Perorangan mencapai sekitar 218 ribu m³ dan berkontribusi sekitar 15,4% dari produksi kayu IPK/IPPKH/HGU/PERORANGAN nasional. Dan pada tahun 2020, produksi kayu dari sumber tersebut mengalami penurunan menjadi sekitar 54 ribu m³ dan hanya berkontribusi sebesar 5,7% dari produksi kayu IPK/IPPKH/HGU/Perorangan nasional.

3. Produksi kayu dari LC HTI

Dalam kurun waktu 2019 hingga 2020, produksi kayu yang berasal dari *land clearing* HTI di Pulau Papua meningkat hingga 11 kali lipat. Produksinya meningkat dari sekitar 3 ribu m³ pada tahun 2019 menjadi sekitar 34,3 ribu m³. Hal ini menjadi indikasi bahwa proses *land clearing* HTI sebagai tahap awal dari pembangunan HTI di Pulau Papua menjadi semakin masif dalam 2 tahun terakhir.

4. *Produksi kayu dari HTI*

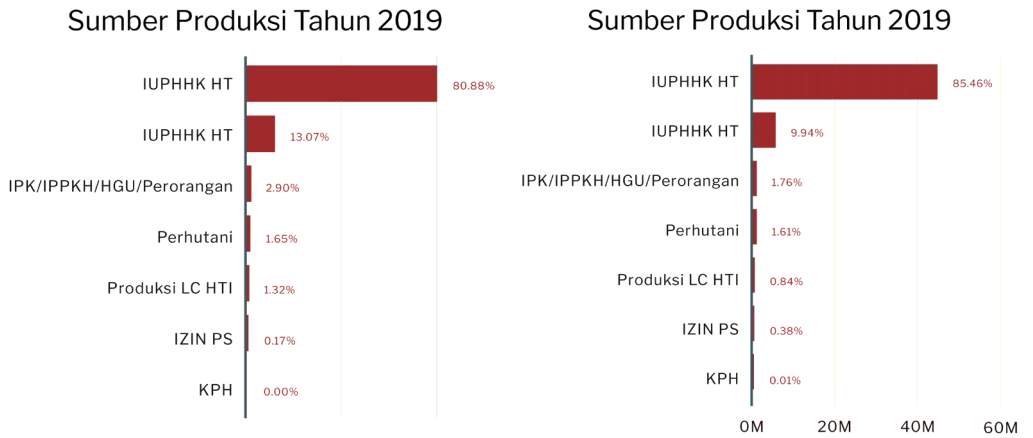
Sumber produksi kayu terakhir yang dihasilkan dari tanah Pulau Papua adalah kayu dari HTI. Meski pemberian izin HTI di Pulau Papua yang telah diberikan sejak tahun 2009 hingga tahun 2020 sudah mencapai 8 izin dengan luas sekitar 898 ribu hektare, produksi kayu dari HTI belum signifikan. Dari data yang berhasil dikompilasi oleh FWI, pada periode 2019-2020, baru mencatatkan adanya produksi kayu dari HTI pada tahun 2020 dan itu pun dengan jumlah yang tidak signifikan yaitu sekitar 12,7 ribu m³.

Berdasarkan asal sumber kayu di atas, menunjukkan bahwa produksi kayu di Pulau Papua berasal dari kayu-kayu yang diekstraksi dari hutan alam di Pulau Papua. Dan dari keempat sumber tersebut, bisa dibilang hanya HPH yang memiliki karakter pengelolaan hutan dengan mempertahankan produksi kayunya secara berkelanjutan. Sedangkan untuk kayu yang dihasilkan dari kegiatan IPK/IPPKH/HGU/Perorangan dan juga land clearing HTI merupakan bentuk pemanfaatan atas kayu yang menjadi “produk sampingan” dari suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengkonversi lahan berhutan menjadi bentuk pengelolaan lahan lainnya.

Sumber Produksi Kayu	2019			2020		
	Indonesia	Papua	%	Indonesia	Papua	%
	HTI	39.514.518	-	-	45.385.759	12.770
HPH	6.386.516	1.245.255	19,5	5.276.016	1.157.934	21,9
IPK/IPPKH/HGU/ Perorangan	1.418.138	218.104	15,4	952.483	54.474	5,7
Perhutani	807.975	-	-	854.560	-	-
LC HTI	645.156	3.068	-	447.221	34.322	7,7
IZIN PS	83.010	-	-	201.824	-	-
KPH	1.976	-	-	5.829	-	-
Total	48.857.289	1.466.427	3	53.123.692	1.259.500	2,4

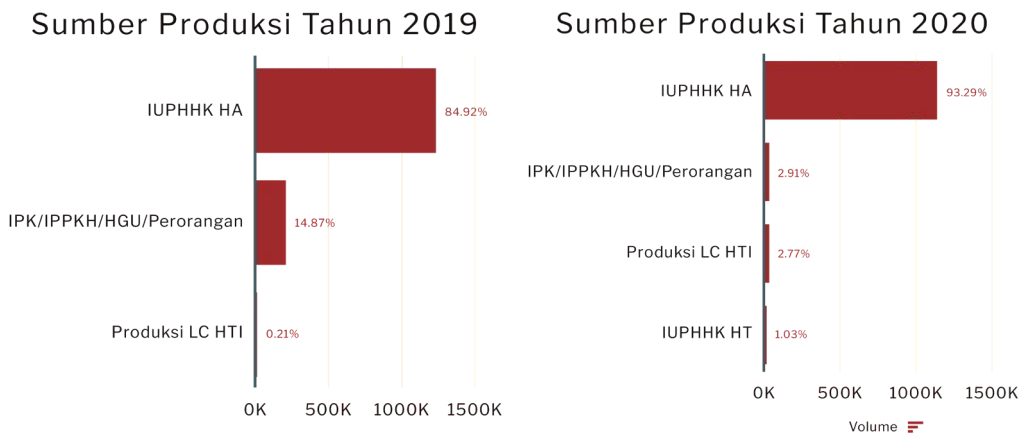
Tabel 3. Produksi kayu Nasional dan Pulau Papua periode tahun 2019-2020
Sumber: KLHK tahun 2021

Berikut adalah beberapa infografis yang menunjukkan volume produksi kayu bulat nasional dan Papua pada tahun 2019 dan 2020.

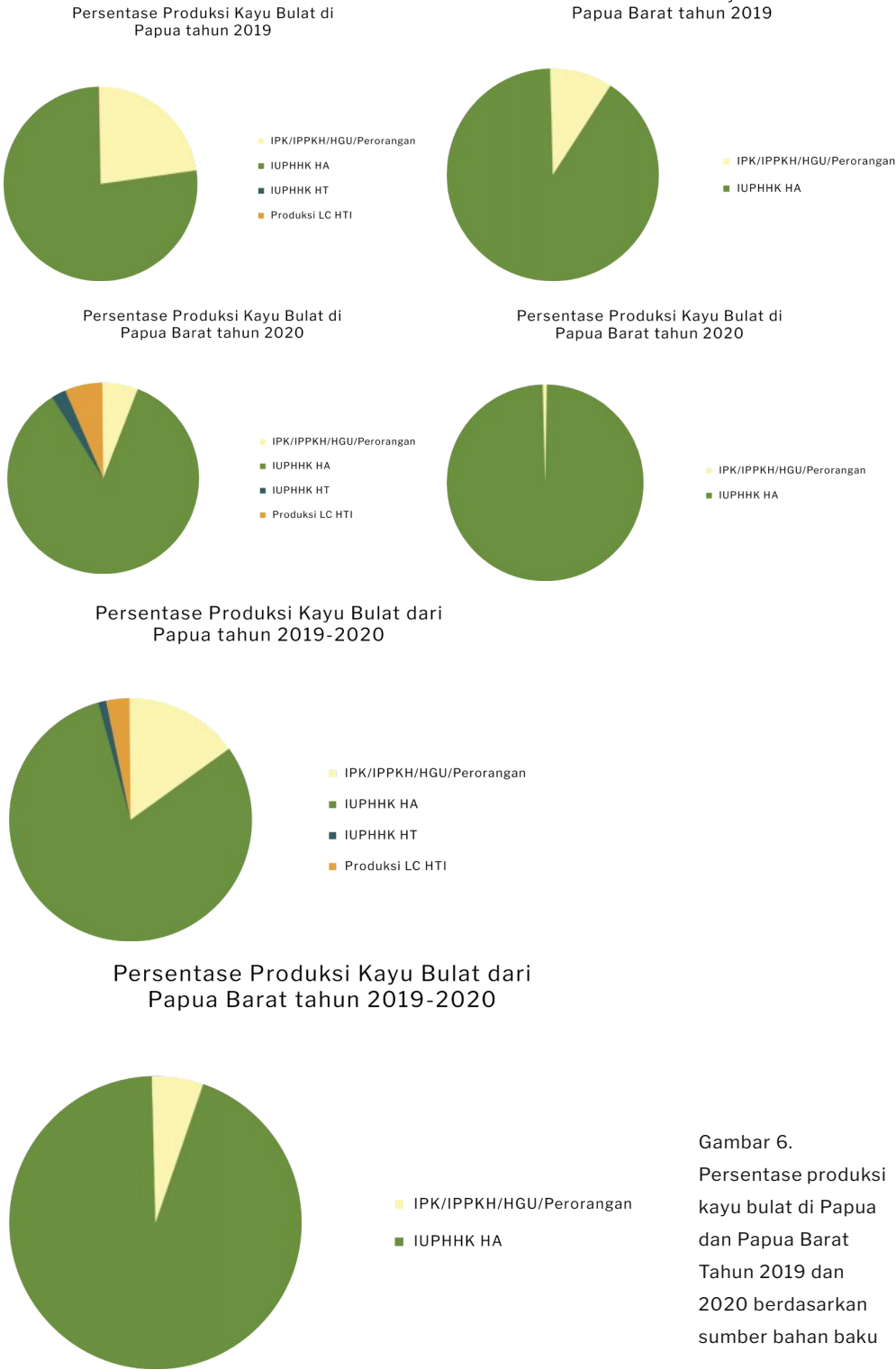


Gambar 4. Sumber Produksi kayu bulat nasional tahun 2019 dan tahun 2020. Sumber: <https://:phl.menlhk.go.id>

24



Gambar 5. Produksi Kayu Bulat Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2019 dan Tahun 2020



Gambar 6. Persentase produksi kayu bulat di Papua dan Papua Barat Tahun 2019 dan 2020 berdasarkan sumber bahan baku

Produksi Kayu di Provinsi Papua Barat

Berdasarkan Tabel 4, produksi kayu bulat yang dihasilkan dari Provinsi Papua Barat hanya berasal dari IUPHHK-HA dan IPK/IPPKH/HGU/Perorangan. Sepanjang Tahun 2019-2020 produksi kayu bulat mengalami penurunan. Tahun 2019, total produksi kayu bulat sekitar 850.973 m³. Sebanyak 772.620 m³ yang bersumber dari IUPHHK-HA kemudian kayu bulat yang dari IPK/IPPKH/HGU/Perorangan sebanyak 78.172 m³. Dibandingkan dengan periode tahun lalu, tahun 2020 total produksi kayu bulat di Papua Barat menurun menjadi 711.897 m³. Yang bersumber dari IUPHHK-HA sebanyak 707.170 m³ dan yang bersumber dari IPK/IPPKH/HGU/Perorangan sebanyak 4.726 m³.

Produksi Kayu di Provinsi Papua

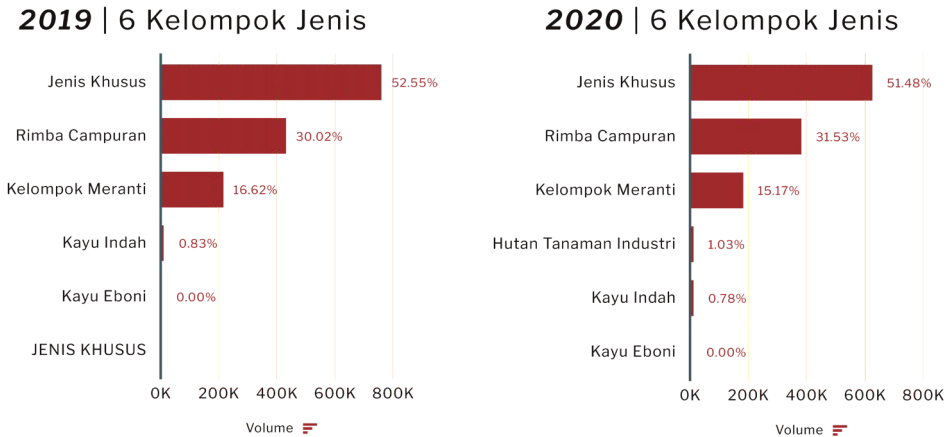
Produksi kayu bulat yang dihasilkan dari Provinsi Papua berasal dari IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, Land Clearing HTI dan IPK/IPPKH/HGU/Perorangan. Sepanjang Tahun 2019-2020 produksi kayu bulat mengalami penurunan. Tahun 2019 total produksi kayu bulat sebanyak 615.658 m³. Sebanyak 472.581 m³ yang bersumber dari IUPHHK-HA kemudian kayu bulat yang dari IPK/IPPKH/HGU/Perorangan sebanyak 139.918 m³, yang terakhir kayu bulat bersumber dari *Land Clearing* HTI 3.068 m³. Untuk IUPHHK-HT pada tahun 2019 tidak ada produksi kayu bulat. Dibandingkan dengan periode tahun lalu, tahun 2020 total produksi kayu bulat di Papua menurun menjadi 529.126 m³. Yang bersumber dari IUPHHK-HA sebanyak 450.700 m³, IPK/IPPKH/HGU/Perorangan sebanyak 31.395 m³, IUPHHK-HT 12.770 m³, yang terakhir kayu bulat bersumber dari *Land Clearing* HTI 34.321 m³.

Provinsi	Sumber Kayu Bulat	Produksi Kayu Bulat Tahun 2019 (m ³)	Produksi Kayu Bulat Tahun 2020 (m ³)	Total
Papua	IPK/IPPKH/HGU/ Perorangan	139.918,92	31.395,16	171.314,08
	IUPHHK HA	472.581,45	450.700,29	923.281,74
	IUPHHK HT		12.770,01	12.770,01
	PRODUKSI LC HTI	3.068,50	34.321,22	37.388,72
Papua Barat	IPK/IPPKH/HGU/ Perorangan	78.172,67	4.726,96	82.899,63
	IUPHHK HA	772.620,69	707.170,48	1.479.791,17
Grand Total		1.466.361,23	1.241.084,12	2.707.445,35

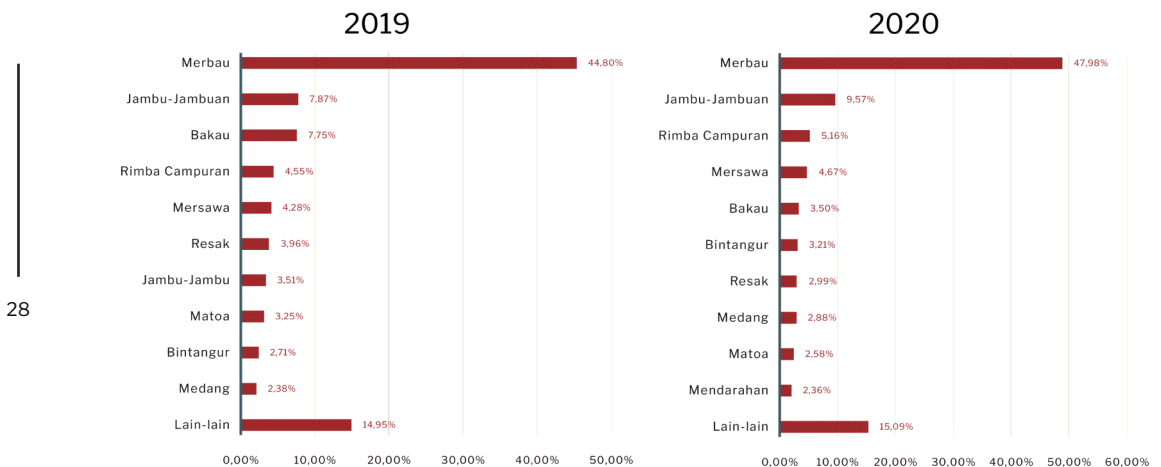
Tabel 4. Produksi Kayu Bulat di Papua dan Papua Barat Tahun 2019 dan 2020. Sumber: phl.klhk.go.id

Produksi Kayu di Provinsi Papua

Mayoritas jenis-jenis kayu yang diekstraksi dari hutan alam Papua adalah jenis khusus, kelompok meranti, rimba campuran, kayu indah dan kayu eboni. Tahun 2019 produksi kayu dari jenis khusus sebesar 52,5% yaitu didominasi oleh kayu merbau sebesar 48% atau sebesar 656.894 m³, jambu-jambuan sebesar 7,8%, bakau sebesar 7,75. Kemudian pada tahun 2020 produksi kayu dari jenis khusus sedikit menurun menjadi 51,48% dan dari kayu jenis khusus ini tetap didominasi oleh kayu merbau sebesar 47,98% atau sebesar 595.513 m³.



Gambar 7. Produksi Kayu Bulat Berdasarkan Kelompok Jenis Kayu. Sumber : phl.klkh.go.id



Gambar 8. Produksi Kayu Bulat Berdasarkan Jenis Kayu. Sumber : phl.klkh.go.id

Merbau adalah salah satu jenis kayu keras dengan kualitas tinggi yang dihasilkan dari pohon anggota suku Fabaceae (Leguminosae). Penyebaran pohon ini di Indonesia berada di Sumatera, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Termasuk ke dalam jenis kayu dengan kelas awet I-II dan kelas kuat I-(III)¹¹. Dalam klasifikasi jenis produksi kayu KLHK, merbau termasuk dalam jenis khusus bersama dengan kayu jati. Berdasarkan Peraturan Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 20 Tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan

satwa yang dilindungi, dan perubahan pertama melalui Peraturan Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 92 Tahun 2018, merbau awalnya termasuk jenis tanaman yang dilindungi. Namun merbau kemudian dikeluarkan dari jenis yang dilindungi karena dianggap potensinya masih melimpah melalui Peraturan Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 106 Tahun 2018 tentang perubahan kedua dari Peraturan Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 20 Tahun 2018.

Pulau Papua merupakan sumber kayu merbau utama sekaligus penyuplai terbesar untuk kayu jenis khusus dinasional. Hal ini terlihat dari data produksi kayu jenis kelas khusus di Indonesia dalam dua tahun terakhir. Produksi kayu untuk jenis kelas khusus di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 1.464.258 m³ dengan 45,9% atau 672.103 m³ di antaranya merupakan jenis merbau. Pada tahun yang sama, kayu merbau yang diekstraksi dari hutan alam di Pulau Papua mencapai 656.894 m³ atau menyumbang sekitar 98% dari produksi kayu merbau nasional. Dan pada tahun 2020, produksi kayu jenis kelas khusus turun menjadi 1.365.415 m³ dengan jenis kayu merbau yang dihasilkan mencapai 612,219 m³ atau 44,84% di antaranya. Dan pada tahun ini, kayu merbau yang diekstraksi dari hutan alam di Pulau Papua mencapai 595.513 m³ atau 97%.

30



**Pendapatan
Negara dari
Ekstraksi Kayu
di Pulau Papua**

Kontribusi Hutan Produksi terhadap ekonomi Indonesia pada tahun 2019 dapat dikatakan menurun. Dari PNBP misalnya, pada tahun 2019 tercatat penerimaan sebesar 2,73 triliun rupiah, lebih kecil dari tahun 2018 yang mencapai 2,86 triliun rupiah. Produksi kayu bulat pada tahun 2019 dari HA sebanyak 6,77 juta m³, HTI sebanyak 36,23 juta m³. Jumlah tersebut produksinya menurun dari tahun 2018, yang mana dari HPH memproduksi kayu bulat sebesar 8,60 juta m³, dan HTI sebesar 40,14 juta m³. Tingkat investasi juga menurun, tahun 2019 nilai investasi sebesar 128,14 triliun rupiah, sedangkan tahun 2018 lebih besar yaitu 155,71 triliun rupiah¹².

Pulau Papua merupakan sumber kayu merbau utama sekaligus penyuplai terbesar untuk kayu jenis khusus di nasional. Hal ini terlihat dari data produksi kayu jenis kelas khusus di Indonesia dalam dua tahun terakhir. Produksi kayu untuk jenis kelas khusus di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 1.464.258 m³ dengan 45,9% atau 672.103 m³ di antaranya merupakan jenis merbau. Pada tahun yang sama, kayu merbau yang diekstraksi dari hutan alam di Pulau Papua mencapai 656.894 m³ atau menyumbang sekitar 98% dari produksi kayu merbau nasional. Dan pada tahun 2020, produksi kayu jenis kelas khusus turun menjadi 1.365.415 m³ dengan jenis kayu merbau yang dihasilkan mencapai 612.219 m³ atau 44,84% di antaranya. Dan pada tahun ini, kayu merbau yang diekstraksi dari hutan alam di Pulau Papua mencapai 595.513 m³ atau 97%.

PSDH dan DR adalah pungutan yang harus dibayarkan pemegang izin HPH untuk setiap kubik kayu yang berhasil dipanen. Namun untuk pemegang izin HTI dan juga perhutani hanya diharuskan membayar PSDH. Sedangkan hasil pungutan DR akan dipakai pemerintah untuk menjalankan program rehabilitasi hutan, meskipun rehabilitasi hutannya dilakukan di lain lokasi dari lokasi perusahaan yang membayar DR. Selain itu, dalam ruang lingkup pelaksanaan desentralisasi dikenal juga istilah Dana Bagi Hasil (DBH).

DBH dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu¹³ untuk mendanai kebutuhan daerah. Untuk sektor kehutanan, ditetapkan DBH untuk PSDH sebesar 20% untuk pusat, 16% untuk provinsi, 32% untuk kota/kabupaten penghasil dan 32% untuk pemerataan kabupaten/kota lain. Sedangkan skema DBH untuk DR adalah 60% untuk pusat dan 40% untuk provinsi.

Persentase Pembagian Dana Bagi Hasil (DBH)

- Pusat
- Provinsi
- Kab./Kota Penghasil
- Biaya Pemungutan
- Pemerataan Kab./Kota Lain



Pajak

Pajak Penghasilan Pasal 21 dan 25/29



Pajak Bumi dan Bangunan



Cukai Hasil Tembakau



Sumber Daya Alam

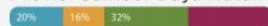


1) Kehutanan

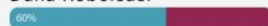
Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan



Provisi Sumber Daya Hutan



Dana Reboisasi



Iuran Tetap:

a. Darat dan Laut <4 mil



b. 4 mil < Laut < 12 mil



Iuran Produksi:

a. Darat dan Laut <4 mil



b. 4 mil < Laut < 12 mil



2) Mineral & Batu Bara



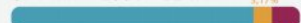
3) Perikanan



a. Darat dan Laut <4 mil



b. 4 mil < Laut < 12 mil

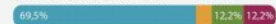


4) Minyak Bumi

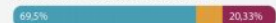


5) Gas Bumi

a. Darat dan Laut <4 mil



b. 4 mil < Laut < 12 mil



6) Panas Bumi

Gambar 9. Persentase pembagian dana bagi hasil (DBH).

Sumber : <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=7266>

Dalam kurun waktu 2019-2020, PNBP pada sektor kehutanan di Pulau Papua berasal dari PSDH, Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, DR dan juga DPEH. berikut ini adalah rincian dari PNBP sektor kehutanan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Provinsi Papua

- Pada tahun 2019, PSDH di Provinsi Papua mencapai 56 miliar rupiah dan berkontribusi sebesar 5,5% dari total pungutan PSDH secara nasional. PSDH yang dihasilkan bersumber dari izin HPH sekitar 87% (49 miliar rupiah), IPK sebesar 8%, HGU sebesar 2% dan Perorangan maupun izin HTI di bawah 1%.
- Pada tahun 2020 kontribusi PSDH dari Provinsi Papua untuk nasional turun menjadi 5,1% atau sekitar 50 miliar rupiah. Dari angka tersebut PSDH dari izin HPH masih menjadi penyumbang terbesar yang mencapai 45 miliar rupiah (90%) dan sisanya disumbangkan pungutan PSDH pengumpul HHBK terdaftar (3,6%), HTI (2,4%), dan lain-lain.
- Pungutan DR di provinsi Papua tahun 2019, secara nasional ikut menyumbang PNBP dari pungutan DR sebesar 6,7% atau bernilai sekitar 7,5 juta USD. Nilai tersebut setara dengan hampir 110 miliar rupiah. Dan DR izin HPH menyumbang 81% dari total pungutan DR di Provinsi Papua tahun 2019. Sedangkan untuk tahun 2020, meski sumbangan DR Provinsi Papua secara nasional mengalami peningkatan menjadi 6,9% namun dibandingkan nilai pungutan tahun sebelumnya justru mengalami penurunan yaitu senilai 6,2 juta USD. Angka tersebut setara dengan 90 miliar rupiah dan DR izin HPH menyumbang hampir 92% pungutan DR Provinsi Papua atau senilai 82 miliar rupiah.
- Berdasarkan skema DBH yang ada, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota asal produksi kayu mendapat persentase bagi hasil dari pungutan PSDH sebesar 16% dan 32%. Pada tahun 2019, DBH yang diperoleh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Papua sekitar 28,6 miliar rupiah. Jika dibandingkan dengan dana APBD Provinsi Papua pada 2019 yang mencapai angka 14,6 triliun rupiah, nilai DBH dari hasil pungutan kegiatan ekstraksi hutan alam ini tidak sampai 0,02% nilai APBD. Begitu juga untuk DBH dari DR dimana provinsi mendapat jatah bagi hasil sebesar 40% atau senilai 44 miliar rupiah. Jika kita bandingkan juga dengan nilai APBD Provinsi Papua pada tahun 2019, nilai DBH hasil pungutan DR ini hanya berkisar 0,03% nilai APBD. Padahal untuk mendapatkan pungutan pajak tersebut, hutan dan lahan di Provinsi Papua harus dibebani izin seluas 3,5 juta hektare.

Papua	Tahun 2019			Tahun 2020		
	PSDH	Iuran	DR (USD)	PSDH	Iuran	DR (USD)
IUPHHK-HA	49.782.103.052	12.412.153.688	6.156.702	45.375.246.078	-	5.771.953
IUPHHK-HT	103.316.460	-	20.426	1.261.723.404	-	227.933
IPK	4.729.985.450	-	1.101.112	287.554.460	-	53.890
Perorangan	326.551.850	-	45.787	11.414.463	-	-
HGU	1.315.104.360	-	271.805	880.276.480	-	223.050
IPHHBK	33.000.000	-	-	402.150.000	-	-
Pengumpul HHBK Terdaftar	-	-	-	1.841.857.500	-	-
Total	56.290.061.172	12.412.153.688	7.595.832	50.060.222.385	-	6.276.826

Tabel 5. Penerimaan Negara Bukan Pajak di Provinsi Papua. Sumber: phl.klhk.go.id

Provinsi Papua Barat

- Pada tahun 2019, PSDH di Provinsi Papua Barat menyumbang PNBPN sebesar 9,8% dari total pungutan PSDH secara nasional atau sekitar 101 miliar rupiah. Dimana sekitar 92% (93 miliar rupiah) disumbangkan oleh pungutan PSDH dari izin HPH dan 8% sisanya disumbangkan oleh pungutan PSDH lainnya (IPK, HGU, HHBK, Industri primer, dll). Sedangkan pada tahun 2020 sumbangan pungutan PSDH dari Provinsi Papua Barat untuk nasional turun menjadi 9,3% atau sekitar 91 miliar rupiah. Dari angka tersebut PSDH dari izin HPH masih menjadi penyumbang terbesar yang mencapai 90 miliar rupiah (98%) dan sisanya disumbangkan pungutan PSDH lainnya.
- Untuk pungutan DR di provinsi Papua Barat tahun 2019, secara nasional ikut menyumbang PNBPN dari pungutan DR sebesar 9,7% atau bernilai sekitar 10,9 juta USD. Nilai tersebut setara dengan hampir 158 miliar rupiah dan DR izin HPH menyumbang 99% dari total pungutan DR di Provinsi Papua tahun 2019. Sedangkan untuk tahun 2020, meski sumbangan DR Provinsi Papua Barat secara nasional mengalami peningkatan menjadi 10,8% namun dibandingkan nilai pungutan tahun sebelumnya justru mengalami penurunan yaitu senilai 9,8 juta USD. Angka tersebut setara dengan 141 miliar rupiah dan DR izin HPH menyumbang hampir keseluruhan pungutan DR Provinsi Papua barat atau senilai 140 miliar rupiah.
- Sehingga dengan skema DBH yang ada, dimana Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota asal produksi kayu mendapat persentase bagi hasil dari pungutan PSDH sebesar 16% dan 32%, pada tahun 2019 DBH yang diperoleh provinsi dan kabupaten/kota di Papua Barat sekitar 48,5 miliar rupiah. Jika dibandingkan dengan dana APBD Provinsi Papua Barat pada 2019 yang mencapai angka 12,4 triliun rupiah, nilai DBH dari hasil pungutan kegiatan ekstraksi hutan alam ini tidak sampai 0,04% nilai APBD. Begitu juga untuk DBH dari DR dimana provinsi mendapat jatah bagi hasil sebesar 40% atau senilai 63,2 miliar rupiah. Jika kita bandingkan juga dengan nilai APBD Provinsi Papua pada tahun 2019, nilai DBH hasil pungutan DR ini hanya berkisar 0,05% nilai APBD. Padahal untuk mendapatkan pungutan pajak tersebut, hutan dan lahan di Provinsi Papua Barat harus dibebani izin seluas 2,9 juta hektare.

Papua Barat	Tahun 2019		Tahun 2020		
	PSDH	DR (USD)	PSDH	DPEH	DR (USD)
IUPHHK-HA	93.636.196.890	10.017.584	90.512.461.480	400.044.000	9.786.416
IPK	5.891.446.740	673.005	694.870.170	-	79.964
HGU	1.457.201.560	306.306	-	-	-
KPH	-	-	3.646.500	-	-
IPHHBK-HA	157.463.040	-	132.072.000	-	-
IPHHK	-	-	32.844.960	-	-
IUPHHBK	9.901.650	-	33.990.000	-	-
Industri Primer	63.594.490	-	-	-	-
Total	101.215.804.370	10.996.895	91.409.885.110	400.044.000	9.866.380

Tabel 6. Penerimaan Negara Bukan Pajak di Provinsi Papua Barat. Sumber: phl.menlhk.go.id

Pendapatan Negara dari Ekstraksi Kayu di Pulau Papua

Jenis PNBP	Tahun 2019				Tahun 2020			
	PSDH	Iuran	DPEH	DR (USD)	PSDH	Iuran	DPEH	DR (USD)
IUPHHK-HA	495.922.990.200	112.815.268.938	734.915.400	88.054.485	427.279.731.368	61.931.850.000	400.044.000	74.619.308
IUPHHK-HT	382.826.736.419	110.315.970	145.471.800	8.698.277	423.725.544.240	1.184.475.000	-	7.084.771
IPK	43.089.610.580	-	1.842.876.450	8.646.874	10.397.885.980	-	2.888.564.850	2.149.668
Perorangan	15.030.719.911	-	-	2.794.308	16.554.638.864	-	-	2.973.858
HGU	12.718.600.870	-	-	2.647.837	10.598.956.894	-	-	2.278.944
IPPKH	12.739.245.736	-	-	2.486.833	10.564.308.240	-	4.399.723.650	2.041.695
HTR	1.164.484.637	-	-	96.185	987.989.843	-	-	101.521
HKM	241.442.903	-	-	998	1.483.008.441	4.690.400	-	-
Perhutani	65.057.588.740	-	-	-	74.943.358.163	-	-	-
KPH	397.886.214	-	-	-	1.280.226.938	-	-	-

Hutan Papua dan Para Penguasanya

IUPHHK-RE	2.046.060	-	-	-	-	2.791.200	-	-	-	-
IUPHHK- HD	1.041.150	-	-	-	-	18.581.892	-	-	-	-
IUPHHBK- HT	54.845.220	-	-	-	-	80.226.120	-	-	-	-
IUPHHBK- HA	157.463.040	-	-	-	-	233.322.000	-	-	-	-
IPHHK	-	-	-	-	-	32.844.960	-	-	-	-
IPHHBK	235.359.275	-	-	-	-	847.322.208	-	-	-	-
Industri Primer	63.594.490	-	-	-	-	627.502	-	-	-	-
Pengumpul HHBK Terdaftar	-	-	-	-	-	1.841.857.500	-	-	-	-
Total	1.029.703.655.445	112.925.584.908	2.723.263.650	113.425.797	980.873.222.353	63.121.015.400	7.688.332.500	91.249.765		

Tabel 7. Penerimaan Negara Bukan Pajak Nasional tahun 2019 dan tahun 2020. Sumber: phl.menlhk.go.id

39



Kepatuhan Atas Legalitas Kayu dan Kelestarian Pengelolaan Hutan di Pulau Papua

Indonesia menerapkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sebagai instrumen yang menjamin kelestarian pengelolaan hutan dan/atau legalitas kayu, serta ketertelusuran kayu melalui sertifikasi penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari (S-PHPL), sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK), dan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP). S-PHPL adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemegang izin atau pemegang hak pengelolaan yang menjelaskan keberhasilan pengelolaan hutan lestari. S-LK adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemegang izin, pemegang hak pengelolaan, pemilik hutan hak, atau pemegang legalitas pemanfaatan hasil hutan kayu yang menyatakan bahwa pemegang izin, pemegang hak pengelolaan, pemilik hutan hak, atau pemegang legalitas pemanfaatan hasil hutan kayu telah memenuhi standar legalitas kayu. Dan DKP adalah pernyataan kesesuaian yang dilakukan oleh pemasok berdasarkan bukti pemenuhan atas persyaratan.

40

Dalam perkembangannya, melalui Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung & Hutan Produksi, SVLK yang semula adalah Sistem Verifikasi Legalitas Kayu, berubah menjadi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian. Hal ini dianggap sebagai terobosan baru Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan (*sustainable*). Pada peraturan ini, SVLK dinyatakan sebagai sistem untuk memastikan kredibilitas penjaminan legalitas hasil hutan, ketertelusuran hasil hutan, dan kelestarian pengelolaan hutan.

Produsen Kayu	Jumlah Unit	Unit S-PHPL	Produksi Kayu 2019-2020 (m ³)	Unit S-VLK	Produksi Kayu 2019-2020 (m ³)	Unit yang belum Sertifikasi	Produksi Kayu 2019-2020 (m ³)
HPH	38	28	2.084.532,18	1	6.066,79	-	197.296,75
HTI	8	1	12.770,01	-	-	7	-

Tabel 7. Jumlah Unit Management yang Sudah Bersertifikat dan Jumlah Produksi Kayu Tahun 2019 dan Tahun 2020. Catatan perkembangan Sertifikasi sampai dengan tahun 2021. Sumber : Analisis FWI Tahun 2021

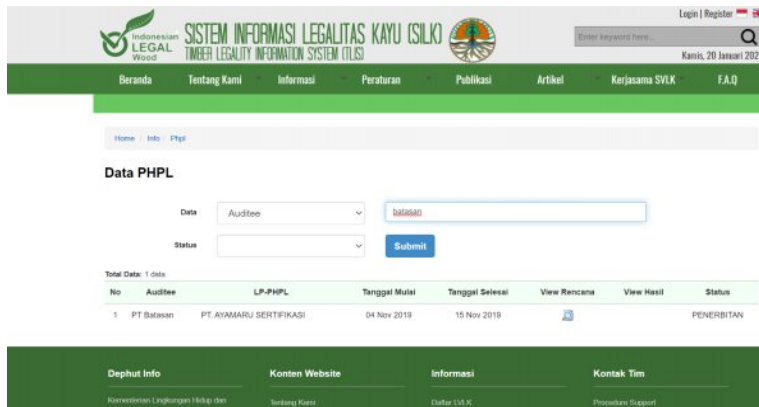
Dalam konteks kepatuhan unit manajemen HPH dan HTI di Papua dan Papua Barat terhadap SVLK, ternyata baru mencapai 28 unit dari total 46 unit manajemen, atau sekitar 60%. **Hal ini tentunya sangat disayangkan karena Papua merupakan wilayah penghasil kayu yang cukup signifikan bagi produksi kayu secara nasional, bahkan 98% produksi kayu merbau nasional juga berasal dari Papua.** Secara lebih rinci, dari 38 unit manajemen (UM) HPH yang ada di Papua, baru 28 yang sudah bersertifikat PHPL. Dari 28 UM tersebut, 6 unit manajemen yang memiliki S-PHPL & S-LK dan 3 unit manajemen yang bersertifikat S-LK saja. Sedangkan dari 8 unit manajemen HTI di Papua, hanya ada 1 unit manajemen yang memiliki sertifikat PHPL dan 1 S-LK¹⁴ yaitu PT Selaras Inti Semesta. Detail mengenai unit manajemen yang sudah bersertifikat PHPL ataupun LK dapat dilihat pada lampiran 2.

Sehingga dari total produksi kayu di Papua yang mencapai 2,45 juta m³ pada rentang 2019-2020, baru sekitar 2,09 juta m³ yang telah berlabel pengelolaan hutan produksi lestari. serta yang sekitar 6.000 ribu m³ yang hanya berstatus legal tanpa ada prinsip pengelolaan hutan lestari. Dan terdapat 197 ribu m³ kayu yang tidak berstatus legal maupun pengelolaan hutan produksi lestari.

*

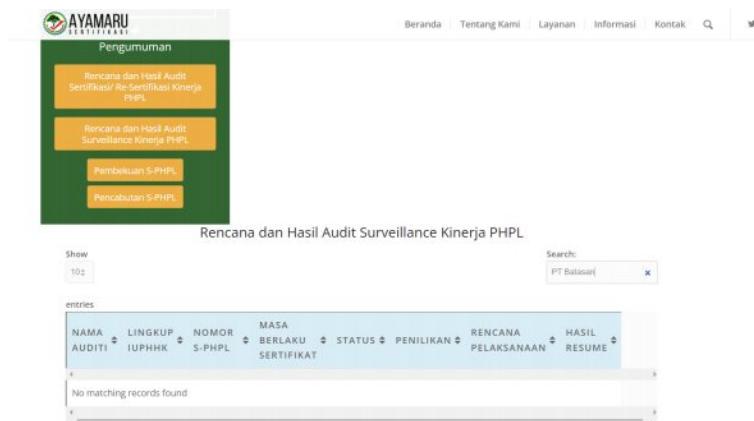
Produksi Kayu di Provinsi Papua Barat

Dalam sistem informasi SILK KLHK, PT Ayamaru Sertifikasi telah menerbitkan sertifikat PT Batasan, tetapi tidak terdapat lampiran informasi hasil sertifikasinya, padahal dalam sistem statusnya adalah penerbitan. Hanya dokumen rencana penilaian saja yang tersedia. Kemudian dalam website LS PT Ayamaru Sertifikasi juga tidak terdapat informasi sertifikasi PHPL PT Batasan. Perusahaan ini memproduksi kayu di tahun 2019-2020 sebesar 11.607,42 m³.



42

Gambar 10. Sistem Informasi Legalitas Kayu KLHK



Gambar 11. Website LS PT Ayamaru Sertifikasi

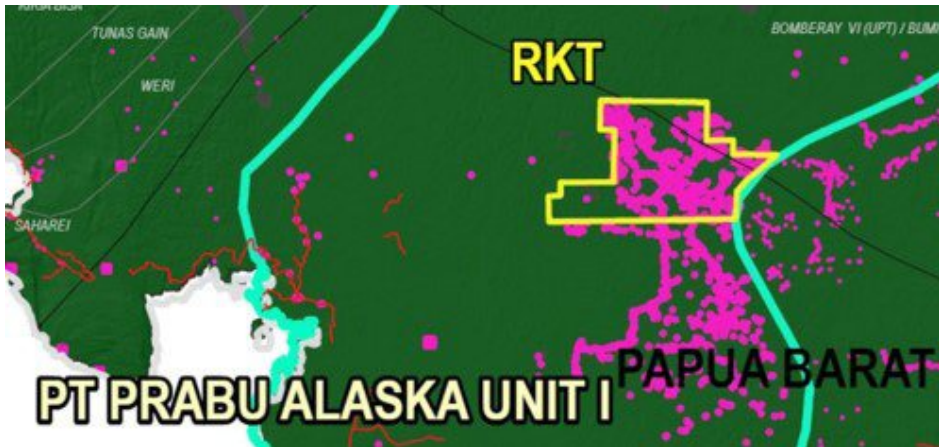
*

PT Prabu Alaska Menebang Kayu Hingga ke Konsesi PT Hanurata

PT Prabu Alaska merupakan perusahaan yang memegang izin IUPHHK-HA, dan anak dari Intra Alamindo Group. Wilayah operasinya termasuk Kabupaten Kaimana dan Fak-Fak. Perusahaan ini merupakan perusahaan IUPHHK-HA terluas di Provinsi Papua Barat, dengan luas 323.65 ribu hektare. FWI melalui data IDEAS IPB dan GLAD Alert menemukan pada tahun 2019-2020 terjadi deforestasi sebesar 1.960 hektare di areal perusahaan yang 97,19% dari total daratannya masih ditutupi oleh hutan alam. Di sebelah timur perusahaan ini berbatasan dengan PT Hanurata dan di sebelah barat berbatasan dengan PT Arfak Indra.

Juli 2021, FWI berkesempatan untuk melakukan kunjungan lapangan untuk menemukan indikasi-indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan ini. Berikut hasil temuan yang didapat:

- PT Prabu Alaska terkonfirmasi melakukan penebangan di luar areal perusahaannya, hingga masuk ke dalam areal PT Hanurata. Hal ini dikonfirmasi melalui wawancara dengan salah satu operator tebang PT.Prabu Alaska. Permasalahan ini diklaim sudah diselesaikan secara internal antara dua belah pihak, dengan melibatkan lembaga sertifikasinya, yaitu PT Lambodja Sertifikasi. PT Prabu Alaska dan PT Hanurata memiliki Lembaga sertifikasi yang sama.
- PT Prabu Alaska terindikasi melakukan penebangan di luar areal Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2020. Hal ini diduga merupakan pembukaan jalan menuju RKT 2021. Indikasi ini tidak dapat terpantau langsung di lokasi karena terkendala aksesibilitas.
- PT Prabu Alaska terindikasi melakukan penebangan di luar areal Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2020. Hal ini diduga merupakan pembukaan jalan menuju RKT 2021. Indikasi ini tidak dapat terpantau langsung di lokasi karena terkendala aksesibilitas.



Gambar 12. Peta Rencana Kerja Tahunan PT Prabu Alaska Unit I. Sumber: FWI Tahun 2021

- PT Prabu Alaska berkonflik dengan 2 masyarakat adat di Kaimana yaitu masyarakat adat Fruata dan Rauna. Konflik ini terjadi akibat PT Prabu Alaska menebang di wilayah adat mereka. Sewaktu dilakukan wawancara dengan juru bicara PT Prabu Alaska, Dirgan Laberis, mereka mengaku bahwa operator tebangnya tidak mengetahui perihal batas wilayah adat.

44



Gambar 13. Pembukaan lahan untuk pelabuhan tempat penimbunan kayu hutan di PT Prabu Alaska



Gambar 14. Proses penandatanganan keberatan oleh masyarakat adat Tanggarofa terhadap penebangan di areal wilayah adat mereka

*

Dugaan Pelanggaran Praktik Pengelolaan Hutan oleh Anak Usaha Korindo Group di Papua

Korindo merupakan salah satu grup perusahaan yang memiliki wilayah konsesi hutan terluas di Papua Selatan. Melalui anak usahanya, PT Inocin Abadi (IA) dan PT Tunas Timber Lestari (TTL), Korindo menguasai lahan konsesi masing-masing seluas 99.665 hektare (PT IA) dan 214.935 hektare (PT TTL), yang terbagi di dua kabupaten yaitu Boven Digul dan Merauke. Dua perusahaan tersebut memperoleh izin sejak tahun 2011 dan aktif beroperasi menebang hutan (HPH) sampai dengan sekarang.

Pada tahun 2020, melalui pengolahan data citra GLAD¹⁵, Forest Watch Indonesia menemukan perubahan tutupan hutan yang cukup signifikan. Pada kedua konsesi PT IA dan PT TTL masing-masing mengalami deforestasi seluas 648 hektare dan 888 hektare pada rentang waktu 2019-2020. Pada tahun 2021 FWI juga melakukan pemantauan hutan terhadap aktivitas PT IA dan PT TTL untuk mencari tahu penyebab deforestasi tersebut. Adapun temuannya sebagai berikut:

- Deforestasi yang terjadi pada tahun 2020 pada area PT IA ($6^{\circ}53'31.36''S$ $140^{\circ}38'35.34''E$ dan $6^{\circ}52'42.87''S$ $140^{\circ}45'16.26''E$) dan PT TTL ($6^{\circ}37'49.41''S$ $140^{\circ}37'51.39''E$) penyebabnya di lapangan adalah pembukaan hutan untuk jalan transportasi mengangkut kayu tebangan.
- Dugaan melakukan penebangan di luar RKT. Area deforestasi tahun 2020 di konsesi PT TTL merupakan wilayah RKT PT TTL tahun 2021. Hal ini diketahui karena terdapat papan informasi di sekitar wilayah tersebut, yang menunjukkan bahwa lokasi tersebut masuk ke dalam area RKT 2021 PT TTL. Selain itu, ditemukan aktivitas penebangan di luar blok RKT tahun 2021 PT IA yang kayunya telah diolah menjadi balok-balok kayu di dalam hutan
- Sebagian kayu-kayu yang ditebang dan dikumpulkan di TPK Hutan PT IA dan PT TTL tidak memiliki *barcode* dan penanda. Temuan lainnya juga mengindikasikan perusahaan tidak melakukan proses tebang pilih karena ditemukan kayu-kayu berdiameter kurang dari 40 sentimeter yang ditebang dan dikumpulkan di TPK Hutan.
- Ditemukan indikasi penebangan disekitar pinggir sungai dan penimbunan sungai untuk akses jalan transportasi kayu pada area PT TTL dengan koordinat $6^{\circ}37'49.41''S$ $140^{\circ}37'51.39''E$
- Ada permasalahan konflik yang tak kunjung selesai antara perusahaan dengan marga pemilik ulayat. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat protes masyarakat pemilik ulayat yang menolak aktivitas penebangan hutan oleh PT TTL. Selain itu, marga yang menerima kompensasi kayu merasa dirugikan, karena nilai kompensasi yang rendah dan tidak berubah selama 10 tahun berjalan¹⁶.

Menindaklanjuti temuan di atas yang juga dipublikasikan oleh Majalah Tempo edisi 8-14 November 2021, Korindo menanggapi dengan mengeluarkan surat hak jawab nomor 10/XI/PR/2021 tanggal 15 November 2021. Adapun isi tanggapannya, Korindo mengklaim tidak melakukan deforestasi di wilayah konsesi anak usahanya PT IA dan PT TTL. Namun, Korindo mengkonfirmasi bahwa penebangan hutan pada tahun 2020 di wilayah RKT 2021 adalah Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) untuk pembuatan akses jalan ke blok yang akan ditebang.

Terkait penebangan di luar blok RKT, Korindo mengklaim melakukan penebangan sesuai RKT. Adapun penjelasan terkait temuan di atas, Korindo hanya mengonfirmasi untuk temuan pembukaan hutan terkait akses jalan. Namun, penebangan hutan yang kayunya berupa kayu olahan gergajian di konsesi PT IA tidak dijelaskan secara rinci. Begitu pula temuan soal kayu-kayu yang tidak memiliki *barcode* di TPK Hutan PT IA dan PT TTL tidak dijelaskan dalam surat hak jawabnya.

47



Gambar 15. Foto udara pembukaan hutan di blok RKT 2021 yang terdeforestasi pada tahun 2020 di konsesi PT Inocin Abadi



Gambar 16. Tumpukan kayu yang tidak memiliki *barcode* dan diameter kurang dari 40 sentimeter di TPK Hutan PT Inocin Abadi

48



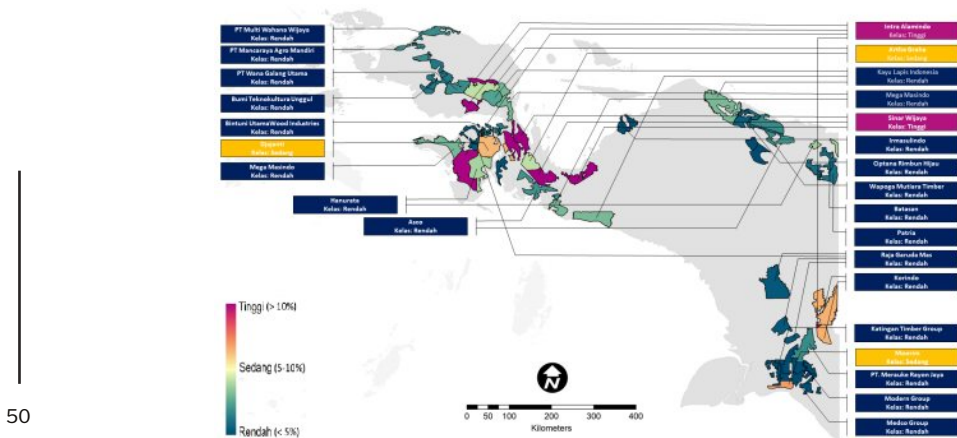
Gambar 17. Tumpukan kayu yang tidak memiliki *barcode* dan diameter kurang dari 40 sentimeter di TPK Hutan Blok RKT 2021 PT Tunas Timber Lestari

49



**Alert
Deforestasi
Dalam Konsesi
HPH Dan HTI
Di Papua**

Sebagaimana disinggung di atas, bahwa setidaknya 55.65 ribu hektare hutan alam terindikasi terdeforestasi dan 78% atau 43.6 ribu hektare dari total indikasi ini berada di areal yang sudah dibebani izin. Gambar 13 menunjukkan rasio antara deforestasi pada setiap grup HPH dan HTI dengan deforestasi total pada seluruh grup. Rasio tersebut merepresentasikan proporsi tingkat deforestasi grup tertentu terhadap total deforestasi yang terjadi pada seluruh HPH dan HTI di Provinsi Papua dan Papua Barat, dalam satuan persen.



50

Gambar 18. Alert Deforestasi di Dalam Konsesi HPH dan HTI di Pulau Papua. Sumber: FWI Tahun 2021

Kelas tinggi menunjukkan bahwa grup tersebut menyumbang deforestasi dengan persentase di atas 10% jika dibandingkan dengan total deforestasi dari group lain. Kelas tinggi (ditunjukkan dengan warna ungu) ditemukan di perusahaan dekat kepala burung Papua, yaitu grup Intra Alamindo dan Sinar wijaya. Namun demikian, ditemukan pula perusahaan dalam grup dengan tingkat deforestasi tinggi di daerah Boven Digoel. Kelas deforestasi sedang (ditunjukkan dengan warna kuning) memiliki rasio deforestasi sebesar 5-10% (e.g: Djajanti, Artha Graha), dan kelas rendah (ditunjukkan dengan warna biru) memiliki rasio deforestasi di bawah 5%, yang mendominasi kelas deforestasi di grup HPH dan HTI yang terdapat di Papua.

Dari total deforestasi (55,65 ribu hektare) pada tahun 2019-2020, sekitar 34% atau sekitar 19 ribu hektare terjadi di wilayah moratorium. Analisa data di atas juga menemukan bahwa 99% deforestasi di wilayah moratorium justru terjadi di luar area konsesi izin, dan hanya sekitar 200 hektare hutan yang terdeforestasi di wilayah moratorium yang tumpang tindih dengan konsesi HPH serta HTI. Salah satu konsesi grup yang memiliki area di dalam moratorium yang luas serta mengalami indikasi deforestasi dengan tingkat tinggi yaitu Sinar Wijaya, dimana 17 ribu hektare konsesinya berada di wilayah moratorium, dan juga masuk kategori tingkat deforestasi tinggi.

Berdasarkan hasil analisis peta PIPPIB¹⁷, dari areal seluas 26,4 juta hektare wilayah di Papua yang telah ditetapkan sebagai areal indikatif PIPPIB, terdapat sekitar 1.145.271 hektare areal yang berada di dalam wilayah konsesi. Areal PIPPIB yang terdapat di dalam konsesi tersebut tersebar pada wilayah konsesi pertambangan, seluas 658 ribu hektare, 420 ribu hektare berada di wilayah konsesi perkebunan kelapa sawit, 62.770 ribu hektare berada di wilayah konsesi HPH, dan 3.569 hektare berada di wilayah konsesi HTI. Selain itu, juga ditemukan adanya areal PIPPIB seluas 4.328 hektare yang berada dalam wilayah yang tumpang tindih antara HPH, HTI, Perkebunan Kelapa Sawit dan atau Pertambangan.

51

Tipe Izin	HPH (hektare)	HTI (hektare)	Perkebunan Kelapa Sawit (hektare)	Pertambangan (hektare)	Sub Total (hektare)
HPH	62.039	-	21	710	62.770
HTI	-	3.536	33	-	3.569
Perkebunan Kelapa Sawit	-	-	417.109	3563	420.672
Pertambangan	-	-	-	658.260	658.260
Total	-	-	-	-	1.145.271

Tabel 8. Areal PIPPIB yang Masuk ke Dalam Konsesi. Sumber: FWI Tahun 2021

PIPIIB	Tutupan hutan 2018 (hektare)	Deforestasi 2020 (hektare)	Tutupan hutan 2020 (hektare)	Tutupan hutan 2020 (hektare)
Tumpang Tindih	3.911	37	22	3.906
HPH	60.329	0	0	60.270
HTI	3.302	122	52	3.302
Kebun	338.828	312	262	338.654
Tambang	576.080	4	2	575.506
Di luar Konsesi	21.541.632	9.916	8.571	21.522.807
Total	22.524.083	10.391	8.909	22.504.445

Tabel 9. Deforestasi PIPPIB di Areal Konsesi. Sumber: FWI Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, kita bisa melihat lebih dalam dimana wilayah moratorium yang masih mengalami deforestasi. Selama 2019-2020, wilayah moratorium hutan yang masih terdeforestasi adalah seluas 19.300 hektare. Dimana dalam rentang dua, wilayah moratorium yang paling besar deforestasinya berada di luar konsesi, yaitu seluas 18.487 hektare atau hampir 95%. Sisanya, deforestasi seluas 574 hektare (hampir 3%) berada di wilayah moratorium yang tumpang tindih dengan konsesi kebun, 174 hektare (kurang dari 1%) di wilayah konsesi HTI, 59 hektare berada di wilayah yang tumpang tindih dengan keempat wilayah (tambang, HPH, HTI, dan Kebun), enam hektare berada di wilayah konsesi tambang, serta tidak ada deforestasi di konsesi HPH yang tumpang tindih dengan wilayah moratorium.

Jika dilihat lebih spesifik lagi, masih terdapat sekitar 66.339 hektare wilayah moratorium yang tumpang tindih dengan konsesi HPH dan HTI berdasarkan grup, dimana yang paling tinggi di wilayah konsesi grup Irmasulindo (12 ribu hektare), Mega Masindo (11 ribu hektare), di wilayah 4 perusahaan yang belum terkonfirmasi grupnya (9 ribu hektare), Sinar Wijaya (8 ribu hektare), Asco (6 ribu hektare), dan sisanya terbagi ke wilayah grup-grup lain.

Grup	Luas Konsesi Dalam PIPPIB (hektare)
Irmasulindo	12.462
Mega Masindo	11.714
Belum Ada Info Group	9.263
Sinar Wijaya	8.683
Asco	6.815
Raja Garuda Mas	4.852
Patria	3.498
Kayu Lapis Indonesia	1.516
Wapoga Mutiara Timber	1.305
Mitra Jaya	694
Artha Graha	660
Bumi Teknokultura Unggul	445
Djajanti	424
Korindo	352

Hanurata	134
Intra Alamindo	44
Ciptana	23
Moorim	4
Batasan	0
Modern Group	0
Bintuni Utama Wood Industries	0
Raja Garuda Mas	0
Katingan Timber Group	0
Belum Ada	2.953
Total PIPPIB di Dalam HPH Dan HTI	66.339
Di Luar HPH Dan HTI	26.329.242
Total	26.395.581

Tabel 10. Luasan Konsesi Grup HPH HTI yang Masuk
 Dalam Wilayah PIPPIB. Sumber: FWI Tahun 2021

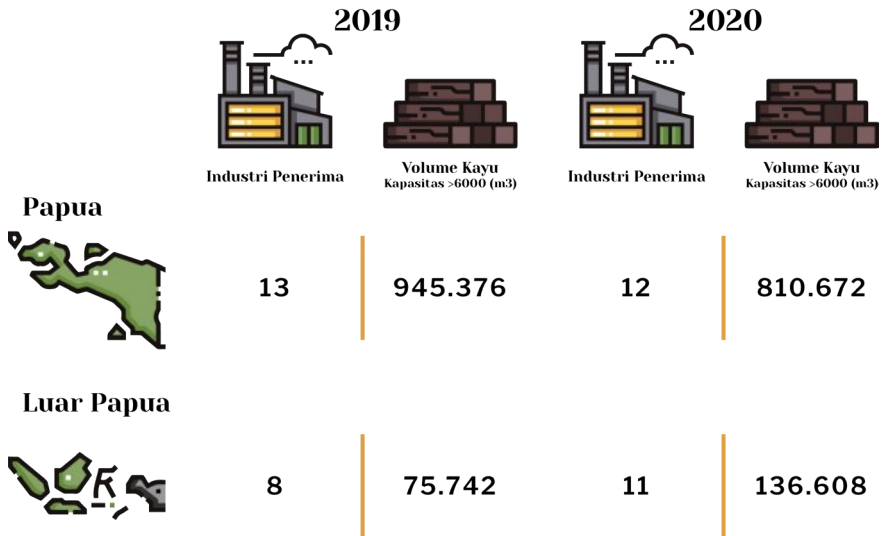
55



**Peredaran
Kayu HPH
dan HTI dari
Pulau Papua**

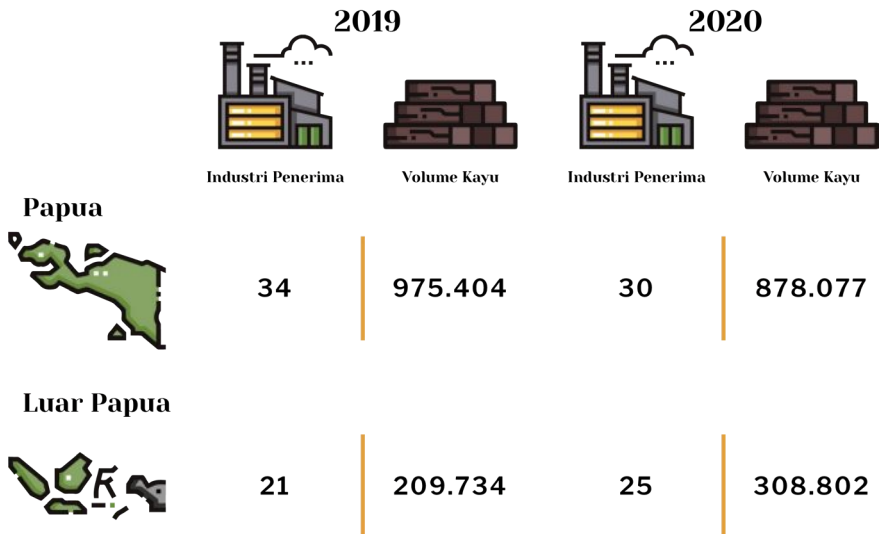
Sumber asal bahan baku untuk pemenuhan bahan baku industri di atas, dijelaskan melalui gambar di bawah ini. Ada dua jenis sumber data yang menjadi referensi, yaitu data: PHL dan RPBBI.

Sumber: RPBBI.klhk.go.id
diakses Jan-Mar 2021



Gambar 19. Jumlah Industri Pengolahan Kayu Dan Volume Kayu yang Diterima Industri Tahun 2019 dan Tahun 2020 di Dalam Sistem Informasi RPBBI

Sumber: phpl.klhk.go.id (data per perusahaan/ izin)
diakses Jan-Aug 2021



Gambar 20. Jumlah Industri Pengolahan Kayu Dan Volume Kayu yang Diterima Industri Tahun 2019 dan 2020 di Dalam Sistem Informasi PHPL

da perbedaan mengenai data jumlah industri penerima kayu dari HPH HTI di Pulau Papua dan volume kayu antara data RPBBI dan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL). Perbedaan data ini karena data RPBBI belum mencakup untuk informasi industri dengan kapasitas di bawah 6.000 m³, sedangkan data pada PHPL sudah mencakup industri yang berkapasitas baik di atas atau di bawah 6.000 m³.

Sebagaimana diketahui bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari HPH, HTI dan juga LC HTI di Pulau Papua dalam 2 tahun terakhir mencapai 2,45 juta m³. Sedangkan yang dipasok ke industri berdasarkan data RPBBI dan juga PHPL, masing-masing sekitar 1.968.758 m³ dan 2.453.017 m³. Terdapat selisih kayu yang diterima oleh industri pengolahan kayu antara data RPBBI dan PHL sekitar 484 ribu m³ yang kemungkinan disebabkan oleh tidak tercatatnya kayu yang diterima industri di bawah 6.000 m³ oleh data RPBBI.

Adapun gambar/peta aliran kayu yang berasal dari izin HPH dan HTI di Papua dapat dilihat pada gambar berikut:

Peredaran Kayu dari HPH dan HTI

sumber: RPBBI KLHK tahun 2020



Papua



Papua Barat



Kapasitas <6000m³

34 Papua / Industri 4 Papua Barat / Industri

8 Papua Barat / Industri 1 Jawa Tengah / Industri



Kapasitas >6000m³

8 Papua / Industri 5 Papua Barat / Industri

8 Papua / Industri 11 Papua Barat / Industri

14 Jawa Timur / Industri 1 Kalimantan Barat / Industri

1 Jawa Tengah / Industri

58

Gambar 19. Jumlah Industri Pengolahan Kayu Dan Volume Kayu yang Diterima Industri Tahun 2019 dan Tahun 2020 di Dalam Sistem Informasi RPBBI

Dari gambar di atas (RPBBI, 2020) dapat dilihat bahwa mayoritas kayu bulat yang berasal dari Papua Barat dikirimkan ke 14 industri di Jawa Timur yang berkapasitas di atas 6.000 m³, lalu diserap 11 industri di Papua Barat, 1 industri di Kalimantan Timur dan 1 industri di Jawa Tengah. Untuk industri berkapasitas di bawah 6.000 m³ terdapat 1 industri di Jawa Tengah dan 13 industri di Papua Barat. Sedangkan kayu bulat yang berasal dari Papua diterima oleh 34 industri di Papua dan 4 industri di Papua Barat.

Sedangkan berdasarkan data PHPL di tahun yang sama, kayu asal Provinsi Papua dikirimkan ke 18 Industri pengolahan kayu dan 4 industri perajin kayu di Kabupaten Merauke dan Boven Digoel. Sedangkan kayu asal Provinsi Papua Barat dikirimkan ke 31 industri pengolahan kayu yang ada di Jawa Timur, 13 industri di Papua Barat, 5 industri di Papua, 2 industri di Jawa Tengah dan 1 industri di Kalimantan Timur.

Peredaran Kayu dari HPH dan HTI

sumber: PHPL KLHK tahun 2020



Papua



Papua Barat

18 Papua
Industri

4 di Kabupaten
Pengrajin

9 Papua Barat
Industri

5 Papua
Industri

31 Jawa Timur
Industri

2 Jawa Tengah
Industri

13 Papua Barat
Industri

1 Kalimantan Barat
Industri

Gambar 22. Peredaran Kayu Dari HPH dan HTI ke Industri Pengolahan Kayu Di Indonesia Berdasarkan Sistem Informasi PHPL

Mengingat kayu dari hutan Provinsi Papua tidak diperbolehkan keluar atau dikirim ke industri di luar Provinsi Papua¹⁸, dan kayu-kayu yang diolah di Papua tersebut diekspor secara langsung ke luar negeri melalui Asosiasi Pengusaha Kayu Gergajian dan Kayu Olahan Indonesia (ISWA), Komda Papua yang melakukan kerjasama dengan PT Pelindo 4 di Jayapura¹⁹. Berdasarkan data serapan industri dari data PHPL menunjukkan bahwa kayu yang berasal dari Provinsi Papua juga diedarkan ke Provinsi Papua Barat sebanyak 46.335 m³. Ada 2 industri di Provinsi Papua Barat yang menerima kayu dari Provinsi Papua yaitu: PT Bagus Jaya Abadi dan PT Henrison Iriana. Antara HPH sebagai pemasok dan industri penerima kayu berada dalam grup yang sama. Industri Kayu PT Bagus Jaya Abadi dan pemasoknya PT Mutiara Alas Khatulistiwa berada di bawah grup Masindo. Sedangkan PT Henrison Iriana dengan pemasoknya PT Bina Balantak Utama PT Diadyani Timber berada di bawah grup Kayu Lapis Indonesia (KLI). Namun PT Henrison Iriana juga menerima pasokan kayu dari HPH PT Mondialindo Setya Pratama (Grup Ciptana) yang berada di Kabupaten Sarmi Provinsi Papua. **Sehingga, dari pola pengiriman kayu yang melibatkan HPH sebagai sumber bahan baku (berasal dari Provinsi Papua) dan industri terintegrasi (berada di luar Provinsi Papua) yang juga merupakan bagian grup yang sama dapat dijadikan cara untuk “mengakali” regulasi yang tidak memperbolehkan kayu asal Provinsi Papua keluar dari wilayahnya.**

61

**Ekspor Kayu
Dari Pulau
Papua**

Indonesia memiliki bahan baku kayu yang besar dan tercatat sebagai salah satu negara pengekspor terbesar di dunia. Ekspor kayu dari Papua mencapai 141 juta USD sepanjang tahun 2019 dengan volume kayu yang di ekspor sebanyak 232.360 m³. Sedangkan pada tahun 2020, nilai ekspor produk kayu dari Papua turun menjadi 136 juta USD yang dihasilkan dari 205.321 m³. Penurunan ini tentunya sejalan dengan juga turunnya produksi kayu bulat dari Papua.

Tahun	Ekspor	Papua	Nilai Ekspor Tahun 2020 (USD)
2019	Nilai Ekspor (USD)	133.784.249	126.241.287
	Volume (m ³)	226.017	47.567.716
2020	Nilai Ekspor (USD)	126.241.287	-
	Volume (m ³)	195.097	-

62

Tabel 11. Nilai Ekspor di Papua dan Papua Barat Tahun 2019 dan Tahun 2020

Provinsi/Negara	Nilai Ekspor Tahun 2019 (USD)	Nilai Ekspor Tahun 2020 (USD)
Papua	133.784.249	126.241.287
Australia	40.033.911	47.567.716
Belgium	61.478	-
China	90.485	-
India	-	21.932
Japan	-	15
New Zealand	3.046.150	3.335.646

Oman	1.925.947	-
Qatar	419.036	-
Republic Of Korea	22.305.414	14.175.917
Saudi Arabia	28.976.608	8.446.766
Somalia	391.589	-
Taiwan, Republic Of China	7.356.158	2.993.579
United Arab Emirates	1.219.452	13.605
United States Of America	27.958.022	49.686.112
Papua Barat	7.672.972	10.466.988
Australia	291.776	1.520.503
Belgium	107.291	102.941
China	5.326.911	6.295.778
French Polynesia	186.670	158.898
India	337.151	1.140.938
Italy	30.297	-
Malaysia	34.401	-
Netherlands	135.852	311.091
New Caledonia	54.113	-
Poland	36.265	-
Republic Of Korea	1.132.246	909.088
Taiwan, Republic Of China	-	27.751
Total	141.457.221	136.708.275

Jika melihat data tahun 2019-2020, ekspor produk kayu secara keseluruhan baik dari Provinsi Papua maupun Papua Barat telah dikirim ke 20 negara berbeda. Berdasarkan besarnya nilai ekspor pada tahun 2019, produk kayu dari Provinsi Papua paling banyak dikirim ke Australia (40 juta USD), Arab Saudi (28 juta USD), Amerika Serikat (27 juta USD) dan Korea Selatan (22 juta USD). Sedangkan yang berasal dari Provinsi Papua Barat, nilai ekspor paling tinggi adalah ke negara China (5,3 juta USD) dan Korea Selatan (1,1 juta USD).

Sedangkan untuk tahun 2020, meskipun nilai ekspor produk kayu turun secara keseluruhan namun untuk beberapa negara justru mengalami peningkatan. Seperti ekspor kayu dari Provinsi Papua ke Amerika yang mengalami peningkatan hampir dua kali lipat dari 27 juta USD menjadi 49 juta USD di tahun 2020. Serta ekspor ke Australia yang juga meningkat pada tahun 2020, dari sebelumnya senilai 40 juta USD menjadi 47 juta USD. Lain halnya dengan Papua Barat, dimana nilai penambahan ekspor secara keseluruhan juga diikuti penambahan nilai ekspor di beberapa negara. Seperti nilai ekspor ke China (6,2 juta USD), Australia (1,5 juta USD), dan India (1,1 juta USD).

64

Informasi mengenai rantai peredaran kayu dari Pulau Papua pada tingkat eksportir, khususnya eksportir produsen dapat didekati dengan data industri pengolahan dengan daftar eksportir. Sedangkan untuk eksportir non produsen atau trader, belum ada informasi yang bisa diakses terkait dari produk kayu dari industri pengolahan mana yang di ekspor oleh eksportir non produsen.

Sebagai gambaran, pada tahun 2020 ada sekitar 55 industri pengolahan yang menerima pasokan kayu dari Pulau Papua. Dari 55 industri tersebut, yang terdaftar sebagai eksportir produsen hanya sekitar 23 perusahaan. Berdasarkan data eksportir yang diakses dari laman SILK, eksportir produk kayu baik sebagai Eksportir Produsen atau sebagai Eksportir Non-Produsen yang berada di Pulau Papua keseluruhan berjumlah 16 perusahaan. Keseluruhan perusahaan tersebut sudah mendapatkan sertifikasi SVLK dengan periode akhir 2022 hingga 2027 (Lampiran 3 dan 4).

*

Negara Tujuan Ekspor olahan kayu yang berasal dari HPH dan HTI di Pulau Papua

Salah satu sumber informasi mengenai peredaran kayu ekspor dan impor yang dapat diakses adalah Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) yang dikembangkan oleh KLHK. Namun dengan periode update yang harian dan selalu berubah, sulit kemudian untuk melihat gambaran detail mengenai ekspor atau impor dalam periode waktu tertentu.

Meski belum bisa menunjukkan akumulasi data tahunan, berikut ini adalah gambaran terkait ekspor kayu yang berasal dari Pulau Papua dengan menggunakan informasi yang berhasil di akses dari SILK. Berdasarkan data harian yang tersedia di laman SILK, diketahui bahwa pada tanggal 21 Desember 2020 terdapat 10 industri pengolahan kayu yang menerima kayu dari HPH dan HTI asal Pulau Papua telah melakukan ekspor ke 7 negara dengan total pengiriman mencapai hampir 800 m³ atau senilai 930 ribu dolar (sekitar 13 miliar rupiah). Industri pengolahan yang melakukan ekspor mayoritas berada di Jawa Timur dengan 8 industri, sisanya dilakukan oleh 1 Industri milik Korindo Group (PT BFI) di Kalimantan Timur, serta 1 Industri milik Sinar Wijaya di Papua.

Meskipun industri pengolahan kayu di luar Papua dan Papua Barat yang melakukan ekspor tidak hanya menerima kayu dari Papua, namun dari jenis yang dikirim menunjukkan bahwa kayu-kayu tersebut mayoritas memang berasal dari Papua. Misalnya IFURA yang melakukan ekspor kayu merbau ke Australia, yang mana sumber kayunya berasal dari HPH PT Asco Prima Nusantara. Industri lain di Jawa Timur yang juga menerima kayu dari PT APN adalah CV Jati Makmur, yang melakukan ekspor kayu merbau ke New Zealand. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

EKSPOR KAYU DARI PAPUA TAHUN 2020

ASAL KAYU	NAMA EKSPORER	NAMA IMPORIR	NEGARA	SCIENTIFIC	Volume
PT Asco Prima Nusantara	PT CV JATI MAHUR	BUILDPRO LIMITED	NEW ZEALAND	MERBAU (Pantai (PNSB))	17,87
PT Hasegata UHBT	PT ARIKA RUMBA	ITIGSA (PT) LTD	AUSTRIALIA	MERBAU (Pantai (PNSB))	38,94
PT Prabu Alaksa	PT DALUPPAPAN INDUSTRIES	TERA TIMBER CO. LTD	REPUBLIC OF KOREA	BANGKIRAI (Pantai (PNSB)) LAEVIFOLIA JAMBUI-JAMBU (EUCALYPTA SP) MANGATI BAKTI	10,90 1,48 16,25
PT Yoda Sereca Timber	PT HASIANI HUKAU PERKASA	HOCK ANK TRADING PTE LTD	AUSTRALIA	(SHOREA JAVES) PANTAI (PNSB)	55,52
PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya	PT Sinar Wajaya Group	WOOD THEORY PTE LTD	NEW ZEALAND	MERBAU (Pantai (PNSB))	36,09
PT Manokwari Mandiri Lestari	PT BERAU KARYA INDAH	GEO STAR RESOURCES PTE LTD	CHINA	MERBAU (Pantai (PNSB))	39,08
PT Kumabima Sajahitara	PT Papua Satey Neneke	GLOBAL WOOD RESOURCES LTD OO DONGSEUNG CO. LTD	AUSTRALIA	MERBAU (Pantai (PNSB))	67,45
PT Mitra Peninggupan Global	PT HUTAN LESTARI HUKI PERKASA	GLOBAL WOOD RESOURCES LTD OO DANLE RMP & SUPPLY CHAIN CO. LTD	CHINA	MERBAU (Pantai (PNSB))	57,83
PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya	PT Roco Prima Nusantara	RESOURCES LTD OO GUMPERTS LTD	CHINA	MERBAU (Pantai (PNSB))	40,08
		ANGAD IMPEX	INDIA	MERBAU (Pantai (PNSB))	85,61
		SWINSON LESTED PRODUCTS MP EXP. CORP LTD	CHINA	MERBAU (Pantai (PNSB))	42,21
		LTL WOODPRODUCTS BV	NETHERLANDS	BANGKIRAI (Pantai (PNSB)) LAEVIFOLIA	27,00
		TRADELINK WOOD PRODUCTS LTD	ISRAEL	BANGKIRAI (SHOREA JAVES) MERBAU (Pantai (PNSB))	27,37
		SIMAHODS LUMBER	NEW ZEALAND	PANTAI (PNSB)	160,04
		PHO THAIER IMPORTERS (PT) LTD	AUSTRALIA	MERBAU (Pantai (PNSB))	74,94
		Total			798,63



Gambar 23. Ekspor Kayu dari Industri yang Menerima Kayu dari Papua & Papua Barat. Sumber: silk.klhk.go.id

67



Penutup

Sekitar 6,4 juta hektare daratan di Pulau Papua telah didistribusikan kuasa pengelolaan hutannya oleh pemerintah kepada 43 perusahaan HPH dan HTI, yang tergabung dalam 24 grup, dan ada 3 perusahaan lain yang berdiri sendiri. Berdasarkan analisis spasial, ada sekitar 6 grup perusahaan dengan penguasaan lahan berkisar antara 6-10% dari total luas izin (6,4 juta hektare) yang diberikan yaitu : KLI Group (632 ribu hektare/10%), RGM Group (549 ribu hektare/8%), Sinar Wijaya (547 ribu hektare/ 8%), Alamindo Grup (460 ribu hektare/7%), Korindo Group (417 ribu hektare/6%), dan Masindo Group (406 ribu hektare/6%).

Sepanjang tahun 2019-2020, sekitar 2,72 juta m³ kayu bulat diproduksi dari hutan alam di Pulau Papua. Sebesar 1.252.407 m³ atau sekitar 46% di antaranya merupakan kayu berjenis merbau, sebagai jenis kayu kelas khusus. Dan dari produksi kayu merbau nasional, sekitar 98% berasal dari hutan alam papua. Kayu-kayu tersebut lebih dari 80% bersumber dari pemanfaatan hasil hutan kayu oleh izin HPH. Sedangkan sumber-sumber lainnya berasal dari IPK/IPPKH/HGU/Perorangan, *Land Clearing* HTI, dan HTI.

Jika dikaitkan antara penguasaan lahan oleh grup dan juga produksi kayu bulat 2019-2020, grup perusahaan yang memiliki izin konsesi yang luas ternyata belum tentu juga melakukan ekstraksi kayu secara besar-besaran. Terutama untuk grup perusahaan HTI di Papua yang baru sebatas izin namun belum banyak melakukan aktivitas seperti grup RGM. Lain halnya dengan grup perusahaan HPH yang memang sudah terbangun, baik aktivitas produksi kayunya maupun industri pengolahan yang juga sudah terintegrasi dan berjarak cukup dekat dengan konsesinya. Contohnya untuk Sinar Wijaya Group dan juga Korindo Group. Selama 2019-2020, Sinar Wijaya mampu mengekstraksi kayu sekitar 772 ribu m³ dari ke 4 HPH nya. Sedangkan Korindo Group memanen kayu sekitar 303 ribu m³ dari 2 konsesi HPH miliknya di Merauke.

PNBP dari ekstraksi kayu dari Pulau Papua pada 2019-2020 mencapai sekitar 298 miliar rupiah untuk PSDH atau berkontribusi sekitar 15% dari total PSDH Nasional, dan sekitar 500 miliar rupiah untuk pungutan DR atau sekitar 17% dari total DR nasional. Dengan adanya skema DBH dimana ada pembagian nilai pungutan baik untuk PSDH dan DR untuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten serta kota/kabupaten lainnya, maka nilai PSDH dan DR yang dipungut tersebut tidak seutuhnya kembali ke daerah lokasi dimana perusahaan berada. Sehingga pada tahun 2019 misalnya, pemerintah provinsi Papua dan Papua Barat hanya mendapatkan nilai PSDH sekitar 77 miliar rupiah dan sekitar 107 miliar untuk DR.

Meskipun deforestasi dan produksi kayu bulat secara nasional pada tahun 2020 turun, namun kontribusi kayu yang diekstraksi dari Pulau Papua terhadap produksi kayu nasional mengalami peningkatan, begitu pula dengan deforestasi yang

terjadi mengalami peningkatan. Hal ini bisa menjadi indikasi kuat bahwa di tahun-tahun mendatang, deforestasi Indonesia akan bergerak ke timur, dimana masih banyak hutan alam yang sudah terbebani izin pengelolaan, baik HPH dan HTI.

Pulau Papua mengalami kenaikan deforestasi, yang terjadi di wilayah HPH dan HTI pada tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2019, total deforestasi yang terjadi di HPH dan HTI adalah 11 ribu hektare mengalami kenaikan menjadi 13 ribu hektare pada tahun 2020. Jika melihat jumlah produksi kayu dan deforestasi yang terjadi, terdapat korelasi antara kenaikan jumlah produksi kayu dengan kenaikan deforestasi. Berdasarkan analisis FWI, grup Sinar Wijaya merupakan kelompok pemilik izin yang wilayahnya paling banyak terdeforestasi, yaitu sekitar 4.701 hektare. Berbanding lurus dengan produksi kayu bulatnya di tahun yang sama. Begitu juga

Hal ini bisa menjadi indikasi kuat bahwa di tahun-tahun mendatang, deforestasi Indonesia akan bergerak ke timur, dimana masih banyak hutan alam yang sudah terbebani izin pengelolaan, baik HPH dan HTI.

untuk grup Korindo yang juga wilayahnya terdeforestasi cukup besar, yaitu sekitar 1.641 hektare. Namun, terdapat juga anomali seperti pada grup Moorim, dimana meski deforestasi di konsesinya tinggi (sekitar 4.625 hektare), namun di periode tersebut produksi kayu bulatnya nol atau tidak ada catatan di sumber data yang tersedia.

Dari sisi kepatuhan unit manajemen HPH dan HTI di Papua dan Papua Barat terhadap SVLK, terdapat 28 unit dari total 46 unit manajemen, atau sekitar 60% yang telah mendapatkan sertifikasi. Hal ini tentunya sangat disayangkan, karena Papua merupakan wilayah penghasil kayu yang cukup signifikan bagi produksi kayu secara nasional, bahkan 98% produksi kayu merbau nasional juga berasal dari Papua. **Hal ini menunjukkan bahwa SVLK yang bersifat *mandatory*, implementasinya belum diterapkan secara penuh bagi seluruh UM.**

Kayu yang dihasilkan dari hutan alam di Pulau Papua dipasok ke industri yang berada di Pulau Papua, dan juga sebagian lainnya ke industri di Pulau Jawa dan Kalimantan. Jika berdasarkan data RPBBI, dan serapan jumlah industri pengolah kayu pada tahun 2020, kayu dari Papua Barat mayoritas atau sekitar 58% diserap oleh industri pengolahan kayu di Papua Barat, 34% diserap oleh industri di Jawa Timur, 4,8% diserap oleh industri di Jawa Tengah dan sisanya diserap industri di Kalimantan Timur. Sedangkan kayu yang berasal dari Papua, mayoritas diserap kebutuhan industri pengolahan di Papua (sekitar 89%), dan sisanya sekitar 11% diserap industri pengolahan di Papua Barat.

Terkait pasar ekspor, pada tahun 2019-2020 kayu asal Papua telah dikirim ke 20 negara dengan nilai ekspor mencapai 277 juta USD. Negara tujuan ekspor kayu dari Papua diantaranya Australia, Arab Saudi, Amerika Serikat, Korea Selatan dan China. Nilai ekspor pada tahun 2020 juga turun sekitar 5 juta USD dibanding tahun 2019, sejalan dengan turunnya produksi kayu bulat di Papua. Dalam kajian ini, kami juga menemukan kendala dalam pelacakan ekspor kayu dari Papua berupa sulitnya menemukan sumber data dari eksportir non-produsen, sedangkan untuk eksportir yang juga produsen, telah tersedia di laman SILK KLHK. Namun temuan baiknya, keseluruhan perusahaan eksportir tersebut sudah mendapatkan sertifikasi SVLK pada periode kajian, maupun perpanjangan sertifikasi kedepan yaitu pada 2022 hingga 2027. Sertifikasi yang telah dilakukan pada industri hilir kehutanan ini diharapkan mampu mendorong tata kelola hutan yang lebih baik dengan meminimalisir celah bagi kayu ilegal masuk dan diperjualbelikan.

Sertifikasi yang telah dilakukan pada industri hilir kehutanan ini diharapkan mampu mendorong tata kelola hutan yang lebih baik dengan meminimalisir celah bagi kayu ilegal masuk dan diperjualbelikan.

72



**Profil
HPH dan
HTI di
Papua**

Artha Graha

Profil Perusahaan

Terdapat dua perusahaan HPH di bawah payung grup Artha Graha (AG) Network di Papua Barat. Pertama PT Papua Satya Kencana (Nomor SK.647/Menhut-II/2009), berlokasi di Kabupaten Teluk Bintuni dengan areal seluas 195.420 hektare. Kedua PT Kurniatama Sejahtera (Nomor SK.648/Menhut-II/2009), berlokasi di Kabupaten Teluk Wondama dengan areal seluas 115.800 hektare. Kedua izin HPH ini dikeluarkan di tanggal yang sama, yaitu pada 15 Oktober 2009 dan berkantor pusat di Gedung Artha Graha Lt. 27, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta. Dengan luasan tersebut, konsesi PT Papua Satya Kencana (PSK) menguasai sekitar 10% luas Kabupaten Teluk Bintuni (1.836.700 hektare), Sedangkan Konsesi PT Kurniatama Sejahtera (KTS) menguasai hampir 8% luas Kabupaten Teluk Wondama (1.449.500 hektare).

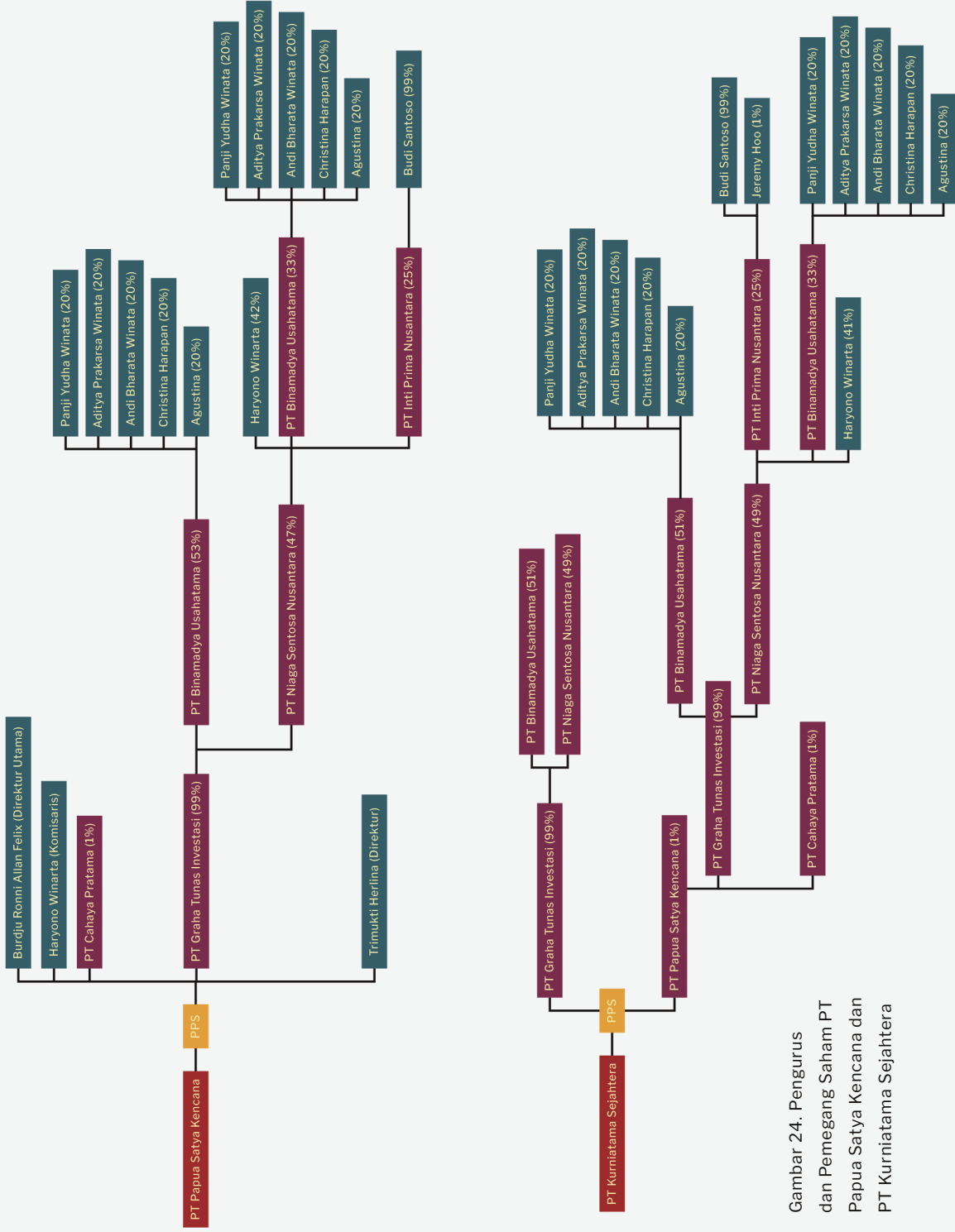
PT KTS telah memiliki sertifikasi PHPL dengan predikat baik dari PT Inti Multima Sertifikasi dengan nomor : IMS-SPHPL-004 yang berlaku sejak 1 Juli 2018 - 30 Juni 2023. Sedangkan PT PSK juga telah memperoleh sertifikat PHPL dengan predikat baik dari PT Mutuagung Lestari dengan nomor: LPHPL-08/MUTU/FM-011, berlaku sejak 6 Januari 2019 - 5 Januari 2024.

Profil Kepemilikan

Artha Graha Grup atau yang sering juga disebut Artha Graha Network (AG Network), adalah kelompok bisnis yang dirintis oleh Tomy Winata (TW). Grup ini bergerak di bidang usaha keuangan, properti, perhotelan dan industri agro. Selain 4 sektor inti, AG Network juga berdiversifikasi ke bisnis lain, yaitu pertambangan, media & hiburan, retail, IT & telekomunikasi dan lainnya²⁰. Dari semua gurita bisnis di atas, ada pula bisnis berupa perusahaan kayu yang ada di Kalimantan Barat dan Papua Barat.

Untuk perusahaan yang terakhir disebutkan di Papua Barat, yaitu PT Kurniatama Sejahtera (PT KTS) dan PT Papua Satya Kencana (PT PSK) dimiliki secara langsung oleh keluarga TW, yakni: Panji Yudha Winata, Aditya Prakarsa, Andi Bharata Winata, Christina Harapan, dan Agustina. Nama lain yang turut menguasai PT KTS dan PT PSK melalui kepemilikan saham mayoritas adalah pengusaha Haryono Winarta²¹ dan menantu TW yaitu Budi Santoso²².

Artha Graha menjadi grup bisnis sukses karena koneksinya dengan pejabat militer. Relasi ini menguntungkan ekspansi imperium bisnis TW dan keuntungan segelintir jenderal. TW didukung tokoh militer membangun fasilitas militer, sekolah, barak, dan mendistribusi barang-barang militer hingga ke Papua²³. TW mendirikan PT Danayasa Arthatama pada tahun 1989 dan bekerjasama dengan Yayasan Kartika Eka Paksi milik Angkatan Darat untuk membangun proyek luar biasa Panglima Besar TKR/TNI dan SCBD yang menghabiskan biaya hingga US\$ 3,25 miliar²⁴. Hingga kini, TW menempatkan pejabat militer dalam posisi strategis perusahaan, misalnya Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri, yang menjabat Komisaris Utama PT Bank Artha Graha²⁵.



Gambar 24. Pengurus dan Pemegang Saham PT Papua Satya Kencana dan PT Kurniatama Sejahtera

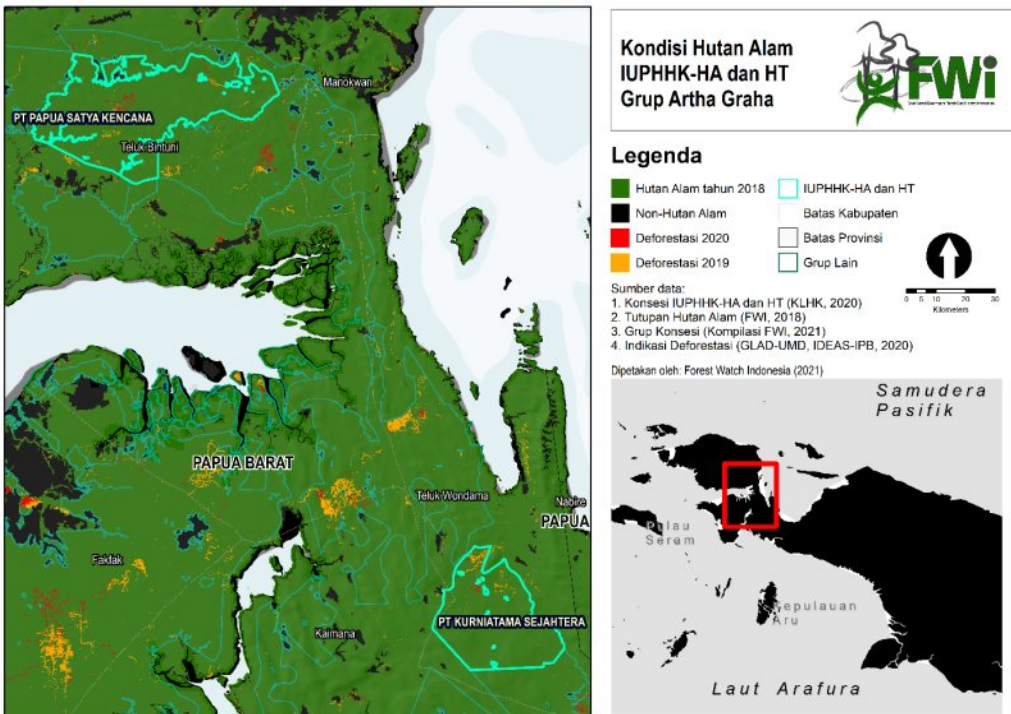
Profil Kondisi Hutan

Grup ini memiliki aktivitas penebangan kayu yang masuk ke kelas sedang pada periode tahun 2019-2020 dengan luasan tutupan hutan alam yang relatif tinggi. Informasi kondisi hutan dapat ditinjau pada tabel di bawah ini.

Luas tutupan hutan alam yang berada di 2 lokasi konsesi ini (PT PSK dan PT KTS), yakni 306,520.42 Ha atau dengan kata lain 98% dari luas kedua konsesi ini masih ditutupi hutan alam. Luas potensi kehilangan hutan alam pada kedua perusahaan ini jika dioperasionalisasikan seluruhnya hampir 25 kali lipat nya dari luas Pulau Bali. Jika dibandingkan dengan luas deforestasi yang terjadi pada 2019 dan 2020 masih terbilang sangat rendah atau sebesar 0.3%. Setelah mendapatkan sertifikat PHPL pada tahun 2019 (PT PSK) dan 2018 (PT KTS) kedua perusahaan ini memungkinkan akan lebih leluasa melakukan operasional kerja setelah lebih dari 10 tahun terhenti. Ke depannya, kehilangan hutan alam dapat diproyeksikan pada kedua perusahaan ini yang bernaung di bawah grup Artha Graha Network.

Deskripsi	Luas (hektare)
Hutan alam tersisa tahun 2020	306.520,42
Deforestasi tahun 2020	448,36
Deforestasi tahun 2019	490,87

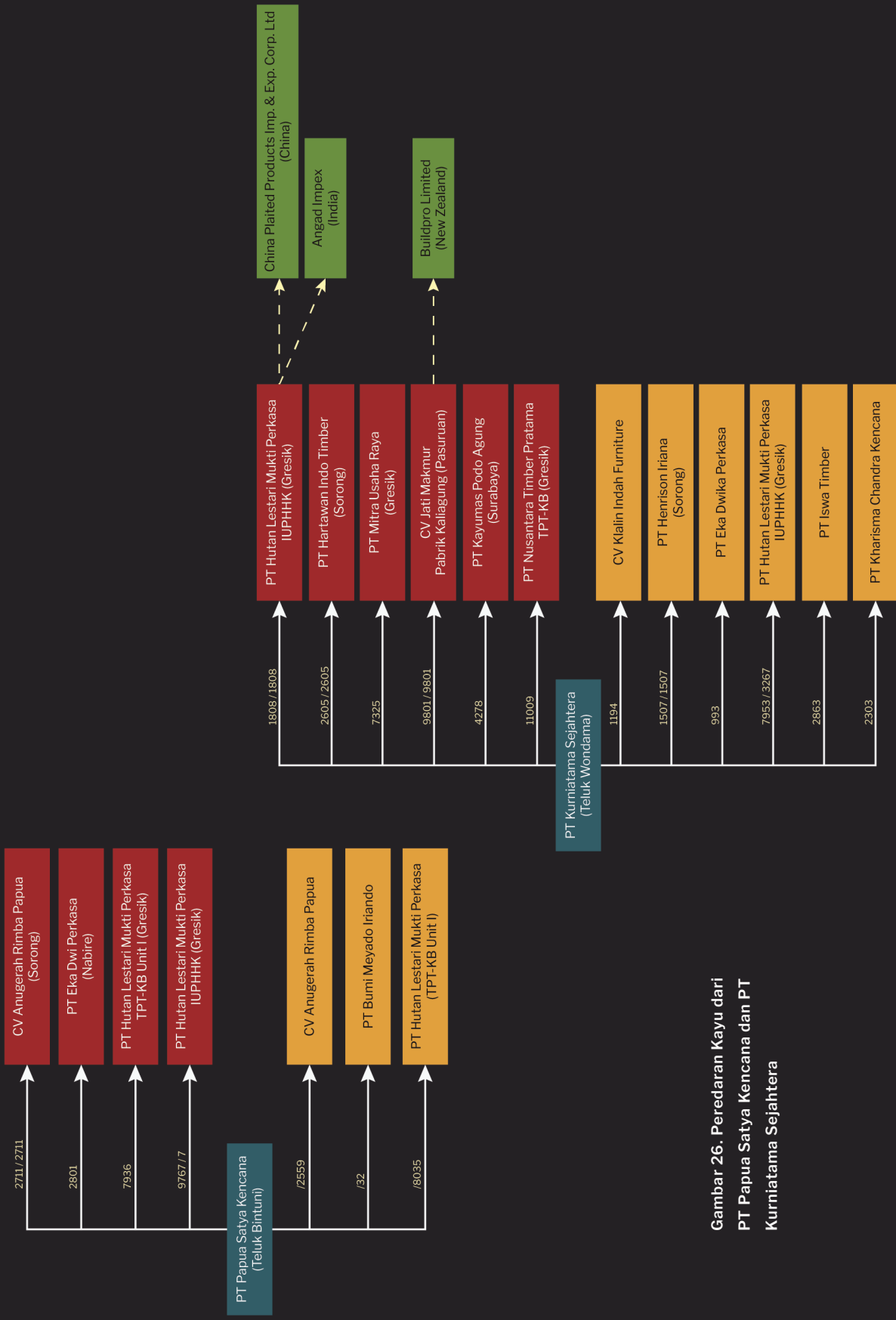
Tabel 13. Tutupan Hutan Alam dan Deforestasi Grup Artha Graha Network



Gambar 25. Peta Kondisi Hutan Alam Grup Artha Graha

Produksi Kayu

Artha Graha Group menghasilkan kayu pada tahun 2020 sebesar 59.195 m³, sementara untuk tahun 2019 tidak ditemukan produksi kayu bulat. Untuk melihat peredaran kayu yang berasal dari grup tersebut, ada 2 sumber informasi yang digunakan, yaitu RPBBI dan Peredaran kayu PHPL. Data dari dua sumber tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 26. Peredaran Kayu dari PT Papua Satya Kencana dan PT Kurniatama Sejahtera

Sumber data dari RBBBI digunakan untuk melihat kebutuhan informasi atas pemenuhan bahan baku yang masuk ke industri dengan kapasitas di atas 6000 m³, sedangkan data dari peredaran kayu PHPL untuk melihat kebutuhan informasi atas pemenuhan bahan baku yang masuk ke industri di atas 6000 m³ dan di bawah 6000 m³.

Pada tahun 2019, PT KTS telah mengirimkan kayunya ke enam industri pengolahan kayu di Papua, Papua Barat, dan Jawa Timur. Dua dari enam perusahaan tersebut berkapasitas di atas 6000 m³, yaitu PT Henrison Iriana (Papua Barat) sebanyak 1.507 m³ dan PT Hutan Lestari Mukti Perkasa/HLMP (Jawa Timur). Menariknya, terdapat perbedaan data jumlah kubikasi kayu yang dilaporkan di RPBBBI (3.270 m³) dan PHPL (7.953 m³) oleh PT KTS untuk PT HLMP atau sebesar 4.683 m³. Selain 2 industri di atas, PT KTS juga mengirimkan kayunya ke industri CV Klalin Indah Furniture (1.194 m³) di Papua Barat, PT Eka Dwika Perkasa (993 m³) di Papua, PT Iswa Timber (2.863 m³) di Jawa Timur dan PT Kharisma Chandra Kencana (2.303 m³) di Papua Barat.

Sedangkan untuk tahun 2020, berdasarkan data RPBBBI, PT KTS mengirimkan kayunya ke PT Hartawan Indo Timber (2.605 m³) di Papua Barat, PT HLMP (1.808 m³) dan CV Jati Makmur Unit Kaliagung (9.081 m³) dimana keduanya ada di Jawa Timur. Kemudian menurut data PHPL tahun 2020, selain tiga pengiriman kayu yang jumlahnya sama dengan data RPBBBI seperti di atas, PT KTS juga mengirimkan kayunya ke PT Kayumas Podo Agung (4.278 m³), PT Mitra Usaha Raya (7.325 m³), dan PT Nusantara Timber Pratama/TPT-KB (11.009 m³) ketiganya juga berada di Jawa Timur.

Sedangkan untuk PT PSK, di tahun 2019 hanya tersedia data dari sumber peredaran kayu PHPL. Tujuan pengiriman kayunya yaitu CV Anugerah Rimba Papua sebanyak 2.302 m³, PT Bumi Meyadi Iriando sebanyak 32 m³, dimana keduanya di Papua Barat dan PT Hutan Lestari Mukti Perkasa (Jawa Timur) sebanyak 9.839 m³. Namun, lagi-lagi ditemukan perbedaan jumlah kubikasi kayu yang dilaporkan untuk PT Hutan Lestari Makmur Perkasa di tahun 2020, data RPBBi menyebutkan bahwa PT PSK hanya mengirimkan kayu sebesar 7 m³ kepada PT HLMP, namun di data PHPL kayu yang dikirimkan tersebut berjumlah 9.766 m³ kayu bulat. Terdapat perbedaan data sekitar 9.760 m³. Adapun industri lain yang menerima kayu dari PT PSK di tahun 2020 adalah PT Eka Dwika Perkasa (2.601 m³) di Papua dan CV Anugerah Rimba Papua sebanyak 2.711 m³ di Papua Barat.

Industri pengolahan kayu yang menerima pasokan dari PT KTS sekaligus melakukan aktivitas ekspor adalah PT HLMP di Gresik, Jawa Timur. Dari data yang kami dapat melalui laman SILK KLHK, diketahui bahwa PT HLMP pada tahun 2020 telah mengekspor kayu Merbau (*Instia sp.*) ke Calcutta (India) sejumlah 85.614 m³ dan Shanghai (China) sejumlah 42.207 m³. Dua perusahaan importir tersebut adalah Angad Impex dan China Plaited Products IMP. & EXP. CORP. LTD. PT HLMP telah memiliki sertifikat legalitas kayu dari PT TRIFOS Internasional Sertifikasi (TRIC) dengan No. TRICIDN-TL-243, dan berlaku dari 23 Desember 2018-22 Desember 2021. Industri lainnya yang melakukan ekspor adalah CV Jati Makmur (pabrik Kaliagung) yang terletak di Pasuruan Jawa Timur. Perusahaan tersebut mengirimkan produk kayu merbau ke Lyttelton (New Zealand) atas nama perusahaan Buildpro Limited sebanyak 17.865 m³. Sedangkan dari data yang kami peroleh, industri-industri yang menerima pasokan kayu dari PT PSK belum melakukan aktivitas ekspor.

ASCO

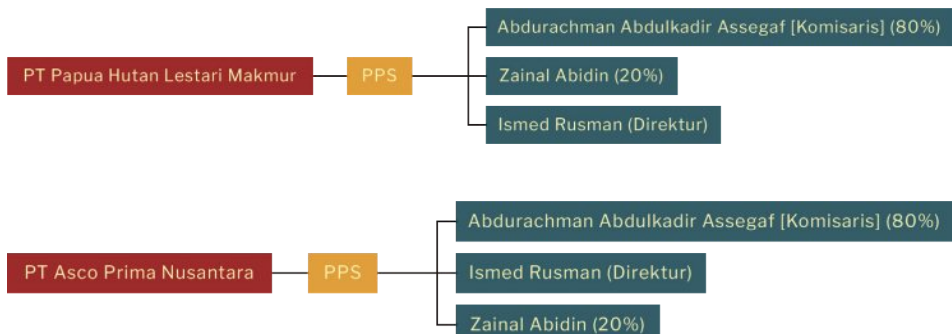
Profil Perusahaan

ASCO Group memiliki 2 unit usaha IUPHHK-HA di Papua dan Papua Barat. Total luas area yang dikuasai oleh ASCO group mencapai 274.780 hektare. Seluas 171.270 hektare atas nama PT Asco Prima Nusantara (APN) di Kabupaten Kaimana, Papua Barat dan 103.510 hektare atas nama PT Papua Hutan Lestari Makmur (PHLM) di Provinsi Papua. Untuk izinnya sendiri, PT APN mendapatkan SK dari Menteri Kehutanan No. SK.82/MENHUT-II/2009, tanggal 5 Maret 2009 dan PT PHLM dengan No. SK.334/Menhut-II/2009 tanggal 15 Juni 2009. PT APN tercatat memegang sertifikat PHPL dengan predikat sedang bernomor: IMS-SPHPL-020 dari PT Inti Multima Sertifikasi yang berlaku dari 31 Mei 2018 sampai dengan 30 Mei 2023. Sedangkan untuk PT PHLM memiliki sertifikat PHPL dengan nomor 009/LPPHPL-018/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 berlaku s.d. 27 Juni 2023 yang diterbitkan oleh PT Transtra Permada.

Profil Kepemilikan

Grup Asco bisa dikatakan sama dengan IFURA karena sama-sama dimiliki oleh Abdurachman Assegaf. Di website IFURA juga menjelaskan bahwa PT APN dan PT PHLM merupakan dua konsesi HPH yang terafiliasi²⁶ dengan mereka. Meskipun nama Abdurachman Assegaf sama sekali tidak dicantumkan di website perusahaan, namun nama tersebut adalah pemegang saham terbesar untuk kedua perusahaan, kepemilikan sebesar 80% saham. Dan 20% sisanya dimiliki oleh Zainal Abidin. IFURA, atau yang sebelumnya merupakan CV Jati Karya, didirikan pada tahun 1924 oleh keluarga Abdurachman Assegaf, beliau merupakan generasi ketiga keluarga yang juga menjabat sebagai direktur sekaligus pemilik perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan produk pengerjaan kayu di Pasuruan.

82



Gambar 27. Pengurus dan Pemegang Saham PT Papua Hutan Lestari Makmur dan PT Asco Prima Nusantara

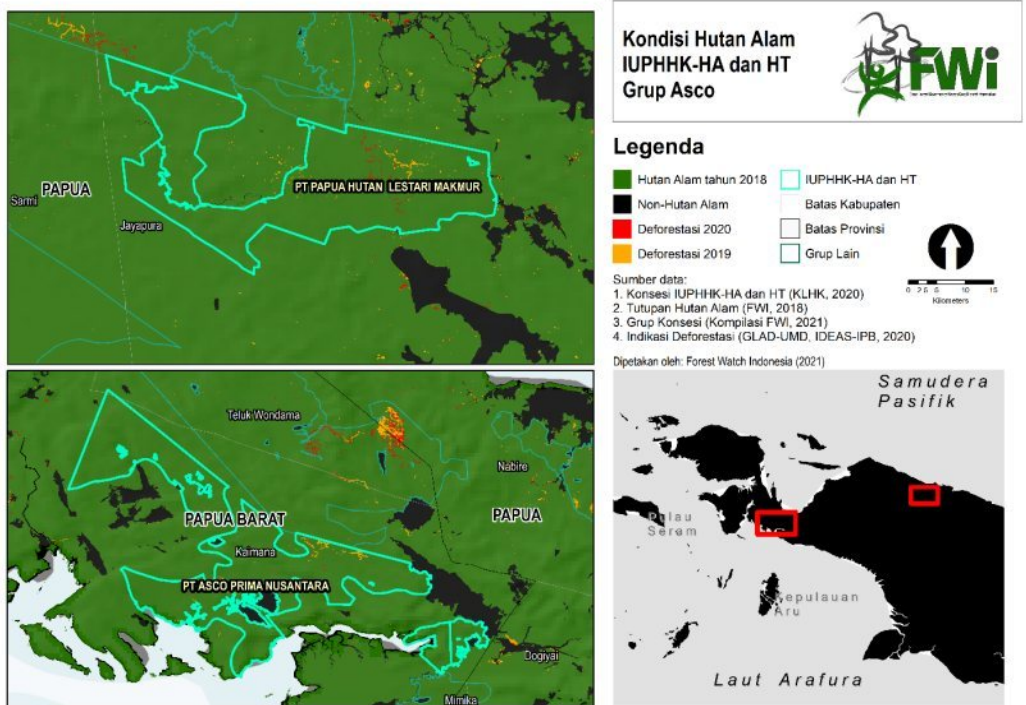
Profil Kondisi Hutan

Grup ini memiliki aktivitas penebangan kayu yang rendah pada periode tahun 2019-2020 dengan luasan tutupan hutan alam yang relatif masih tinggi. Informasi kondisi hutan dapat ditinjau pada tabel di bawah ini.

Luas tutupan hutan alam yang berada di 2 lokasi konsesi ini (PT APN dan PT PHLM), yakni 261,568.6 hektare atau dengan kata lain 95% dari luas kedua konsesi ini masih ditutupi hutan alam. Luas potensi kehilangan hutan alam pada kedua perusahaan ini jika dioperasionalkan seluruhnya, lebih dari 21 kali lipat luas Pulau Bali. Jika dibandingkan dengan luas deforestasi yang terjadi pada 2019 dan 2020, masih terbilang sangat rendah atau hanya 0.2%. Setelah mendapatkan sertifikat PHPL pada tahun 2018 (PT APN dan PT PHLM), kedua perusahaan ini kemungkinan akan lebih leluasa melakukan operasional kerja, setelah sempat lebih dari 10 tahun terhenti. Ke depannya, kehilangan hutan alam dapat diproyeksikan pada kedua perusahaan yang bernaung di bawah ASCO Group.

Deskripsi	Luas (hektare)
Hutan alam tersisa tahun 2020	261.568,6
Deforestasi tahun 2020	221,84
Deforestasi tahun 2019	378,1

Tabel 14. Tutupan Hutan Alam dan Deforestasi Grup Asco



Gambar 28. Peta Kondisi Hutan Alam Grup Asco

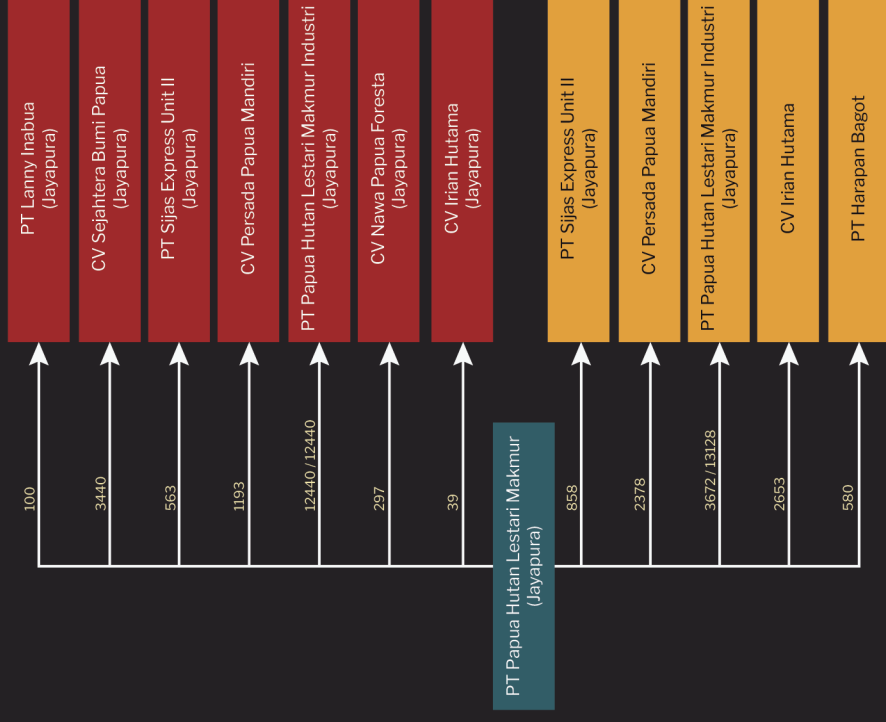
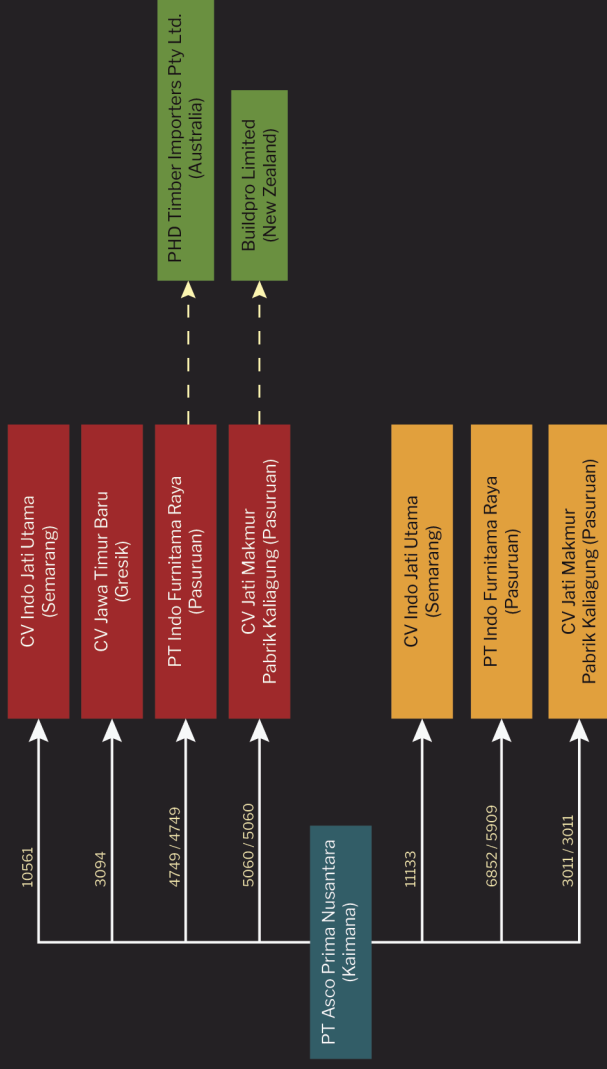
Produksi Kayu

Berdasarkan data RPBBI online dan Dirjen PHPL yang tersedia, diketahui bahwa selama tahun 2019 dan 2020, PT PHLM telah menghasilkan kayu bulat sebanyak 17.195 m³ dan 15.516 m³, sedangkan PT APN sebanyak 22.675 m³ dan 7.978 m³. Menurut data RPBBI tahun 2019, PT PHLM mensuplai industri pengolahan kayu milik PT PHLM sendiri (terintegrasi) sebanyak 3.672 m³, dan sisanya (merujuk pada data PHPL) dikirimkan ke industri CV Irian Utama (2.653 m³), CV Persada Papua Mandiri (2.379 m³), PT Harangan Bagot (540 m³), PT Sijas Express Unit II (858 m³) dan Industri Milik PHLM sendiri yaitu 13.128 m³. Terdapat selisih sekitar 9.456 m³ kayu yang diterima industri PHLM, jika melihat data RPBBI dan PHPL diatas.

Untuk tahun 2020, data RPBBI dan PHPL mencatat angka yang sama terkait kayu yang diterima oleh industri PT PHLM, yaitu 12.440 m³. Selain itu, kayu dari HPH PT PHLM juga masuk ke industri CV Irian Utama sebanyak 36 m³, CV Nawa Papua Foresta 297 m³, CV Persada Papua Mandiri 1.191 m³, CV Sejahtera Bumi Papua 3.440 m³, PT Lanny Inabua 100 m³, dan PT Sijas Express Unit II sebanyak 563 m³.

PT APN yang terletak di Kaimana, Papua Barat, dapat mengirimkan kayunya ke industri di luar daerah, dan mayoritas mengirimkan kayunya ke Jawa Timur. Pada tahun 2019, data RPBBI mencatat adanya kayu yang diterima oleh CV Jati Makmur unit Kaliagung sebesar 3.011 m³ dan PT IFURA sebesar 5.909 m³. Data PHPL juga memperlihatkan angka yang sama untuk kayu yang diterima CV Jati Makmur (3.011 m³), namun berbeda angka yang terima oleh PT IFURA (6.852 m³), atau ada selisih 942 m³. Sisa kayunya diterima oleh industri CV Indo Jati Utama di Jawa Tengah sebesar 11.133 m³.

Untuk tahun 2020, kayu dari PT APN tercatat di RPBBI masuk ke industri PT IFURA (4.749 m³) dan CV Jati Makmur Unit Kaliagung (5.060 m³). Data PHPL juga mencatat angka yang sama untuk CV Jati Makmur (5.060 m³), sisanya diterima oleh CV Jawa Timur Baru (3.094 m³) dan CV Indo Jati Utama (10.561 m³). Terkait perdagangan ekspor produk kayu, lewat laman SILK KLHK kemudian tercatat bahwa pada periode penerimaan kayu dari HPH PT APN, industri PT IFURA tercatat melakukan ekspor produk kayu (merbau) ke Brisbane (Australia) sebanyak 74.938 m³ dengan tujuan P.H.D Timbers Importers PT LTD. Sedangkan industri lainnya yang juga melakukan ekspor adalah CV Jati Makmur Unit Kaliagung, yang tercatat melakukan pengiriman produk kayu (merbau) ke Lyttelton (New Zealand) sebanyak 17.865 m³ dengan tujuan importir Buildpro Limited.

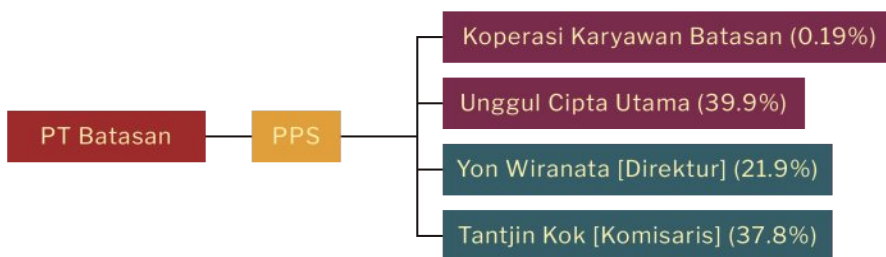


Gambar 29. Peredaran Kayu dari PT Papua Hutan Lestari Makmur dan PT Asco Prima Nusantara

Batasan

Profil Kepemilikan

Kepemilikan saham PT Batasan dikuasai oleh Tan Tjin Kok dan Yon Wiranata/Suryadi Wiranata. Selain memiliki izin HPH di Papua, PT Batasan juga memiliki izin HPH di Sintang (SK. Menhut Nomor 416/Menhut-II/2004 tanggal 19 Oktober 2004), Kalimantan Barat dan Pabrik Plywood di Tanjung Pura Indah Comp. Blok H/10-11, Pontianak, Kalimantan Barat. Kedua nama tersebut di atas juga menempati jabatan sebagai komisaris dan direktur utama di PT Batasan, namun informasi lainnya belum diketahui.



Gambar 30. Pengurus dan Pemegang Saham PT Batasan

Profil Perusahaan

PT Batasan berada di Kabupaten Keerom provinsi Papua. Perusahaan ini mendapatkan izin dari KLHK (Departemen kehutanan pada saat itu) dengan No 342/Kpts-II/97 seluas 106.643 hektare yang izinnnya habis pada tahun 2017, kemudian dilakukan perpanjangan izin pada tahun 2018 dengan No 436/MenLHK/Setjen/HPL.0/10/2018 seluas 79.572 hektare. Selama 20 tahun lebih beroperasi, perusahaan ini belum memiliki sertifikat PHPL dan memiliki sertifikat VLK pada tahun 2014 dengan no 24/A-SERT-VLK/XI/2014 yang berlaku sampai dengan 13 November 2017 dan direvisi pada penilikan kedua lewat SLK.24/ASERT/LVLK-011-IDN dengan status Terpelihara, dan berlanjut dinyatakan “MEMENUHI” standar legalitas kayu. Sertifikat ini didapatkan dari lembaga sertifikasi PT Ayamaru Sertifikasi.

Kemudian setelah mendapatkan izin perpanjangan pada tahun 2018, PT Batasan mendapatkan sertifikat VLK No 097/BWI-SLK dari lembaga sertifikasi PT Borneo Wanajaya Indonesia dan dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu dengan status Terpelihara dan Berkelanjutan yang berlaku dari 13 Agustus 2019 sampai sampai dengan 12 Agustus 2022. Sampai dengan tahun 2021 PT Batasan sudah melakukan 2 kali penilikan.

Profil Kondisi Hutan

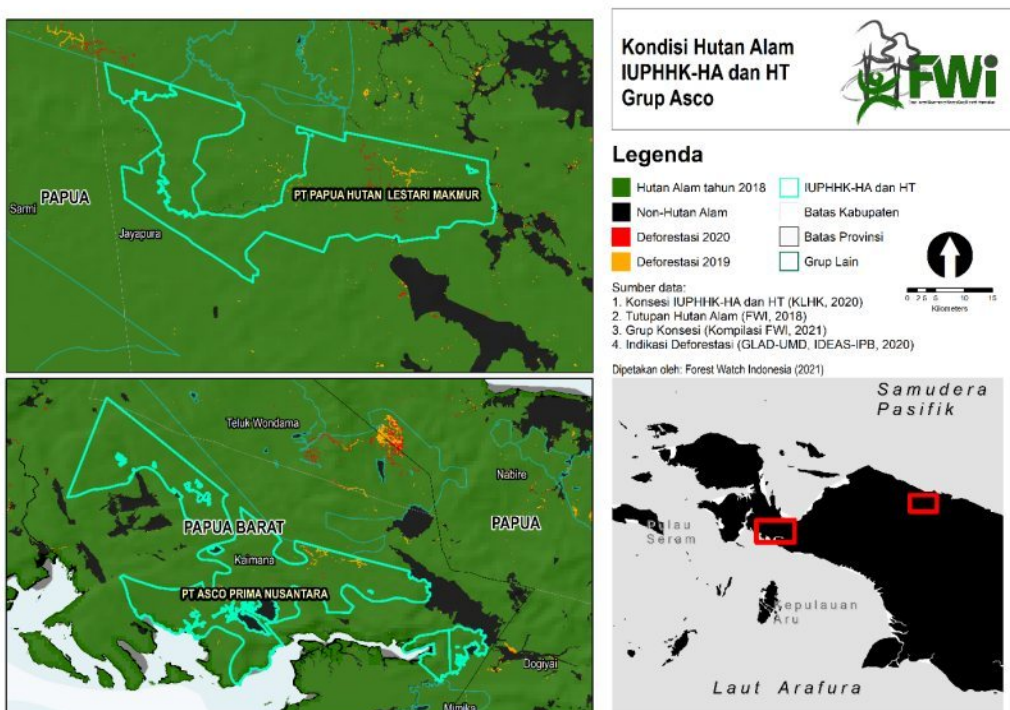
Grup ini memiliki aktivitas penebangan kayu yang relatif rendah pada periode tahun 2019-2020 dengan luasan tutupan hutan alam yang relatif rendah. Informasi kondisi hutan dapat ditinjau pada tabel di bawah.

Luas tutupan hutan alam yang berada di PT Batasan, yakni 78,324.19 hektare atau dengan kata lain 98% dari luas konsesi PT Batasan masih ditutupi hutan alam. Luas potensi kehilangan hutan alam pada perusahaan HPH ini jika dioperasionalisasikan seluruhnya lebih dari 6 kali lipatnya dari luas Pulau Bali. Jika dibandingkan dengan luas deforestasi yang terjadi pada 2019 dan 2020 masih terbilang sangat rendah atau sebanyak 0.7%. Setelah mendapatkan sertifikat VLK yang berlaku sejak tahun 2019,

perusahaan ini memungkinkan akan lebih leluasa melakukan operasional kerja sebagai perusahaan HPH. PT Batasan yang telah mengalami perpanjangan izin setelah beroperasi selama 30 tahun di Provinsi Papua kemudian diperpanjang dengan pengurangan luas konsesi sebesar 27 ribu Ha. Sebagai inti bisnis perusahaan HPH adalah pemanfaatan hutan alam, maka rekam jejak perusahaan ini sangat berkaitan dengan proyeksi kehilangan hutan alam di Provinsi Papua.

Deskripsi	Luas (hektare)
Hutan alam tersisa tahun 2020	78.324,19
Deforestasi tahun 2020	221,84
Deforestasi tahun 2019	378,1

Tabel 15. Tutupan Hutan Alam dan Deforestasi Grup Batasan



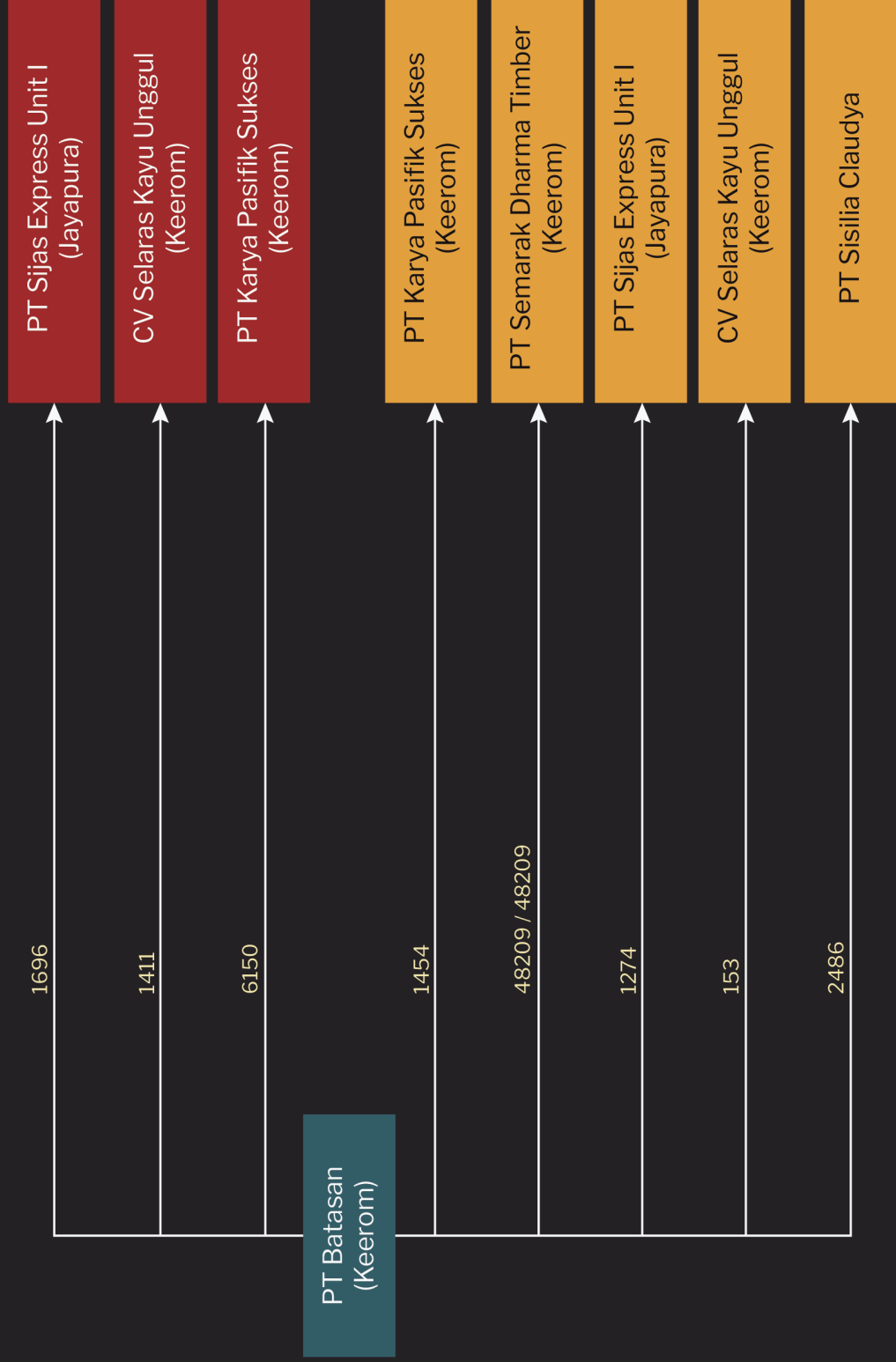
Gambar 31. Peta Kondisi Hutan Alam Grup Batasan

Produksi Kayu

Pada tahun 2019 dalam sistem produksi kayu bulat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari tercatat bahwa PT Batasan memproduksi kayu bulat 2.790,98 m³. Sementara catatan data dalam sistem PHPL mengenai peredaran kayu perusahaan ini mengirimkan kayu kepada industri pengolahan kayu sebanyak 53.576,02 m³. Dalam data PNPB tahun 2019 untuk pembayaran PSDH PT Batasan membayar sejumlah Rp 5.995.658.350 dengan jumlah volume kayu 33.245,87 m³.

Industri-industri yang menerima kayu dari PT Batasan ini adalah PT Semarak Dharma Timber sebanyak 48.208,67 m³ (sama dengan yang tercatat di RPBBI), CV Selaras Kayu Unggul sebanyak 153,12 m³, PT Karya Pasifik Sukses sebanyak 1.453,85 m³, PT Sijas Express Unit I sebanyak 1.273,98 m³ dan PT Sisilia Claudya sebanyak 2.486,40 m³. Sedangkan produksi kayu bulat yang dihasilkan oleh PT Batasan pada tahun 2020 sebesar 8.816,44 m³. Pada catatan sistem peredaran kayu bulat PHPL, perusahaan ini mengirimkan kayu sebanyak 9.257,8 m³ kepada tiga industri pengolahan kayu di Papua, yaitu CV Selaras Kayu Unggul sebanyak 1.411,46 m³, PT Karya Pasifik Sukses sebanyak 6.149,985 m³, PT Sijas Express Unit I sebanyak 1.696,36 m³. Dalam sistem RPBBI di atas 6000 m³, tidak terdapat industri yang menerima kayu dari PT Batasan.

Berdasarkan data yang didapatkan mengenai tujuan ekspor kayu pada tahun 2020, tidak ada informasi dalam sistem SILK yang menyebutkan industri-industri pengolahan kayu yang menerima kayu dari PT Batasan melakukan ekspor kayu secara langsung.



Gambar 32. Peredaran Kayu dari PT Batasan

Bintuni Utama Murni Wood Industri

Profil Perusahaan

PT Bintuni Utama Murni Wood Industries (disingkat PT BUMWI) didirikan pada tanggal 1 Februari 1980. PT BUMWI adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, khususnya pemanfaatan dan pengolahan kayu bakau-bakauan/*Rhizophoraceae* (mangrove). Izin Pemanfaatan (HPH/IUPHHK) didasarkan atas SK HPH nomor 174/Kpts-IV/1988 tertanggal 21 Maret 1988, dengan adendum Nomor 94/Kpts-II/1995 tanggal 13 Februari 1995, berlaku selama 20 tahun, dengan perpanjangan melalui Nomor: SK. 213/MENHUT-II/2007 tanggal 28 Mei 2007 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2052 (45 tahun) atas areal seluas 82.120 hektare yang terletak di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat.

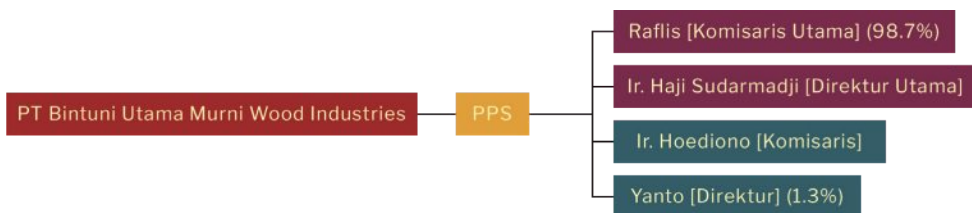
PT BUMWI juga memiliki industri pengolahan sendiri, berdasarkan izin pengolahan (industri) Nomor: 4010/MENHUT-VI/BPPHH/2005, yang mengolah kayu bakau-bakauan tersebut menjadi *woodchip* yang diekspor ke Jepang, Taiwan, dan RRC, sebagai bahan baku pulp kertas. Kapasitas produksi industri pengolah chip PT BUMWI mencapai hampir 200 ribu m³/tahun. Sejak dimulainya produksi di tahun 1988, PT BUMWI telah mengekspor sekitar 2.9 juta ton *woodchip*²⁷.



Pengakuan pengelolaan hutan mangrove secara lestari dari lembaga independen dibuktikan dengan terbitnya Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) berpredikat Baik pada tahun 2016, yang diterbitkan oleh Sarbi International Certification. Sertifikat VLK yang bersifat *mandatory* pun sudah didapatkan di awal tahun 2016. Begitu pun juga sertifikasi legalitas kayu internasional (*Legal Harvest Verification*) dari SCS Global Services. Di tahun 2015, PT BUMWI mendapatkan sertifikasi FSC® Forest Management (FSC-C126506) dengan dukungan dari TBI (*The Borneo Initiatives*) dan WWF/GFTN.

Profil Kepemilikan

Mengacu dari data AHU Kemenkumham RI, PT BUMWI mayoritas sahamnya dikuasai oleh Raflis (98%) yang sekaligus menjabat sebagai komisaris utama. Menurut informasi di laman resmi perusahaan, Raflis juga pernah menjabat sebagai direktur utama. Saat ini, Raflis menjadi pemegang saham mayoritas di perusahaan, namun belum ada informasi lebih rinci tentang siapa pemilik sebenarnya dari PT BUMWI. Hal lain yang mungkin menarik adalah adanya indikasi keterkaitan antara PT BUMWI dengan Marubeni di Jepang. Karena selain PT BUMWI mengekspor produksi *woodchip* ke Jepang, laporan investigasi terdahulu²⁸ juga banyak menyebutkan keterkaitan antara 2 perusahaan ini.



Gambar 33. Pengurus dan Pemegang Saham PT Bintuni Utama Murni Wood Industries

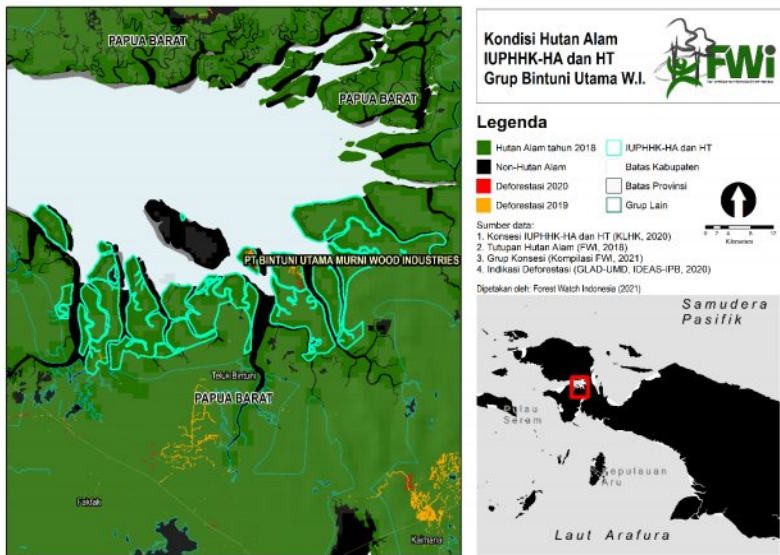
Profil Kondisi Hutan

Grup ini memiliki aktivitas penebangan kayu yang rendah pada periode tahun 2019-2020 dengan luasan tutupan hutan alam yang relatif rendah. Informasi kondisi hutan dapat ditinjau pada tabel di bawah ini.

Luas tutupan hutan alam yang berada di PT BUMWI, yakni 68.587,9 hektare atau dengan kata lain 84% dari luas konsesi PT BUMWI masih ditutupi hutan alam. Luas potensi kehilangan hutan alam pada perusahaan HPH ini jika dioperasionalkan seluruhnya lebih dari 5 kali lipat luas Pulau Bali. Jika dibandingkan dengan luas deforestasi yang terjadi pada 2019 dan 2020, terbilang tinggi atau sebanyak 1.1%²⁹. Setelah mendapatkan berbagai pengakuan seperti sertifikasi PHPL, sertifikat VLK, *Legal Harvest Verification*, dan sertifikasi FSC, perusahaan ini memiliki kemungkinan lebih leluasa melakukan operasional kerja sebagai perusahaan HPH di Papua Barat. Terlebih, perusahaan ini telah beroperasi sejak 1988 dan berakhir izin hingga 2052, yang memungkinkan untuk melakukan pemanfaatan hutan mangrove di Teluk Bintuni secara masif. Inti bisnis perusahaan HPH ini adalah pemanfaatan hutan alam mangrove, maka rekam jejak perusahaan ini sangat berkaitan dengan proyeksi kehilangan hutan alam di Provinsi Papua Barat.

Deskripsi	Luas (hektare)
Hutan alam tersisa tahun 2020	68.587,9
Deforestasi tahun 2020	558,94
Deforestasi tahun 2019	254,6

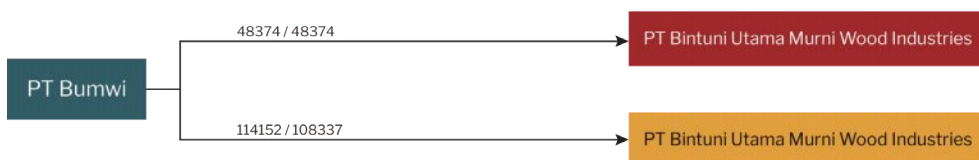
Tabel 16. Tutupan Hutan Alam dan Deforestasi
Grup Bintuni Utama Murni Wood Industri



Gambar 34. Peta Kondisi Hutan Grup Bintuni Utama Wood Industries

Produksi Kayu

Produksi kayu bulat PT BUMWI pada tahun 2019 dan 2020 adalah sebanyak 113.643 m³ dan 43.469 m³. PT BUMWI tercatat hanya memasok kayunya ke industri milik mereka sendiri (terintegrasi). Dari hasil produksi tersebut, data RPBBI mencatat bahwa pada tahun 2019, industri PT BUMWI mendapatkan pasokan bahan baku sebanyak 114.152 m³, sementara data PHPL mencatat sebanyak 108.337 m³. Sedangkan pada tahun 2020, data RPBBI dan PHPL mencatat jumlah yang sama, yaitu sebanyak 48.374 m³. Terkait tujuan ekspor kayu pada tahun 2020, tidak ada informasi dalam sistem SILK yang menyebutkan bahwa industri PT BUMWI melakukan ekspor ke luar negeri.



Gambar 35. Peredaran Kayu dari PT Bintuni Utama Wood Industries

BUMI TEKNOKULTURA UNGGUL

Profil Perusahaan

Unit Usaha grup BTEK di bidang pembalakan kayu adalah PT Bangun Kayu Irian (SK.623/Menhut-II/2014, tanggal 14 Juli 2014) dan PT Mitra Pembangunan Global (SK.714/Menhut-II/2009, tanggal 19 September 2009). Dua perusahaan tersebut terletak di Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat. Luas izin konsesi PT BKI adalah 139.970 hektare dan PT MPG seluas 83.950 hektare. Kedua konsesi ini menguasai lahan seluas 223.920 hektare atau sama dengan 2.239 km², yaitu hampir 30% luas daratan Kabupaten Sorong Selatan yang luasnya 7.790 km².

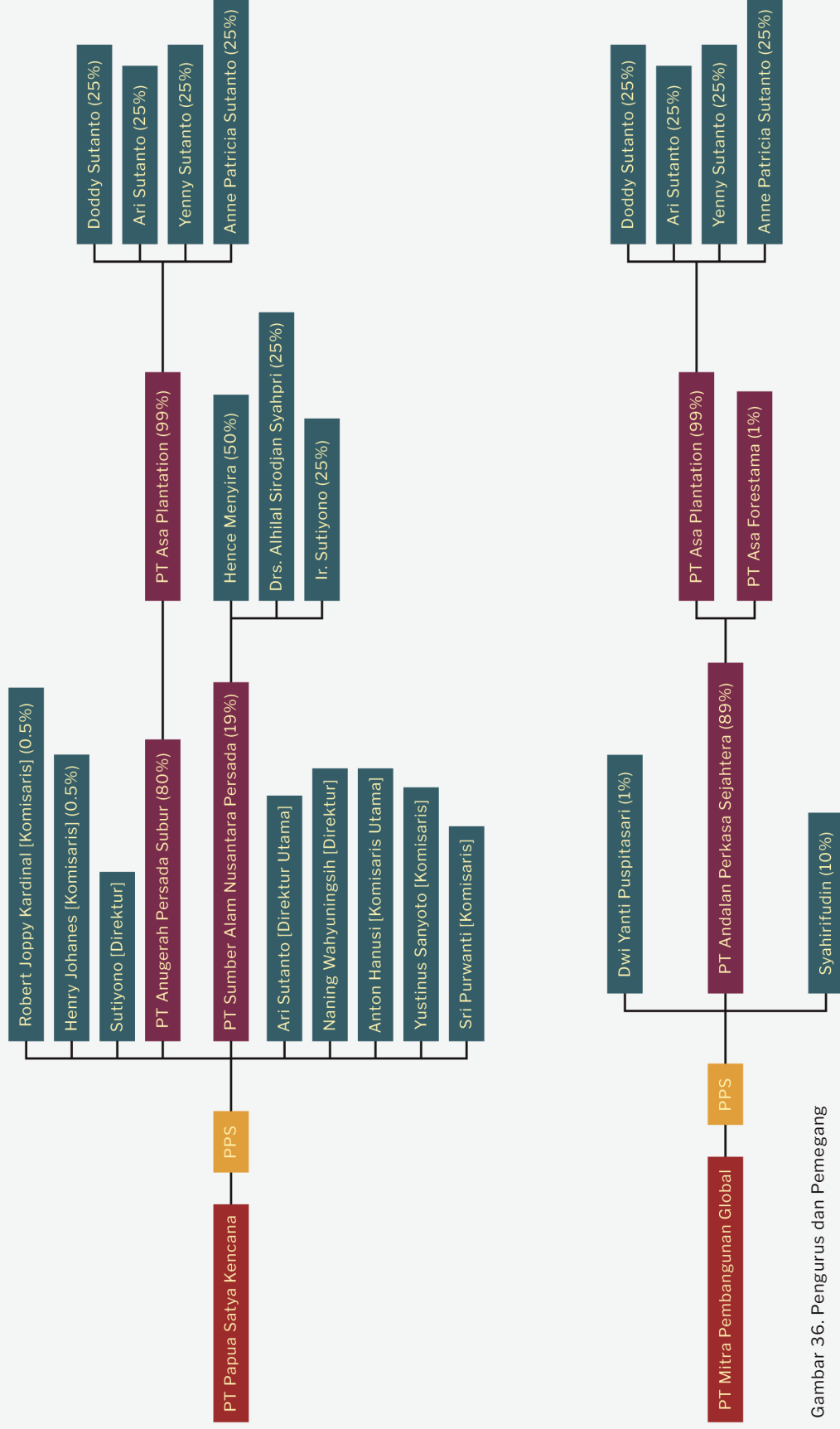
PT BKI telah memiliki sertifikat legalitas kayu dari PT Lambodja Sertifikasi dengan nomor: Laser/LK-IUPHHK-HA/79 yang berlaku sejak 16 Juni 2021-15 Juni 2024. Sedangkan berdasarkan hasil keputusan LVLK Garda Mutu Prima, Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) IUPHHK-HA PT Mitra Pembangunan Global dengan nomor GMP/2019/10005 dicabut karena tidak adanya kepastian pelaksanaan penilikan hingga akhir masa pembekuan.

Profil Kepemilikan

PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk. (BTEK) adalah perusahaan yang didirikan pada 6 Juni 2001 dengan bidang usaha yang dijalankan meliputi produksi kayu bulat, jasa pembalakan kayu, tanaman hias, lemak kakao, dan padatan kakao. Berdasarkan laporan tahunan perusahaan tahun 2019³⁰, bidang usaha yang dijalankan PT BTEK saat ini adalah: Real estate dan Konstruksi, Aktivitas jasa, Perdagangan, Industri, Pertambangan, Perkebunan, Pertanian dan Penguasaan hutan dan Jasa Penunjang Kehutanan. Kantor Pusat Perusahaan beralamat di Rukan Komplek Permata Senayan, Blok E No. 38 Jl. Tentara Pelajar Jakarta Selatan 12210, sedangkan lokasi kegiatan usaha berada di Jl. Raya Serang Km. 68 Desa Julang, Cikande, Serang, Banten, Indonesia.

Berdasarkan surat dari PT Ficomindo Buana Registrar, Biro Administrasi Efek, No 01/BTEK-FBR/I/2020 tanggal 06 Januari 2020, Susunan kepemilikan saham Entitas per tanggal 31 Desember 2019 PT BTEK dimiliki mayoritas oleh publik (58,4%) dan 41,6% dimiliki oleh HSBC Singapore. Sedangkan untuk kepemilikan saham di PT Bangun Kayu Irian mayoritas dimiliki oleh keluarga Sutanto (Doddy Sutanto, Ari Sutanto, Yenny Sutanto dan Anne Patricia Sutanto), lewat anak perusahaan PT Asa Plantation. Begitu pun dengan PT Mitra Pembangunan Global yang 99% kepemilikan sahamnya dikuasai keluarga Sutanto.

Dari nama-nama tersebut di atas, Yenny dan Anne juga memiliki jabatan di grup BTEK yaitu sebagai komisaris komisi dan juga direktur utama. Sutanto merupakan kerabat Handiman Tjokrosaputro yang merupakan ayah dari Benny Tjokrosaputro (Bentjoek) yang belakangan terjerat kasus jiwasraya. Anne Patricia Sutanto, juga menjabat sebagai Presdir Pancaprima Ekabrothers dan Wakil Presdir PT Pan Brothers TBK (PBRX). Selain memang tenar karena sering muncul di publik, nama Anne belakangan juga mencuat karena menjadi saksi kasus Jiwasraya yang melibatkan sepupunya, Bentjoek. Sepuluh rekening Anne juga ikut disita kejagung akibat pemeriksaan kasus TPPU Jiwasraya ini³¹.



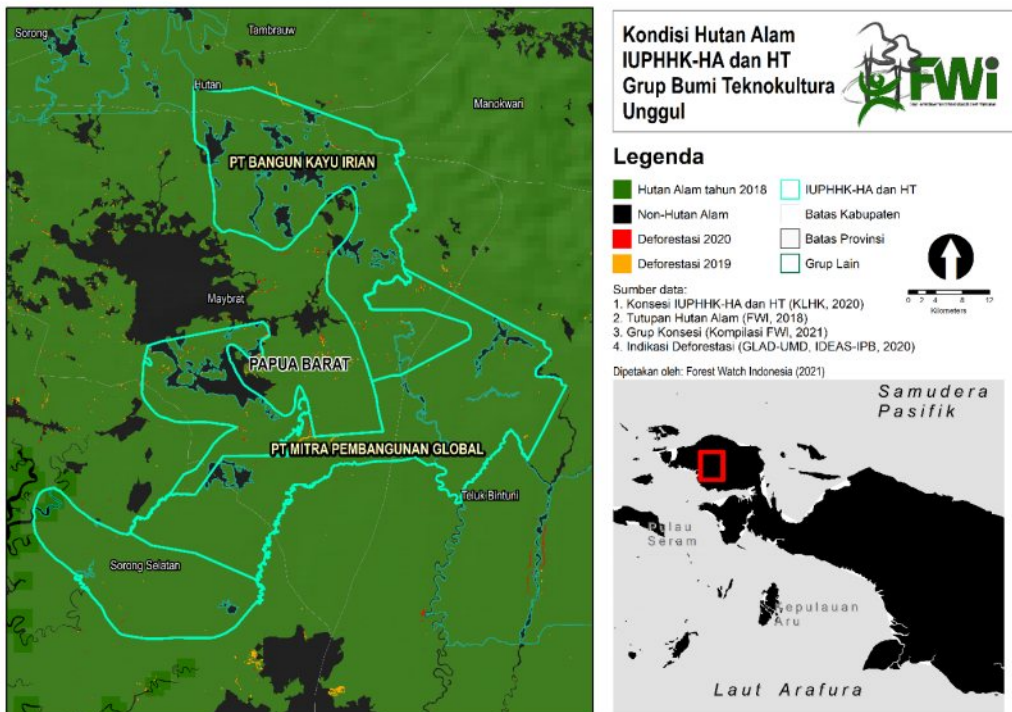
Gambar 36. Pengurus dan Pemegang Saham PT Bangun Kayu Irian dan PT Mitra Pembangunan Global

Profil Kondisi Hutan

Grup ini memiliki aktivitas penebangan kayu yang rendah pada periode tahun 2019-2020 dengan luasan tutupan hutan alam yang relatif rendah. Informasi kondisi hutan dapat ditinjau pada Tabel berikut.

Deskripsi	Luas (hektare)
Hutan alam tersisa tahun 2020	208.022,97
Deforestasi tahun 2020	258,86
Deforestasi tahun 2019	162,48

Tabel 17. Tutupan Hutan Alam dan Deforestasi Grup Bumi Teknokultura Unggul



Gambar 37. Peta Kondisi Hutan Grup Bumi Teknokultura Unggul

Produksi Kayu

Selama periode bulan Juni 2020-Mei 2021, PT BKI belum melakukan kegiatan pengiriman kayu dari TPK Hutan ke luar areal atau tujuan industri, sehingga belum diterbitkannya dokumen angkutan kayu SKSHHK secara *online* di SIPUHH. Namun PT BKI telah membayarkan kewajiban PSDH dan DR terhadap kayu yang telah di LHP berupa bukti setor ke bank dan dokumen SIPUHH Online yaitu Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (BPNBP) pada periode bulan April 2021.

Berdasarkan data yang tersedia di RPBBI Online maupun dirjen PHPL tahun 2019, PT MPG tidak mengirimkan kayu bulatnya ke industri di atas 6000 m³, dan hanya mengirimkan kepada industri antara 2000-6000 m³ di Kota Gresik yaitu PT Wijaya Loka Nusantara (4.550 m³) dan TPT KB PT Gema Lestari Indonesia (9.147 m³). Sedangkan pada tahun 2020, PT MPG melakukan pengiriman kayu ke PT Kayu Merapi Internusa (3.477 m³), di mana data jumlah kubikasi kayu antara yang ada di RPBBI Online maupun Dirjen PHPL sama. Dan pengiriman lagi ke TPT KB PT Gema Lestari Indonesia sebanyak 5.560 m³.

Melalui PT Kayu Merapi Internusa inilah, kayu-kayu dari hutan alam yang salah satunya berasal dari Papua Barat diekspor ke luar negeri. Dari data yang kami peroleh, PT KMI mengirimkan kayu jenis Bangkirai sebanyak 27.373 m³ kepada Tradelink Wood Products LTD di Israel dan 27.000 m³ kepada LTL Wood Product BV di Belanda.



Gambar 38. Peredaran Kayu dari PT Mitra Pembangunan Global

Ciptana

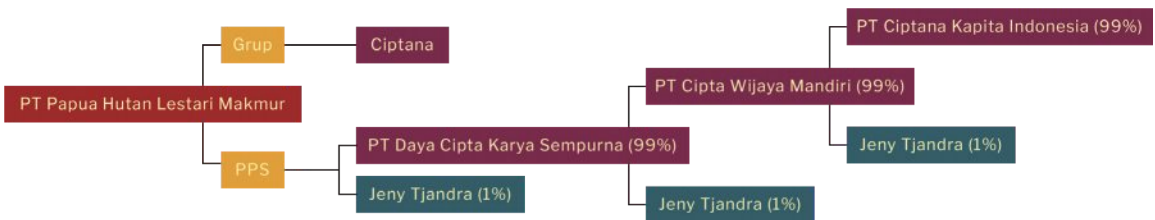
Profil Perusahaan

Perusahaan pembalakan kayu di bawah Ciptana Group adalah PT Mondialindo Setya Pratama (PT MSP). PT MSP telah mengantongi izin IUPHHK-HA sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.466/Menhut-II/2006 tanggal 19 September 2006 dengan Luas ±94.800 hektare dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK 120/Menlhk/setjen/PLA.2/2/2018 tanggal 28 Februari 2018 dengan luas 94.568,79 hektare, dan No. SK.875/Menlhk/Setjen/HPL.0/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019 dengan luas 94.568,79 hektare yang berlokasi di Kabupaten Sarmi Provinsi Papua.

PT MSP telah memperoleh sertifikat PHPL berpredikat baik dengan nomor: 46-SIC-04.01 dari PT Sarbi International Certification (SIC) sejak 24 Mei 2018 dan telah diamandemen pada 21 Mei 2021 sehingga sertifikat ini berlaku hingga 23 Mei 2024.

Profil Kepemilikan

Ciptana Group atau yang dahulu bernama UD. Wijaya Pratama didirikan oleh Bapak Sudarsono Chandrawidjaja pada tahun 1993. Perusahaan ini sekarang terletak di Jl. Raya Semarang – Purwodadi Km 16,5. Mranggen, Demak, Jawa Tengah. Bergerak di bidang produksi plywood, veneer, decking, dan kayu gergajian dengan nama produk CIPTANA. Perusahaan yang terdaftar di AHU Kemenkumham untuk Ciptana Group adalah PT Cipta Wijaya Mandiri, yang sahamnya dimiliki sebagian kecil oleh PT Ciptana Kapita Indonesia dan Mayoritas dikuasai oleh Jenny Tjandra Widjaja. Beliau juga menjabat sebagai komisaris di perusahaan tersebut.



Gambar 39. Pengurus dan Pemegang Saham PT Mondialindo Setya Pratama

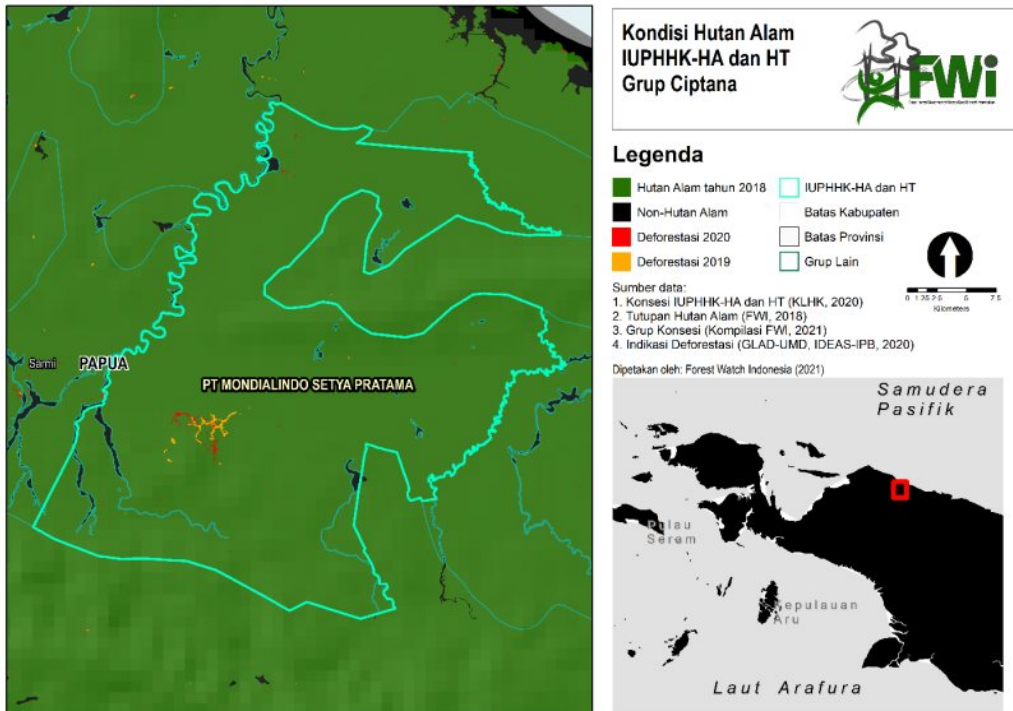
Profil Kondisi Hutan

Grup ini memiliki aktivitas penebangan kayu yang rendah pada periode tahun 2019-2020 dengan luasan tutupan hutan alam yang relatif rendah. Informasi kondisi hutan dapat ditinjau pada tabel berikut.

Luas tutupan hutan alam yang berada di PT MSP, yakni 92.508,20 hektare atau dengan kata lain 98% dari luas konsesi PT MSP masih ditutupi hutan alam. Luas potensi kehilangan hutan alam pada perusahaan HPH ini jika dioperasionalkan seluruhnya lebih dari 7 kali lipat dari luas Pulau Bali. Jika dibandingkan dengan luas deforestasi yang terjadi pada 2019 dan 2020, terbilang rendah atau sebanyak 0.29%³². Setelah mendapatkan pengakuan seperti sertifikasi PHPL pada tahun 2021 perusahaan ini kemungkinan akan lebih leluasa melakukan operasional kerja sebagai perusahaan HPH di Sarmi Provinsi Papua. Pemanfaatan hutan alam sebagai inti bisnis perusahaan HPH, maka rekam jejak perusahaan ini sangat berkaitan dengan proyeksi kehilangan hutan alam di Kabupaten Sarmi Provinsi Papua.

Deskripsi	Luas (hektare)
Hutan alam tersisa tahun 2020	92.508,2
Deforestasi tahun 2020	162,93
Deforestasi tahun 2019	106,87

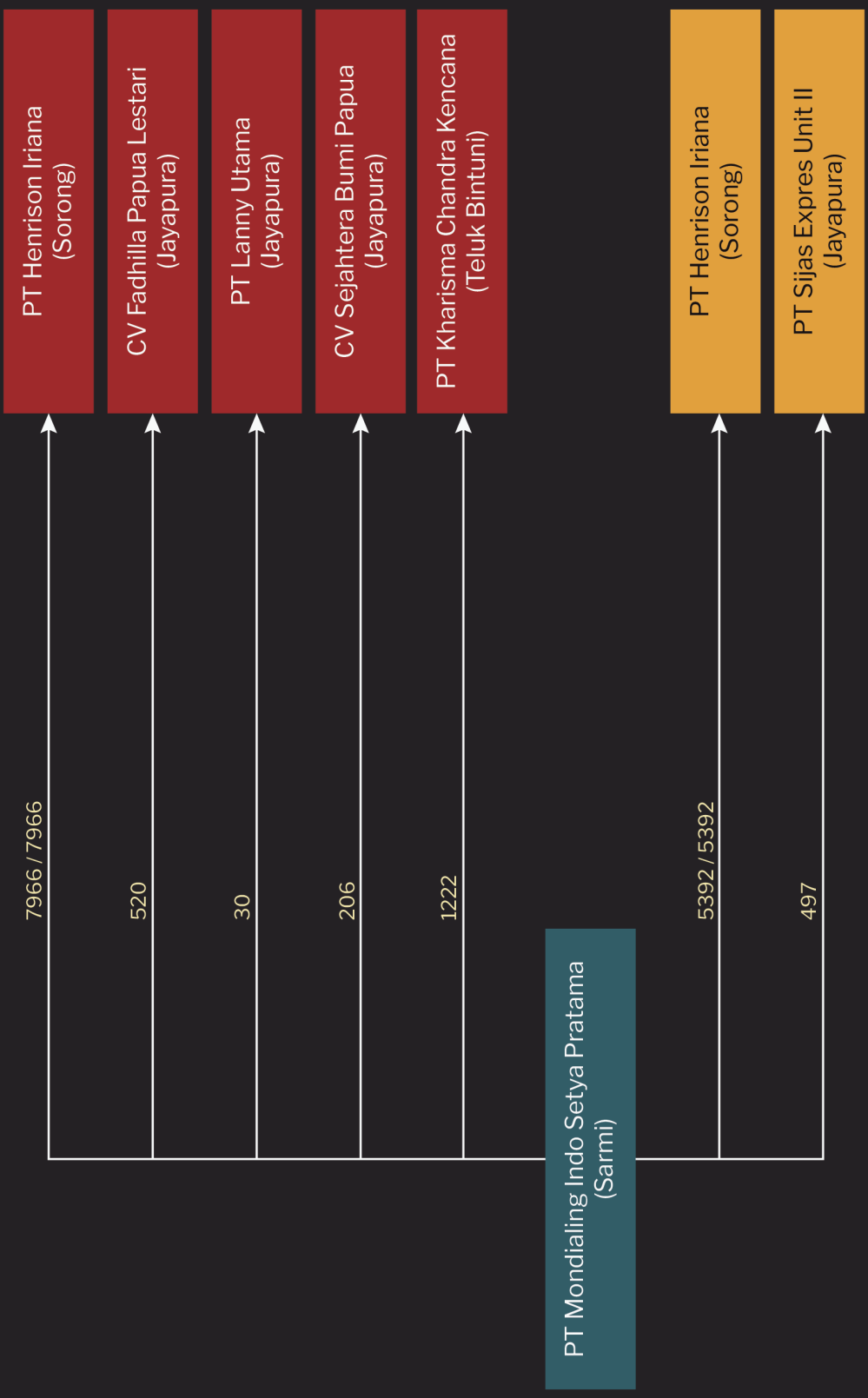
Tabel 18. Tutupan Hutan Alam dan Deforestasi Grup Ciptana



Gambar 40. Peta Kondisi Hutan Alam Grup Ciptana

Produksi Kayu

Produksi kayu bulat yang dihasilkan PT MSP pada tahun 2019 adalah sebesar 9.949 m³ dan pada tahun 2020 sebesar 8.731 m³. Berdasarkan data di Dirjen PHPL dan RPBBI online yang diakses pada desember 2019, PT MSP mengirimkan kayu bulat sebanyak 5.392 m³ kepada PT Henrison Iriana dan industri atas nama PT Sijas Expres Unit II sebanyak 497 m³. Sedangkan untuk tahun 2020, PT Henrison Iriana menerima kayu sebanyak 7.966 m³, serta sisanya dikirim kepada industri antara 2000-6000 m³ yaitu CV Sejahtera Bumi Papua sebanyak 206 m³, CV Fadhila Papua Lestari sebanyak 520 m³, PT Lanny Inabua sebanyak 30 m³ dan PT Kharisma Chandra Kencana sebanyak 1.222 m³. Peredaran kayu dari PT MSP seluruhnya berada di daratan Papua, termasuk juga tidak ditemukannya data ekspor dari industri yang menerima kayu dari PT MSP.

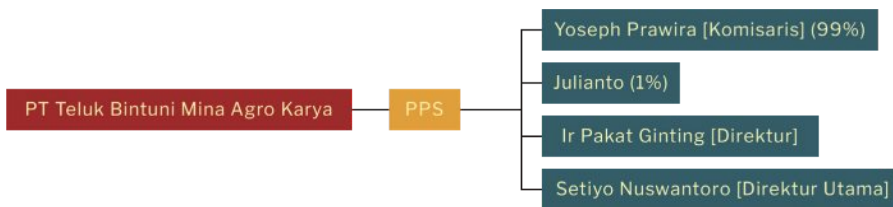


Gambar 41. Peredaran Kayu dari PT Mondialindo Setya Pratama

Djajanti

Profil Kepemilikan

Kepemilikan saham mayoritas PT PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya (TBMAK) dikuasai oleh Yoseph Prawira (99%), yang juga sekaligus menjabat sebagai Komisaris di perusahaan ini. Nama-nama lain yang terkait dengan PT TBMAK adalah Setiyo Nuswantoro yang menjabat sebagai direktur utama dan Ir Pakat Ginting yang menjabat sebagai direktur produksi. Meski di banyak laporan PT TBMAK merupakan bagian dari grup Djajanti, namun nama-nama yang tersebut di atas tidak terkait secara langsung dengan grup maupun perusahaan lain di bawah naungan grup Djajanti.



Gambar 42. Pengurus dan Pemegang Saham PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya

Profil Perusahaan

PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya (TBMAK) adalah sebuah perusahaan pemegang izin HPH yang terletak di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. HPH dengan luas konsesi 237.750 hektare tersebut tidak hanya berada di Teluk Bintuni, namun juga masuk ke wilayah Kabupaten Fak-fak dan Kaimana. Kantor pusatnya berada di Jakarta, tepatnya di Tamansari Parama Boutique Office Lt. 8 Unit B, Jl. KH. Wahid Hasyim No. 84-88, RT.015/RW.06 Kel. Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Izin PT TBMAK berlaku hingga tahun ... sesuai dengan SK.509/Menhut-II/2012 tanggal 13 September 2012.

Berdasarkan hasil re-sertifikasi yang dilakukan oleh Lambodja Sertifikasi pada April 2019 menerangkan bahwa IUPHHK-HA Teluk Bintuni Mina Agro karya telah “LULUS” dengan predikat “BAIK” standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL). Masa berlaku sertifikat PHPL milik PT TBMAK hingga April 2025.

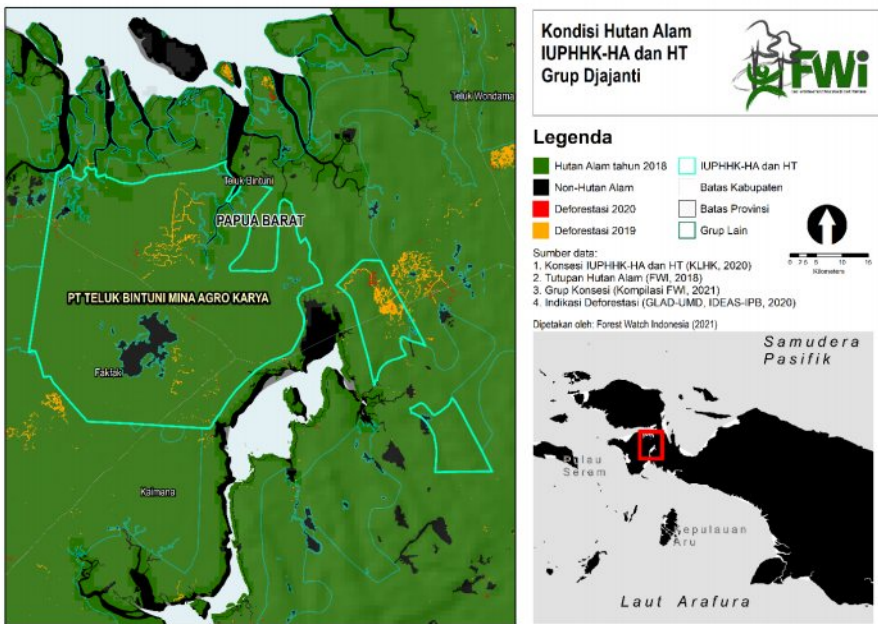
Profil Kondisi Hutan

Grup ini memiliki aktivitas penebangan kayu yang moderat pada periode tahun 2019-2020 dengan luasan tutupan hutan alam yang relatif masih tinggi. Informasi kondisi hutan dapat ditinjau pada tabel berikut.

Luas tutupan hutan alam yang berada di PT TBMAK, yakni 223,471.22 hektare, atau dengan kata lain 94% dari luas konsesi PT TBMAK masih ditutupi hutan alam. Luas potensi kehilangan hutan alam pada perusahaan HPH ini jika dioperasionalisasikan seluruhnya lebih dari 18 kali lipatnya dari luas Pulau Bali. Jika dibandingkan dengan luas deforestasi yang terjadi pada 2019 dan 2020 terbilang cukup atau sebanyak 0.66³³ Sertifikasi PHPL pada tahun 2019, memungkinkan perusahaan ini lebih leluasa melakukan operasional kerja sebagai perusahaan HPH di Provinsi Papua Barat. Karena inti bisnis perusahaan HPH adalah pemanfaatan hutan alam, maka rekam jejak perusahaan ini sangat berkaitan dengan proyeksi kehilangan hutan alam di Kabupaten Fak-Fak, Teluk Bintuni, dan Kaimana Provinsi Papua Barat.

Deskripsi	Luas (hektare)
Hutan alam tersisa tahun 2020	223.471,22
Deforestasi tahun 2020	1248,36
Deforestasi tahun 2019	227,49

Tabel 19. Tutupan Hutan Alam dan Deforestasi Grup Djajanti



Gambar 43. Peta Kondisi Hutan Alam Grup Djajanti

Produksi Kayu

PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya (TBMAK) memproduksi kayu kayu bulat pada tahun 2019 sebanyak 101.492,40 m³. Dalam data RPBB Online, kapasitas di atas 6000 m³ perusahaan ini mengirimkan kayu sebesar 95.686,42 m³ kepada industri di Papua Barat, Papua, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Industri tersebut adalah PT Biak Veneer Jaya sebanyak 17.762,22 m³, CV Cipta Jaya Sentosa sebesar 6431,4 m³, PT Daya Cipta Karya Sempurna sebesar 4.467,34 m³, PT Haswin Hijau Perkasa sebesar 10.478,82 m³, PT Henrison Iriana sebesar

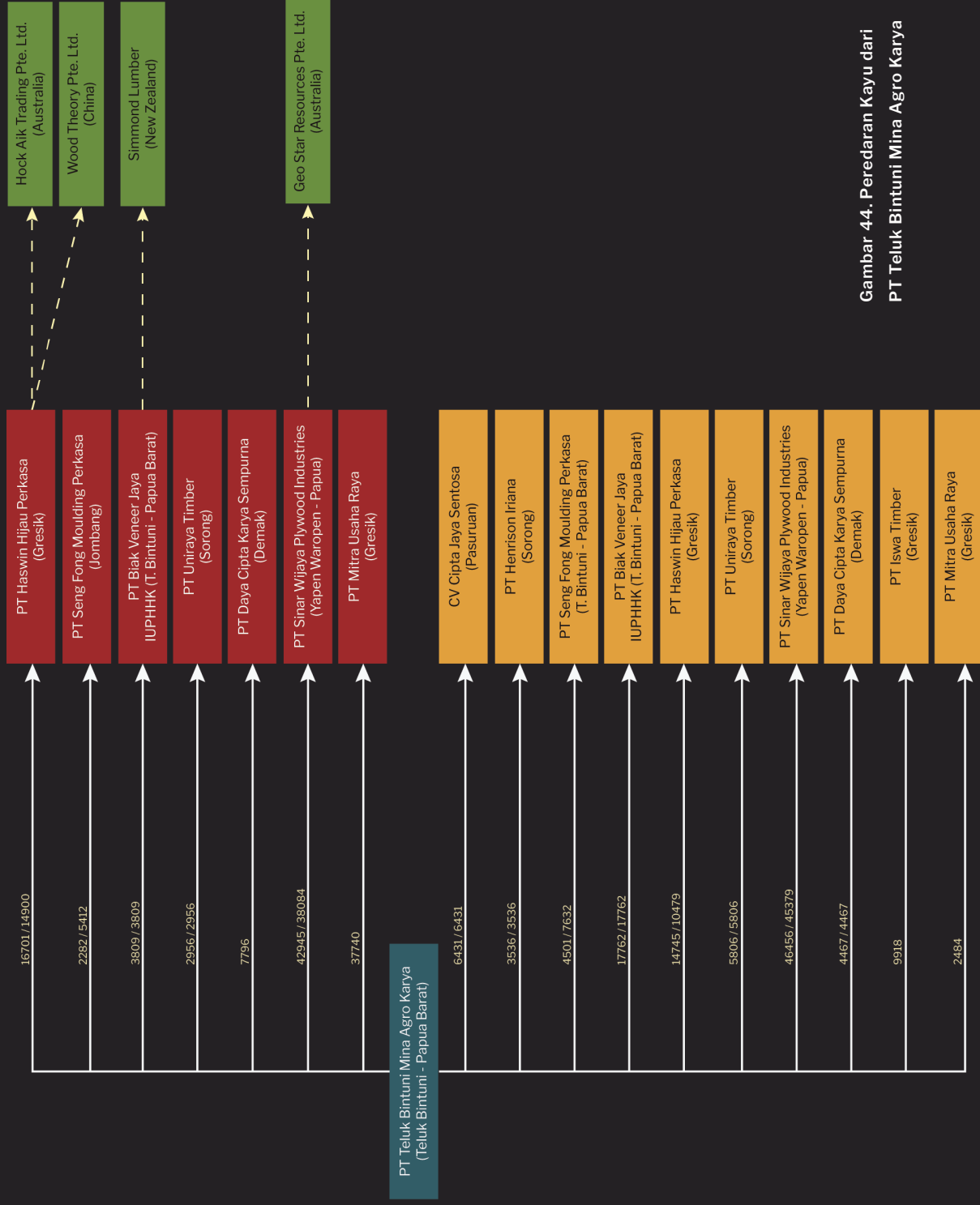
3535,78 m³, PT Seng Fong Moulding Perkasa sebesar 7631,51 m³ dan PT Sinar Wijaya Industries sebesar 45.379,35 m³.

Dalam data peredaran kayu PHPL, disebutkan bahwa perusahaan ini mengirimkan kayu sebanyak 116.105,57 m³ kepada industri di Papua Barat, Papua, Jawa Timur, dan Jawa Tengah yaitu industri CV Cipta Jaya Sentosa 6431,4 m³, PT Henrison Iriana 3535,78 m³, PT Biak Veneer Jaya 17762,22 m³, PT Daya Cipta Karya Sempurna 4467,34 m³, PT Haswin Hijau Perkasa 14744,84 m³, PT Iswa Timber 9.917,82 m³, PT Mitra Usaha Raya 2.484 m³, PT Seng Fong Moulding Perkasa 4.500,63 m³, Sinar Wijaya Plywood Industries 46.455,56 m³ dan PT Uniraya Timber 5.805,98 m³.

Dalam data PNPB tahun 2019, perusahaan ini membayar PSDH untuk kayu 113.090 m³ dengan nilai Rp 15.112.148.900, untuk jenis kayu Kelompok Indah II, Kelompok Meranti, Kelompok Rimba dan Merbau.

Pada Tahun 2020, perusahaan ini memproduksi kayu bulat sebanyak 109.613,30 m³. Dalam data RPBB Online, perusahaan ini mengirimkan kayu kepada industri di Papua Barat sebanyak 72.956,54 m³. Kayu bulat tersebut dikirimkan kepada industri di Provinsi Papua Barat, Papua, Jawa Timur, dan Jawa Tengah yaitu PT Biak Veneer Jaya sebesar 3.808,88 m³, PT Daya Cipta Karya Sempurna sebesar 7.796,23 m³, PT Haswin Hijau Perkasa sebesar 14.899,77 m³, PT Seng Fong Moulding Perkasa sebesar 5.412 m³, PT Sinar Wijaya Plywood Industries sebesar 38.083,87 m³ dan kepada PT Uni Raya Timber sebesar 2.955,79 m³. Sedangkan dalam data PNPB, perusahaan ini membayar PSDH untuk kayu 111.831,29 m³ dengan nilai Rp 16.213.345.290.

Dalam data tahun 2020, pada Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK), tujuan ekspor kayu yang berasal dari PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya dikirim melalui eksportir, PT Sinar Wijaya Plywood Industries, PT Seng Fong Moulding Perkasa, dan PT Haswin Jaya Perkasa. Olahan kayu ini dikirim melalui Importir Hock Aik Trading PT LTD menuju Negara Australia, New Zealand, Wood Theory PT LTD menuju negara China, SIMMONDS LUMBER menuju negara New Zealand, dan GEO STAR RESOURCES PT LTD menuju negara Australia.



Gambar 44. Peredaran Kayu dari PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya

Hanurata

Profil Perusahaan

Hanurata Group dapat dikatakan sebagai pemain lama industri perikanan di Indonesia. Grup yang identik dengan Keluarga Cendana (Soeharto) ini memiliki dua unit izin IUPHHK-HA atau HPH yang berada di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, seluas 234.470 hektare serta di Kabupaten Jayapura dan Keerom, Papua, seluas 56.325 hektare. Izin operasi PT Hanurata di Kabupaten Fakfak didapatkan pada tahun 2014 melalui SK.859/Menhut-II/2014. Sedangkan di Jayapura dan Keerom izinya didapatkan pada tahun 2012 melalui SK.601/MeNHUT-II/2012. Kantor pusat Hanurata Group terletak di Jl Kebon Sirih No 67-69 Hanurata Graha Lt.6, Kebon Sirih, Jakarta.

Pada Tahun 2016, PT Hanurata unit Fakfak mendapatkan sertifikat PHPL dari lembaga sertifikasi PT. Trustindo Prima Karya. Sedangkan unit yang ada di Jayapura mendapatkan sertifikat PHPL dari lembaga sertifikasi PT Lambodja Sertifikasi pada tahun yang sama. Masa berlaku sertifikat PHPL kedua perusahaan berakhir pada 15 Maret 2021.

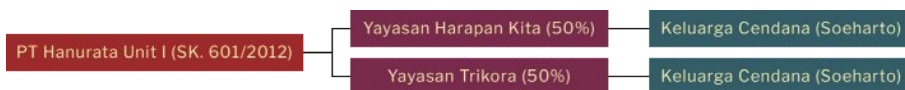
Profil Kepemilikan

Kepemilikan saham PT Hanurata terbagi rata (50:50) ke dua yayasan yang identik dengan keluarga Soeharto. Yaitu Yayasan Harapan Kita dan Yayasan Trikora.

Yayasan Harapan Kita saat ini dikelola oleh anak-anak Soeharto. Yayasan ini juga pernah mengelola aset negara (TMII) selama 46 tahun. TMII akhirnya diambil alih negara pada tanggal 1 April 2021. Pada bagian kepengurusan yayasan, anak pertama Presiden Soeharto Hj. Siti Hardiyanti Indra Rukmana adalah ketua umum yayasan. Anak keduanya, Sigit Harjojudanto sebagai Ketua, Bambang Trihatmodjo yang merupakan anak ketiga sebagai pembina, dan menantunya Indra Rukmana sebagai ketua pengawas³⁴.

Begitu juga dengan Yayasan Trikora yang didirikan oleh Soeharto. Anak keempat dan kelimanya, yaitu Siti Hediati Hariyadi dan Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto) adalah pembina Yayasan Trikora. Sementara cucu-cucu Soeharto menjadi pengurus yayasan tersebut³⁵.

Yayasan Trikora awalnya bertujuan mulia membantu anak-anak yatim anggota TNI yang gugur pada peristiwa merebut Irian Jaya. Akan tetapi pada tahun 2000 pernah ada surat dakwaan yang menyatakan Soeharto telah merugikan negara sebesar Rp 7 miliar di Yayasan Trikora akibat pemberian dana kepada lembaga yang tidak berhubungan dengan kegiatan yayasan³⁶.



Gambar 45. Pengurus dan Pemegang Saham PT Hanurata Unit I

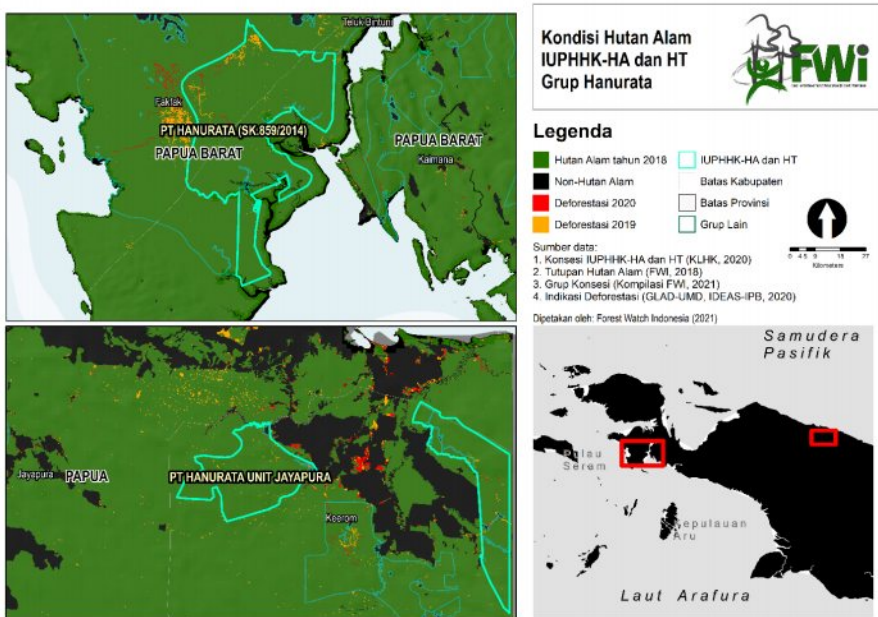
Profil Kondisi Hutan

Grup ini memiliki aktivitas penebangan kayu yang rendah pada periode tahun 2019-2020 dengan luasan tutupan hutan alam yang relatif masih tinggi. Informasi kondisi hutan dapat ditinjau pada tabel 19.

Luas tutupan hutan alam yang berada di kedua perusahaan milik Hanurata Group, yakni 286,213.44 hektare atau dengan kata lain 98% dari luas konsesi Hanurata Group masih ditutupi hutan alam. Luas potensi kehilangan hutan alam pada perusahaan HPH ini jika dioperasionalkan seluruhnya lebih dari 23 kali lipat dari luas Pulau Bali. Jika dibandingkan dengan luas deforestasi yang terjadi pada 2019 dan 2020 terbilang rendah atau sebanyak 0.33%³⁷. Setelah mendapatkan pengakuan seperti sertifikasi PHPL pada tahun 2016, perusahaan dalam grup ini kemungkinan akan lebih leluasa melakukan operasional kerja pemanfaatan hutan alam. Rekam jejak perusahaan ini sangat berkaitan dengan proyeksi kehilangan hutan alam di Provinsi Papua dan Papua Barat, karena inti dari bisnis HPH adalah pemanfaatan hutan alam.

Deskripsi	Luas (hektare)
Hutan alam tersisa tahun 2020	286.213,44
Deforestasi tahun 2020	328,26
Deforestasi tahun 2019	637,35

Tabel 20. Tutupan Hutan Alam dan Deforestasi Grup Hanurata



Gambar 46. Peta Kondisi Hutan Alam Grup Hanurata

Produksi Kayu

PT Hanurata Unit Papua Barat memproduksi kayu kayu bulat pada tahun 2019 sebanyak 52.372 m³. Dalam data RPBBI Online, kapasitas di atas 6000 m³ perusahaan ini mengirimkan kayu sebesar 32.467 m³ kepada industri pengolahan kayu di Provinsi Jawa Timur. Industri tersebut adalah PT Aneka Rimba Indonusa sebanyak 32.467 m³.

PT Hanurata Unit Papua Barat memproduksi kayu kayu bulat pada tahun 2019 sebanyak 52.372 m³. Dalam data RPBBI Online, kapasitas di atas 6000 m³ perusahaan ini mengirimkan kayu sebesar 32.467 m³ kepada industri pengolahan kayu di Provinsi Jawa Timur. Industri tersebut adalah PT Aneka Rimba Indonusa sebanyak 32.467 m³.

Pada Tahun 2020, perusahaan ini memproduksi kayu bulat sebanyak 35.347,2 m³. Dalam data RPBBI online perusahaan ini mengirimkan kayu kepada industri di Jawa Timur sebanyak 63.780,66 m³ yaitu PT Aneka Rimba Indonusa. Dalam data peredaran kayu PHPL menyebutkan bahwa perusahaan ini mengirimkan kayu kepada industri PT Aneka Rimba Indonusa sebesar 34.214,39 m³. Sedangkan dalam data PNBP, perusahaan ini membayar PSDH untuk kayu 21.344 m³ dengan nilai Rp 3.926.339.930.

Dalam data tahun 2020 pada Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK), tujuan ekspor kayu yang berasal dari PT Hanurata Unit Papua Barat dikirim melalui eksportir, PT Aneka Rimba Indonusa. Olahan kayu ini dikirim melalui Importir ITI (SA) PTY. LTD menuju Negara Australia.

Pada tahun 2019, PT Hanurata Coy LTD Unit Jayapura memproduksi kayu kayu bulat sebanyak 3.335 m³. Kemudian tidak terdapat informasi untuk PT Hanurata Coy LTD unit jayapura di dalam sistem RPBBI Online mengenai pengiriman kayu dengan kapasitas diatas 6.000 m³ oleh perusahaan ini.

Dalam data peredaran kayu di sistem PHPL tahun 2019 disebutkan bahwa perusahaan ini mengirimkan kayu ke industri di provinsi Papua yaitu CV Sejahtera Bumi Papua sebesar 100,33 m³, CV Selaras Kayu Unggul sebesar 921,36 m³, PT Sijas Express Unit I sebesar 527,15 m³ dan PT Victori Civi Unit II sebesar 4960,02 m³.

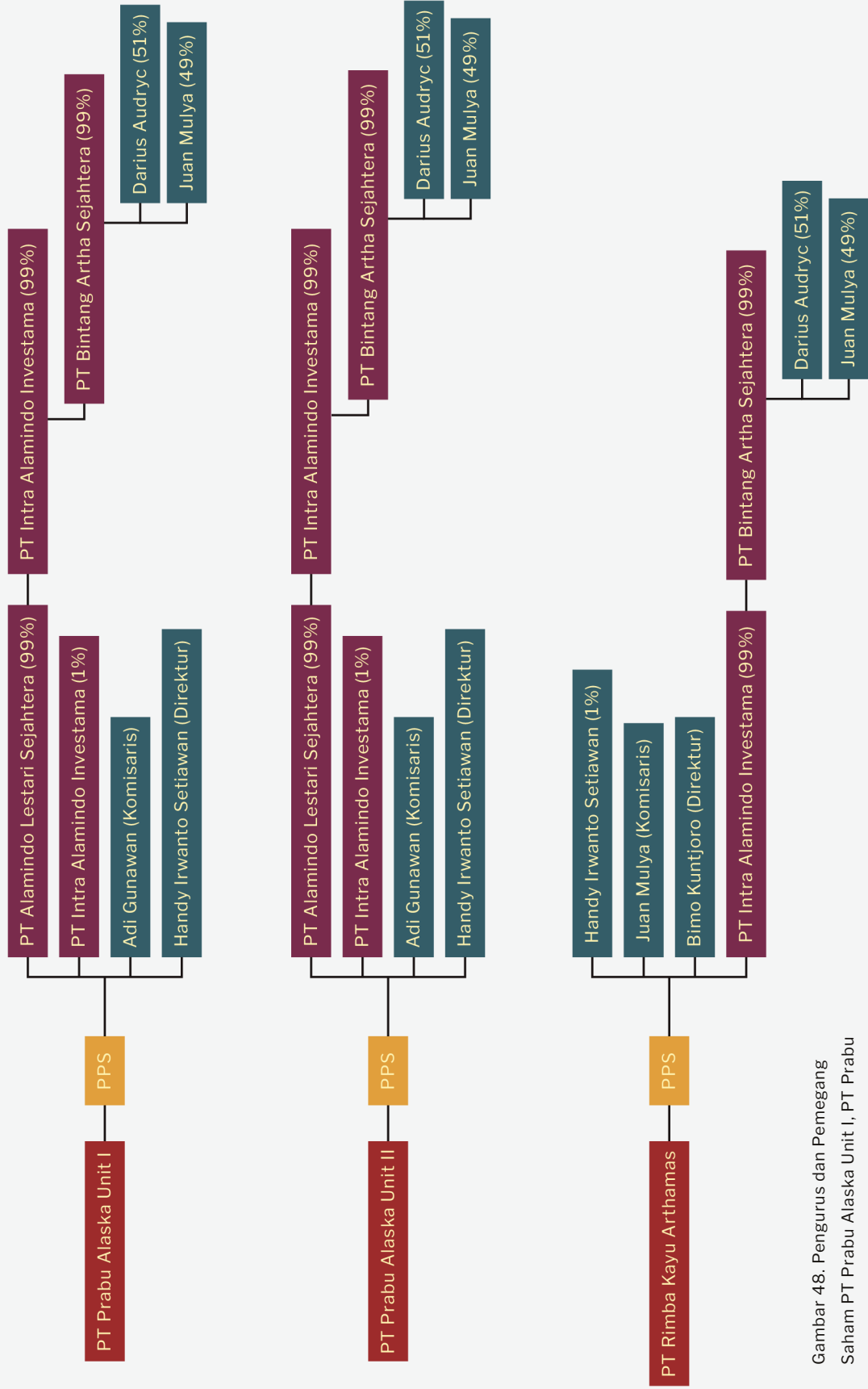


Gambar 47. Peredaran Kayu dari PT Hanurata Unit I

Intra Alamindo

Profil Kepemilikan

Kepemilikan saham PT Prabu Alaska (PA) maupun PT Rimba Kayu Arthamas (RKA) mayoritas dikuasai oleh Darius Audryc (51%) dan Juan Mulya (49%). Kedua nama tersebut terkait ke PT PA dan PT RKA melalui penguasaan saham mayoritas di PT Bintang Artha Sejahtera, yang merupakan perusahaan di balik PT Intra Alamindo Investama dan PT Alamindo Lestari Sejahtera. Namun seperti kebanyakan aktor pemilik manfaat sebenarnya dari suatu perusahaan, nama Darius Audryc dan Juan Mulya sulit ditemukan informasi dan latar belakangnya, begitu pun kaitannya secara langsung dengan grup Alamindo. Nama lain yang justru muncul baik sebagai pengurus di grup Alamindo dan PT PA adalah Adi Gunawan, sebagai komisaris.



Gambar 48. Pengurus dan Pemegang Saham PT Prabu Alaska Unit I, PT Prabu Alaska Unit II, PT Rimba Kayu Arthamas



Profil Perusahaan

PT Alamindo Lestari Sejahtera Tbk. (d/h PT Garbapati Prakarsa), adalah perusahaan induk (*Holding Company*)³⁸ yang memiliki anak perusahaan yaitu PT Prabu Alaska dan PT Rimbakayu Arthamas yang bergerak di bidang pengusahaan hutan dan Pemegang IUPHHK-HA (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam) serta PT Karas Industri Papua yang bergerak di bidang Industri kayu yang semuanya berlokasi di wilayah Papua Barat. Kantor Pusat PT ALS berada di komplek Detta Marina, Jl. Raya Bogor KM. 28 Jakarta Timur 13710, (021) 2961-6868.

PT Prabu Alaska, adalah perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan dan Pemegang IUPHHK-HA dengan SK izin nomor: 15/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 tertanggal 19 september 2016, berlokasi di Kabupaten Fakfak & Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Boven Digoel, Papua seluas 322,780 hektare. PT Rimbakayu Arthamas, adalah perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan dan Pemegang IUPHHK-HA dengan SK izin nomor :16/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 tertanggal 20 september 2016, berlokasi di Kabupaten Bintuni, Provinsi Papua seluas 130,400 hektare.

PT Prabu Alaska telah memiliki sertifikat PHPL dengan predikat baik dari Lambodja Sertifikasi bernomor LASER/PHPL-PA/2021/13 yang terbit sejak 5 Maret 2021 dan berlaku sampai 18 September 2021. Sedangkan untuk PT Rimba Kayu Arthamas telah memperoleh sertifikat legalitas kayu dari Garda Mutu Prima bernomor GMP/2020/20031 yang berlaku sejak 28 Juli 2020 hingga 27 Juli 2023.

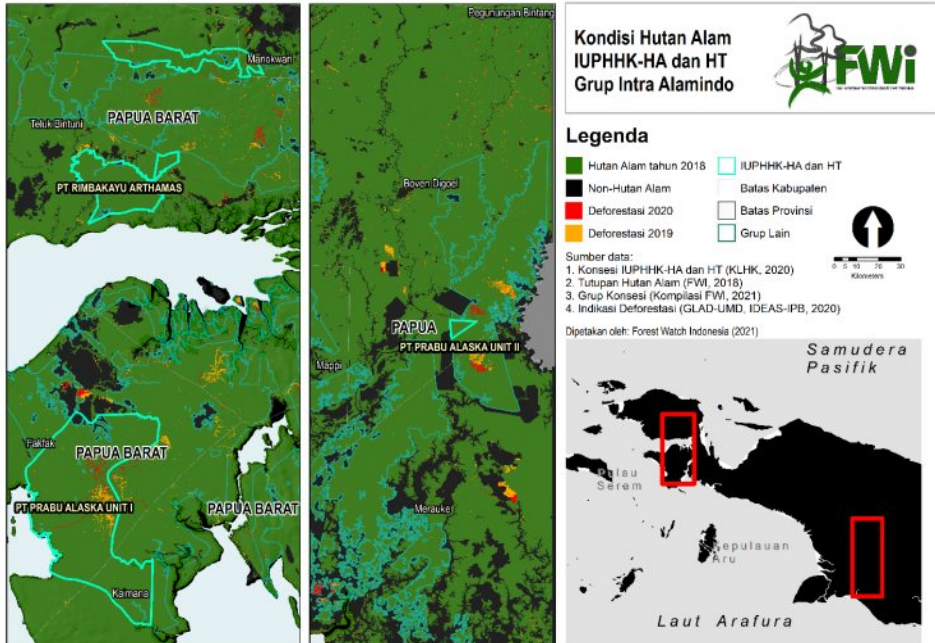
Profil Kondisi Hutan

Grup ini memiliki aktivitas penebangan kayu yang tinggi pada periode tahun 2019-2020 dengan luasan tutupan hutan alam yang relatif masih tinggi. Informasi kondisi hutan dapat ditinjau pada tabel berikut.

Luas tutupan hutan alam yang berada di kedua perusahaan (PT PA dan PT RKA) milik Alamindo Group, yakni 444,861.18 hektare atau dengan kata lain 98% dari luas konsesi Alamindo Group masih ditutupi hutan alam. Luas potensi kehilangan hutan alam pada perusahaan HPH ini jika dioperasionalkan seluruhnya lebih dari 35 kali lipat luas Pulau Bali. Jika dibandingkan dengan luas deforestasi yang terjadi pada 2019 dan 2020 terbilang tinggi, atau sebanyak 0.50%³⁹. Setelah mendapatkan pengakuan seperti sertifikasi PHPL dan legalitas kayu pada tahun 2020 dan 2021, PT PA dan PT RKA akan lebih leluasa melakukan operasional kerja pemanfaatan hutan alam. Pemanfaatan hutan alam sebagai inti bisnis perusahaan HPH, maka rekam jejak perusahaan ini sangat berkaitan dengan proyeksi kehilangan hutan alam di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Deskripsi	Luas (hektare)
Hutan alam tersisa tahun 2020	444.861,18
Deforestasi tahun 2020	755,64
Deforestasi tahun 2019	1471,19

Tabel 21. Tutupan Hutan Alam dan Deforestasi Grup Intra Alamindo



Gambar 49. Peta Kondisi Hutan Alam Grup Intra Alamindo

Produksi Kayu

PT Prabu Alaska memproduksi kayu kayu bulat pada tahun 2019 sebanyak 98.123 m³. dalam data RPBBI online kapasitas di atas 6000 m³ perusahaan ini mengirimkan kayu sebesar 5.602,54 m³ kepada industri pengolahan kayu di provinsi Papua dan Jawa Timur. Industri tersebut adalah PT Korindo Abadi sebesar 5.294,82 m³ dan PT Hutan Lestari Mukti Perkasa sebesar 307,72 m³.

Informasi yang terdapat di dalam peredaran kayu PHPL menyebutkan bahwa perusahaan ini mengirimkan kayu sebanyak 86.085,96 m³, kepada industri di Jawa Timur, Papua, dan Papua Barat. Industri di Jawa Timur yaitu CV Jasa Mitra Abadi sebesar 16.089,4 m³, PT Alam Lestari Jaya Salbach sebesar 32.931,71 m³, PT Hutan Lestari Mukti Perkasa sebesar 6.209,82 m³, PT ISwa Timber sebesar 10.823,16 m³, PT Mitra Usaha Raya 4.025,49 m³, PT Nusantara Timber Pratama sebesar 9.804,4 m³. Kemudian Industri di Papua PT Korindo Abadi sebesar 5.294,82 m³ dan di Papua Barat yaitu PT Aneka Wood Profil Indah sebesar 907,16 m³.

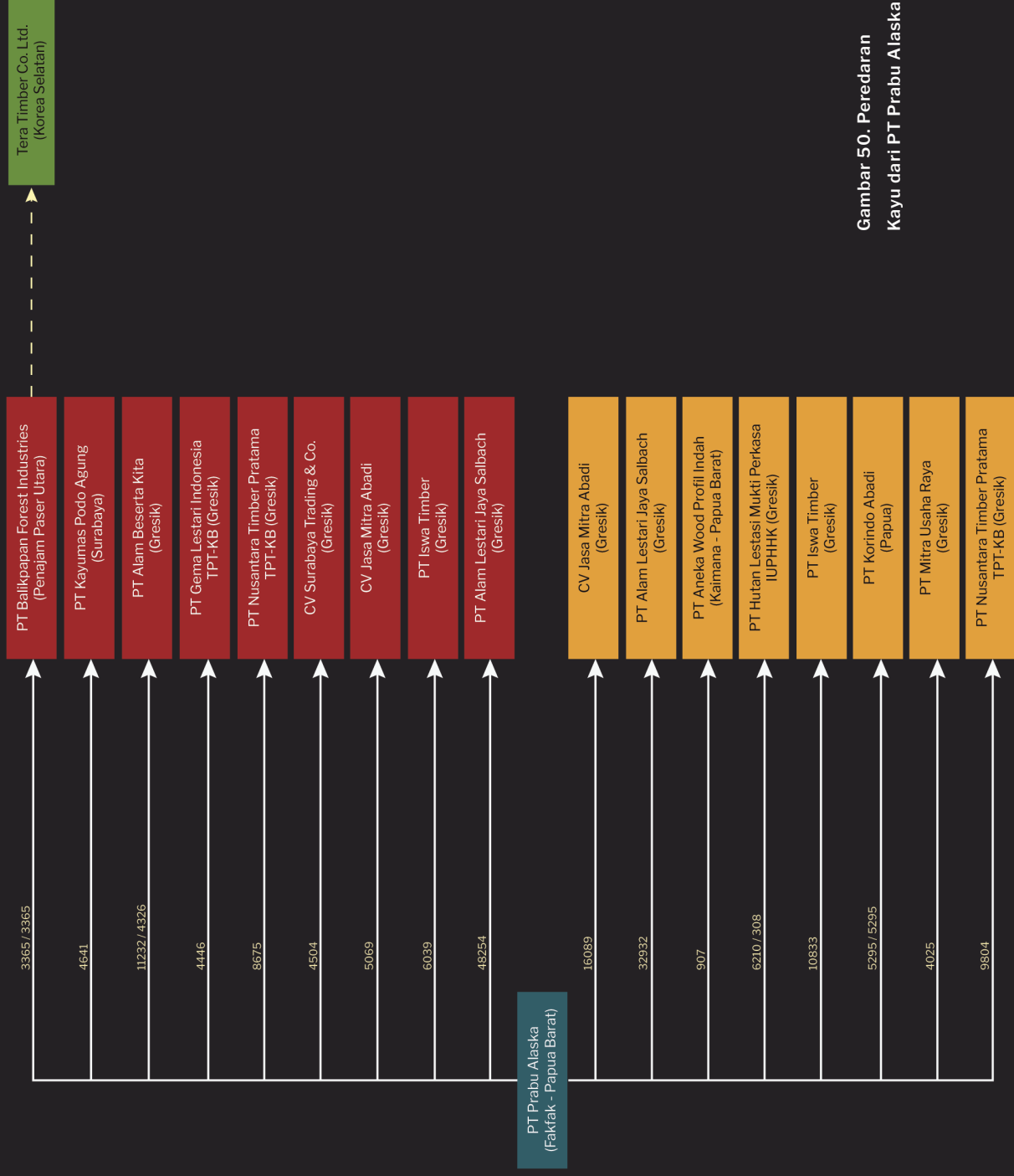
Dalam data PNPB tahun 2019, perusahaan ini membayar PSDH untuk kayu 112.210,84 m³ dengan nilai Rp 16.990.235.980 untuk jenis kayu Kelompok Meranti, Kelompok Rimba dan Merbau.

Pada Tahun 2020, perusahaan ini memproduksi kayu bulat sebanyak 66.666,472 m³. Dalam data RPBB online dengan kapasitas industri di atas 6000 m³ perusahaan ini mengirimkan kayu kepada industri di Jawa Timur dan Kalimantan Timur sebanyak 7.691,32 m³ yaitu PT Alam Beserta Kita (Ex. CV Wana Gemilang Raya) sebanyak 4.325,99 m³ dan PT Balikpapan Forest Industries sebesar 3.365,33 m³.

Dalam data peredaran kayu PHPL menyebutkan bahwa perusahaan ini mengirimkan kayu ke provinsi Jawa Timur dan Kalimantan Timur sebesar 96.225,98 m³. Industri di Jawa Timur yang menerima kayu dari perusahaan ini adalah Jasa Mitra Abadi sebesar 5.068,78 m³, CV SURABAYA TRADING & CO (GRESIK) sebesar 4.503,65 m³, PT Alam Beserta Kita sebesar 11.232,35 m³, PT Alam Lestari Jaya Salbach sebesar 11.232,35 m³, PT Alam Lestari Jaya Salbach 48.254,43 m³, PT Balikpapan Forest Industries (INDUSTRI) 3.365,33, PT Iswa Timber sebesar 6.039,28 m³, PT Kayumas Podo Agung sebesar 4.641,14 m³, PT Nusantara Timber Pratama (TPT-Kb) sebesar 8.675,24 m³.

Dalam data PNPB tahun 2020, perusahaan ini membayar PSDH untuk kayu 66.666,47 m³ dengan nilai Rp12.247.246.010 untuk jenis kayu Kelompok Meranti, Kelompok Rimba dan Merbau.

Dalam data tahun 2020 pada Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK), tujuan ekspor kayu yang berasal dari PT Prabu Alaska dikirim melalui eksportir, PT Balikpapan Forest Industries, dan olahan kayu ini dikirim melalui Importir Tera Timber Co. LTD. menuju Korea Selatan.



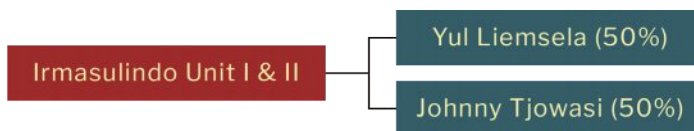
Gambar 50. Peredaran Kayu dari PT Prabu Alaska

Irmasilindo

Profil Kepemilikan

PT Irmasilindo adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan kayu berdiri sejak tahun 1989. Berkantor pusat atau PT Irmasilindo Unit I terletak/beroperasi di kota Makassar, tepatnya di Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami No. 28 Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia dan kantor cabang atau PT Irmasilindo Unit II yang terletak/beroperasi di kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat. Kepemilikan saham PT Irmasilindo dikuasai oleh Yul Liemsela dan Johny Tjowasi yang masing-masing memiliki 50% saham perusahaan.

Yul dan Johnny adalah sepasang suami isteri. Mereka berdua menjadi komisaris PT Irmasilindo. Nama-nama yang ada di direksi dan komisaris PT Irmasilindo masih satu keluarga, yaitu Feronica Tjowasi dan Filemon Tjowasi, anak-anak dari Yul dan Johnny. Feronica memegang jabatan sebagai direktur keuangan dan Filemon menjabat sebagai direktur utamanya.



Gambar 51. Pengurus dan Pemegang Saham PT Irmasilindo Unit I dan II

Profil Perusahaan

PT Irmasulindo merupakan perusahaan swasta nasional yang memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) pada hutan alam melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan bernomor SK.04/Kpts-II/2001 tanggal 11 Januari 2001 yang terdiri dari dua blok terpisah yaitu Unit I seluas 104.192 hektare berlokasi di Kabupaten Waropen, Provinsi Papua dan Unit II seluas 70.348 hektare berlokasi di Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat.

PT Irmasulindo telah memiliki sertifikat legalitas kayu dari PT BRIK Quality Service dengan nomor : BRIK-VLK-0130, yang berlaku sejak 10 April 2019 dan berakhir pada 9 April 2025. Sedangkan untuk unit HPH (Irmasulindo unit II), informasi terakhir yang kami peroleh adalah sertifikat VLK yang berakhir tahun 2018, dikeluarkan oleh PT Ayamaru Sertifikasi dengan nomor SLK.52/ASERT/LVLK-011-IDN.

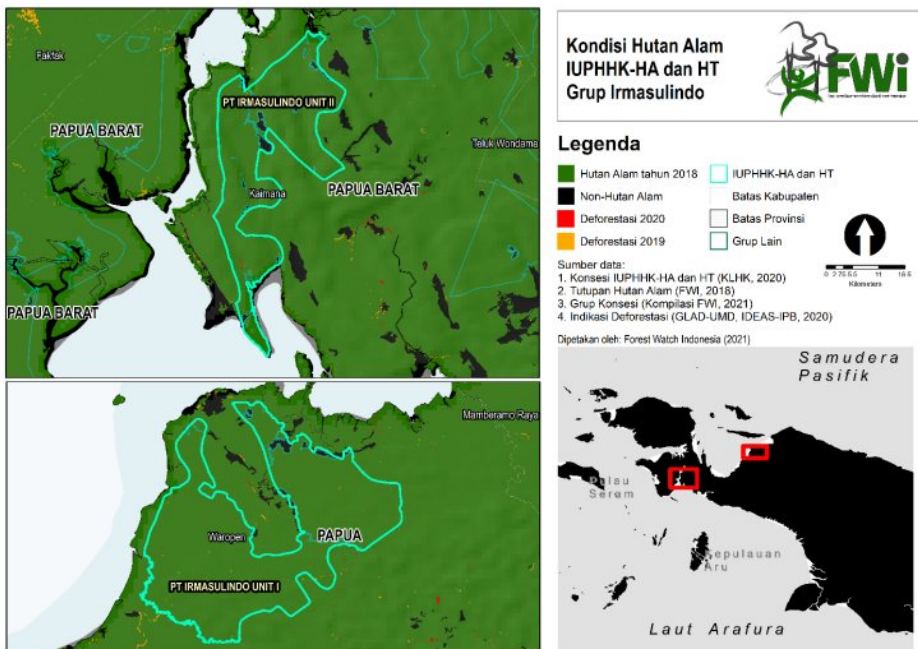
Profil Kondisi Hutan

Grup ini memiliki aktivitas penebangan kayu yang rendah pada periode tahun 2019-2020 dengan luasan tutupan hutan alam yang relatif rendah. Informasi kondisi hutan dapat ditinjau pada tabel berikut.

Luas tutupan hutan alam yang berada di PT Irmasulindo (Unit I dan Unit II), yakni 169.388,56 hektare atau dengan kata lain 97% dari luas konsesi PT Irmasulindo masih ditutupi hutan alam. Luas potensi kehilangan hutan alam pada perusahaan HPH ini jika dioperasionalisasikan seluruhnya lebih dari 13 kali lipat luas Pulau Bali. Jika dibandingkan dengan luas deforestasi yang terjadi pada 2019 dan 2020, masih terbilang sangat rendah atau sebanyak 0.2%⁴⁰. Setelah mendapatkan sertifikat VLK yang berlaku sejak tahun 2018 dan 2019, perusahaan ini akan lebih leluasa melakukan operasional kerja sebagai perusahaan HPH. PT Irmasulindo telah mendapatkan izin sejak tahun 2001 dan beroperasi selama kurang lebih 20 tahun sebagai perusahaan HPH. Sebagai perusahaan HPH yang memiliki inti bisnis dalam pemanfaatan hutan alam, maka rekam jejak perusahaan ini sangat berkaitan dengan proyeksi kehilangan hutan alam di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Deskripsi	Luas (hektare)
Hutan alam tersisa tahun 2020	169.388,56
Deforestasi tahun 2020	324,52
Deforestasi tahun 2019	28,81

Tabel 22. Tutupan Hutan Alam dan Deforestasi Grup Irmasulindo



Gambar 52. Peta Kondisi Hutan Alam Grup Irmasulindo

Produksi Kayu

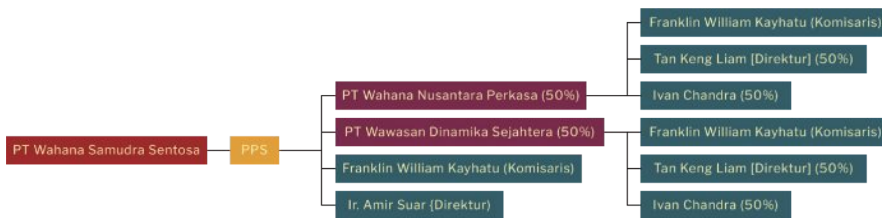
Dalam proses pengumpulan dan analisis data kajian ini (2019-2020), PT Irmasulindo Unit I dan II tidak tercatat atau belum melaporkan aktivitas penebangan kayu maupun pengiriman kayu keluar konsesinya, dibuktikan dengan tidak adanya data PT Irmasulindo di RPBBI, PNBP, dan sistem informasi lainnya di KLHK pada periode tersebut. Belakangan, PT Irmasulindo Unit I termasuk salah satu perusahaan yang izinnya dicabut oleh pemerintah pada 06 Januari 2022.

Katingan Timber Group

Profil Kepemilikan

Saham perusahaan PT Wahana Samudra Sentosa (WSS) dimiliki oleh PT Wahana Nusantara Perkasa dan PT Wawasan Dinamika Sejahtera. Kedua perusahaan tersebut sama-sama dikuasai oleh Tan Keng Liam dan Ivan Chandra. Lewat Tan Keng Liam inilah sebenarnya PT WSS terkait dengan Katingan Timber Group (KTG). Tan Keng Liam merupakan Direktur Produksi KTG sejak tahun 2014 hingga sekarang, dan juga pemilik saham mayoritas di PT WSS. Karena jika hanya melihat website KTG saat ini, nama PT WSS tidak muncul di daftar lini perusahaan di bawah naungan KTG (dahulu ada informasinya)⁴¹.

Katingan Timber Group berkantor pusat di Gama Tower 20 Floor E,F,G, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22 Karet Kuningan, Jakarta 12940 (Telp. 021-2918 3330), serta memiliki kantor cabang di Makassar, Gorontalo, Ambon, dan Merauke. KTG memiliki anak perusahaan yang bergerak di hulu-hilir pengolahan kayu, baik HPH, HTI dan industri pengolahannya. Adapun perusahaan-perusahaan di bawah naungan KTG yaitu PT Gema Hutani Lestari (HPH), PT Gema Nusantara Jaya (HTI), PT Gorontalo Citra Lestari (HTI), dan PT Katingan Timber Celebes (Industri).



Gambar 53. Pengurus dan Pemegang Saham PT Wahana Samudra Sentosa

Profil Perusahaan

PT Wahana Samudera Sentosa merupakan perusahaan pemegang izin HTI (SK.880/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014) yang beroperasi di Distrik Ngguti dan Okaba, Kabupaten Merauke dengan luas konsesi 79.000 hektare. Pada awal berdirinya PT WSS di Merauke banyak menimbulkan kasus-kasus yang tidak terselesaikan, mulai dari perizinan lingkungan yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat adat, hingga Amdal yang tidak sesuai tata ruang⁴². Terkait sertifikasi PHPL maupun VLK PT WSS, belum ada informasi baik yang sedang diajukan, diproses, maupun telah lulus penilaian lembaga sertifikasi.

129

Profil Kondisi Hutan

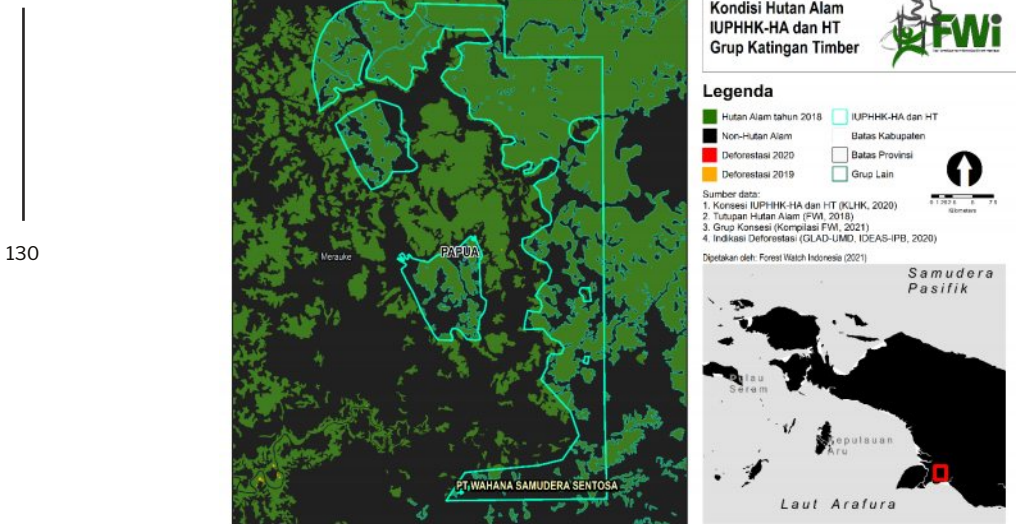
Grup ini memiliki aktivitas penebangan kayu yang rendah pada periode tahun 2019-2020, dengan luasan tutupan hutan alam yang relatif rendah. Informasi kondisi hutan dapat ditinjau pada tabel berikut.

Luas tutupan hutan alam yang berada di PT WSS, yakni 49.907,72 hektare atau dengan kata lain 63% dari luas konsesi Katingan Timber Group masih ditutupi hutan alam. Luas potensi kehilangan hutan alam pada perusahaan HTI ini jika ditambah dengan pemanfaatan hutan alam yang tersisa, yaitu lebih dari 4 kali lipat luas Pulau Bali. Jika dibandingkan dengan luas deforestasi yang terjadi pada 2019 dan 2020 masih terbilang sangat rendah, atau sebanyak 0.09%⁴³. Tanpa adanya jaminan sistem PHPL dan SVLK akan berdampak negatif terhadap deforestasi, degradasi, dan keberlanjutan

(sosial-ekologi) di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Rekam jejak kedua perusahaan ini tentunya sangat berkaitan dengan proyeksi kehilangan hutan alam di Provinsi Papua.

Deskripsi	Luas (hektare)
Hutan alam tersisa tahun 2020	49.907,72
Deforestasi tahun 2020	49,53
Deforestasi tahun 2019	0

Tabel 23. Tutupan Hutan Alam dan Deforestasi Grup Katingan Timber



Gambar 54. Peta Kondisi Hutan Alam Grup Katingan Timber

Produksi Kayu

Berdasarkan data kayu bulat tahun 2019 dan 2020 dalam sistem informasi PHPL, serta sistem informasi RPBB online, tidak ada informasi produksi kayu bulat. Informasi mengenai peredaran kayu bulat kepada Industri pengolahan kayu dari PT Wahana Samudera Sentosa.

Kayu Lapis Indonesia

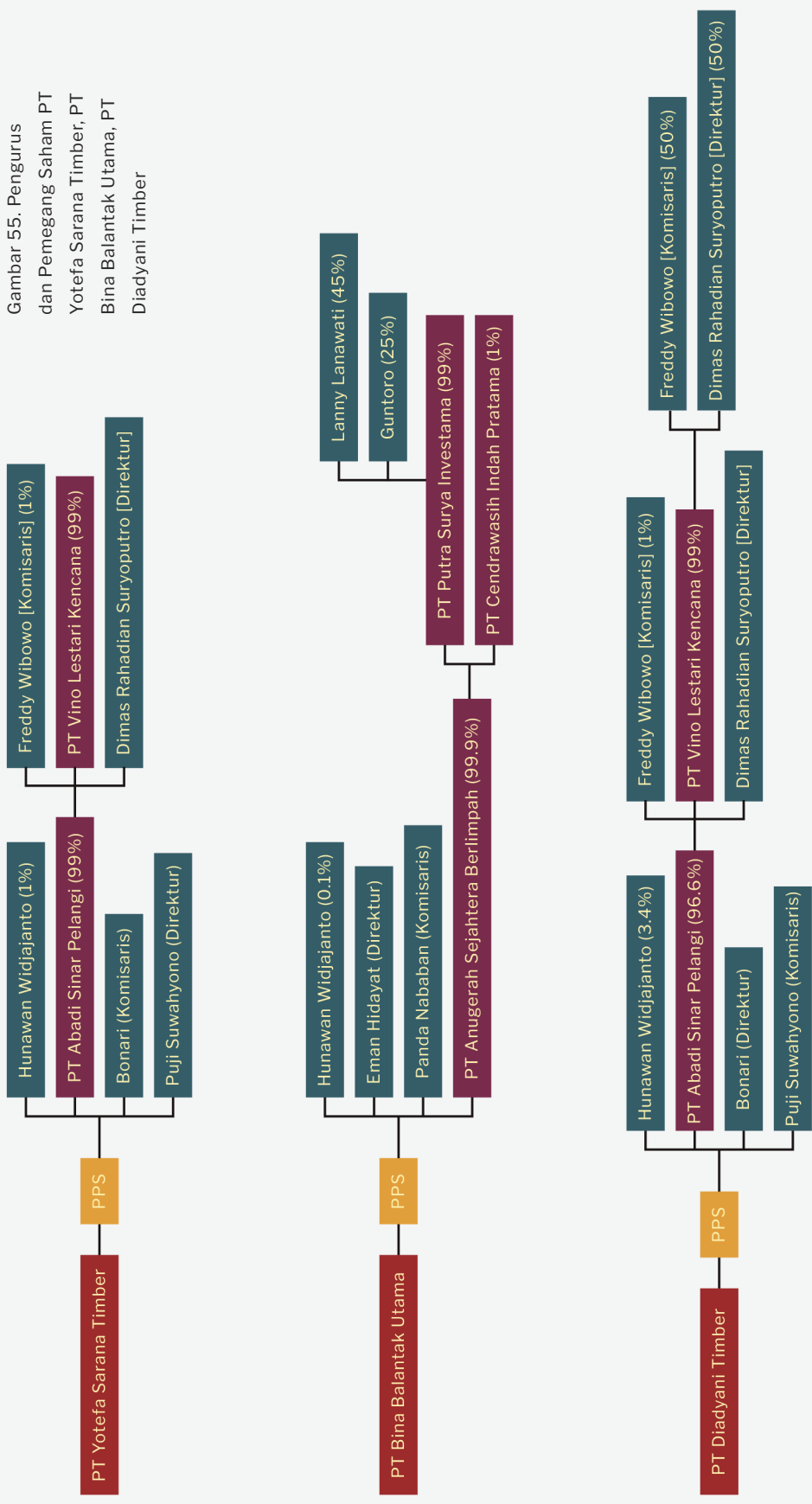
Profil Kepemilikan

PT Yotefa Sarana Timber, PT Diadyani Timber, dan PT Bina Balantak Utama adalah perusahaan yang tergabung dalam PT Kayu Lapis Indonesia (KLI) Group. Kepemilikan saham perusahaan yang tergabung dalam grup KLI adalah atas nama Dimas Rahadian Suryoputro dan Freddy Wibowo, yang memiliki perusahaan PT Vino Lestari Kencana dan PT Abadi Sinar Pelangi, dimana kedua perusahaan tersebut sebagai pemilik saham mayoritas PT Yotefa Sarana Timber dan PT Diadyani Timber. Nama lain yang juga memiliki saham adalah atas nama Lanny Lanawati dan Guntoro sebagai pemilik mayoritas saham PT Bina Balantak Utama.

Catatan menarik mengenai KLI Group justru bisa dicermati melalui para pengurus di belakangnya, seperti Hunawan Widjajanto yang juga merupakan anggota dewan pengawas APHI periode 2016-2021, Ketua Dewan Pengawas APKINDO periode 2018-2023, sekaligus menjabat sebagai Presiden Direktur PT KLI. Sebelumnya, Hunawan Widjajanto juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Yotefa Sarana Timber (ada di resume penilaian PHPL TUV 2014). Nama pengurus lain yang juga muncul berdasarkan akta perubahan terakhir no.36 tanggal 18 Agustus 2016 yaitu Bonari dan Puji Suwahyono (komisaris dan direktur), yang juga memiliki jabatan sama di PT Diadyani Timber, Kabupaten Mimika, Papua. Kepemilikan saham juga sama, yaitu PT Abadi Sinar Pelangi dan Hunawan Widjajanto.

Hal lain yang mungkin juga menarik adalah, terkait latar belakang berdirinya PT KLI yang dibentuk oleh keluarga Sutanto. Sutanto beserta dua sepupunya mendirikan KLI di kabupaten Demak pada 1978, dan beroperasi untuk memproduksi plywood sejak 1979. Sutanto merupakan kerabat Handiman Tjokrosaputro yang merupakan ayah dari Benny Tjokrosaputro (Bentjoek), yang belakangan terjerat kasus Jiwasraya. Salah satu anak Sutanto yang sukses bernama Anne Patricia Sutanto, Presdir Pancaprima Ekabrothers dan Wakil Presdir PT Pan Brothers TBK (PBRX). Anne juga memiliki jabatan di grup BTEK sebagai direktur utama. Serta kepemilikan saham di PT Bangun Kayu Irian mayoritas dimiliki oleh keluarga Sutanto (Doddy Sutanto, Ari Sutanto, Yenny Sutanto dan Anne Patricia Sutanto), lewat anak perusahaan PT Asa Plantation. Begitu pun dengan PT Mitra Pembangunan Global yang 99% kepemilikan sahamnya dikuasai keluarga Sutanto.

Gambar 55. Pengurus dan Pemegang Saham PT Yotefa Sarana Timber, PT Bina Balantak Utama, PT Diadyani Timber



Profil Perusahaan

Pabrik kayu lapis PT Kayu Lapis Indonesia terletak di Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, dan berdiri sejak 1978. Lahan pabrik yang luasnya mencapai 140 hektare itu berada di tepi Laut Jawa, di antara banyak tambak ikan, dan dilengkapi dengan pelabuhan bongkar muat kayu gelondongan. Kapasitas produksi pabrik ini mencapai 480 ribu m³, ini menjadikan pabrik KLI menjadi salah satu pengolahan kayu lapis yang terbesar di Indonesia. Selain pabrik di Kaliwungu, PT KLI juga memiliki pabrik kayu lapis di Sorong, Papua, dengan nama PT Henrison Iriana.

Konsesi HPH KLI Grup di Papua juga menjadi salah satu yang terluas, yaitu PT Bina Balantak Utama (BBU), PT Diadyani Timber (DT), dan PT Yotefa Sarana Timber (YST). PT BBU lewat SK.365/Menhut-II/2011 tanggal 7 Juli 2011, menguasai konsesi seluas 298 ribu hektare yang terletak di Kabupaten Sarmi, Papua. PT DT melalui SK.292/Menhut-II/2009 tanggal 18 Mei 2009, menguasai 190 ribu hektare hutan papua yang terletak di Kabupaten Mimika, Papua. Sedangkan PT YST berdasarkan izin SK.570/Menhut-II/2011 tanggal 3 Oktober 2012, menguasai hutan papua seluas sekitar 123 ribu hektare yang terletak di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat.

Untuk sertifikat pengelolaan hutan lestari (PHPL) dan juga legalitas kayu (S-LK) yang dimiliki oleh anggota grup KLI yaitu, Sertifikat PHPL dengan predikat baik untuk PT BBU dengan nomor 008/S-PHPL/GRS/X/2018 yang dikeluarkan PT Global Resource Sertifikasi (GRS) pada 3 Oktober 2018 dan berlaku hingga 2 Oktober 2023. Selain itu secara Voluntary, PT BBU telah meraih sertifikat PHPL skema FSC® dari SCS Global Services yang berlaku mulai Juni 2016 sampai dengan Juni 2021. PT YST juga memperoleh Sertifikat PHPL dengan predikat baik dari PT GRS berdasarkan sertifikat nomor 23/S-PHPL/GRS/II/2020 tanggal 7 Februari 2020 dan berlaku hingga 6 Februari 2025. PT DT juga telah memiliki sertifikat PHPL dari PT Tuv Rheinland Indonesia sesuai sertifikat nomor 824 407 180002 yang berlaku sejak 1 Desember 2017 dan berakhir pada 30 November 2022.

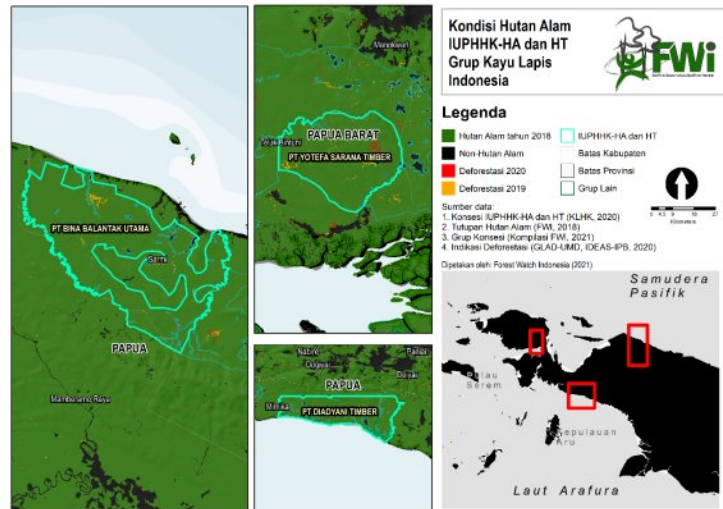
Profil Kondisi Hutan

Grup ini memiliki aktivitas penebangan kayu yang relatif tinggi pada periode tahun 2019-2020 dengan luasan tutupan hutan alam yang relatif masih tinggi. Informasi kondisi hutan dapat ditinjau pada tabel berikut.

Luas tutupan hutan alam yang berada di keempat perusahaan (PT BBU, PT DT, PT YST, PT MAM) milik KLI Group, yakni 700,669.86 Ha atau dengan kata lain 99% dari luas konsesi KLI Group masih ditutupi hutan alam. Luas potensi kehilangan hutan alam pada keempat perusahaan HPH ini jika dioperasionalkan seluruhnya, lebih dari 56 kali luas Pulau Bali. Jika dibandingkan dengan luas deforestasi yang terjadi pada 2019 dan 2020, terbilang cukup atau sebanyak 0.31%⁴⁴. Setelah mendapatkan pengakuan seperti sertifikasi PHPL, Sertifikasi Legalitas Kayu, hingga FSC, KLI Group akan lebih leluasa melakukan operasional kerja pemanfaatan hutan alam. Pemanfaatan hutan alam sebagai inti bisnis perusahaan HPH, mengakibatkan rekam jejak perusahaan ini sangat berkaitan dengan proyeksi kehilangan hutan alam di Kabupaten Sarmi, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Sorong, Kabupaten Mimika di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Deskripsi	Luas (hektare)
Hutan alam tersisa tahun 2020	700.669,86
Deforestasi tahun 2020	1.151
Deforestasi tahun 2019	1.073,15

Tabel 24. Tutupan Hutan Alam dan Deforestasi Grup Kayu Lapis Indonesia



Gambar 56. Peta Kondisi Hutan Alam Grup Kayu Lapis Indonesia

Produksi Kayu

Nama Perusahaan	Kayu Bulat 2020	Kayu Bulat 2019
PT Bina Balantak Utama	23.415,31	53.894
PT Diadyani Timber	14.754,48	17.278

Tabel 25. Produksi Kayu Bulat Grup Kayu Lapis Indonesia

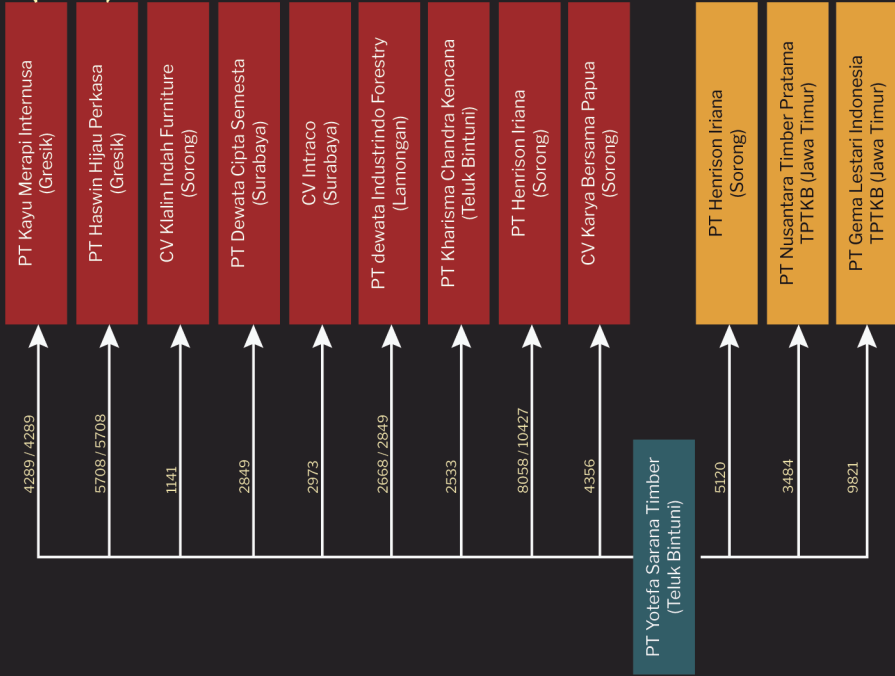
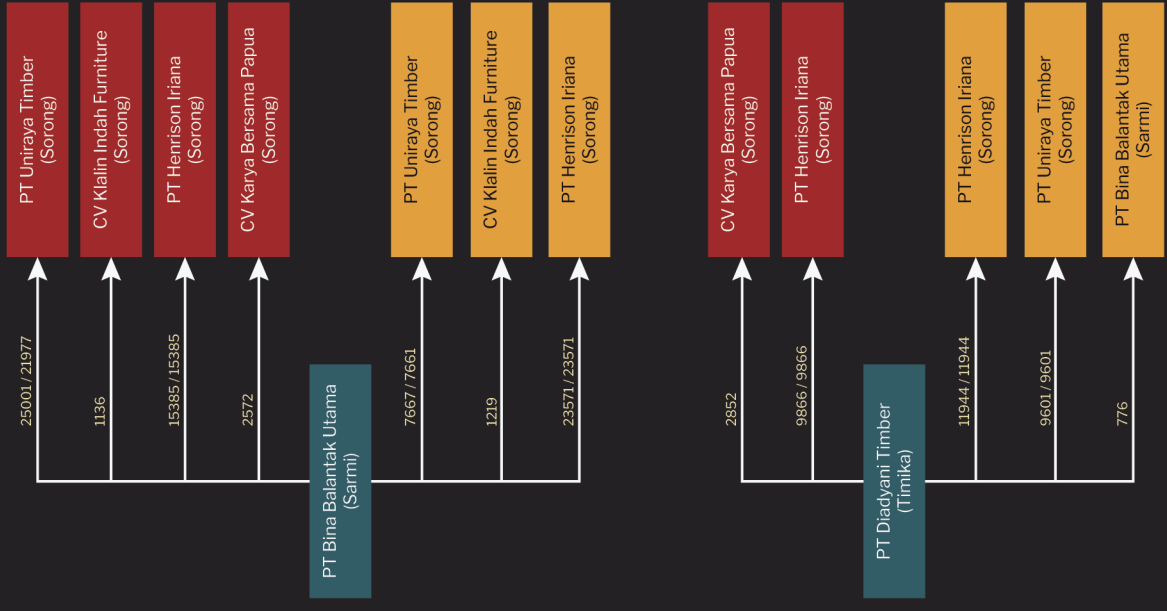
PT Bina Balantak Utama memproduksi kayu kayu bulat pada tahun 2019 sebanyak 53.894 m³ dan 2020 sebanyak 23.415 m³. Berdasarkan data RPBBI online tahun 2019 untuk kapasitas industri di atas 6000 m³, kayu yang diterima oleh industri pengolahan sebanyak 31.233 m³ kepada industri pengolahan kayu di provinsi Papua Barat. Industri tersebut adalah PT Uni Raya Timber sebanyak 7.662 m³ dan PT Henrison Iriana sebesar 23.571 m³. Serta data peredaran kayu PHPL juga mencatat adanya

sejumlah kayu yang diterima oleh PT Klalin Indah Furniture sebesar 1.219 m³. Sedangkan pada tahun 2020, produksi kayu dari PT BBU juga masuk ke industri PT Uniraya Timber (21.977 m³) dan PT Henrison Iriana (15.385 m³). Selain itu, data PHPL juga mencatat sebanyak 2.571,53 m³ kayu diterima CV Karya Bersama Papua, 1.136,27 m³ diterima oleh CV Klalin Indah Furniture, 15.385,4 m³ diterima oleh PT Henrison Iriana, dan 25.001,1 m³ diterima oleh industri PT Uniraya Timber.

Pada tahun 2019 dan 2020, produksi kayu bulat PT Diadyani adalah 17.278 m³ dan 14.754 m³. Berdasarkan data RPBBI 2019, tercatat sebanyak 11.944,02 m³ kayu diterima oleh PT Henrison Iriana dan 9.600,59 m³ diterima oleh PT Uni Raya Timber. Sedangkan berdasarkan data PHPL, jumlah kayu yang diterima industri PT Henrison Iriana dan PT Uniraya Timber sama dengan data RPBBI, namun ada penambahan sebanyak 1.218,61 m³ yang diterima oleh CV Klalin Indah Furniture. Kemudian untuk tahun 2020, data RPBBI mencatat kayu dari PT Diadyani diterima oleh PT Henrison Iriana sebanyak 15.385,4 m³ dan PT Uni Raya Timber sebanyak 21.976,9 m³. Sedangkan data PHPL mencatat sebanyak 2.571,53 m³ diterima oleh CV Karya Bersama Papua, 1.136,27 m³ diterima oleh CV Klalin Indah Furniture, 25.001,1 m³ diterima oleh PT Uniraya Timber, dan jumlah yang sama diterima oleh PT Henrison Iriana atau sebanyak 15.385,4 m³.

PT Yotefa Sarana Timber pada tahun 2019 dan 2020 memproduksi kayu sebanyak 20.155,35 m³ dan 40.292,35 m³. selama tahun 2019, tidak tercatat kayu dari PT YST di RPBBI yang masuk industri, sedangkan yang tercatat di data PHPL kayu yang berasal dari PT YST diterima oleh PT Henrison Iriana (5.119,52 m³), PT Nusantara Timber Pratama (TPT-KB) sebanyak 3.483,57 m³, dan TPT-KB PT Gema Lestari Indonesia 9.821,28 m³. Untuk tahun 2020, data RPBBI mencatat kayu dari PT YST diterima sebanyak 2.848,54 m³ oleh PT Dewata Cipta Semesta, 5.708,44 m³ oleh PT Haswin Hijau Perkasa, 10.427,2 m³ oleh PT Henrison Iriana, 4.288,65 m³ oleh PT Kayu Merapi Internusa. Kemudian data lain yang tercatat selama tahun 2020 di PHPL adalah 2.973,37 m³ diterima oleh CV Intraco, 4.357 m³ diterima oleh CV Karya Bersama Papua, 1.140,9 m³ diterima oleh CV Klalin Indah Furniture, 8.057,89 m³ diterima oleh PT Henrison Iriana, 2.848,54 m³ diterima oleh PT Dewata Cipta Semesta, 2.668,16 m³ diterima oleh PT Dewata Industrindo Forestry, 5.708,44 m³ diterima oleh PT Haswin Hijau Perkasa, 4.288,65 m³ diterima oleh PT Kayu Merapi Internusa, dan sebanyak 2.532,7 m³ diterima oleh PT Kharisma Chandra Kencana.

Industri yang menerima kayu dari PT YST juga tercatat melakukan ekspor produk kayu ke luar negeri. Industri tersebut adalah PT Kayu Merapi Internusa yang melakukan ekspor ke Tradelink Wood Products Ltd (UK), dan LTL Wood-Products B.V. (Belanda). Serta PT Haswin Hijau Perkasa yang mengirimkan kayunya ke Wood Theory PTE. LTD (China), dan Hock Aik Trading Pte. Ltd. (Australia).



Gambar 57. Peredaran Kayu dari PT PT Yotefa Sarana Timber, PT Bina Balantak Utama, PT Diadyani Timber

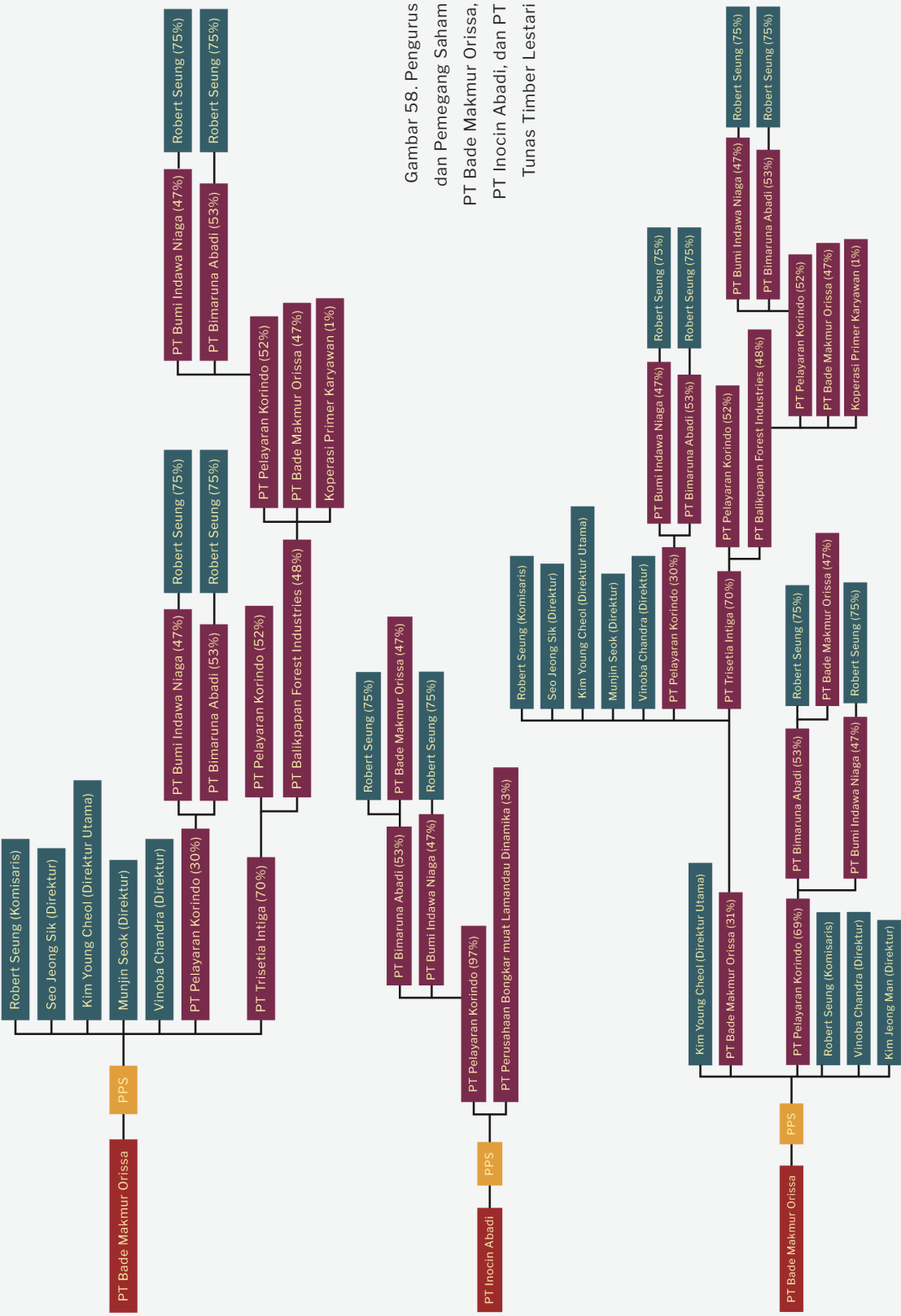
Korindo

Profil Kepemilikan

Korindo adalah sebuah grup perusahaan swasta yang didirikan oleh pengusaha konglomerat asal Korea Selatan, Eun-Ho Seung, pada tahun 1969. Bisnis utama Korindo adalah sektor sumber daya alam berupa HPH dan HTI, kelapa sawit, serta karet. Termasuk juga pabrik pengolahan kayu lapis, kayu serpih dan produksi minyak sawit. Ada pula sektor bisnis lainnya seperti manufaktur kertas koran, industri alat berat, pembiayaan (*finance*), dan real estate⁴⁵.

Korindo mayoritas sahamnya dimiliki oleh keluarga Seung dari Korea Selatan. Dimana kepemilikan saham antar perusahaan di bawah naungan Korindo saling terkait satu sama lain. Seperti PT Bade Makmur Orisa (BMO) yang saham mayoritasnya dimiliki oleh PT Pelayaran Korindo (PK) dan PT Trisetia Intiga (TI). PT PK dimiliki sahamnya oleh PT Bumi Indawa Niaga (BIN) dan PT Bimaruna Abadi (BA), sedangkan PT TI dimiliki sahamnya kembali oleh PT PK dan PT Balikpapan Forest Industries (BFI). Kemudian PT BFI juga kembali dimiliki saham mayoritasnya oleh PT PK dan PT BMO. Begitupun juga dengan anggota Grup Korindo lainnya yang saling terkait, namun di akhir Robert Seung lah pemilik akhirnya.

Sejak awal beroperasi di Indonesia, mitra bisnis yang penting bagi Korindo selama ekspansinya adalah Mohamad 'Bob' Hasan. Bob Hasan pernah menjadi pemilik saham dan direktur di perusahaan kertas milik Korindo, yakni PT Aspex Kumbong⁴⁶. Bob Hasan di tahun 2001 dipenjarakan atas tuduhan pencurian uang negara sebesar 243 juta Dolar AS. Namun tetap menjadi mitra bisnis Korindo hingga tahun 2017. Di lokasi produksi (Asiki, Papua) Korindo juga menggunakan aparat dan militer untuk mengamankan operasional perusahaannya (laporan kontras soal Bisnis Militer di Papua)⁴⁷.



Gambar 58. Pengurus dan Pemegang Saham PT BADE MAKMUR ORISSA, PT Inocin Abadi, dan PT Tunas Timber Lestari



Profil Perusahaan

Korindo mulai melakukan penebangan hutan di Papua pada tahun 1993 di wilayah konsesi HPH seluas 464.000 hektare, melalui PT Bade Makmur Orissa (BMO). Saat ini, Korindo mempunyai dua konsesi aktif untuk penebangan (HPH) di Papua, yaitu PT Tunas Timber Lestari⁴⁸ di Boven Digoel (SK.711/Menhut-II/2010 tanggal 27 Desember 2010) dan PT Inocin Abadi di Merauke (SK.606/Menhut-II/2011 tanggal 21 Oktober 2011), dengan wilayah konsesi masing-masing seluas 214.935 dan 99.665 hektare. Produksi dari PT BMO telah berakhir sejak tahun 2012 dan berganti menjadi konsesi HTI, setelah PT BMO mendapatkan izin bernomor (16/1/IUPHHK-HTI/PMDN/2017 tanggal 19 September 2017), yang terletak di Boven Digoel dengan luas 99.750 hektare. Indonesia bernomor 024.2/EQC-VLK/XII/2014 hanya berlaku sampai 10 Desember 2015. Sejalan dengan dua perusahaan lainnya, PT Tunas Timber Lestari juga terakhir mendapatkan sertifikat PHPL dari PT Ayamaru Sertifikasi dengan No 12-1/A-SERT/XII/2012 tanggal 17 Februari 2012 dan berlaku hanya sampai 16 Februari 2015. Hingga saat ini, belum ada informasi terbaru terkait re-sertifikasi ketiga perusahaan tersebut.

Hingga saat ini, Korindo Group setidaknya memiliki izin konsesi (HPH & HTI) aktif dengan total luas hampir 630 ribu hektare, dengan rincian luas izin HPH seluas 513 ribu hektare dan izin HTI seluas 116 ribu hektare⁴⁹. Belum lagi ditambah dengan izin konsesi sawit seluas 29 ribu hektare, dimana 20 ribu hektare ada di Papua. Kayu-kayu yang dihasilkan dari keseluruhan konsesi Korindo Group ini, serta kayu lain dari pemasok pihak ketiga, memberi suplai bahan baku untuk tiga pabrik kayu lapis Korindo, yaitu PT Balikpapan Forest Industries, PT Korindo Abadi dan PT Korindo Ariabima Sari (KAS). Ketiga pabrik korindo ini memiliki kapasitas produksi hingga 32 ribu m³/bulan. Namun PT KAS dilaporkan telah menutup pabriknya pada akhir Oktober 2018, dengan alasan kekurangan bahan baku dan defisit anggaran⁵⁰.

Menurut Korindo Sustainability Report, seluruh (100%) izin konsesi yang dimiliki Korindo Group telah bersertifikat PHPL dan VLK, dan hanya terkecuali untuk wilayah konsesi HTI yang belum dikembangkan. Sementara untuk industri, PT Korindo Abadi juga telah mendapatkan sertifikat FSC dengan nomor FSC-C020770. Namun jika ditelusuri lebih jauh, persoalan sertifikasi perusahaan anggota grup Korindo tidak baik-baik saja. Sertifikat PHPL PT BMO telah dicabut oleh PT Ayamaru sertifikasi⁵¹ sejak 2014. PT Inocin Abadi yang dahulu memiliki sertifikat VLK dari PT Equality Indonesia bernomor 024.2/EQC-VLK/XII/2014 hanya berlaku sampai 10 Desember 2015. Sejalan dengan dua perusahaan lainnya, PT Tunas Timber Lestari juga terakhir mendapatkan sertifikat PHPL dari PT Ayamaru Sertifikasi dengan No 12-1/A-SERT/XII/2012 tanggal 17 Februari 2012 dan berlaku hanya sampai 16 Februari 2015. Hingga saat ini, belum ada informasi terbaru terkait re-sertifikasi ketiga perusahaan tersebut.

Profil Kondisi Hutan

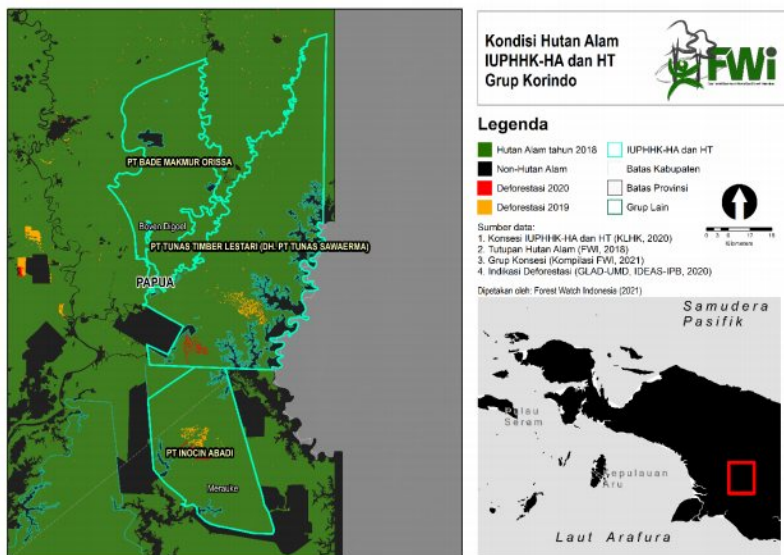
143

Grup ini memiliki aktivitas penebangan kayu yang rendah pada periode tahun 2019-2020 dengan luasan tutupan hutan alam yang relatif masih tinggi. Informasi kondisi hutan dapat ditinjau pada tabel berikut.

Deskripsi	Luas (hektare)
Hutan alam tersisa tahun 2020	382.145,18
Deforestasi tahun 2020	866,65
Deforestasi tahun 2019	774,01

Tabel 25. Tutupan Hutan Alam dan Deforestasi Group Korindo

Luas tutupan hutan alam yang berada di ketiga perusahaan (PT BMO, PT TTL, PT IA) milik Korindo Group, yakni 382.145,18 hektare atau dengan kata lain 92% dari luas konsesi Korindo Group masih ditutupi hutan alam. Luas potensi kehilangan hutan alam pada ketiga perusahaan HPH dan HTI ini jika dioperasionalkan seluruhnya lebih dari 30 kali luas Pulau Bali. Jika dibandingkan dengan luas deforestasi yang terjadi pada 2019 dan 2020, terbilang tinggi atau sebanyak 0.42%⁵². Setelah sertifikasi PHPL dan sertifikasi legalitas kayu pada ketiga perusahaan di bawah Korindo Group ini kadaluarsa sejak 2014 dan 2015, aspek penting yang layak untuk diperhatikan terutama berkaitan dengan keberlanjutan dan keseriusan berusaha. Sebagai inti bisnis perusahaan HPH dan HTI yang luasnya lebih dari 414 ribu hektare tanpa adanya jaminan sistem PHPL dan SVLK akan berdampak negatif terhadap deforestasi, degradasi, dan keberlanjutan (sosial-ekologi). Rekam jejak ketiga perusahaan ini tentunya sangat berkaitan dengan proyeksi kehilangan hutan alam di Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Merauke di Provinsi Papua.

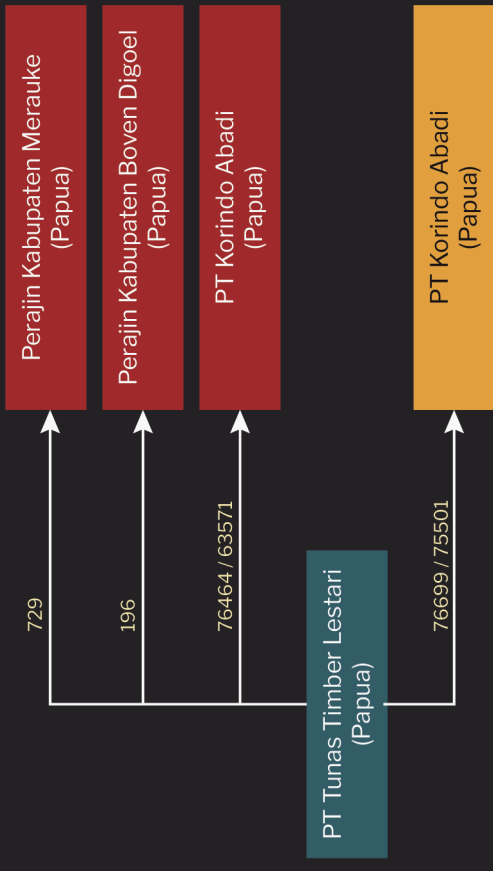
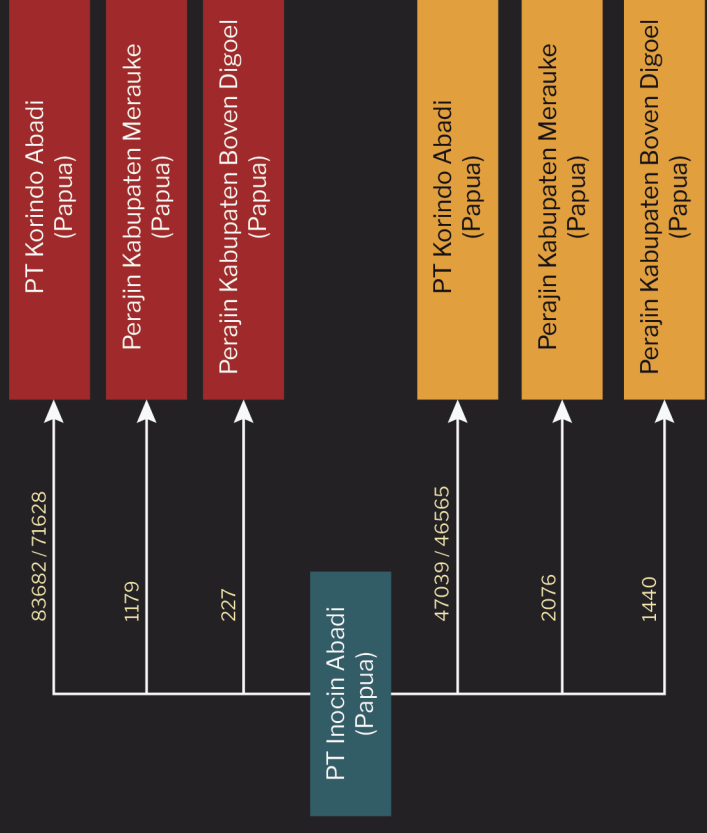


Gambar 59. Kondisi Hutan Alam Grup Korindo

Produksi Kayu

Selama tahun 2019 dan 2020, PT Inocin Abadi memproduksi kayu bulat sebanyak 54.936,15 m³ dan 86240,37 m³. Berdasarkan data RPBBi tahun 2019, sebanyak 46.565,24 m³ kayu bulat diterima oleh industri PT Korindo Abadi. Sedangkan data PHPL mencatat 1.440,11 m³ kayu diterima oleh Perajin Kabupaten Boven Digoel, 2.675,81 m³ diterima oleh Perajin Kabupaten Merauke dan sebanyak 47.038,65 m³ diterima oleh PT Korindo Abadi (industri). Untuk tahun 2020, data RPBBi mencatat sebanyak 71.627,6 m³ diterima oleh industri PT Korindo Abadi. Kemudian data yang tercatat di PHPL yaitu sebanyak 226,6 m³ diterima oleh Perajin Kabupaten Boven Digoel, 1.179,42 m³ diterima oleh Perajin Kabupaten Merauke dan sebanyak 83.628,4 m³ diterima oleh PT Korindo Abadi (industri).

PT Tunas Timber Lestari pada tahun 2019 dan 2020 memproduksi kayu bulat masing-masing sebanyak 71.687,94 m³ dan 90.439,22 m³. Kayu tersebut tercatat di RPBBi dan PHPL tahun 2019 diterima oleh industri PT Korindo Abadi sebanyak 75.501,36 m³ dan 76.698,93 m³. Sedangkan untuk tahun 2020, data RPBBi mencatat 63.570,8 m³ diterima oleh PT Korindo Abadi. Kemudian yang tercatat di PHPL yaitu 196,16 m³ diterima oleh Perajin Kabupaten Boven Digoel, 728,81 m³ diterima oleh Perajin Kabupaten Merauke, dan 76.463,7 m³ diterima oleh PT Korindo Abadi (industri).



Gambar 60. Peredaran Kayu dari PT Tunas Timber Lestari dan PT Inocin Abadi

Medco

Profil Kepemilikan

Medco adalah sebuah konglomerat bisnis yang dimiliki oleh keluarga Panigoro. Perusahaan ini awalnya berfokus pada sektor pertambangan minyak dan gas bumi, kemudian berkembang ke sektor agribisnis (perkebunan sawit, biofuel dan industri kayu), konstruksi dan fabrikasi, bahkan sektor finansial (Bank Himpunan Saudara).

Kepemilikan saham Medco Group semua bermuara pada Arifin Panigoro (AP) dan adiknya, Hilmi Panigoro. Bisnis ini merupakan bagian dari usaha keluarga bersama adiknya yang menjadi Presiden Direktur dari Medco Energi. AP pernah tercatat di peringkat 45 daftar Forbes tentang orang-orang terkaya di Indonesia tahun 2019. Hilmi Panigoro juga merupakan Ketua Dewan Pembina Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI). Selain seorang pengusaha, AP juga terjun ke politik. Ia pernah bergabung bersama PDIP dan menjadi anggota DPR RI dapil Banten Pada masa 1999-2005. Terakhir, Arifin mendirikan partai sendiri, yaitu Partai Demokrasi Pembaruan (PDP).



Gambar 61. Pengurus dan Pemegang Saham PT Selaras Inti Semesta dan PT Medco Papua Alam Lestari

Profil Perusahaan

Medco Group melalui anak perusahaannya yang bergerak di bidang Hutan Tanaman Industri (HTI), yaitu PT Selaras Inti Semesta (SIS) dan PT Medco Papua Alam Lestari (MPAL) memiliki konsesi di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Konsesi dua perusahaan memiliki luas berturut-turut sekitar 169.400 hektare dan 68.300 hektare. Konsesi PT SIS berada di Distrik Hanimah setelah mengantongi izin IUPHHK-HT SK.18/MENHUT-II/2009 tanggal 22 Januari 2009. Sedangkan PT MPAL memiliki konsesi di Distrik Kaptel dengan izin IUPHHK-HT SK.2/1/IUPHHK-HTI/ PMA/2017 tanggal 2 Mei 2017.

PT SIS mendapatkan sertifikat PHPL berpredikat sedang dari PT Borneo Wanajaya Indonesia (BWI) dengan nomor 008/BWI-SPHPL, yang berlaku sejak 13 Oktober 2021 hingga 12 Oktober 2027. Sedangkan untuk PT MPAL belum diketahui informasi perihal sertifikasinya.

Profil Kondisi Hutan

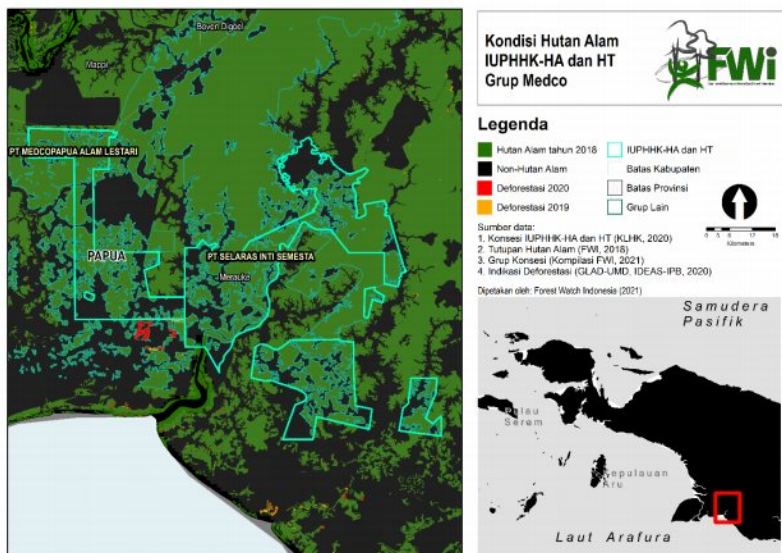
Grup ini memiliki aktivitas penebangan kayu yang rendah pada periode tahun 2019-2020 dengan luasan tutupan hutan alam yang relatif rendah. Informasi kondisi hutan dapat ditinjau pada tabel berikut.

Deskripsi	Luas (hektare)
Hutan alam tersisa tahun 2020	139.173,01
Deforestasi tahun 2020	324,25
Deforestasi tahun 2019	8,14

Tabel 26. Tutupan Hutan Alam dan Deforestasi Grup Medco

Luas tutupan hutan alam yang berada di kedua perusahaan HTI (PT SIS dan PT MPAL) milik Medco Group, yakni 139.173,01 hektare atau dengan kata lain 59% dari luas konsesi Medco Group masih ditutupi hutan alam. Luas potensi kehilangan hutan alam pada kedua perusahaan HTI ini jika dioperasionalkan seluruhnya, ditambah dengan pemanfaatan hutan alam, adalah lebih dari 11 kali luas Pulau Bali. Jika dibandingkan dengan luas deforestasi yang terjadi pada 2019 dan 2020, terbilang rendah atau sebanyak 0.2%⁵³. Namun, PT SIS baru mendapatkan sertifikasi PHPL pada Oktober 2021, sementara PT MPAL belum diketahui pemenuhan sertifikasi pada perusahaannya, sehingga penting untuk meninjau kembali keberlanjutan dan keseriusan dari kedua perusahaan HTI. Tanpa adanya jaminan sistem PHPL dan SVLK, akan berdampak negatif terhadap deforestasi, degradasi, dan keberlanjutan (sosial-ekologi) di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Rekam jejak kedua perusahaan ini tentunya sangat berkaitan dengan proyeksi kehilangan hutan alam di Provinsi Papua.

150



Gambar 62. Peta Kondisi Hutan Alam Grup Medco

Produksi Kayu

Selama tahun 2019-2020, anak perusahaan grup Medco yang memproduksi kayu bulat hanya PT Selaras Inti Semesta yaitu sebanyak 12770,01 m³, itu pun hanya pada tahun 2020. Berdasarkan data PHPL yang tersedia pada tahun 2020, kayu tersebut diterima oleh Perajin Kabupaten Merauke sebanyak 7.775 m³.



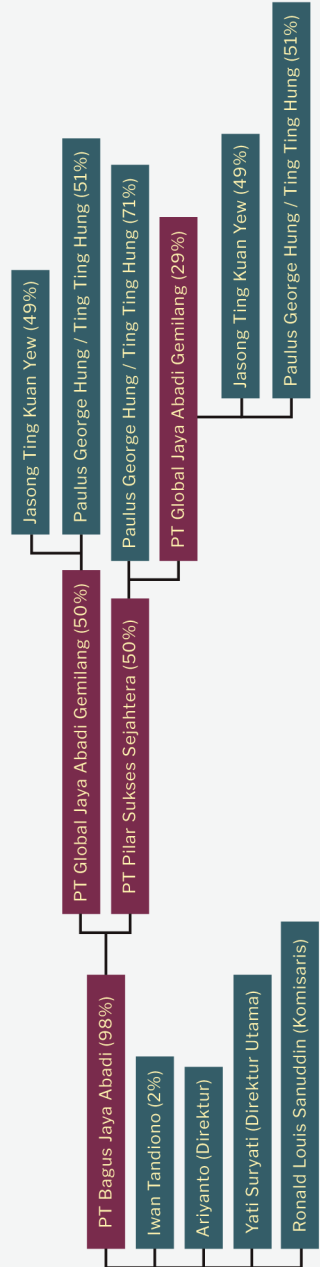
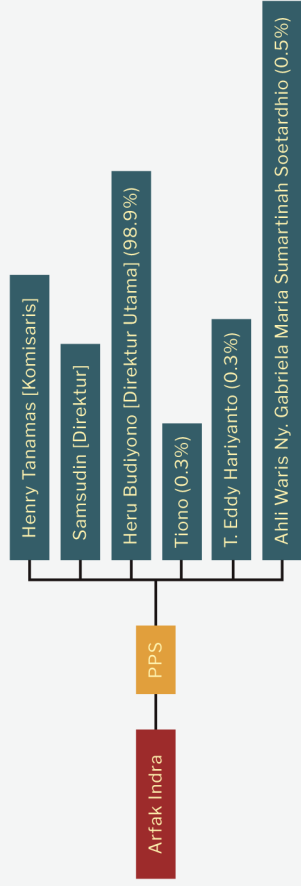
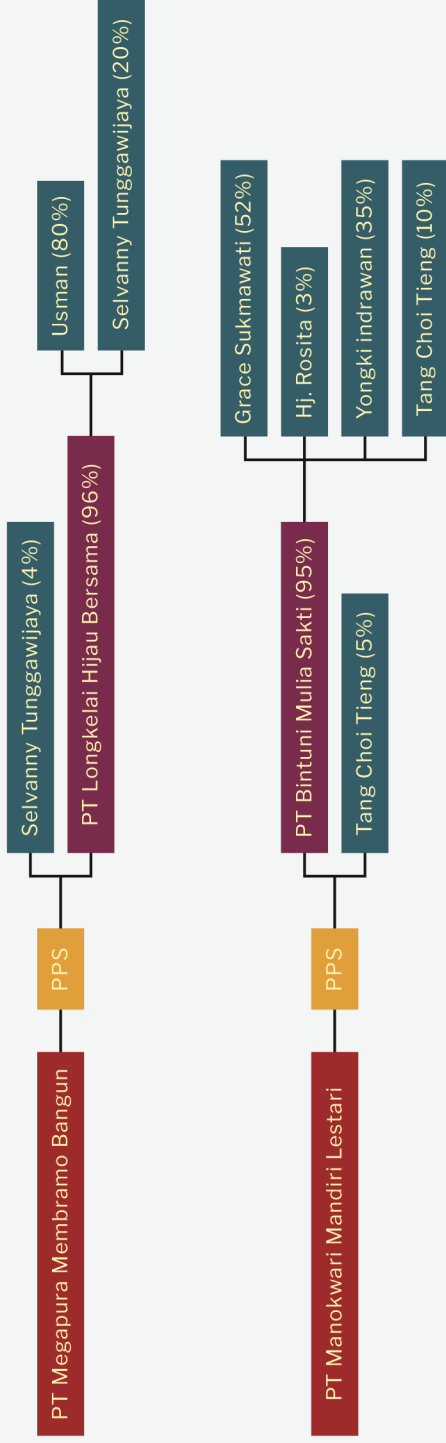
Gambar 63. Peredaran Kayu dari PT Selaras Inti Semesta

Mega Masindo

Profil Kepemilikan

Mr. Wong atau Paulus George Hung/ Ting Ting Hung merupakan seorang China Malaysia yang dikenal sebagai cukong pembalakan kayu secara liar (*illegal logging*), dan sudah melalang buana di Indonesia. Nama Mr Hung juga masuk dalam daftar hitam target operasi hutan lestari yang dikeluarkan Menteri Kehutanan saat itu, MS Kaban. Beberapa perusahaan pembalakan kayu di bawah bendera Mega Masindo Group yang ada di Papua yaitu PT Megapura Membramo Bangun (MMB), PT Manokwari Mandiri Lestari (MML), PT Arfak Indra, dan PT Mutiara Alas Khatulistiwa (MAK). Kantor pusat Mega Masindo group berada di Jalan Kelapa Hybrida Raya Blok PF 18 Nomor 32, Kelapa Gading, Jakarta Utara, sedangkan alamat kantor di Sorong Jl. Tidar No.1 Kota Sorong.

Sementara itu, kepemilikan saham perusahaan di bawah bendera Mega Masindo Group tidak seluruhnya langsung berkaitan dengan Mr Hung. PT Megapura Membramo Bangun dimiliki oleh Selvanny Tunggowijaya dan PT Longkelai Hijau Bersama, yang sahamnya juga dimiliki oleh Selvanny bersama Usman (80%). Saham PT Manokwari Mandiri Lestari dimiliki oleh Tang Choi Tieng dan PT Bintuni Mulia Sakti. Sembilan puluh lima persen saham PT Manokwari Mandiri Lestari sendiri dimiliki oleh Grace Sukmawati, Hj. Rosita, Yongki Indrawan, dan lagi oleh Tang Choi Tieng (10%). PT Arfak Indra sahamnya dimiliki oleh Henry Tanamas, Samsudin, Heru Budiyono (98,9%), Tiono, T. Eddy Hariyanto, dan ahli waris Ny. Gabriela. Saham di PT Mutiara Alas Khatulistiwa 98% dimiliki oleh PT Bagus Jaya Abadi (98%) dan Iwan Tandiono 2%. PT Bagus Jaya Abadi sahamnya dimiliki oleh PT Global Jaya Abadi Gemilang dan PT Pilar Sukses Sejahtera yang sebagian besar sahamnya milik Jasong Ting Kuan Yew dan Paulus George Hung (Mr. Hung).



Gambar 64. Pengurus dan Pemegang Saham PT Megapura Membramo Bangun, PT Manokwari Mandiri Lestari, PT Arfak Indra, dan PT Mutiara Alas Khatulistiwa



Profil Perusahaan

Di bawah Mega Masindo Group ada 4 Perusahaan HPH, yaitu Megapura Mambramo Bangun, Manokwari Mandiri Lestari, Arfak Indra, dan Mutiara Alas Khatulistiwa. Total luas 4 unit perusahaan, 405.835 hektare. Megapura Membramo Bangun 55.100 hektare, Manokwari Mandiri Lestari 90.980 hektare, Arfak Indra 177.900 hektare, dan Mutiara Alas Khatulistiwa 81.855 hektare. Tiga unit perusahaan ada di Provinsi Papua Barat : PT Megapura Membramo Bangun di Manokwari, Manokwari Mandiri Lestari di Teluk Bintuni, dan Arfak Indra di Fak Fak. Sedangkan satu perusahaan lainnya, Mutiara Alas Khatulistiwa di Jayapura, Papua. Soal perizinan, PT Megapura Membramo Bangun mendapatkan izin sesuai SK.397/Menhut-II/2006 tanggal 17 Juli 2006, PT Manokwari Mandiri Lestari SK.366/Menhut-II/2011 tanggal 7 Juli 2011, PT Arfak Indra SK.333/Menhut-II/2009 tanggal 15 Juni 2009, dan PT Mutiara Alas Khatulistiwa SK.676/Menhut-II/2014 tanggal 12 Agustus 2014.

154

Dalam hal pengelolaan hutan produksi lestari, PT MMB telah mendapatkan sertifikat PHPL berpredikat sedang dari PT Lambodja Sertifikasi dengan nomor LASER/PHPL-MMB/05 yang berlaku sejak 8 September 2020 hingga 7 September 2025. Untuk PT AI, informasi terakhir yang kami peroleh adalah pada tanggal 27 Mei - 1 Juni 2021 telah dilakukan penilaian sertifikasi awal VLK yang dilakukan oleh PT Kreasi Prima Sertifikasi dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk penerbitan sertifikat legalitas kayu. PT MML juga telah mendapatkan sertifikat PHPL dari PT Equality Indonesia dengan nomor 012.2/EQC-PHPL/VIII/2015, yang berlaku sejak 15 Juni 2013 sampai dengan 14 Juni 2018. Sedangkan untuk PT MAK, informasi terakhir yang diperoleh bahwa pada tanggal 15-25 Oktober 2020 PT Intishar Sadira Ehsan (ISE) akan melakukan audit sertifikasi awal pengelolaan hutan produksi lestari, namun hasil dari penilaian tersebut belum dilaporkan lagi oleh PT ISE.

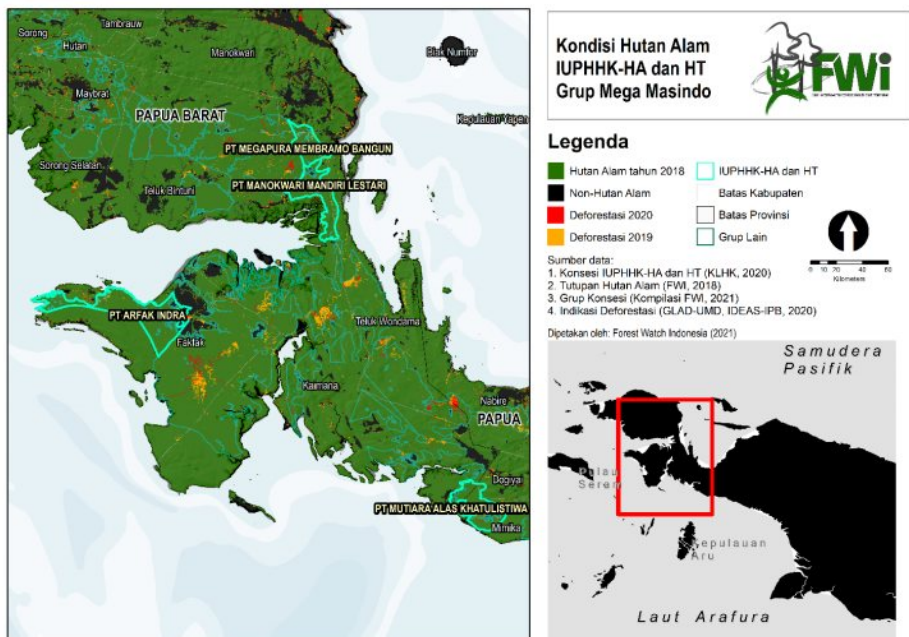
Profil Kondisi Hutan

Grup ini memiliki aktivitas penebangan kayu yang rendah pada periode tahun 2019-2020 dengan luasan tutupan hutan alam yang relatif masih tinggi. Informasi kondisi hutan dapat ditinjau pada tabel berikut.

Deskripsi	Luas (hektare)
Hutan alam tersisa tahun 2020	374.094,30
Deforestasi tahun 2020	332,9
Deforestasi tahun 2019	497,31

Tabel 27. Tutupan Hutan Alam dan Deforestasi Grup Mega Masindo

Luas tutupan hutan alam yang berada di keempat perusahaan HPH (PT MMB, PT MML, PT AI, PT MAK) milik Mega Masindo, yakni 374,094.30 hektare atau dengan kata lain 92% dari luas konsesi Mega Masindo masih ditutupi hutan alam. Luas potensi kehilangan hutan alam pada keempat perusahaan HPH ini jika dioperasionalkan seluruhnya adalah lebih dari 30 kali luas Pulau Bali. Jika dibandingkan dengan luas deforestasi yang terjadi pada 2019 dan 2020 terbilang rendah atau sebanyak 0.2%⁵⁴. Namun demikian, sertifikat PHPL PT MML sudah kedaluwarsa pada tahun 2018 dan PT MAK belum diketahui hasil penilaian PHPL-nya. Penting untuk meninjau kembali keberlanjutan dan keseriusan berusaha dari perusahaan HPH ini. Tanpa adanya jaminan sistem PHPL dan SVLK akan berdampak negatif terhadap deforestasi, degradasi, dan keberlanjutan (sosial-ekologi) di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Rekam jejak keempat perusahaan ini tentunya sangat berkaitan dengan proyeksi kehilangan hutan alam di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.



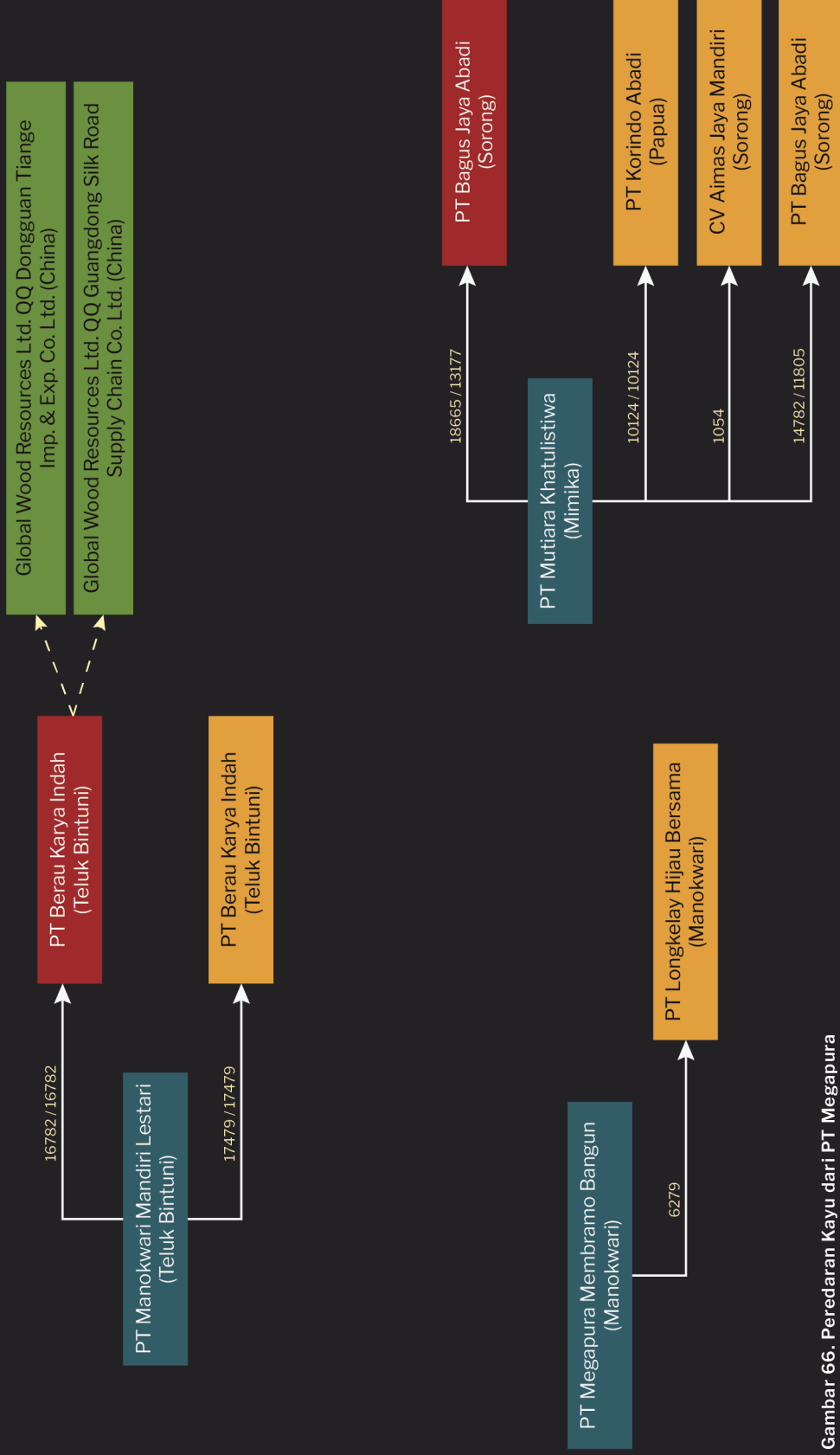
Gambar 65. Peta Kondisi Hutan Alam Grup Mega Masindo

Produksi Kayu

Pada tahun 2019 dan 2020, PT Mutiara Alas Khatulistiwa memproduksi kayu bulat sebanyak 28.593,52 m³ dan 22.719,95 m³. Berdasarkan data RPBBI 2019, kayu tersebut diterima oleh PT Bagus Jaya Abadi sebanyak 11.805,07 m³ dan PT Korindo Abadi sebanyak 10.124,4 m³. Sedangkan data PHPL mencatat kayu tersebut diterima oleh CV Aimas Jaya Mandiri (1.054,23 m³), PT Bagus Jaya Abadi (14.781,81 m³), dan sama untuk PT Korindo Abadi (10.124,4 m³). Kemudian untuk tahun 2020, data RPBBI mencatat sebanyak 13.117,1 m³ diterima oleh PT Bagus Jaya Abadi. Dan data PHPL mencatat sebanyak 18.665,4 m³ diterima oleh PT Bagus Jaya Abadi.

Untuk PT Megapura Membramo Bangun pada tahun 2019 dan 2020 memproduksi kayu bulat sebanyak 590,9 m³ dan 8.135,55 m³. Dari produksi kayu tersebut, hanya pada tahun 2019 tercatat di PHPL sebanyak 6.279,42 m³ diterima oleh PT Longkelai Hijau Bersama. Sedangkan untuk PT Manokwari Mandiri Lestari pada tahun 2019 dan 2020 memproduksi kayu bulat sebanyak 8.013,66 m³ dan 17.336,3 m³. Berdasarkan data yang tercatat di RPBB dan PHPL tahun 2019, kayu PT MML diterima oleh PT Berau Karya Indah sebanyak 17.478,7 m³.

Sedangkan untuk tahun 2020, kayu dari PT MML diterima oleh PT Berau Karya Indah sebanyak 16.782 m³ baik data dari RPBB maupun PHPL. PT Berau Karya Indah juga melakukan aktivitas ekspor selama tahun 2020, yaitu ke China lewat importir Global Wood Resources Ltd Qq Dongguan Tiange Imp. & Exp. Co.,Ltd dan Global Wood Resources Ltd Qq Guangdong Silk Road Supply Chain Co., Ltd.



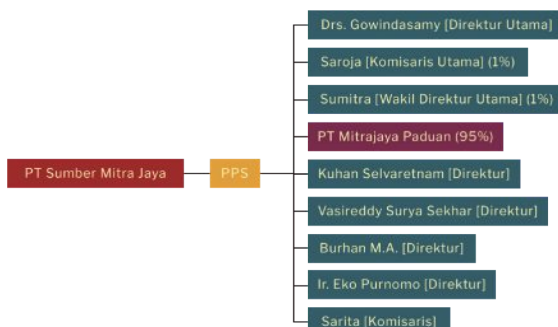
Gambar 66. Peredaran Kayu dari PT Megapura Membramo Bangun, PT Manokwari Mandiri Lestari, dan PT Mutiara Alas Khatulistiwa

Mitra Jaya

Profil Kepemilikan

Dato Drs. K. Gowindasamy, adalah pengusaha keturunan India pemilik PT Sumber Mitra Jaya (SMJ) / Mitra Jaya Group. Perusahaan itu berdiri sejak tahun 1981, dan semula hanya perusahaan kontraktor pembangunan jalan di Jakarta. Kini, SMJ berkembang dengan berbagai bisnis di sektor konstruksi (pembangunan jalan tol), pertambangan (emas dan batu bara), properti, farmasi, dan juga kehutanan lewat izin HPH PT SMJ di Sarmi dan Jayapura. Gowindasamy merupakan orang terkaya Indonesia ke 92 versi Forbes 2018, dengan kekayaan mencapai US\$ 430 juta. Ia juga pendiri sebuah lembaga filantropis Yayasan Saroja Ammal Sejahtera. Kantor pusat Mitra Jaya Group beralamatkan di Graha Irama 14th Floor. Jl. H. R Rasuna Said Blok X-1. Jakarta Selatan.

Jika mengacu kepada data administrasi hukum umum (AHU) Kemenkumham, kepemilikan mayoritas saham PT SMJ adalah atas nama PT Mitra Jaya Paduan sebesar 95%. Meski di website resmi Mitra Jaya Group⁵⁵ lini usaha dibidang kehutanan (HPH PT SMJ) tidak disebutkan sebagai lini bisnis Mitra Jaya group, namun pimpinan direksi di Mitra Jaya group sama dengan para pengurus dan pemilik saham di HPH PT SMJ. Nama-nama tersebut adalah Drs Gowindasamy, Saroja, Sumitra, Kuan Selvaretnam, Vasireddy Surya Sekhar, Burhan MA, Ir Eko Purnomo, dan Sarita.



Gambar 67. Pengurus dan Pemegang Saham PT Sumber Mitra Jaya

Profil Perusahaan

Terdapat dua izin HPH PT SMJ di Papua, yaitu berdasarkan SK.396/Menhut-II/2005 tanggal 23 November 2005 yang terletak di Jayapura, dengan luas konsesi 102 ribu hektare dan PT SMJ dengan SK.556/Menhut-II/2006 tanggal 22 Desember 2006 yang terletak di Kabupaten Sarmi, dengan luas konsesi sekitar 52 ribu hektare. Perihal sertifikasi, hingga laporan ini ditulis, belum ditemukan informasi terkait pengajuan, proses, hasil, maupun penilaian sertifikasi PHPL atau VLK terhadap konsesi PT SMJ.

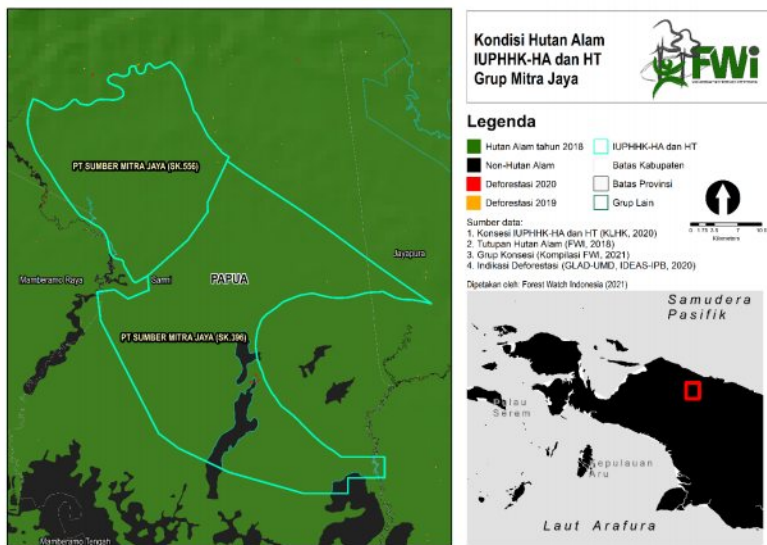
Profil Kondisi Hutan

Grup ini memiliki aktivitas penebangan kayu yang rendah pada periode tahun 2019-2020, dengan luasan tutupan hutan alam yang juga relatif rendah. Informasi kondisi hutan dapat ditinjau pada tabel berikut.

Deskripsi	Luas (hektare)
Hutan alam tersisa tahun 2020	152.381,24
Deforestasi tahun 2020	81,12
Deforestasi tahun 2019	1,69

Tabel 28. Tutupan Hutan Alam dan Deforestasi Grup Mitra Jaya

Luas tutupan hutan alam yang berada di kedua perusahaan HPH (PT SMJ) milik Mitra Jaya Group, yakni 152.381,24 hektare atau dengan kata lain 99% dari luas konsesi Mitra Jaya Group masih ditutupi hutan alam. Luas potensi kehilangan hutan alam pada kedua perusahaan HTI ini jika dioperasionalkan seluruhnya adalah lebih dari 12 kali lipat Pulau Bali. Jika dibandingkan dengan luas deforestasi yang terjadi pada 2019 dan 2020, terbilang rendah atau sebanyak 0.05%⁵⁶. Namun, kedua perusahaan belum memenuhi sertifikasi PHPL maupun SVLK, sehingga penting untuk meninjau kembali keberlanjutan dan keseriusan dari perusahaan HPH ini. Tanpa adanya jaminan sistem PHPL dan SVLK, akan berdampak negatif terhadap deforestasi, degradasi, dan keberlanjutan (sosial-ekologi) di Provinsi Papua. Rekam jejak kedua perusahaan ini tentunya sangat berkaitan dengan proyeksi kehilangan hutan alam di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua.



Gambar 68. Peta Kondisi Hutan Alam Grup Mitra Jaya

Produksi Kayu

Selama periode riset, yaitu 2019-2010, Mitra Jaya Group belum melakukan aktivitas penebangan dan produksi kayu bulat. Belakangan diketahui termasuk salah satu perusahaan yang izinnya dicabut oleh pemerintah pada 06 Januari 2022.

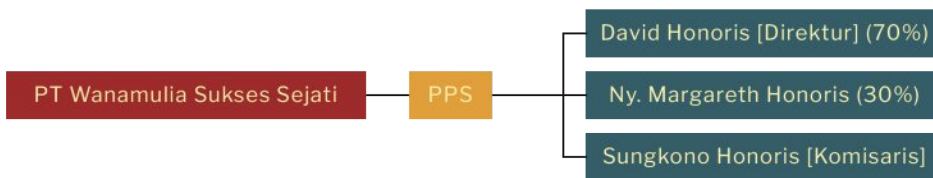
Modern Group

Profil Kepemilikan

Modern Group merupakan grup perusahaan milik keluarga Honoris. Bermula dari sebuah perusahaan distributor perlengkapan fotografi bernama PT Modern Photo Film Company (MPF) yang terbentuk 12 Mei 1971. Ho Tjek atau lebih dikenal dengan nama Otje Honoris bersama anak-anaknya menjadi distributor tunggal bagi semua produk Fujifilm Jepang di Indonesia. Bahkan, perusahaan ini berhasil memproduksi kamera pertama buatan Indonesia bermerek Fujica M-1. Setelah Otje Honoris meninggal pada tahun 1982, bisnis Modern Group diteruskan oleh anak-anaknya (Luntungan Honoris, Sungkono Honoris, Samadikun Hartono, dan Siewie Honoris). Gurita bisnis keluarga Honoris terus membesar. Mulai dari ritel, *smelter* nikel, properti, teknologi, peternakan, pertanian, kehutanan, dan lain sebagainya. Bahkan anaknya, Luntungan Honoris pernah di dapuk sebagai salah satu dari 50 orang terkaya Indonesia versi majalah Forbes Asia, dengan kekayaan mencapai 800 juta US dollar⁵⁷.

Sepak terjang keluarga Honoris juga pernah tercoreng akibat salah satu anak dari Otje Honoris (Samadikun Hartono) terlibat kasus penyelewengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Lantas dia pun menjadi buronan pemerintah Indonesia selama 13 tahun, dan baru tertangkap di Tiongkok sesaat sebelum ajang balap Formula-1 dimulai, Jumat 15 April 2016. Tidak main-main, total dana BLBI yang dikorupsi mencapai Rp. 169 milyar⁵⁸. Tidak hanya di dunia usaha, Keluarga Honoris juga ada yang terjun ke dunia politik. Anak dari Luntungan Honoris, yaitu Charles Honoris merupakan anggota DPR RI dari partai PDIP sejak tahun 2014.

Di Papua, Keluarga Honoris memiliki cadangan tanah (*land banking*) yang salah satunya dalam bentuk izin IUPHHK-HA atau HPH. Ada nama David Honoris, anak dari Sungkono Honoris yang menjadi direktur utama di dua perusahaannya di Papua. Sungkono Honoris sendiri bertindak sebagai komisaris. Sementara anaknya, David Honoris, sebagai direktur dan memegang 70% saham. Sedangkan Margareth Honoris memegang 30% saham sisanya. Dua perusahaan tersebut adalah PT Wanamulia Sukses Sejati dan PT Wanamulia Sukses Sejati Unit III.



Gambar 69. Pengurus dan Pemegang Saham PT Wanamulia Sukses Sejati

Profil Perusahaan

Modern Group memiliki izin 211.345 hektare tanah di Provinsi Papua melalui dua unit perusahaan HPH, yaitu PT Wanamulia Sukses Sejati seluas 112.245 hektare dan PT Wanamulia Sukses Sejati Unit III seluas 99.100 hektare. Kedua perusahaan tersebut hadir di Kabupaten Merauke berdasarkan izin tahun 2015 dan 2017. Sampai saat ini (Oktober 2021), kedua perusahaan tersebut berstatus tidak aktif sehingga belum ada aktivitas untuk kedua perusahaan tersebut, sehingga berpengaruh terhadap tidak adanya sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari yang dimiliki oleh perusahaan ini.

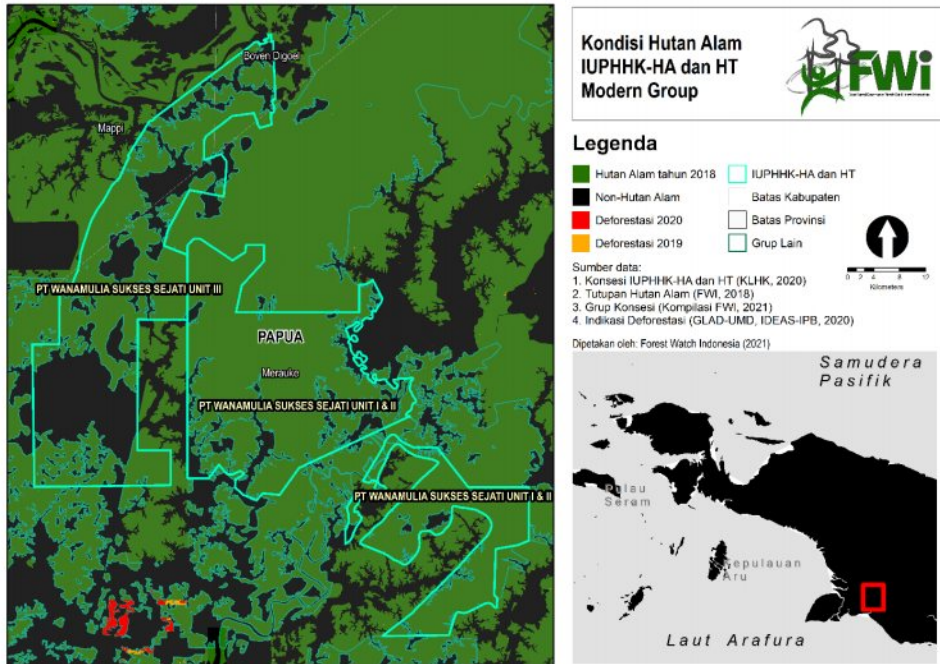
Profil Kondisi Hutan

Luas tutupan hutan alam yang berada di kedua perusahaan HPH (PT WSS) milik Modern Group, yakni 153.661,8 hektare, atau dengan kata lain 73% dari luas konsesi Modern Group masih ditutupi hutan alam. Luas potensi kehilangan hutan alam pada kedua perusahaan HPH ini jika dioperasionalkan seluruhnya adalah lebih dari 12 kali lipat luas Pulau Bali. Jika dibandingkan dengan luas deforestasi yang terjadi pada 2019 dan 2020, terbilang sangat rendah atau sebanyak 0.1%⁵⁹. Namun, kedua perusahaan belum memenuhi sertifikasi PHPL maupun SVLK, sehingga penting untuk meninjau kembali keberlanjutan dan keseriusan dari perusahaan HPH ini. Tanpa adanya jaminan sistem PHPL dan SVLK akan berdampak negatif terhadap deforestasi, degradasi, dan keberlanjutan (sosial-ekologi) di Kabupaten Merauke. Rekam jejak kedua perusahaan ini tentunya sangat berkaitan dengan proyeksi kehilangan hutan alam di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua.

164

Deskripsi	Luas (hektare)
Hutan alam tersisa tahun 2020	153.661,8
Deforestasi tahun 2020	6,86
Deforestasi tahun 2019	1,98

Tabel 29. Tutupan Hutan Alam dan Deforestasi Grup Modern



Gambar 70. Kondisi Hutan Alam Grup Modern

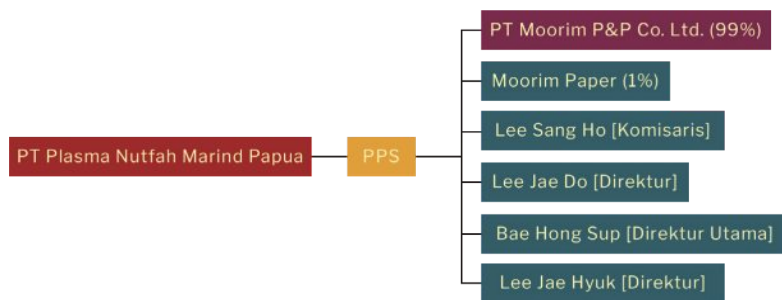
Produksi Kayu

Dalam proses pengumpulan dan analisis data kajian ini (2019-2020), PT Wanamulia Sukses Sejati Unit I, II dan III tidak tercatat atau belum melaporkan aktivitas penebangan kayu maupun pengiriman kayu keluar konsesi. Dibuktikan dengan tidak adanya data di RPBBI, PNPB, dan sistem informasi lain di KLHK pada periode tersebut.

Moorim

Profil Kepemilikan

PT Plasma Nutfah Marind Papua (PNMP) pada 2011 dibeli oleh perusahaan Moorim (asal Korea Selatan)⁶⁰. Sahamnya 99% dimiliki oleh PT Moorim P&P, Co., LTD (99%) dan Moorim Paper (1%), dimana kedua perusahaan tersebut juga masuk dalam Moorim Group dan berlokasi di Korea Selatan. Ketua Dewan Moorim Group⁶¹ adalah Lee Dong Wook. Jajaran direksi juga ditempati oleh orang asal Korea Selatan.



Gambar 71. Pengurus dan Pemegang Saham PT Plasma Nutfah Marind Papua

Profil Perusahaan

PT Plasma Nutfah Marind Papua (PNMP) satu-satunya perusahaan yang berafiliasi dengan Moorim. Konsesi PT PNMP berada di Merauke, Provinsi Papua dengan luas konsesi 64.050 hektare. Beroperasi melalui SK.624/ Menhut-VI/2009 tanggal 14 November 2011. Moorim group tidak memiliki kebijakan NDPE yang eksplisit, tetapi terdapat strategi perusahaan berupa komitmen untuk melakukan kebijakan ramah lingkungan sesuai dengan kebijakan pemerintah “rendah karbon dan pertumbuhan hijau”. Sekedar informasi, perusahaan induk Moorim di Korea memegang sertifikat Forest Stewardship Council / FSC untuk pengelolaan hutan. Sedangkan untuk PT PNMP sendiri belum diketahui informasi terkait sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari yang dimiliki.

Profil Kondisi Hutan

Grup ini memiliki aktivitas penebangan kayu yang masuk ke kelas sedang pada periode tahun 2019-2020 dengan luasan tutupan hutan alam yang relatif rendah. Informasi kondisi hutan dapat ditinjau pada tabel berikut.

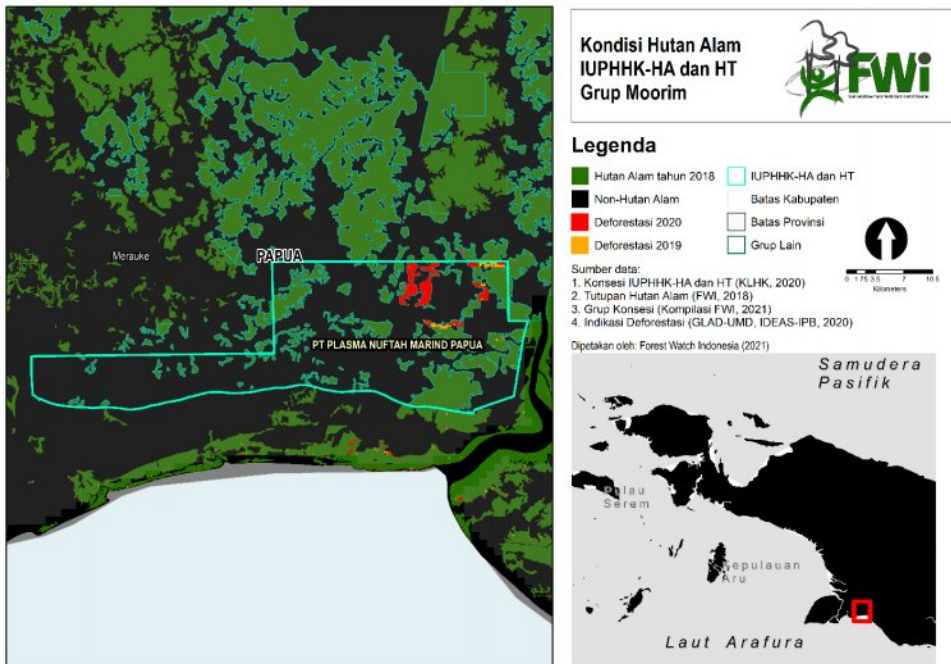
Luas tutupan hutan alam yang berada di PT PNMP, yakni 10.286,57 hektare atau dengan kata lain 16% dari luas konsesi Moorim Group masih ditutupi hutan alam. Luas potensi kehilangan hutan alam pada perusahaan HTI ini jika juga dengan pemanfaatan hutan alam yang tersisa adalah hampir seluas Pulau Bali. Jika dibandingkan dengan luas deforestasi yang terjadi pada 2019 dan 2020 masih terbilang sangat tinggi atau sebanyak 44%⁶². Tanpa adanya jaminan sistem PHPL dan SVLK pada perusahaan ini, maka akan berdampak negatif terhadap deforestasi, degradasi, dan keberlanjutan (sosial-ekologi) di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Rekam jejak perusahaan ini tentunya sangat berkaitan dengan proyeksi kehilangan hutan alam di Provinsi Papua.

163

Deskripsi	Luas (hektare)
Hutan alam tersisa tahun 2020	10,286.57
Deforestasi tahun 2020	4288.47
Deforestasi tahun 2019	336.92

Tabel 30. Tutupan Hutan Alam dan Deforestasi Grup Moorim

Aidenvironment⁶³ telah mengidentifikasi praktik Moorim Group pada tahun 2021. Hasilnya, terdapat empat perusahaan yang melakukan deforestasi hutan seluas 7.000 hektare untuk kebutuhan bahan baku industri di Papua antara tahun 2016 hingga Mei 2021. Dan Moorim lewat PT PNMP adalah penyumbang deforestasi terbesar, yang telah membuka hutan seluas 3.800 hektare selama jangka waktu ini.



Gambar 72. Kondisi Hutan Alam Grup Moorim

Produksi Kayu

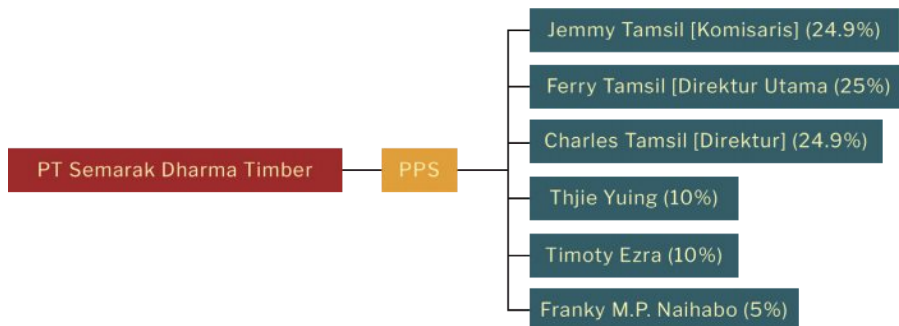
Dalam proses pengumpulan dan analisis data kajian ini (2019-2020), PT Plasma Nutfah Marind Papua (PNMP) tidak tercatat atau belum melaporkan aktivitas penebangan kayu maupun pengiriman kayu keluar konsesinya, dibuktikan dengan tidak adanya data di RPBBI, PNBPN dan sistem informasi lainnya di KLHK pada periode tersebut. Padahal dari analisis spasial terlihat pada konsesi PT PNMP dalam periode 2019-2020 telah terjadi deforestasi seluas kurang lebih 4.624 hektare.

Patria

Profil Kepemilikan

Kepemilikan saham PT Semarak Dharma Timber (SDT) adalah atas nama Jemmy Tamsil, Ferry Tamsil, dan Charles Tamsil sebesar 75%. Dan sisa sahamnya dimiliki oleh Thjie Yuing, Timoty Ezra, dan Franky MP Naibaho. Selain sebagai Direktur Utama PT SDT, Patria Group juga dimiliki oleh keluarga Tamsil⁶⁴.

Pada tahun 2018, FT sempat terjerat kasus penyuaipan yang melibatkan PT Victory Cemerlang Indonesia Wood Industry (VCIWI) dengan Kadis Kehutanan Provinsi Papua, Jan Jap Ormuseray. Namun kasusnya terhenti sampai Jakarta. FT diduga hendak menerima suap dari Direktur PT VCIWI mengenai kasus *illegal logging*.



Gambar 73. Pengurus dan Pemegang Saham PT Semarak Dharma Timber

Profil Perusahaan

PT SDT memiliki izin konsesi seluas 164 ribu hektare, berdasarkan izin SK.287/Menhut-II/2014 tanggal 20 Maret 2014, dan terletak di Kabupaten Keerom, Papua. Kantor pusatnya berada di Jl. Pakin No 1, Rukan Mitra Bahari Blok E 17-19, Penjaringan, Jakarta. Selain itu, PT SDT juga memiliki pabrik kayu di Distrik Waris, Keerom, berdasarkan izin usaha industri SK Menteri Kehutanan tertanggal 1 Maret 2013 untuk 36.000 kubik kayu gergajian per tahun. Selain konsesi HPH, ada dua konsesi sawit milik Patria Group, yaitu PT Semarak Agri Lestari dan PT Patria Agri Lestari (PAL). Keduanya, ada di lahan alokasi penggunaan lain (APL) untuk pencadangan Kota Terpadu Mandiri Senggi Distrik Keerom. PAL sudah dapat IUP SK No. 03 dari Kepala BKPM Papua tertanggal 5 Oktober 2016.

PT Ayamaru Sertifikasi melalui surat Nomor: 310/A-SERT/VIII/2020 menyampaikan hasil pelaksanaan audit jarak jauh (remote audit) Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu terhadap PT SDT dan telah ‘memenuhi” standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifiser,. PT SDT dinyatakan “Lulus” Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor :SLK.164/ASERT/LVLK-011-IDN, dengan masa berlaku sejak 12 Agustus 2020 sampai dengan 11 Agustus 2023.

Profil Kondisi Hutan

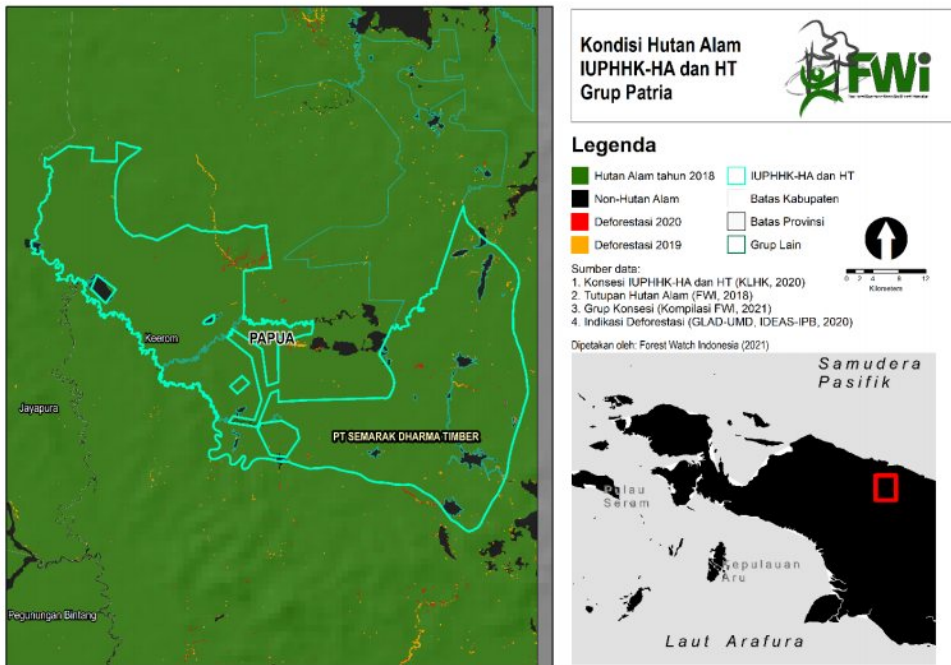
Grup ini memiliki aktivitas penebangan kayu yang masuk ke kelas rendah pada periode tahun 2019-2020 dengan luasan tutupan hutan alam yang juga relatif rendah. Informasi kondisi hutan dapat ditinjau pada tabel berikut.

Profil Kondisi Hutan

Luas tutupan hutan alam yang berada di PT SDT, yakni 159.346,99 hektare atau dengan kata lain 97% dari luas konsesi di bawah naungan Patria Group ini masih ditutupi hutan alam. Luas potensi kehilangan hutan alam pada perusahaan HPH ini jika dioperasionalkan seluruhnya mencapai lebih dari 12 kali luas Pulau Bali. Jika dibandingkan dengan luas deforestasi yang terjadi pada 2019 dan 2020 masih terbilang rendah atau sebanyak 0.23%⁶⁵. Setelah dikatakan memenuhi melalui terbitnya sertifikat SVLK tentunya perusahaan ini memiliki kemungkinan lebih leluasa melakukan operasional kerja sebagai perusahaan HPH. Dampak negatif yang mungkin timbul dari adanya aktivitas perusahaan ini seperti deforestasi, degradasi, dan keberlanjutan (sosial-ekologi) di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua. Rekam jejak perusahaan ini tentunya sangat berkaitan dengan proyeksi kehilangan hutan alam di Provinsi Papua.

Deskripsi	Luas (hektare)
Hutan alam tersisa tahun 2020	159.346,99
Deforestasi tahun 2020	240,64
Deforestasi tahun 2019	127,17

Tabel 31. Tutupan Hutan Alam dan Deforestasi Grup Patria



Gambar 74. Kondisi Hutan Alam Grup Patria

Produksi Kayu

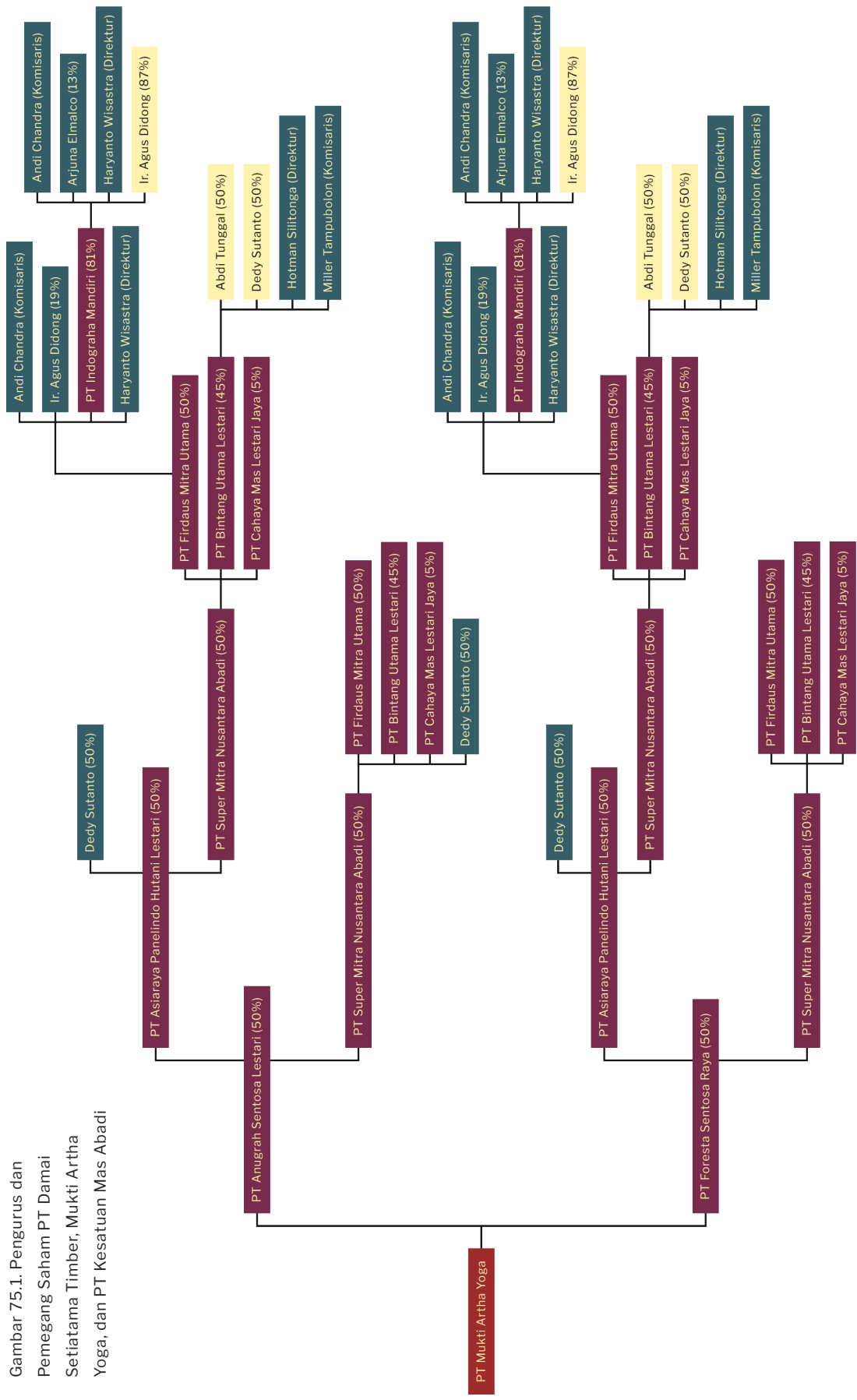
Dalam proses pengumpulan dan analisis data kajian ini (2019-2020), PT Semarak Dharma Timber tercatat memproduksi kayu bulat sebanyak 6.847,98 m³, namun tidak ditemukan data pengiriman kayu ke industri yang tercatat di RPBBi maupun PHPL dalam periode tersebut.

Raja Garuda Mas

Profil Kepemilikan

Kepemilikan saham pada perusahaan di bawah naungan Raja Garuda Mas (RGM) group ini didominasi nama Ir Agus Didong sebesar 87%, dan sisanya dimiliki oleh Andi Chandra, Arjuna El Malco, dan Harianto Wisastra pada perusahaan PT Firdaus Mitra Utama. Kepemilikan saham grup perusahaan ini juga dimiliki oleh Abdi Tunggal dan Dedy Sutanto pada perusahaan PT Bintang Utama Lestari.

Gambar 75.1. Pengurus dan Pemegang Saham PT Damai Setiatama Timber, Mukti Artha Yoga, dan PT Kesatuan Mas Abadi



Profil Perusahaan

RGGM memiliki tiga anak perusahaan yang bergerak di bidang eksploitasi hutan dan perkebunan kayu, yaitu PT Damai Setiatama Timber (HPH), Mukti Artha Yoga (HPH), dan PT Kesatuan Mas Abadi (HTI), dengan luas masing-masing konsesi secara berurutan sekitar 315.475 hektare, 151.690 hektare, dan 99.980 hektare. PT Damai Setiatama Timber (DST) memiliki konsesi di dua kabupaten, yaitu Boven Digoel dan Mappi, sedangkan PT Mukti Artha Yoga (MAY) di Kabupaten Merauke. Lain halnya dengan konsesi Hutan Tanaman Industri PT Kesatuan Mas Abadi (KMA) yang memiliki konsesi di Kabupaten Fakfak dan Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. PT DST memiliki konsesi sejak tahun 2013 lewat izin SK. 565/Menhut-II/2013. Sedangkan PT MAY lebih dahulu di tahun 2007 setelah mendapatkan izin SK. 57/ Menhut-II/2007 dan PT KMA merupakan perusahaan baru di tahun 2019 lewat izin SK. 552/Menlhk/Setjen/PLA.2/8/2019.

Berdasarkan data yang kami peroleh, ketiga perusahaan grup RGM yang memiliki konsesi di Papua dan Papua Barat belum memiliki sertifikasi PHPL dan VLK, kecuali PT DST. PT DST memiliki sertifikasi PHPL yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi PT Ayamaru Sertifikasi melalui surat Nomor 035/ASERT-PHPL/kpts/pnlk/XII/2019.

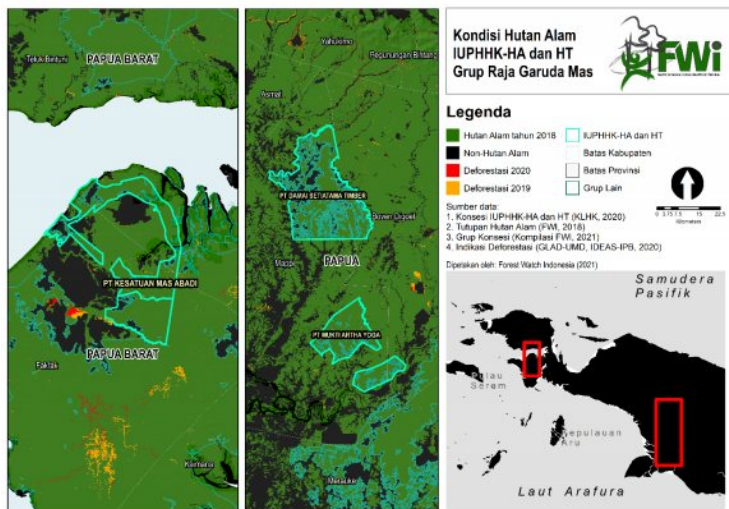
Profil Kondisi Hutan

Luas tutupan hutan alam yang berada di RGM Group (PT DST, PT MAY, PT KMA) yakni 421.593,90 hektare, atau dengan kata lain 74% dari luas konsesi RGM Group masih ditutupi hutan alam. Luas potensi kehilangan hutan alam pada perusahaan HPH dan HTI ini jika ditambah dengan pemanfaatan hutan alam yang tersisa adalah 34 kali dari luas Pulau Bali. Jika dibandingkan dengan luas deforestasi yang terjadi pada 2019 dan 2020 masih terbilang sangat rendah, atau sebanyak 0.1%⁶⁶. Tanpa adanya jaminan sistem PHPL dan SVLK pada perusahaan ini (PT MAY dan PT KMA), maka akan berdampak negatif, berupa deforestasi, degradasi, dan keberlanjutan (sosial-ekologi) di Kabupaten Boven

Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Merauke. Rekam jejak perusahaan ini tentunya sangat berkaitan dengan proyeksi kehilangan hutan alam di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Deskripsi	Luas (hektare)
Hutan alam tersisa tahun 2020	421.593,90
Deforestasi tahun 2020	394,52
Deforestasi tahun 2019	68,7

Tabel 32. Tutupan Hutan Alam dan Deforestasi Grup Raja Garuda Mas



Gambar 76. Peta Kondisi Hutan Alam Grup Raja Garuda Mas

Produksi Kayu

Dalam proses pengumpulan dan analisis data kajian ini (2019-2020), anak perusahaan RMG di Papua tidak tercatat atau belum melaporkan aktivitas penebangan kayu, maupun pengiriman kayu keluar konsesinya, dibuktikan dengan tidak adanya data di RPBBI, PNBP dan sistem informasi lainnya di KLHK pada periode tersebut.

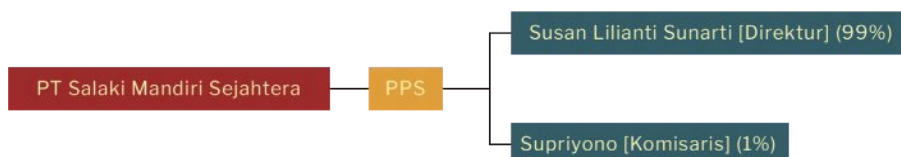
Rimbunan Hijau

r

Profil Kepemilikan

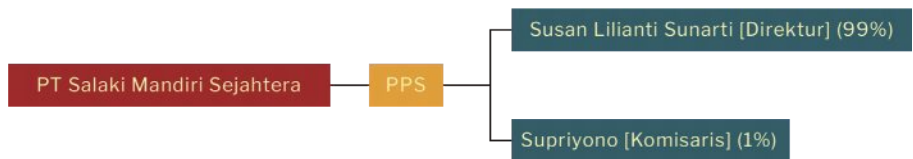
Rimbunan Hijau Group adalah perusahaan pembalok hutan multinasional asal Malaysia, yang dikendalikan oleh pengusaha Malaysia Tiong Hiew King. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1975, dan diperkirakan memiliki omset tahunan lebih dari US\$1 miliar, menurut Dewan Bisnis Malaysia-China. Selain Malaysia dan Indonesia, perusahaan ini juga beroperasi di banyak negara, termasuk Papua Nugini, Guinea Khatulistiwa, Gabon, Vanuatu, Selandia Baru, dan Rusia. Bahkan di Papua Nugini, Rimbunan Hijau adalah satu-satunya operator penebangan terbesar, dan menjalankan pabrik penggergajian terbesar di negara itu. Ia juga memiliki salah satu dari dua surat kabar utama di Papua Nugini, yaitu *The National*.

Saham PT Salaki Mandiri Sejahtera dimiliki oleh Susan Lilianti Sunarti, yang sekaligus menjabat direktur dan Supriyono sebagai komisaris. Sampai tahun 2016, baik PT SMS dan PT Wapoga Mutiara Timber⁶⁷ (perusahaan yang tergabung dalam Wapoga Group), saham mayoritasnya masih dimiliki oleh Susan Lilianti Sunarti, warga negara Indonesia yang juga pernah menjabat sebagai presiden direktur dan presiden komisaris PT Wapoga Mutiara Timber. Karena ilegal bagi perusahaan milik asing di Indonesia untuk menjalankan konsesi penebangan, ada kemungkinan Susan Lilianti Sunarti bertindak sebagai pemegang saham *nominee*, sedangkan keluarga Tiong adalah pemilik manfaat yang sebenarnya⁶⁸.



Gambar 77. Pengurus dan Pemegang Saham PT Salaki Mandiri Sejahtera

Saham PT Salaki Mandiri Sejahtera dimiliki oleh Susan Lilianti Sunarti, yang sekaligus menjabat direktur dan Supriyono sebagai komisaris. Sampai tahun 2016, baik PT SMS dan PT Wapoga Mutiara Timber⁶⁷ (perusahaan yang tergabung dalam Wapoga Group), saham mayoritasnya masih dimiliki oleh Susan Lilianti Sunarti, warga negara Indonesia yang juga pernah menjabat sebagai presiden direktur dan presiden komisaris PT Wapoga Mutiara Timber. Karena ilegal bagi perusahaan milik asing di Indonesia untuk menjalankan konsesi penebangan, ada kemungkinan Susan Lilianti Sunarti bertindak sebagai pemegang saham *nominee*, sedangkan keluarga Tiong adalah pemilik manfaat yang sebenarnya⁶⁸.



Gambar 77. Pengurus dan Pemegang Saham PT Salaki Mandiri Sejahtera

Profil Perusahaan

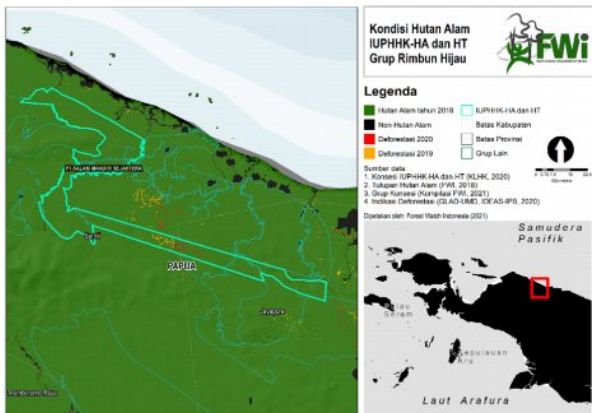
Setelah PT WMT keluar dari Rimbunan Hijau Group, saat ini hanya menyisakan satu perusahaan HPH di Papua, yaitu PT Salaki Mandiri Sejahtera (SMS). Luas konsesi PT SMS adalah 79.130 hektare yang berada di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. PT SMS beroperasi dengan SK.396/Menhut-II/2006 tanggal 17 Juli 2006 dan telah mendapatkan sertifikat PHPL dari LS Inti Multima Sertifikasi dengan nomor sertifikat IMS-SPHPL-021 yang dikeluarkan tanggal 25 Oktober 2018 dan berlaku hingga 29 Oktober 2023.

Profil Kondisi Hutan

Grup ini memiliki aktivitas penebangan kayu yang rendah pada periode tahun 2019-2020, dengan luasan tutupan hutan alam yang juga relatif rendah. Informasi kondisi hutan dapat ditinjau pada tabel berikut.

Deskripsi	Luas (hektare)
Hutan alam tersisa tahun 2020	74.585,76
Deforestasi tahun 2020	176,28
Deforestasi tahun 2019	141,46

Tabel 33. Tutupan Hutan Alam dan Deforestasi Grup Rimbunan Hijau

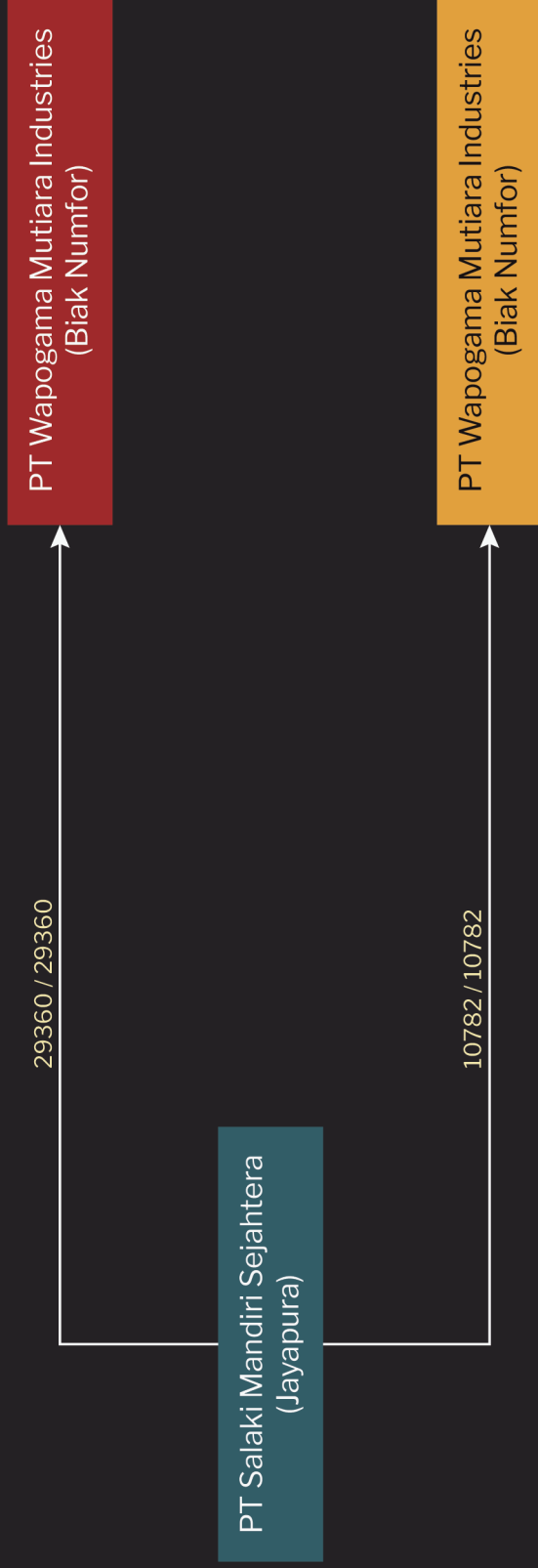


Gambar 78. Peta Kondisi Hutan Alam Grup Rimbunan Hijau

Luas tutupan hutan alam yang berada di PT SMS, yakni 74.585,76 hektare, atau dengan kata lain 91% dari luas konsesi PT SMS masih ditutupi hutan alam. Luas potensi kehilangan hutan alam pada perusahaan HPH ini jika dioperasionalkan seluruhnya adalah lebih dari 6 kali lipat luas Pulau Bali. Jika dibandingkan dengan luas deforestasi yang terjadi pada 2019 dan 2020, terbilang tinggi atau sebanyak 0.4%⁶⁹. Setelah mendapatkan pengakuan seperti sertifikasi PHPL, perusahaan ini akan lebih leluasa melakukan operasional kerja sebagai perusahaan HPH di Papua. Terlebih, perusahaan ini telah beroperasi sejak 2006, yang memungkinkan untuk melakukan pemanfaatan hutan yang turut berdampak pada deforestasi, degradasi, dan keberlanjutan (sosial-ekologi). Sebagai perusahaan HPH yang memiliki inti bisnis berupa pemanfaatan hutan alam, maka rekam jejak perusahaan ini sangat berkaitan dengan proyeksi kehilangan hutan alam di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua.

Produksi Kayu

Pada tahun 2019-2020, PT Salaki Mandiri Sejahtera memproduksi kayu bulat sebesar 26.325,05 m³ dan 21.626,89 m³. Berdasarkan data RPBBI dan PHPL tahun 2019, kayu tersebut diterima oleh PT Wapoga Mutiara Industries sebesar 10.782,37 m³. Untuk tahun 2020, RPBBI dan PHPL juga mencatat data yang sama, yaitu sebesar 29.359,6 m³ yang diterima oleh PT Wapoga Mutiara Industries.

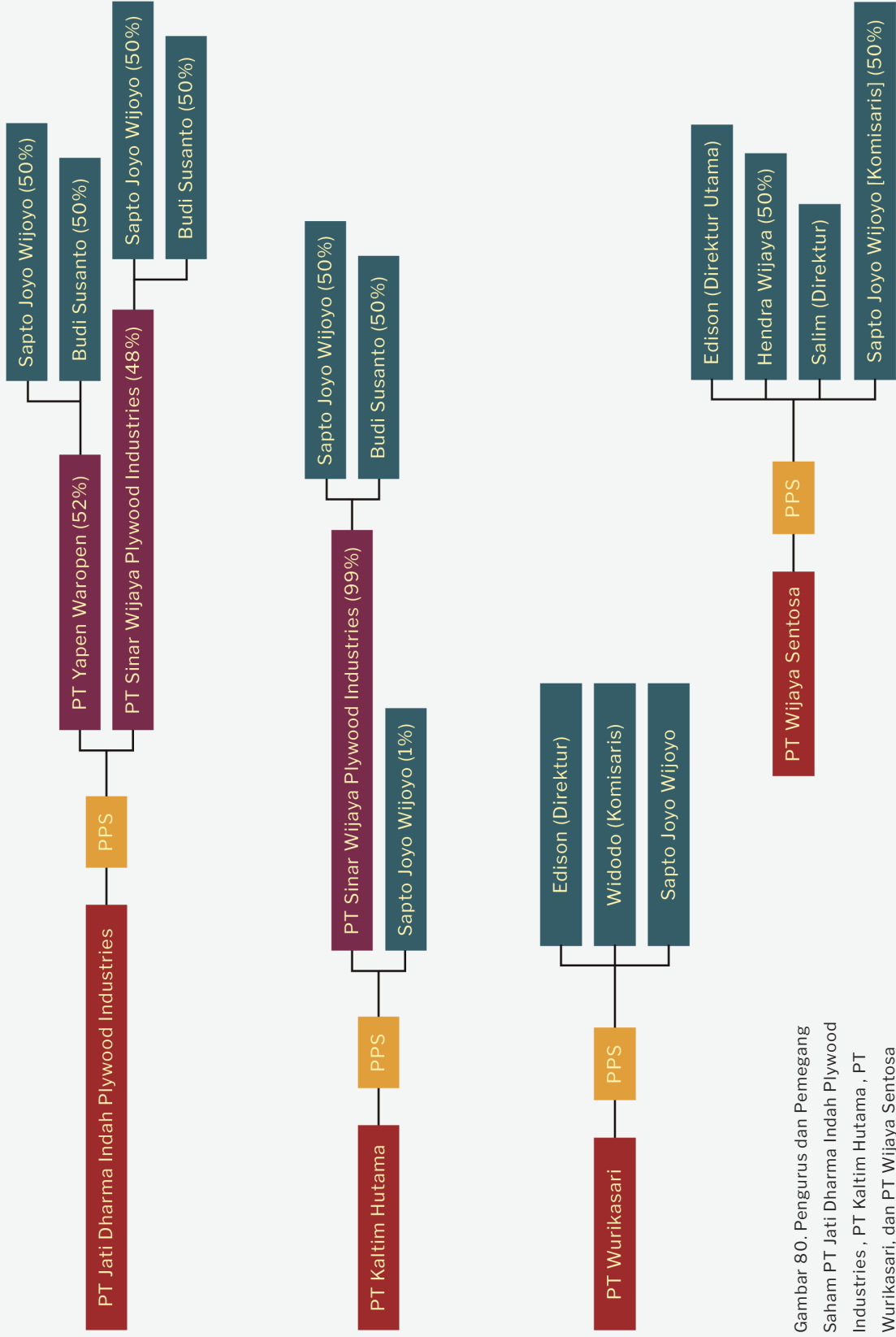


Gambar 79. Peta Kondisi Hutan
Alam PT Salaki Mandiri Sejahtera

Sinar Wijaya

Profil Kepemilikan

Sinar Wijaya Group adalah perusahaan swasta Indonesia milik Sapto Joyo Wijoyo, yang bergerak dalam bidang industri berbasis kayu. Didirikan pada tahun 2002, dengan lini usaha utamanya adalah industri pengolahan kayu berkapasitas 140.000 m³ untuk kayu lapis dan 36.000 m³ untuk merbau *decking* dan *flooring*. Selain sektor penebangan dan industri kayu yang diwakili oleh empat anak perusahaannya (PT Jati Dharma Indah Plywood Industries, PT Kaltim Utama, PT Wukirasari, dan PT Wijaya Sentosa), Sinar Wijaya Group juga menyediakan perusahaan transportasi lewat PT Sinar Jaya Wijaya. Kepemilikan saham dari anak-anak perusahaan SWG bermuara pada dua nama yaitu Sapto Joyo Wijoyo dan Budi Susanto.



Gambar 80. Pengurus dan Pemegang Saham PT Jati Dharma Indah Plywood Industries, PT Kaltim Hutama, PT Wurikasari, dan PT Wijaya Sentosa

Profil Perusahaan

Sinar Wijaya Group memiliki empat anak perusahaan yang bergerak di bidang HPH, yaitu PT Jati Dharma Indah Plywood Industries (8/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016), PT Wijaya Sentosa (SK.33/Menhut-II/2013), PT Wukirasari (SK.477/Menhut-II/2008) dan PT Kaltim Utama (SK.652/Menhut-II/2009). Total luasan konsesi keempat perusahaan sekitar 548.215 hektare. Tiga diantaranya berlokasi di Provinsi Papua Barat, dan satu lagi di Papua. Keempat perusahaan ini merupakan penyedia bahan baku utama industri PT Sinar Wijaya Plywood Industries. Terletak di Dawai - Serui, Yapen Waropen, Provinsi Papua, daerah industrinya terletak di area seluas 274 hektare.

Nama Perusahaan	Lokasi	Luas Konsesi (Hektare)
PT Jati Dharma Indah Plywood Industries	Nabire, Papua	139.470
PT Kaltim Utama	Kaimana, Papua Barat	161.670
PT Wijaya Sentosa	Teluk Wondama, Papua Barat	130.755
PT Wukirasari	Teluk Bintuni, Papua Barat	116.320

Tabel 34. Luas Konsesi Anak Perusahaan Sinar Wijaya Group

Terkait sertifikat PHPL dan juga S-LK, PT WS telah memiliki sertifikat PHPL berpredikat baik dari PT Tuv Rheinland Indonesia dengan nomor 824303140005, berlaku sejak 10 Maret 2019 hingga 9 Maret 2024. PT JDPI juga memiliki sertifikat PHPL dengan predikat baik dari PT Transtra Permada bernomor 06/LPPHPL-018/XII/2019, berlaku sejak 17 Desember 2019 hingga 8 Januari 2025. PT Wukirasari juga memperoleh S-PHPL bernomor 51-SIC-04.01 dari PT Sarbi International Certification yang berlaku sejak 20 Februari 2019 hingga 19 Februari 2024. Sedangkan untuk PT Kaltim Utama S-PHPL dengan Nomor LASER/PHPL-KALHUT/2014/1 yang berlaku sejak 21 Mei 2014 dan seharusnya berlaku hingga

20 Mei 2019 dibekukan oleh PT Lambodja Sertifikasi pada 21 September 2015⁷⁰. Namun informasi terakhir yang kami ketahui melalui surat keputusan Nomor: 080/IMS-SK/IX/2019 dari PT Inti Multima Sertifikasi yang menyatakan PT KH memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat VLK-nya.

Profil Kondisi Hutan

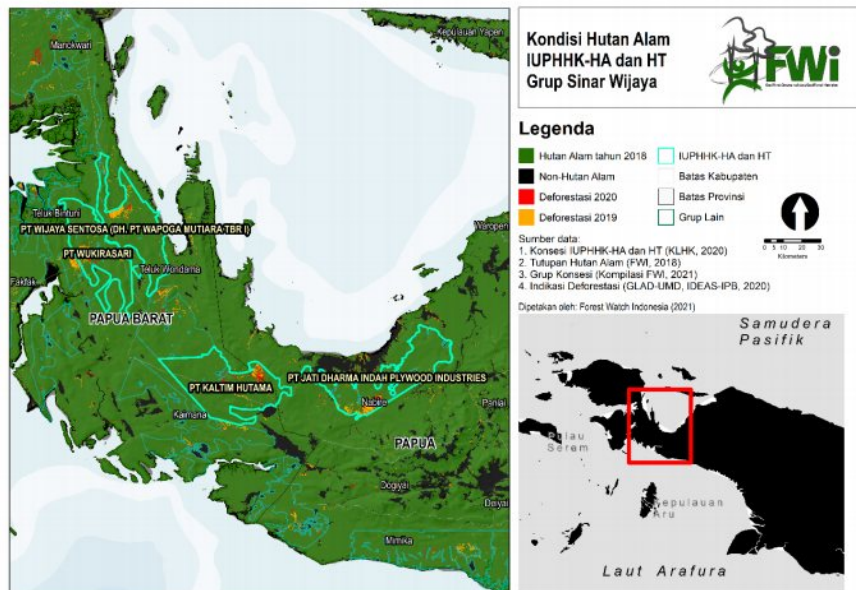
Grup ini memiliki aktivitas penebangan kayu yang tinggi pada periode tahun 2019-2020, dengan luasan tutupan hutan alam yang juga relatif tinggi. Informasi kondisi hutan dapat ditinjau pada tabel berikut.

Deskripsi	Luas (hektare)
Hutan alam tersisa tahun 2020	795.107,39
Deforestasi tahun 2020	1.422,23
Deforestasi tahun 2019	3.708,3

Tabel 35. Tutupan Hutan Alam dan Deforestasi Grup Sinar Wijaya

Luas tutupan hutan alam yang berada di keempat perusahaan HPH, yaitu PT Jati Dharma Indah Plywood Industries (JDIPI), PT Kaltim Utama (KH), PT Wukirasari, dan PT Wijaya Sentosa (WS) milik Sinar Wijaya Group, yakni 374.094,30 hektare atau dengan kata lain 92% dari luas konsesi Sinar Wijaya Group masih ditutupi hutan alam. Luas potensi kehilangan hutan alam pada keempat perusahaan HPH ini jika dioperasionalkan seluruhnya adalah lebih dari 30 kali lipat luas Pulau Bali. Jika dibandingkan dengan luas deforestasi yang terjadi pada 2019 dan 2020, terbilang rendah atau sebanyak 0.2%⁷¹. Setelah mendapatkan pengakuan seperti sertifikasi PHPL dan SVLK, perusahaan ini akan lebih leluasa melakukan operasional kerja sebagai perusahaan HPH di Papua. Perusahaan berupaya untuk

melakukan pemanfaatan hutan, yang tentunya akan berdampak pada deforestasi, degradasi, dan keberlanjutan (sosial-ekologi) di Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Nabire. Rekam jejak perusahaan ini sangat berkaitan dengan proyeksi kehilangan hutan alam di Provinsi Papua dan Papua Barat.



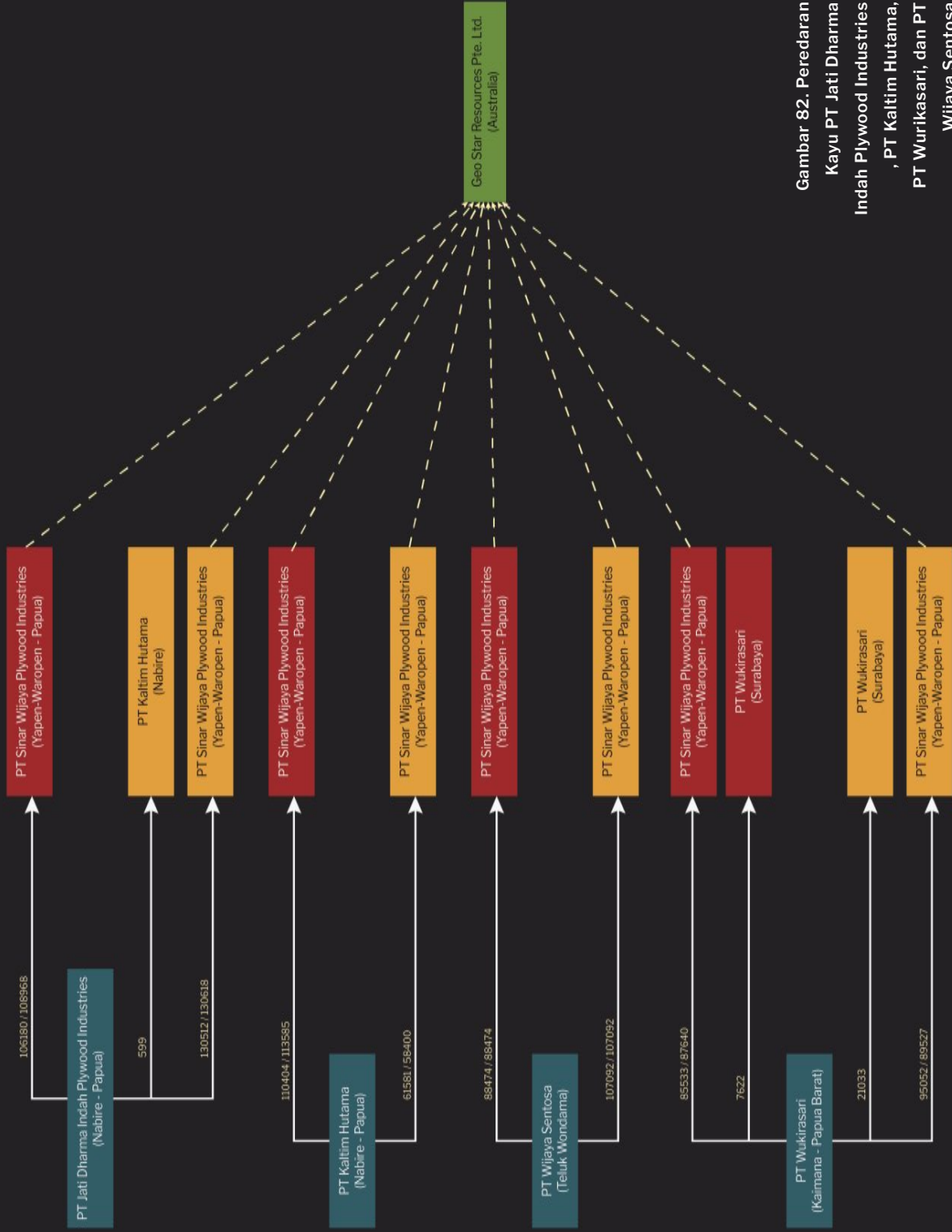
Gambar 81. Peta Kondisi Hutan Grup Sinar Wijaya

Produksi Kayu

Pada periode tahun 2019 dan 2020, PT JDIPi memproduksi kayu bulat sebanyak 127.502,21 m³ dan 107.287,83 m³. Berdasarkan data RPBBi tahun 2019, kayu yang berasal dari PT JDIPi diterima oleh PT Sinar Wijaya Plywood Industries sebesar 130.617,96 m³, sedangkan dari data PHPL sebanyak 599,12 m³ diterima oleh PT Kaltim Hutama dan 130.512,39 m³ diterima oleh PT Sinar Wijaya Plywood Industries. Pada tahun 2020, kayu yang diterima PT Sinar Wijaya Plywood Industries berdasarkan data RPBBi dan PHPL yaitu 108.968 m³ dan 106.180 m³.

Pada periode yang sama, PT Kaltim Utama mampu memproduksi kayu bulat sebesar 14.486,55 m³ dan 117.892,68 m³. Pada tahun 2019, berdasarkan data dari RPBBI dan PHPL kayu dari HPH tersebut diterima oleh PT Sinar Wijaya Plywood Industries sebesar 58.400,03 m³ dan 61.580,84 m³. Dan untuk tahun 2020 sebesar 113.585 m³ dan 110.404 m³. Begitu pun. dengan PT Wijaya Sentosa yang pada tahun 2019 dan 2020 memproduksi kayu bulat sebesar 107.642,51 m³ dan 89.654,24 m³, berdasarkan data RPBBI dan PHPL tahun 2019 kayu hasil produksinya diterima oleh PT Sinar Wijaya Plywood Industries sebesar 107.092,45 m³, dan pada tahun 2020 sebesar 88.474,3 m³.

Kemudian untuk PT Wukirasari yang pada tahun 2019 dan 2020 memproduksi kayu bulat sebesar 111.108,11 m³ dan 96.616,87 m³. Berdasarkan data RPBBI pada tahun 2019, kayu dari PT Wukirasari diterima oleh industri PT Sinar Wijaya Plywood Industries sebesar 89.526,65 m³, dan data PHPL mencatat 95.052,39 m³ untuk PT Sinar Wijaya Plywood Industries dan 21.032,94 m³ untuk PT Wurikasari sendiri. Sedangkan untuk tahun 2020, data RPBBI mencatat adanya kayu yang diterima oleh PT Sinar Wijaya Plywood Industries sebesar 87.639,9 m³, sedangkan berdasarkan data PHPL tercatat penerimaan atas nama PT Sinar Wijaya Plywood Industries sebesar 85.533,2 m³ dan sebesar 7.622,48 m³ untuk PT Wurikasari. Pada tahun 2020, proses ekspor yang dilakukan Sinar Wijaya Group dilakukan oleh PT Sinar Wijaya Plywood Industries ke Australia, dengan tujuan Geo Star Resources Pte Ltd.



Gambar 82. Peredaran Kayu PT Jati Dharma Indah Plywood Industries, PT Kaltim Hutama, PT Wukirasari, dan PT Wijaya Sentosa

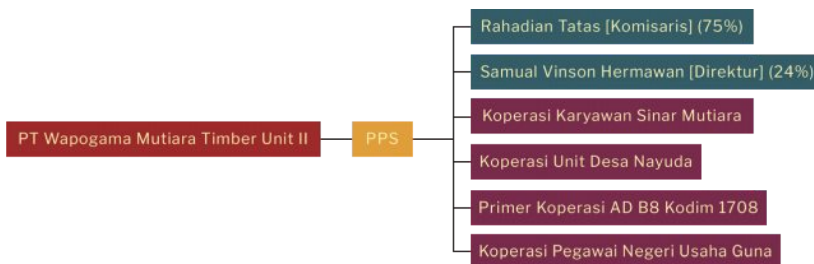
Wapoga Group



Profil Kepemilikan

Sebelum tahun 2016, PT Wapoga Mutiara Timber (WMT) memiliki dua unit konsesi, yaitu Unit I dan Unit II. Belakangan, PT WMT Unit I telah berubah nama menjadi PT Wijaya Sentosa (Sinar Wijaya group). Begitu pun dengan pemilik sahamnya, yang semula milik Susan Lilianti Sunarti, kini dikuasai oleh Sapto Joyo Wijoyo dari Sinar Wijaya Group. Sedangkan PT WMT unit II dimiliki oleh Rahadian Tatas, Samuel Vinson Hermawan, dan sebagian oleh Koperasi Karyawan Sinar Mutiara, Koperasi Unit Desa Nayuda, Koperasi AD B8 Kodim 1708, serta Koperasi Pegawai Negeri Usaha Guna. Wapoga Group berbasis di Malaysia, dan dikendalikan oleh Tan Eng Kwee dan Fredy Tang.

187



Gambar 83. Pengurus dan Pemegang Saham PT Wapoga Mutiara Timber Unit II

Profil Perusahaan

Wapoga Mutiara Timber Group hanya memiliki 1 unit perusahaan dengan izin IUPHHK-HA, yaitu PT Wapoga Mutiara Timber (WMT) Unit II. Luas konsesi HPH PT Wapoga Mutiara Timber sekitar 169.170 hektare di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Perusahaan memperoleh izin sejak tahun 2012 lewat SK 625/Menhut-II/2012. Selain konsesi HPH, PT WMT juga memiliki kompleks industri kayu terintegrasi yang berbasis di Biak, yang mengoperasikan industri hilir, dan memproduksi produk kayu lapis, *block-board*, *film face*, *sawn timber moulding*.

Sertifikat PHPL PT WMT diterbitkan oleh PT Inti Multima Sertifikasi melalui sertifikat nomor IMS-SPHPL-010, berlaku sejak 30 Desember 2018 hingga 29 Desember 2023. Selain itu, PT WMT unit II juga memperoleh sertifikat FSC sejak tahun 2016⁷².

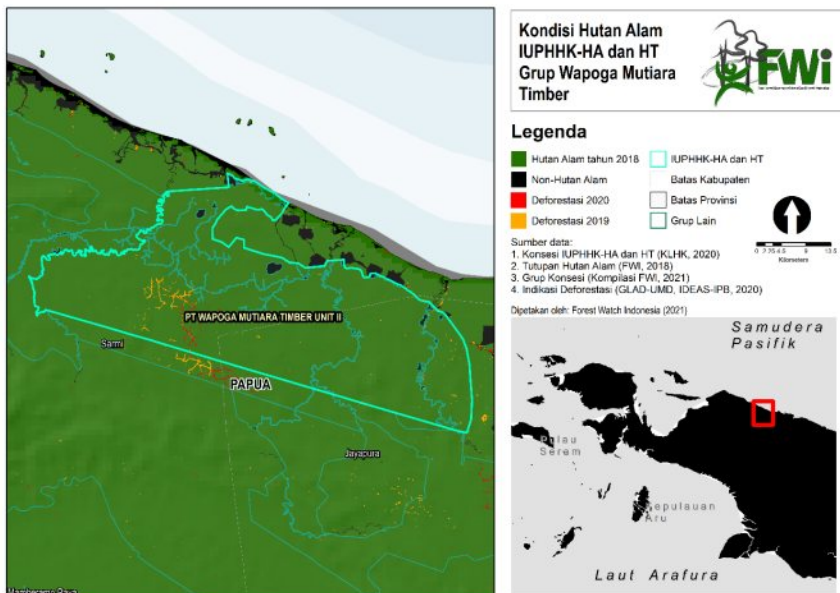
Profil Kondisi Hutan

Grup ini memiliki aktivitas penebangan kayu yang rendah pada periode tahun 2019-2020, dengan luasan tutupan hutan alam yang juga relatif rendah. Informasi kondisi hutan dapat ditinjau pada tabel berikut.

Deskripsi	Luas (hektare)
Hutan alam tersisa tahun 2020	163.921,8
Deforestasi tahun 2020	282,59
Deforestasi tahun 2019	282,59

Tabel 36. Tutupan Hutan Alam dan Deforestasi Grup Wapoga

Luas tutupan hutan alam yang berada di PT WMT milik Wapoga Group, yakni 163.921,8 hektare atau dengan kata lain 97% dari luas konsesi PT WMT masih ditutupi hutan alam. Luas potensi kehilangan hutan alam pada perusahaan HPH ini jika dioperasionisasikan seluruhnya bisa lebih dari 13 kali lipat luas Pulau Bali. Jika dibandingkan dengan luas deforestasi yang terjadi pada 2019 dan 2020, terbilang rendah atau sebanyak 0.3%⁷³. Setelah dikatakan memenuhi melalui terbitnya sertifikat SVLK hingga FSC, tentunya perusahaan ini ke depannya akan lebih leluasa melakukan operasional kerja sebagai perusahaan HPH. Dampak negatif yang mungkin timbul dari adanya aktivitas perusahaan ini seperti deforestasi, degradasi, dan keberlanjutan (sosial-ekologi) di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Dengan inti bisnis perusahaan HPH berupa pemanfaatan hutan alam, rekam jejak perusahaan ini tentunya sangat berkaitan dengan proyeksi kehilangan hutan alam di Provinsi Papua.



Gambar 84. Peta Kondisi Hutan Alam Grup Wapoga Mutiara Timber

Produksi Kayu

Pada tahun 2019 dan 2020, PT WMT memproduksi kayu bulat sebanyak 44.607,88 m³ dan 44.304,88 m³. Kayu-kayu tersebut dikirimkan kepada industri terintegrasi milik grup Wapoga yang terletak di Kabupaten Sarmi. Berdasarkan data RPBB dan PHPL tahun 2019, kayu yang diterima industri WMI adalah sebesar 48.261,46 m³. Sedangkan untuk tahun 2020, berdasarkan sumber data yang sama, kayu yang diterima industri PT WMI adalah sebesar 40.947,4 m³.



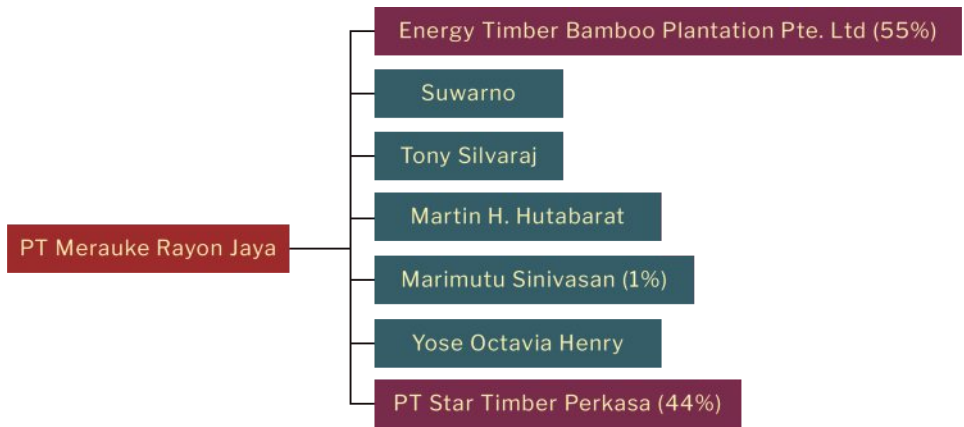
Gambar 85. Peredaran Kayu dari PT Wapoga Mutiara Timber Unit II

Perusahaan Yang Tidak Ada Informasi Grup

Profil Perusahaan, Kepemilikan, Kondisi Hutan, dan Produksi Kayu

1. *PT Merauke Rayon Jaya*

PT Merauke Rayon Jaya (MRJ) atau yang dulu dikenal sebagai PT Maharani Rayon Raya adalah perusahaan HTI yang memiliki izin konsesi seluas 206.800 hektare, dan terletak di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. PT MRJ mendapatkan izin HTI pada tanggal 17 Mei 2018 berdasarkan SK.238/MenLHK/Setjen/Kum.1/ 5/2018. PT MRJ merupakan salah satu dari sekitar 20 perusahaan yang dimiliki oleh konglomerat Indonesia yaitu Marimutu Sinivasan. Dahulu, Marimutu Sinivasan dekat dengan Keluarga Cendana, dan saat ini merupakan pemilik Texmaco Group. Meskipun berdasarkan alur kepemilikan saham yang tersedia di dokumen AHU, mayoritas kepemilikan saham PT MRJ dikuasai oleh Energy Timber Bamboo Plantation PTE. LTD (55%), dan PT Star Timber Perkasa (44%). Sedangkan Marimutu Sinivasan hanya menguasai 1% saham PT MRJ.



Gambar 87. Pengurus dan Pemegang Saham PT. Merauke Rayon Raya

Sampai dengan tahun 2018, sekitar 183 ribu hektare (88%) area konsesi PT MRJ masih berupa hutan alam. Dalam rentang tahun 2019-2020, terdapat deforestasi seluas sekitar 125 hektare di dalam konsesinya. Terkait produksi kayu, berdasarkan data RPBBI tahun 2019, kayu dari PT MRJ tercatat masuk ke industri pengolahan kayu PT Henrison Iriana di Sorong, Papua Barat, sebanyak 2.750,18 hektare.

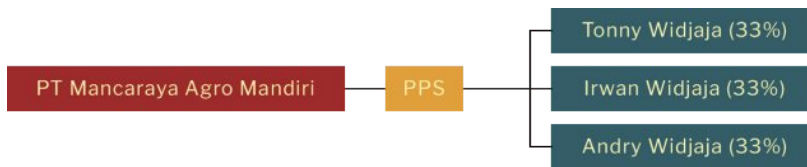
192



Gambar 88. Peredaran Kayu dari PT Merauke Rayon Raya

2. PT Mancaraya Agro Mandiri

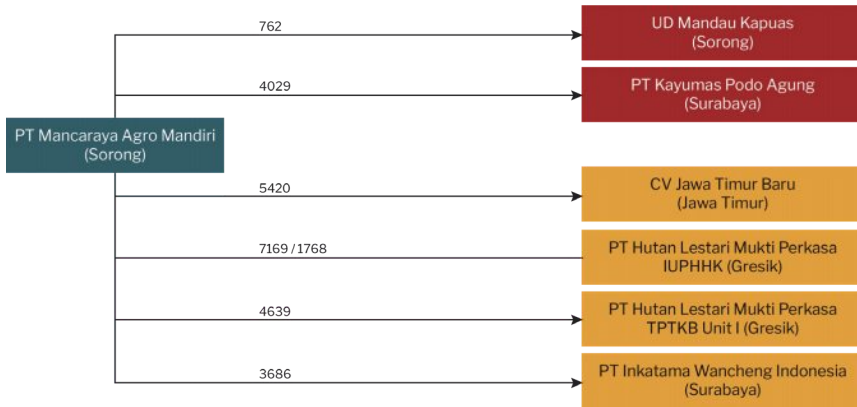
PT MAM memperoleh izin konsesi HPH berdasarkan SK.55/ Menhut-II/2006 tanggal 14 Maret 2006, menguasai sekitar 97 ribu hektare hutan Papua yang terletak di Sorong, Papua Barat. Sedangkan untuk sertifikasi yang diperoleh, berdasarkan informasi terakhir yang kami peroleh berdasarkan surat Nomor : 287/SIC/Dirut/V/2021 dari PT Sarbi International Certification (SIC) yang menginformasikan bahwa pada 24 -32 Mei 2021 akan dilakukan audit jarak jauh (remote audit) pada tahap Penilaian I Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari PT MAM, dan hingga laporan ini ditulis informasi hasil remote audit tersebut belum diumumkan ke publik. Berdasarkan data AHU, kepemilikan saham PT MAM dikuasai oleh keluarga Widjaja dan terbagi merata kepada Tonny Widjaja, Irwan Widjaja dan Andry Widjaja yang sama-sama memiliki 33% saham perusahaan.



Gambar 89. Pengurus dan Pemegang Saham PT Mancaraya Agro Mandiri

Sampai dengan tahun 2018, 91.798 ribu hektare (sekitar 94%) konsesi PT MAM masih berupa hutan alam. Dalam periode 2019-2020, konsesi PT MAM mengalami deforestasi seluas 339 hektare. Terkait produksi kayu, pada tahun 2019 PT MAM memproduksi kayu bulat sebanyak 13.925 m³. Berdasarkan data RPBBI tahun 2019, kayu bulat yang berasal dari PT MAM diterima oleh PT Hutan Lestari Mukti Perkasa di Jawa Timur sebanyak 1768,36 m³. Sedangkan jika merujuk pada data PHPL di tahun yang sama kayu bulat tersebut juga diterima oleh CV. Jawa Timur Baru (5419,85 m³), PT Hutan Lestari Mukti Perkasa (IUIPHHK) (7168,84 m³), PT Hutan Lestari Mukti Perkasa (TPTKB UNIT I) (4638,55 m³) dan PT. Inkatama Wancheng Indonesia (3686,31

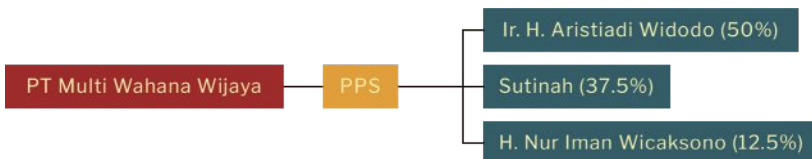
m³). Untuk tahun 2020, hanya data yang bersumber dari PHPL yang mencatat adanya kayu asal PT MAM yang diterima oleh industri pengolahan kayu, yaitu sebanyak 4028,75 m³ yang diterima oleh PT. Kayumas Podo Agung serta sebanyak 762,42 m³ yang diterima oleh UD. Mandau Kapuas.



Gambar 90. Peredaran Kayu dari Mancaraya Agro Mandiri

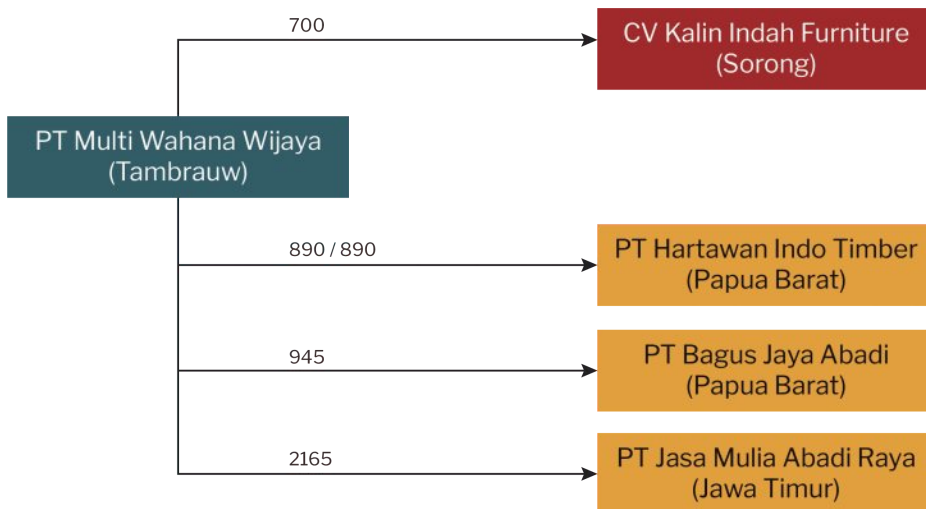
3. PT Multi Wahana Wijaya

PT MWW mendapatkan izin HPH berdasarkan SK159/Menhut-II/2011 tanggal 31 Maret 2011. Terletak di Kabupaten Sorong Papua Barat dengan luas konsesi mencapai 107.740 hektare. Jika melihat data AHU, kepemilikan saham PT MWW mayoritas dikuasai oleh IR H Aristiadi Widodo (50%) dan Sutinah (37,5%). Nama lain yang juga muncul meskipun kepemilikan sahamnya kecil yaitu H Nur Iman Wicaksono (12,5%).



Gambar 91. Pengurus dan Pemegang Saham PT Multi Wahana Wijaya

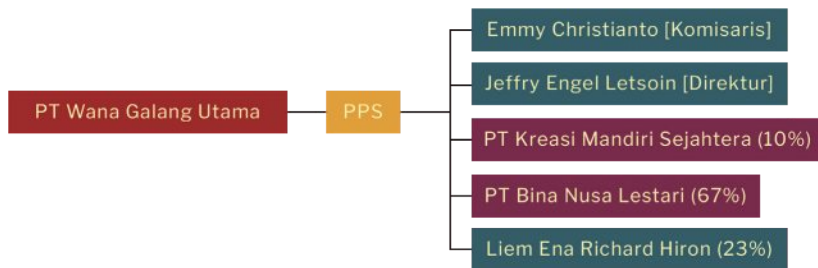
Sampai dengan tahun 2018, konsesi PT MWW yang masih berupa hutan alam adalah sekitar 101,100 hektare (94%) dari total luas konsesi. Dalam periode kajian ini (2019-2020), di dalam konsesi PT MWW masih mengalami deforestasi seluas 294 hektare. Terkait produksi kayu bulat, pada tahun 2019 PT MWW memanen kayu bulat sebanyak 1.384,32 m³. Dari hasil tersebut data RPBBI tahun 2019 mencatat bahwa kayu bulat dari PT MWW diterima oleh industri PT Hartawan Indo Timber sebanyak 890,39 m³. Namun data PHPL di tahun yang sama justru mencatatkan angka yang jauh lebih tinggi, dimana kayu bulat dari PT MWW diterima oleh 2 industri lain selain yang tercatat di RPBBI, yaitu PT. Bagus Jaya Abadi (944,56 m³) dan PT. Jasa Mulia Abadi Raya (2165,2 m³). Kemudian di tahun 2020, meskipun tidak ditemukan data terkait produksi kayu bulat di PT MWW, namun berdasarkan data PHPL masih terdapat kayu yang diterima oleh CV. Klalin Indah Furniture sebanyak 700,06 m³ yang berasal dari PT MWW.



Gambar 92. Peredaran Kayu dari PT Multi Wahana Wijaya

4. PT Wana Galang Utama

PT WGU mendapatkan izin konsesi HPH berdasarkan SK 6/1/IUPHHK-HA/PMDN/2015 tanggal 13 Juli 2015. Izin konsesi tersebut terletak di Kabupaten Teluk Bintuni Papua Barat dengan luas 132.850 hektare. Jika merujuk pada dokumen AHU, kepemilikan saham PT WGU dikuasai oleh PT Bina Nusa Lestari (67%) dan Liem Ena Richard Hiron (23%). Meskipun terdapat informasi yang menyebutkan bahwa PT WGU juga bagian dari Sinar Wijaya Grup namun berdasarkan kepemilikan saham dan website resmi grup tidak ditemukan informasi keterkaitannya.



Gambar 93. Pengurus dan Pemegang Saham PT Wana Galang Utama

196

Sampai dengan tahun 2018, hutan alam di konsesi PT WGU masih tersisa sekitar 128.447 hektare atau masih sekitar 97% dari total luas konsesi. Meskipun kecil, pada rentang tahun 2019-2020 terdapat deforestasi di dalam konsesi PT WGU sekitar 135 hektare. Terkait produksi kayu bulat, PT WGU pada tahun 2019 dan 2020 memanen kayu sebanyak 5425,73 m³ dan 9016,99 m³. Namun selama rentang tersebut, hanya pada tahun 2020 tercatat di sistem PHPL adanya kayu yang berasal dari PT WGU beredar dan diterima oleh industri atas nama CV. Green Diamond Papua sebanyak 1667,37 m³.



Gambar 94. Peredaran Kayu dari PT Wanagalang Utama (Teluk Bintuni)

197



**Lampiran,
Referensi, dan
Catatan Kaki**

Lampiran 1. Daftar Grup dan Anak Perusahaan di Pulau Papua

No	Grup	Anak Perusahaan (HPH dan HTI)	SK izin	Tanggal Izin	Luas Izin (SK)	Luas Analisis Spasial
1	Artha Graha	PT Kurniatama Sejahtera	SK.648/Menhut-II/2009	15/10/2009	115.800	113.340
2		PT Papua Satya Kencana	SK.647/Menhut-II/2009	15/10/2009	195.420	199.230
3	Asco	PT Asco Prima Nusantara	SK.82/Menhut-II/2009	05/03/2009	171.270	173.646
4		PT Papua Hutan Lestari Makmur	SK.334/Menhut-II/2009	15/06/2009	103.510	100.627
5	Batasan	PT Batasan	SK.436/Menhk/Setjen/HPL.0/10/2018	19/10/2018	79.572	79.634
6	Bintuni Utama Murni Wood Industri	PT Bintuni Utama Murni Wood Industries	SK.213/Menhut-II/2007	28/05/2007	82.120	81.810
7	Bumi Teknokultura Unggul	PT Bangun Kayu Irian	SK.623/Menhut-II/2014	14/07/2004	139.970	140.343
8		PT Mitra Pembangunan Global	SK.714/Menhut-II/2009	19/09/2009	83.950	84.034
9	Ciptana	PT Mondialindo Setya Pratama	SK.875/MENLHK/SETJEN/HPL.0/10/2019	18/11/2019	94.569	94.429
10	Djajanti	PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya	SK.509/Menhut-II/2012	13/09/2012	237.750	234.943
11	Hanurata	PT Hanurata (Sk.859/2014)	SK.859/Menhut-II/2014	29/09/2014	234.470	233.987
12		PT Hanurata Unit Jayapura (Sk.601/2012)	SK.601/MeNHUT-II/2012	30/10/2012	56.325	56.356
13	Intra Alamindo	PT Prabu Alaska Unit I Dan II	15/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016	19/09/2016	322.780	323.866
14			15/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016	19/09/2016	6.435	6.446
15		PT Rimbakayu Arthamas	16/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016	20/09/2016	130.400	130.133
16	Irmasulindo	PT Irmasulindo Unit I Dan II	SK.04/Kpts-II/2001	11/01/2001	104.192	102.494
17			SK.04/Kpts-II/2001	11/01/2001	70.348	72.442
18	Katingan Timber Group	PT Wahana Samudra Sentosa	SK.880/Menhut-II/2014	29/09/2014	79.000	80.282
19	Kayu Lapis Indonesia	PT Bina Balantak Utama	SK.365/Menhut-II/2011	07/07/2011	298.710	122.408

20	Kayu Lapis Indonesia	PT Diayani Timber	SK.292/Menhut-II/2009	18/05/2009	190.000	297.798
21		PT Yotefa Sarana Timber	SK.570/Menhut-II/2011	03/10/2011	123.565	211.801
22	Korindo	PT Bade Makmur Orissa	16/1/IUPHHK-HTI/ PMDN/2017	2017-09-11	99.750	103.000
23		PT Inocin Abadi	SK.606/Menhut-II/2011	21/10/2011	99.665	99.719
24		PT Tunas Timber Lestari (Dh. PT Tunas Sawaerma)	SK.711/Menhut-II/2010	27/12/2010	214.935	214.861
25	Medco	PT Medcopapua Alam Lestari	SK.2/1/IUPHHK-HTI/ PMA/2017	02/05/2017	68.300	68.330
26		PT Selaras Inti Semesta	SK.18/MENHUT-II/2009	22/01/2009	169.400	166.745
27	Mega Masindo	PT Arfak Indra	SK.333/Menhut-II/2009	15/06/2009	177.900	177.354
28		PT Manokwari Mandiri Lestari	SK.366/Menhut-II/2011	07/07/2011	90.980	91.150
29		PT Megapura Membramo Bangun	SK.397/Menhut-II/2006	17/07/2006	55.100	56.415
30		PT Mutiara Alas Khatulistiwa	SK.676/Menhut-II/2014	12/08/2014	81.855	81.661
31	Mitra Jaya	PT Sumber Mitra Jaya (Sk.396)	SK.396/Menhut-II/2005	23/11/2005	102.250	102.225
32		PT Sumber Mitra Jaya (Sk.556)	SK.556/Menhut-II/2006	22/12/2006	52.160	55.151
33	Modern Group	PT Wanamulia Sukses Sejati	3/1/IUPHHK-HTI/ PMDN/2015	31/03/2015	112.245	112.561
34		PT Wanamulia Sukses Sejati Unit Iii	SK.11/1/IUPHHK-HTI/ PMDN/2017	12/06/2017	99.100	99.146
35	Moorim	PT Plasma Nutfah Marind Papua	SK.624/Menhut-VI/2009	14/11/2011	64.050	64.433
36	Patria	PT Semarak Dharma Timber	SK.287/Menhut-II/2014	20/03/2014	164.180	164.359
37	Raja Garuda Mas	PT Damai Setiatama Timber	SK.565/Menhut-II/2013	16/08/2013	315.475	313.283
38		PT Kesatuan Mas Abadi	SK.552/Menhk/Setjen/ PLA.2/8/2019	14/08/2019	99.980	87.209
39		PT Mukti Artha Yoga	SK.57/Menhut-II/2007	22/02/2007	151.690	148.987
40	Rimbunan Hijau	PT Salaki Mandiri Sejahtera	SK.396/Menhut-II/2006	17/07/2006	79.130	81.379

41	Sinar Wijaya	PT Jati Dharma Indah Plywood Industries	8/1/IUPHHK-HA/ PMDN/2016	21/07/2016	139.470	139.509
42		PT Kaltim Utama	SK.652/Menhut-II/2009	15/10/2009	161.670	161.291
43		PT Wijaya Sentosa (Dh. PT Wapoga Mutiara Tbr I)	SK.33/Menhut-II/2013	15/01/2013	130.755	130.069
44		PT Wukirasari	SK.477/Menhut-II/2008	31/12/2008	116.320	116.514
45	Wapoga Mutiara Timber	PT Wapoga Mutiara Timber Unit li	SK.625/Menhut-II/2012	07/11/2012	169.170	169.514
46	Tidak Ada Informasi Group	PT Multi Wahana Wijaya	159/Menhut-II/2011	31/03/2011	107.740	110.168
47		PT Wana Galang Utama	6/1/IUPHHK-HA/ PMDN/2015	13/07/2015	132.850	132.530
48		PT Merauke Rayon Jaya	SK.238/MenLHK/ Setjen/Kum.1/ 5/2018	17/05/2018	206.800	192.295
49		PT Mancaraya Agro Mandiri	SK.55/Menhut-II/2006	14/03/2006	97.820	97.529

Lampiran 2. Produksi Kayu Bulat Tahun 2019 dan 2020

No	Grup	Anak Perusahaan (HPH dan HTI)	Produksi Kayu Bulat 2019	Produksi Kayu Bulat 2020
1	Artha Graha	PT Kurniatama Sejahtera	-	26.598,16
		PT Papua Satya Kencana	-	32.597,16
2	Asco	PT Asco Prima Nusantara	22.675,11	7.978,49
		PT Papua Hutan Lestari Makmur	17.195,36	15.516,23
3	Batasan	PT Batasan	2.790,98	8.816,44
4	Bintuni Utama Murni Wood Industri	PT Bintuni Utama Murni Wood Industries	113.643,21	43.468,51
5	Bumi Teknokultura Unggul	PT Bangun Kayu Irian	-	-
		PT Mitra Pembangunan Global	-	-
6	Ciptana	PT Mondialindo Setya Pratama	9.948,51	8.730,71
7	Djajanti	PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya	116.626,77	109.613,30

8	Hanurata	PT Hanurata (Sk.859/2014)	52.371,75	35.347,20
		PT Hanurata Unit Jayapura (Sk.601/2012)	3.335,07	-
9	Intra Alamindo	PT Prabu Alaska Unit I	98.213,00	66.666,47
		PT Prabu Alaska Unit li	-	-
		PT Rimbakayu Arthamas	110,58	5.956,21
10	Irmasulindo	PT Irmasulindo Unit I	-	-
		PT Irmasulindo Unit li	-	-
11	Katingan Timber Group	PT Wahana Samudra Sentosa	-	-
12	Kayu Lapis Indonesia	PT Bina Balantak Utama	53.894,26	23.415,31
		PT Diadyani Timber	17.277,97	14.754,48
		PT Yotefa Sarana Timber	20.155,35	40.292,35
13	Korindo	PT Bade Makmur Orissa	-	-
		PT Inocin Abadi	54.936,15	86.240,37
		PT Tunas Timber Lestari (Dh. PT Tunas Sawaerma)	71.687,94	90.439,22
14	Medco	PT Medcopapua Alam Lestari	-	-
		PT Selaras Inti Semesta	-	12.770,01
15	Mega Masindo	PT Arfak Indra	-	-
		PT Manokwari Mandiri Lestari	8.013,66	17.336,30
		PT Megapura Membramo Bangun	590,90	8.135,55
		PT Mutiara Alas Khatulistiwa	28.593,52	22.719,95
16	Mitra Jaya	PT Sumber Mitra Jaya (Sk.396)	-	-
		PT Sumber Mitra Jaya (Sk.556)	-	-
17	Modern Group	PT Wanamulia Sukses Sejati	-	-
		PT Wanamulia Sukses Sejati Unit lii	-	-
18	Moorim	PT Plasma Nutfah Marind Papua	-	-

19	Patria	PT Semarak Dharma Timber	-	6.847,98
20	Raja Garuda Mas	PT Damai Setiatama Timber	-	-
		PT Kesatuan Mas Abadi	-	-
		PT Mukti Artha Yoga	-	-
21	Rimbunan Hijau	PT Salaki Mandiri Sejahtera	26.325,05	21.626,89
22	Sinar Wijaya	PT Jati Dharma Indah Plywood Industries	127.502,21	107.287,83
		PT Kaltim Utama	14.486,55	117.892,68
		PT Wijaya Sentosa (Dh. PT Wapoga Mutiara Tbr l)	107.642,51	89.654,24
		PT Wukirasari	111.108,11	96.616,87
23	Wapogama Mutiara Timber	PT Wapoga Mutiara Timber Unit li	44.607,88	44.304,88
24	Belum Ada Group	PT Merauke Rayon Jaya	-	-
		PT Multi Wahana Wijaya	1.384,32	-
		PT Wana Galang Utama	5.425,73	9.016,99
		PT Mancaraya Agro Mandiri	13.925,22	-

Lampiran 3. Daftar Group dan Anak Perusahaan yang bersertifikat PHPL dan LK

No	Grup	Anak Perusahaan (HPH dan HTI)	No Sertifikat PHPL	Sertifikasi PHPL	LS PHPL	No Sertifikat LK	V-LK
1	Artha Graha	PT Kurniatama Sejahtera	MS-SPHP-004	phpl	PT Inti Multima Sertifikasi	-	-
		PT Papua Satya Kencana	LPPHPL-008/MUTU/FM-011	phpl	PT Mutuagung Lestari	-	-
2	Asco	PT Asco Prima Nusantara	IMS-SPHPL-020	phpl	PT Inti Multima Sertifikasi	-	VLK - habis
		PT Papua Hutan Lestari Makmur	009/LPPHPL-018/VI/2018	phpl	PT Transtra Permada	LVLK-010-IDN	VLK
3	Batasan	PT Batasan	Tidak Ada Link Dokumen	phpl	PT Ayamuru Sertifikasi	097/BWI-SLK	VLK
4	Bintuni Utama Murni Wood Industri	PT Bintuni Utama Murni Wood Industries	11-SIC-04.01	phpl	PT Sarbi International Certification	92-SIC-04.02	VLK

5	Bumi Teknokultura Unggul	PT Bangun Kayu Irian	-	-	-	LASER/LK-IUPHHK-HA/79	VLK
		PT Mitra Pembangunan Global	GMP/2019/10005	phpl - cabut	PT Intishar Sadira Eshan	-	-
6	Ciptana	PT Mondialindo Setya Pratama	46-SIC-04.01	phpl	PT Sarbi International Certification	-	VLK - habis
7	Djajanti	PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya	LASER/PHPL-TBMAK/02	phpl	PT Lambodja Sertifikasi	-	-
8	Hanurata	PT Hanurata (Sk.859/2014)	O11.SPHPL.019-IDN	phpl	PT Trustindo Prima Karya	-	-
		PT Hanurata Unit Jayapura (Sk.601/2012)	LASER/PHPL-HNRT/08	phpl	PT Lambodja Sertifikasi	-	VLK - habis
9	Intra Alamindo	PT Prabu Alaska Unit I	LASER/PHPL-PA/2021/13	phpl	PT Lambodja Sertifikasi	-	VLK - habis
		PT Prabu Alaska Unit II	-	-	-	-	-
		PT Rimbakayu Arthamas	-	-	-	LASER/LK-IUPHHK-HA/89	VLK
10	Irmasulindo	PT Irmasulindo Unit I	-	-	-	BRIK-VLK-0130	VLK
		PT Irmasulindo Unit II	-	-	-	-	-
11	Katingan Timber Group	PT Wahana Samudra Sentosa	-	-	-	-	-
12	Kayu Lapis Indonesia	PT Bina Balantak Utama	008/S-PHPL/GRS/X/2018	phpl	PT Global Resource Sertifikasi	-	-
		PT Diayani Timber	824 407 180002	phpl	PT Global Resource Sertifikasi	-	VLK - habis
		PT Yotefa Sarana Timber	023.1/S-PHPL/GRS/II/2021	phpl	PT Global Resource Sertifikasi	-	-
13	Korindo	PT Bade Makmur Orissa	-	-	-	-	-
		PT Inocin Abadi	025/EQC-PHPL/XII/2015	phpl	PT Equality Indonesia	-	-
		PT Tunas Timber Lestari (Dh. PT Tunas Sawaerma)	SPHPL.12/ASERT/LPPHPL-001-IDN	phpl	PT Ayamaru Sertifikasi	-	-
14	Medco	PT Medcopapua Alam Lestari	008/BWI-SPHPL	phpl	PT Borneo Wanajaya Indonesia	-	-
		PT Selaras Inti Semesta	008/BWI-SPHPL	phpl	PT Borneo Wanajaya Indonesia	213/BWI-SLK	VLK

15	Mega Masindo	PT Arfak Indra	20.REV.2/A-SERT-PHPL/VI/2013	phpl - habis	PT Ayamaru Sertifikasi	-	-
		PT Manokwari Mandiri Lestari	012.7/EQC-PHPL/V/2021	phpl	PT Equality Indonesia	-	-
		PT Megapura Membramo Bangun	LASER/PHPL-MMB/05	phpl	PT Lambodja Sertifikasi	-	-
		PT Mutiara Alas Khatulistiwa	001-ISE-SPHPL-025 IDN	phpl	PT Intishar Sadira Eshan	-	-
16	Mitra Jaya	PT Sumber Mitra Jaya (Sk.396)	-	-	-	-	-
		Pt Sumber Mitra Jaya (Sk.556)	-	-	-	-	-
17	Modern Group	PT Wanamulia Sukses Sejati	-	-	-	-	-
		PT Wanamulia Sukses Sejati Unit Iii	-	-	-	-	-
18	Moorim	PT Plasma Nutfah Marind Papua	-	-	-	-	-
19	Patria	PT Semarak Dharma Timber	SLK.164/ASERT/LVLK-011-Ldn	phpl	PT Ayamaru Sertifikasi	-	VLK
20	Raja Garuda Mas	PT Damai Setiatama Timber	SPHPL.11/ASERT/LPPHPL-001-IDN	phpl	PT Ayamaru Sertifikasi	-	-
		PT Kesatuan Mas Abadi	-	-	-	-	-
		PT Mukti Artha Yoga	-	-	-	-	-
21	Rimbunan Hijau	PT Salaki Mandiri Sejahtera	IMS-SPHPL-021	phpl	PT Inti Multima Sertifikasi	-	-
22	Sinar Wijaya	PT Jati Dharma Indah Plywood Industries	006/LPPHPL-018/XII/2019	phpl	PT Transtra Permada	-	VLK - habis
		PT Kaltim Utama	IMS-SLK-307	phpl	Pt Intishar Sadira Eshan	IMS-SLK-307	VLK
		PT Wijaya Sentosa (Dh. Pt Wapoga Mutiara Tbr I)	824 303 140005	phpl - habis	PT Global Resource Sertifikasi	-	VLK - cabut
		PT Wukirasari	51.SIC.04.01	phpl	PT Sarbi International Certification	-	VLK
23	Wapogama Mutiara Timber	PT Wapoga Mutiara Timber Unit Ii	IMS-SPHPL-010	phpl	PT Inti Multima Sertifikasi	-	-

24	Belum Ada Group	PT Merauke Rayon Jaya	-	-	-	-	-
		PT Multi Wahana Wijaya	SPHPL.15/ASERT/ LPPHPL-001-IDN	phpl	PT Ayamaru Sertifikasi	-	-
		PT Wana Galang Utama	-	-	-	-	-
		PT Mancaraya Agro Mandiri	39.SIC.04.01	phpl	PT Sarbi International Certification	-	-

Lampiran 4. Deforestasi yang terjadi di dalam Grup HPH dan HTI

Grup	Anak Perusahaan (HPH dan HTI)	Deforestasi 2019	Deforestasi 2020
Artha Graha	PT Kurniatama Sejahtera	299	116,6
	PT Papua Satya Kencana	192	332
	PT Asco Prima Nusantara	208	122
Asco	PT Papua Hutan Lestari Makmur	170	99
Batasan	PT Batasan	147	109
Bintuni Utama Murni Wood Industri	PT Bintuni Utama Murni Wood Industries	255	559
Bumi Teknokultura Unggul	PT Bangun Kayu Irian	76	209
	PT Mitra Pembangunan Global	86	50
Ciptana	PT Mondialindo Setya Pratama	107	163
Djajanti	PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya	1.248	227
Hanurata	PT Hanurata (Sk.859/2014)	542	253
	PT Hanurata Unit Jayapura (Sk.601/2012)	95	75
Intra Alamindo	PT Prabu Alaska Unit I	1.426	648
	PT Prabu Alaska Unit li	0	0,2324
	PT Rimbakayu Arthamas	45	108
Irmasulindo	PT Irmasulindo Unit I	15	169
	PT Irmasulindo Unit li	13	156
Katingan Timber Group	PT Wahana Samudra Sentosa	0	49

Kayu Lapis Indonesia	PT Bina Balantak Utama	298	246
	PT Diadyani Timber	348	355
	PT Yotefa Sarana Timber	271	368
Korindo	PT Bade Makmur Orissa	6	99
	PT Inocin Abadi	316	332
	PT Tunas Timber Lestari (Dh. PT Tunas Sawaerma)	452	436
Medco	PT Medcopapua Alam Lestari	0,6057	45
	PT Selaras Inti Semesta	8	279
Mega Masindo	PT Arfak Indra	125	136
	PT Manokwari Mandiri Lestari	69	21
	PT Megapura Membramo Bangun	95	84
	PT Mutiara Alas Khatulistiwa	208	91
Mitra Jaya	PT Sumber Mitra Jaya (Sk.396)	0,3852	46
	PT Sumber Mitra Jaya (Sk.556)	1	35
Modern Group	PT Wanamulia Sukses Sejati	0,7763	156
	PT Wanamulia Sukses Sejati Unit Iii	1	14
Moorim	PT Plasma Nutfah Marind Papua	337	4288,47
Patria	PT Semarak Dharma Timber	127	241
Raja Garuda Mas	PT Damai Setiatama Timber	42	306
	PT Kesatuan Mas Abadi	20	17
	PT Mukti Artha Yoga	7	72
Rimbunan Hijau	PT Salaki Mandiri Sejahtera	141	176
Sinar Wijaya	PT Jati Dharma Indah Plywood Industries	1.209	430
	PT Kaltim Utama	810	507
	PT Wijaya Sentosa (Dh. Pt Wapoga Mutiara Tbr I)	898	65
	PT Wukirasari	685	97
Wapogama Mutiara Timber	PT Wapoga Mutiara Timber Unit Ii	283	288

Belum Ada Group	PT Merauke Rayon Jaya	4	121
	PT Multi Wahana Wijaya	76	218
	PT Wana Galang Utama	30	105
	PT Mancaraya Agro Mandiri	156	183

Lampiran 5. Daftar Ekspertir yang bersertifikat di Papua Barat

No	Nama Ekspertir	No S-LK	Masa Berlaku
1	Rimba Bintuni Lestari	SLK.87/ASERT/LVLK-011-IDN	06 Dec 2016 - 05 Dec 2022
2	Hartawan Indo Timber	LVLK-003/MUTU/LK-485	10 Oct 2020 - 09 Oct 2026
3	Alco Timber Irian	069-VLK-NKL-2020	11 Mar 2020 - 10 Mar 2026
4	Wukirasari	122-SIC-04.02	11 Jul 2018 - 10 Jul 2024
5	Berau Karya Indah	VLK 00544	02 Jan 2021 - 01 Jan 2027
6	Longkelai Hijau Bersama	VLK 00434	01 Dec 2020 - 30 Nov 2026
7	Klalin Indah Furniture	VLK 00310	02 Jun 2016 - 01 Jun 2022

Lampiran 6. Daftar Ekspertir yang bersertifikat di Papua

No	Nama Ekspertir	No S-LK	Masa Berlaku
1	Cenderawasih Kayu Indah	SLK.172/ASERT/LVLK-011-IDN	08 Sep 2021 - 07 Sep 2027
2	PT Sisilia Claudya	SLK.109/ASERT/ LVLK-011-IDN	19 Oct 2017 - 18 Oct 2023
3	Edom Ariha Jaya	108	16 Oct 2017 - 15 Oct 2023
4	Mevan Jaya	102	18 Aug 2017 - 17 Aug 2023
5	Sijas Express	95	30 Mar 2017 - 29 Mar 2023
6	Selaras Inti Semesta	213/BWI-SLK	04 Nov 2021 - 03 Nov 2027
7	Nawa Papua Foresta	141/BWI-SLK	01 Jul 2020 - 30 Jun 2026
8	Sinar Wijaya Plywood Industries	BRIK-VLK-0037	14 Nov 2020 - 13 Nov 2026
9	Korindo Abadi	LVLK-003/MUTU/LK-032	29 Nov 2020 - 28 Nov 2026

Referensi & Catatan Kaki

1. https://www.academia.edu/9928802/Akerlof_1970_The_Market_for_Lemons_Quality_Uncertainty_and_the_Market_Mechanism
2. <https://www.papua.go.id/view-detail-page-254/sekilas-papua-.html>
3. <https://labbineka.kemdikbud.go.id/bahasa/daftarbahasa>
4. GLAD Alert dikembangkan oleh Hansen et al. (2016) yang diestimasi menggunakan indeks spektral dari citra Landsat dengan skala 30-m. Glad Alert menyediakan informasi indikasi awal deforestasi setiap 7 hari.
5. Kawasan Hutan yang ditetapkan Pemerintah belum pasti merupakan wilayah yang berhutan atau memiliki hutan alam, didalamnya juga terdapat area yang tidak berhutan seperti semak belukar. Sehingga masih banyak juga wilayah lain yang masih memiliki hutan alam namun tidak terakomodir/masuk ke wilayah moratorium karena berada diluar kawasan hutan.
6. Perkembangan Industri Perakayuan di Tanah Papua*) Oleh Ir. Wahyudi, M.WoodSc, Ph
7. Permohonan informasi FWI no: 03/FWI/II/2021 dan surat KLHK no: S.88/HUMAS/PPIP/Hms.3/2/2021
8. Permohonan informasi FWI no: 03/FWI/II/2021 dan surat KLHK no : S.88/HUMAS/PPIP/Hms.3/2/2021
9. Oligopoli adalah suatu situasi pasar yang mana produksi didominasi sebagian atau seluruhnya oleh sejumlah kecil perusahaan
10. <https://jakrev.com/nasional/stranas-pk-terus-dorong-transparansi-beneficial-ownership-untuk-cipatakan-iklim-usaha-yang-transparan/>
11. <https://rimbakita.com/pohon-merbau/>
12. Siaran Pers:Terobosan Pemerintah Untuk Tingkatkan Investasi Dan Produktivitas Hutan Produksi, KLHK 2020. PPID | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Terobosan Pemerintah untuk Tingkatkan Investasi dan Produktivitas Hutan Produksi (menlhk.go.id)
13. UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
14. Tidak menutup kemungkinan terdapat unit manajemen yang memiliki skema sertifikasi lain seperti FSC, namun dalam kajian ini hanya akan melihat kepatuhan atas skema sertifikasi PHPL dan VLK yang berlaku secara mandatory di Indonesia.
15. Global Land Analysis and Discovery University of Maryland, Amerika Serikat
16. Nilai kompensasi kayu seharga Rp. 10.000 rupiah/kubik sejak tahun 2010. Dimuat dalam tulisan "Surat Marah Tiga Marga". Publikasi Majalah Tempo pada tanggal 8 November 2021
17. Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha Tahun 2021 Revisi 2, diperoleh melalui geoportal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

18. Sesuai dengan Perdasus Papua Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 52 Ayat 1, “Kayu bulat dan hasil hutan lainnya wajib diolah di Provinsi Papua untuk optimalisasi industri kehutanan, meningkatkan nilai tambah, menciptakan peluang kerja, menambah peluang usaha, meningkatkan pengetahuan dan teknologi” dan Pergub Papua Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) DI Provinsi Papua Pasal 15 Ayat 3, “Pemegang IPHHK dan pemegang izin pengumpulan hasil hutan kayu olahan dilarang mengangkut dan memperdagangkan hasil hutan kayu ke Provinsi lain, menerima hasil hutan kayu yang tidak berasal dari perizinan yang sah dan menerbitkan FAKO IPHHL/nota atas hasil hutan kayu yang tidak berasal dari perizinan yang sah”.
19. <https://www.papua.go.id/view-detail-berita-4299/undefined>
20. <https://arthagraha.net/artha-graha-network/>
21. <https://jatim.idntimes.com/news/jatim/fitria-madia/5-fakta-haryono-winarta-crazy-rich-dibalik-vaksin-nusantara/5>
22. <https://koran.tempo.co/read/nasional/273960/kasus-suap-cek-pelawatmenantu-tommy-winata-dikorek-soal-sponsor-suap>
23. <https://tirto.id/sejarah-persinggungan-tommy-winata-dengan-tentara-ee2a>
24. https://www.academia.edu/31737336/Keterlibatan_Militer_Dalam_Bisnis_Tomy_Winata
25. <https://amp.tirto.id/m/kiki-syahnakri-oK>
26. <https://www.ifura.com/id/home/about>
27. <http://www.bumwimangrove.com/home/>
28. Eksploitasi sumber daya alam di Papua selama 22 tahun dengan pendekatan dari atas ke bawah | Down to Earth (downtoearth-indonesia.org)
29. Jika dibandingkan dengan perusahaan HPH lain yang beroperasi di Papua dan Papua Barat
30. <http://btek.co.id/new/laporan-tahunan/>
31. <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/06/08/2020/rekening-diblokir-imbaskasus-jiwasraya-saksi-minta-dikembalikan/>
32. Jika dibandingkan dengan perusahaan HPH lain yang beroperasi di Papua dan Papua Barat
33. Jika dibandingkan dengan perusahaan HPH lain yang beroperasi di Papua dan Papua Barat
34. <https://news.detik.com/berita/d-5523410/daftar-keluarga-soeharto-di-yayasan-harapan-kita-yang-kuasai-tmii>.
35. <https://tirto.id/modus-soeharto-mencatut-uang-publik-lewat-yayasan-cDPf>
36. <https://nasional.tempo.co/read/690940/yayasan-supersemar-dan-5-yayasan-soeharto-dibidik-kejaksaaan>
37. Jika dibandingkan dengan perusahaan HPH lain yang beroperasi di Papua dan Papua Barat
38. PT Alamindo Lestari Sejahtera mengakuisisi PT PA dan PT RKA sejak 2017
39. Jika dibandingkan dengan perusahaan HPH lain yang beroperasi di Papua dan Papua Barat
40. Jika dibandingkan dengan perusahaan HPH lain yang beroperasi di Papua dan Papua Barat
41. PT Wahana Sentosa Samudera - Katingan Timber Group
42. <https://awasmiffee.potager.org/?p=788&lang=id>
43. Jika dibandingkan dengan perusahaan HPH lain yang beroperasi di Papua dan Papua Barat
44. Jika dibandingkan dengan perusahaan HPH lain yang beroperasi di Papua dan Papua Barat
45. Berdasarkan informasi yang tersedia di website korindo
46. <https://daftarperusahaanindonesia.com/2012/02/aspex-kumbong-pt/>
47. https://kontras.org/home/WPKONTRAS/wp-content/uploads/2018/09/Laporan_Digoel.pdf

48. Informasi terakhir dari website korindo menginformasikan bahwa sejak 1 April 2021, PT TTL d/h PT Tunas Sawa Erma (TSE) telah berpisah dari korindo group dan saat ini memiliki group usaha sendiri di bawah naungan TSE group
49. <https://www.korindo.co.id/sustainability/>
50. <https://kalteng.antaranews.com/berita/288996/berhenti-beroperasi-pt-korindo-terpaksa-berhentikan-1076-pekerja>
51. <https://ayamarusertifikasi.co.id/layanan-ayamaru/sertifikasi-phpl/pencabutan-s-phpl/>
52. Jika dibandingkan dengan perusahaan HPH lain yang beroperasi di Papua dan Papua Barat
53. Jika dibandingkan dengan perusahaan HPH lain yang beroperasi di Papua dan Papua Barat
54. Jika dibandingkan dengan perusahaan HPH lain yang beroperasi di Papua dan Papua Barat
55. <https://mitrajaya.co.id/about/directors>
56. Jika dibandingkan dengan perusahaan HPH lain yang beroperasi di Papua dan Papua Barat
57. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2572132/daftar-terbaru-150-orang-terkaya-di-indonesia-08-agustus-2016>
58. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4024819/gurita-bisnis-samadikun-koruptor-yang-balikin-duit-rp-87-m>
59. Jika dibandingkan dengan perusahaan HPH lain yang beroperasi di Papua dan Papua Barat
60. https://awasmiffee.potager.org/?page_id=171
61. https://www.moorim.co.kr:13002/eng/companyinfo/paper_outline.php
62. Jika dibandingkan dengan perusahaan HPH lain yang beroperasi di Papua dan Papua Barat
63. <https://www.aidenvironment.org/2021/09/07/three-industrial-tree-plantation-group-companies-responsible-for-4700-ha-forest-loss-in-indonesia/>
64. <https://www.mongabay.co.id/2019/02/06/tak-ada-kejelasan-kelola-hutan-adat-di-papua-jadi-celah-pebisnis-kayu-ilegal/>
65. Jika dibandingkan dengan perusahaan HPH lain yang beroperasi di Papua dan Papua Barat
66. Jika dibandingkan dengan perusahaan HPH lain yang beroperasi di Papua dan Papua Barat
67. <http://www.intimultimasertifikasi.com/wp-content/uploads/2018/11/RESUME-HASIL-AUDIT-PT-WAPOGA-MUTIARA-TIMBER-UNIT-II-TAHUN-2018.pdf>
68. <https://awasmiffee.potager.org/?p=1688>
69. Jika dibandingkan dengan perusahaan HPH lain yang beroperasi di Papua dan Papua Barat
70. <http://www.lambodjasertifikasi.com/pengumuman-pembekuan-s-phpl-pt-kaltim-hutama/>
71. Jika dibandingkan dengan perusahaan HPH lain yang beroperasi di Papua dan Papua Barat
72. <https://fsc.org/en/newsfeed/fscs-recent-certification-in-indonesia-gives-its-forests-a-chance-to-thrive>
73. Jika dibandingkan dengan perusahaan HPH lain yang beroperasi di Papua dan Papua Barat



mi Teknologi - Unggul Ciptana Djajanti Hanu

na Graha - ASCO Batasan - Bintun Utama

ra Alamindo Group - Irmaulindo - Batingan

ayu Laras Indonesia - Korindo - Meico - Me

a Jaya Modern Group - Moorim - Atria - R

Rimanan Hilis - Sinar Wijaya - Wapoga Group

